



KHATULISTIWA

Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan
Melalui Peningkatan Produktivitas



Kajian Fiskal Regional Gabungan
Tahun 2023



Pengarah:

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti

Penanggung Jawab:

Direktur Pelaksanaan Anggaran, Tri Budhianto

Koordinator:

Plt. Kepala Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran, Nur Hidayat

Kontributor:

Heru Cahyadi, Teguh Puspandoyo, Arif, Bayu Yudistira, Teguh Dwi Prasetyo, Dian Merini, I Wayan Agus, Risky Utama, Hero Dwi Afrisal, Alif Shofia Salsabila, Chyntia Bella Br. Sitepu, Bayu Adi Handoko, Rifqi Achmad Rafi, Andi Eka Iftitah, Angeline Lorenzky, Yakob Yulis Setyoko, Restu Alam Siagian

Layout & Desain:

Prasetya Adi Kurniawan, Siti Nurhalizah, Wirasukma Legendani

Unit Support & Teknis:

Anggreyni B. Y. Tampubolon, Dwi Ismanto, Paryanto

Cover Foto:

Tim Kreatif Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat

Laporan Khatulistiwa

Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Gd. Prijadi Praptosuhardjo Lt.4

Jalan Lapangan Banteng 2-4, Jakarta Pusat



**Astera
Primanto Bhakti**

Direktur Jenderal Perbendaharaan

**ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, atas rahmat-Nya Direktorat Jenderal Perbendaharaan memublikasikan Laporan Khatulistiwa Tahun 2023 sebagai konsolidasi dari KFR Tingkat Wilayah yang disusun oleh seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan atas implementasi kebijakan fiskal yang dikaitkan dengan kondisi perekonomian dan kesejahteraan di tingkat nasional dan regional, yang disusun secara spasial berdasarkan 6 regional yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, dan Maluku-Papua, sebagai suatu kawasan yang memiliki karakteristik serupa ditinjau dari letak geografis, aspek ekonomi, sosial budaya, dan sumber daya alam.

Khatulistiwa Tahun 2023 mengusung tema "*Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Produktivitas*" sebagai bentuk optimisme peran fiskal dalam menghadapi segala tantangan pasca pandemi Covid-19 dan kondisi global agar tetap dapat mewujudkan pemulihan ekonomi nasional sekaligus melanjutkan target pembangunan melalui penguatan sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk para stakeholder dan partisipasi masyarakat.

Pembaca yang budiman,
Sebagai negara berdaulat (*sovereign nation*), Pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD RI Tahun 1945, yakni "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Oleh karena itu, setiap perumusan kebijakan fiskal dan implementasinya senantiasa diarahkan untuk menjamin perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian bagi segenap masyarakat Indonesia.

Pembaca yang budiman,
Tahun 2023 merupakan kondisi yang berat seiring dengan turbulensi perekonomian global. Pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang masih berlanjut, tekanan inflasi yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter di negara maju, perang yang terjadi di belahan bumi lainnya, dan isu perubahan iklim menunjukkan kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja dan diliputi ketidakpastian. Menghadapi tekanan kondisi global, APBN dan APBD sebagai instrumen strategis pemerintah, dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan kebijakan ekspansif dan berperan sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak yang dihasilkan tekanan kondisi global. Oleh karena itu, sinkronisasi pembangunan daerah terutama yang dibiayai oleh APBN dan APBD mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya dorong dan optimalisasi penggunaan sumber daya fiskal yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pada gilirannya, belanja pemerintah dapat berkontribusi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama (*ultimate goal*) yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan fiskal tersebut.

Pembaca yang budiman,
Hasil telaah makro tahun 2023 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah yang telah dilaksanakan berperan penting dalam menjaga perekonomian tetap *resilience* di tengah tekanan global. Perlambatan perekonomian global utamanya diampifikasi oleh peningkatan *downside risk* masih menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Namun, capaian tahun 2023 menjadi modal kuat untuk menghadapi tahun 2024 dengan optimis. Momentum ini harus terus dijaga dalam menuju konsolidasi fiskal tahun 2023, dimana defisit anggaran harus kembali di bawah 3 persen dari PDB.

Perekonomian nasional saat ini masih terkonsentrasi di regional Jawa dan Sumatera dengan kontribusi sebesar 77,76 persen terhadap PDB Nasional. Upaya pemerataan pembangunan secara berkesinambungan harus terus dilakukan dengan menciptakan peluang-peluang baru guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar kawasan Jawa-Sumatera. Selain itu, indikator

kesejahteraan menunjukkan perbaikan yang tercermin, antara lain pada capaian IPM, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat ketimpangan pendapatan, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan.

Pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan secara inklusif melalui optimalisasi fungsi APBN/APBD sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi, termasuk melalui peningkatan alokasi anggaran belanja pemerintah terutama bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI), penyempurnaan kebijakan TKDD, terutama penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang telah terdesentralisasi pencairan anggarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta sinkronisasinya dengan belanja Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, kemandirian fiskal pemerintah perlu terus didorong dengan strategi dan kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbasis pada pengembangan potensi daerah secara spesifik sebagai keunggulan masing-masing daerah.

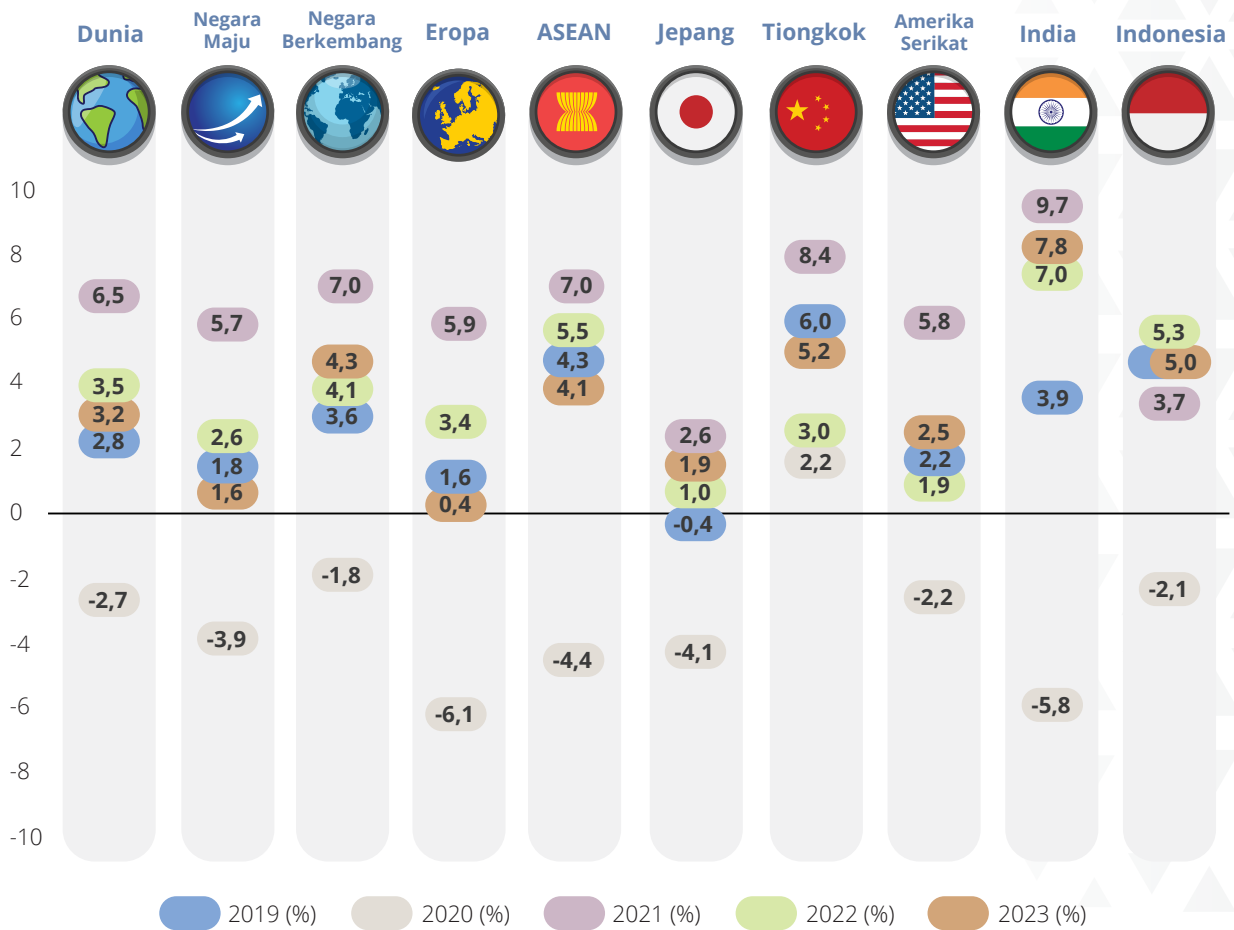
Pembaca yang budiman,
Secara singkat, gambaran kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masing-masing regional diulas dalam Laporan Khatulistiwa ini. Dengan demikian, Laporan Khatulistiwa Tahun 2023 ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian fiskal dan perkembangan ekonomi dan fiskal yang bersifat nasional dan regional. Akhir kata kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Khatulistiwa ini. Kami berharap Laporan Khatulistiwa Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya dalam peningkatan peran fiskal bagi perekonomian nasional dan regional serta bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

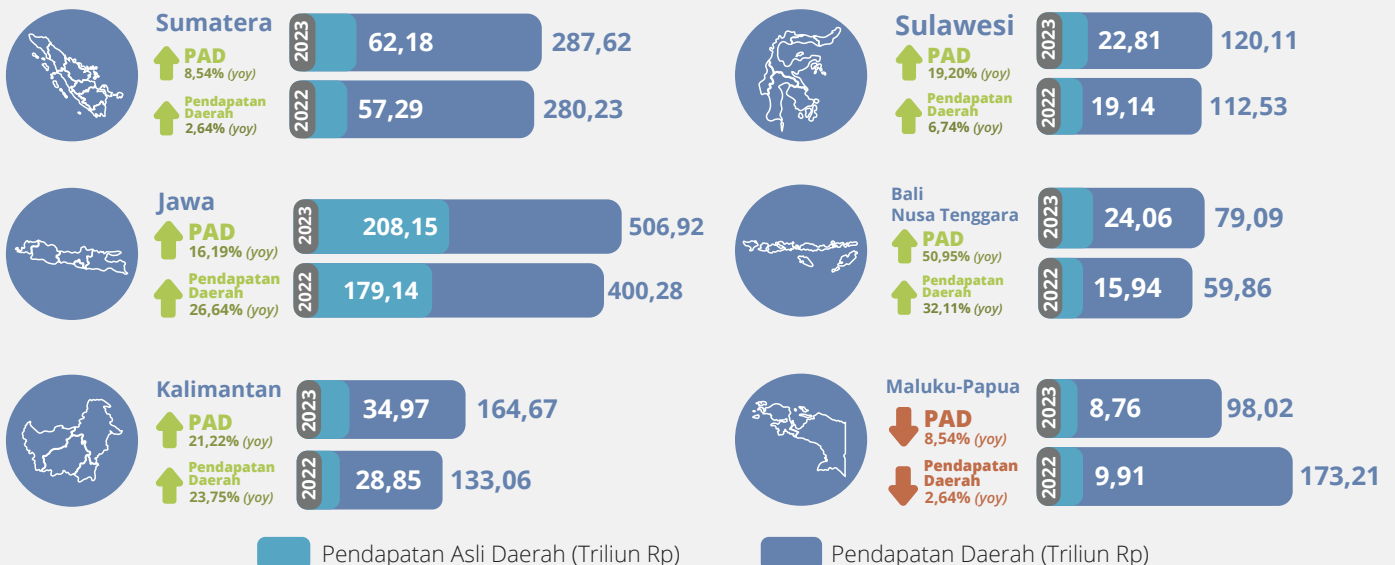
Jakarta, September 2024
Direktur Jenderal Perbendaharaan

DASHBOARD FISKAL REGIONAL TAHUN 2023

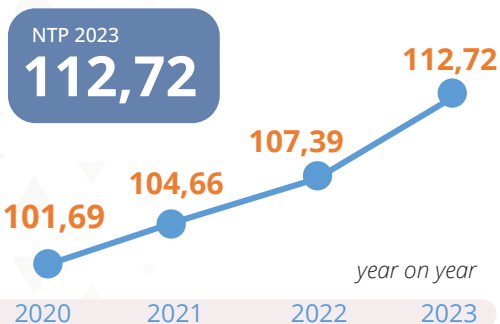
Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2019 - 2023



Realisasi PAD dan Pendapatan Daerah per Regional Tahun 2022-2023



Nilai Tukar Petani



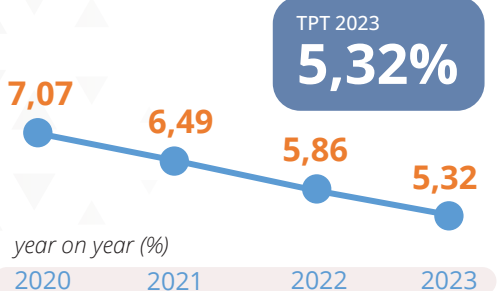
Nilai Tukar Petani (NTP) nasional tahun 2023 mencapai 112,72 dengan tren yang positif setiap tahunnya. Kenaikan NTP pada tahun 2023 mencerminkan bahwa petani memiliki daya beli yang lebih baik dan secara keseluruhan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Nilai Tukar Nelayan



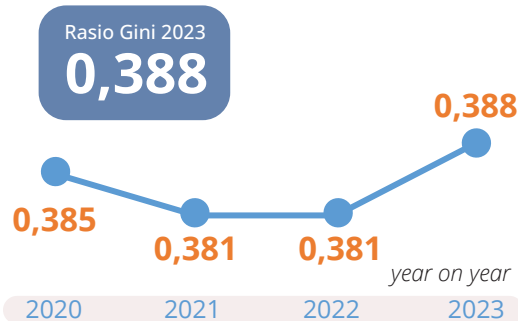
Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional pada tahun 2023 tercatat sebesar 106,14 yang menunjukkan sedikit penurunan dari tahun 2022. NTN berada di atas angka 100 menandakan bahwa kesejahteraan nelayan masih relatif baik, namun memerlukan perhatian dan dukungan berkelanjutan.

Tingkat Pengangguran Terbuka



TPT tahun 2023 terus mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 5,32 persen, namun penurunan tersebut belum dapat mencapai tingkat seperti pada kondisi sebelum Pandemi Covid-19. Dampak berkelanjutan dari Pandemi Covid-19 yang mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi serta adanya konflik geopolitik.

Rasio Gini

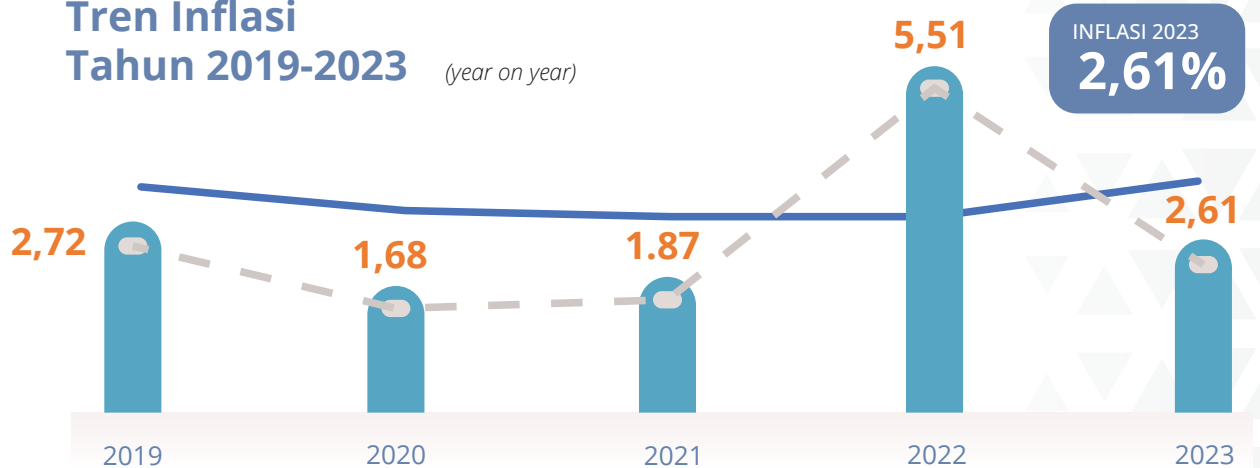


Secara tren, terjadi kenaikan angka Rasio Gini sebesar 0,007 poin dibanding September 2022. Semakin tingginya tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk salah satunya disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi serta penurunan pendapatan rumah tangga.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

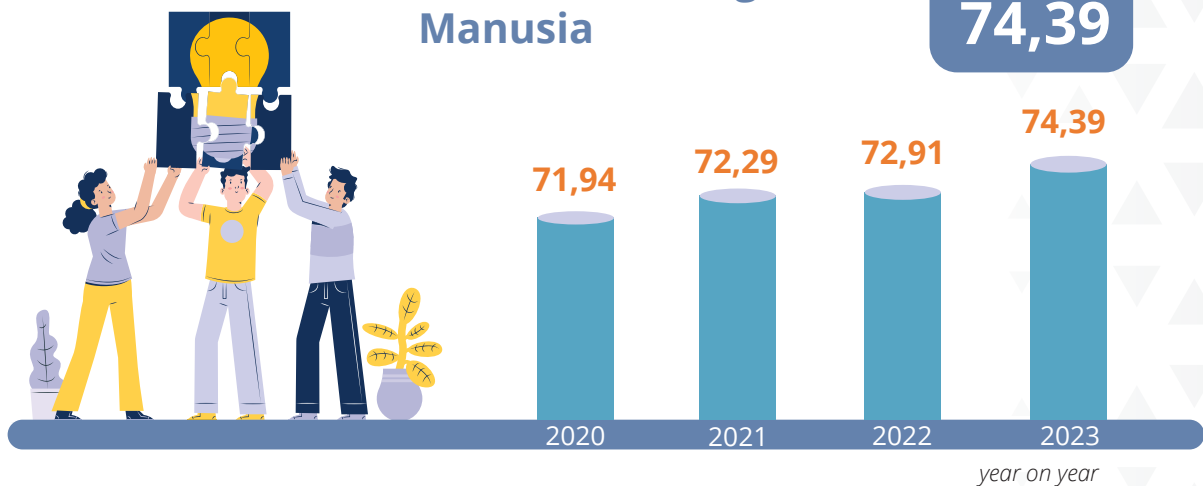


Tren Inflasi Tahun 2019-2023 (year on year)

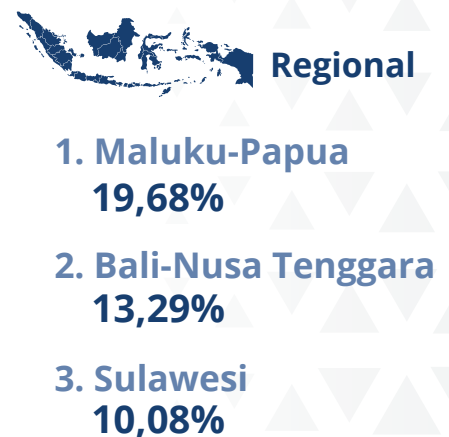
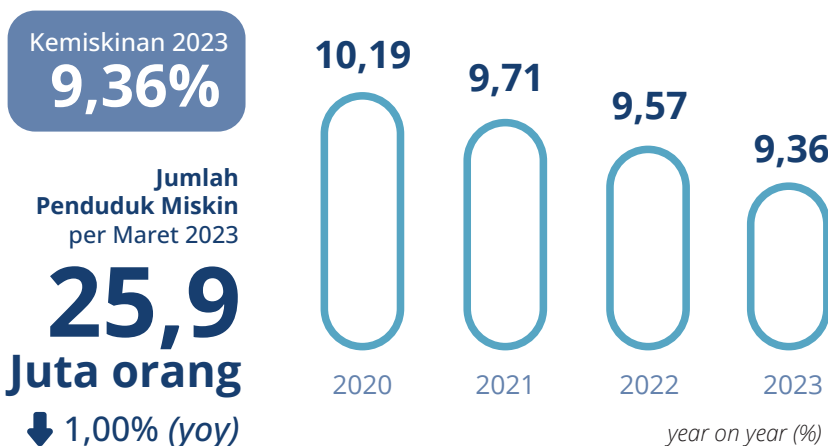


Capaian Inflasi tahun 2023 tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) yang stabil dan terkendali pada rentang target sasaran dibawah asumsi makro inflasi sebesar 3,60 persen (yoy). Inflasi yang terkendali ini tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak dalam mengendalikan harga di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Indeks Pembangunan Manusia



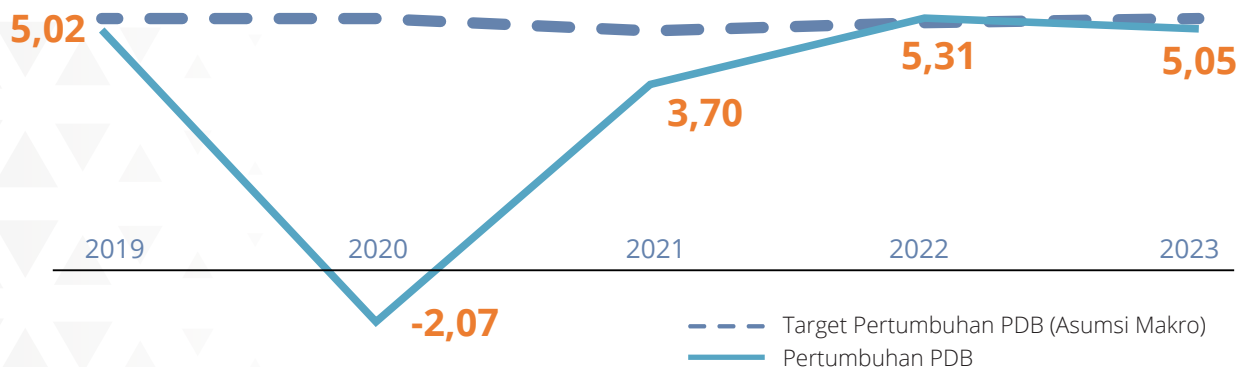
Tingkat Kemiskinan



Tren Pertumbuhan PDB Tahun 2019-2022 (c-to-c)

PDB 2023

5,05



Pendapatan Negara

Rp2.783,93 T

Defisit
(Rp337,29 T)

Belanja Negara

Rp3.121,22 T

Pendapatan Pajak

Target Rp2.118,35 T

Realisasi Rp2.154,21 T

101,69%

PNBP

Rp515,80 T Target

Rp612,54 T Realisasi

118,75%

Pendapatan Hibah

Target Rp0,41 T

Realisasi Rp17,18 T

4197,40%

Target sesuai Perpres 75/2023

Realisasi
**APBN
2023**

Rp2.239,79 T 97,28%

Belanja Pegawai

Pagu Rp442,51 T

Realisasi Rp412,71 T

93,27%

Belanja Modal

Rp210,32 T Pagu

Rp303,04 T Realisasi



144,08%

Belanja Barang

Pagu Rp375,88 T

Realisasi Rp432,71 T

115,12%

Bantuan Sosial

Rp148,52 T Pagu

Rp156,60 T Realisasi



105,44%

Pembayaran Bunga Utang

Pagu Rp441,40 T

Realisasi Rp439,88 T

99,66%

Belanja Subsidi

Rp298,50 T Pagu

Rp269,59 T Realisasi



90,32%

Belanja Hibah

Pagu Rp0,01 T

Realisasi Rp0,22 T

2172,76%

Belanja Lain-lain

Rp385,32 T Pagu

Rp225,02 T Realisasi

58,40%

TKD dan Dana Desa

Rp881,43 T 108,19%

Dana Bagi Hasil

Pagu Rp136,26 T

Realisasi Rp205,67 T

150,94%

Dana Alokasi Khusus Fisik

Rp53,42 T Pagu

Rp50,33 T Realisasi



94,22%

Dana Insentif Daerah

Pagu Rp8,00 T

Realisasi Rp7,91 T

98,83%

Dana Otonomi Khusus

Rp17,24 T Pagu

Rp17,24 T Realisasi

100,00%

Dana Alokasi Umum

Pagu Rp396,00 T

Realisasi Rp398,03 T

100,51%

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Rp132,37 T Pagu

Rp131,02 T Realisasi



98,98%

Dana Keistimewaan DIY

Pagu Rp1,42 T

Realisasi Rp1,37 T

96,67%

Dana Desa

Rp70,00 T Pagu

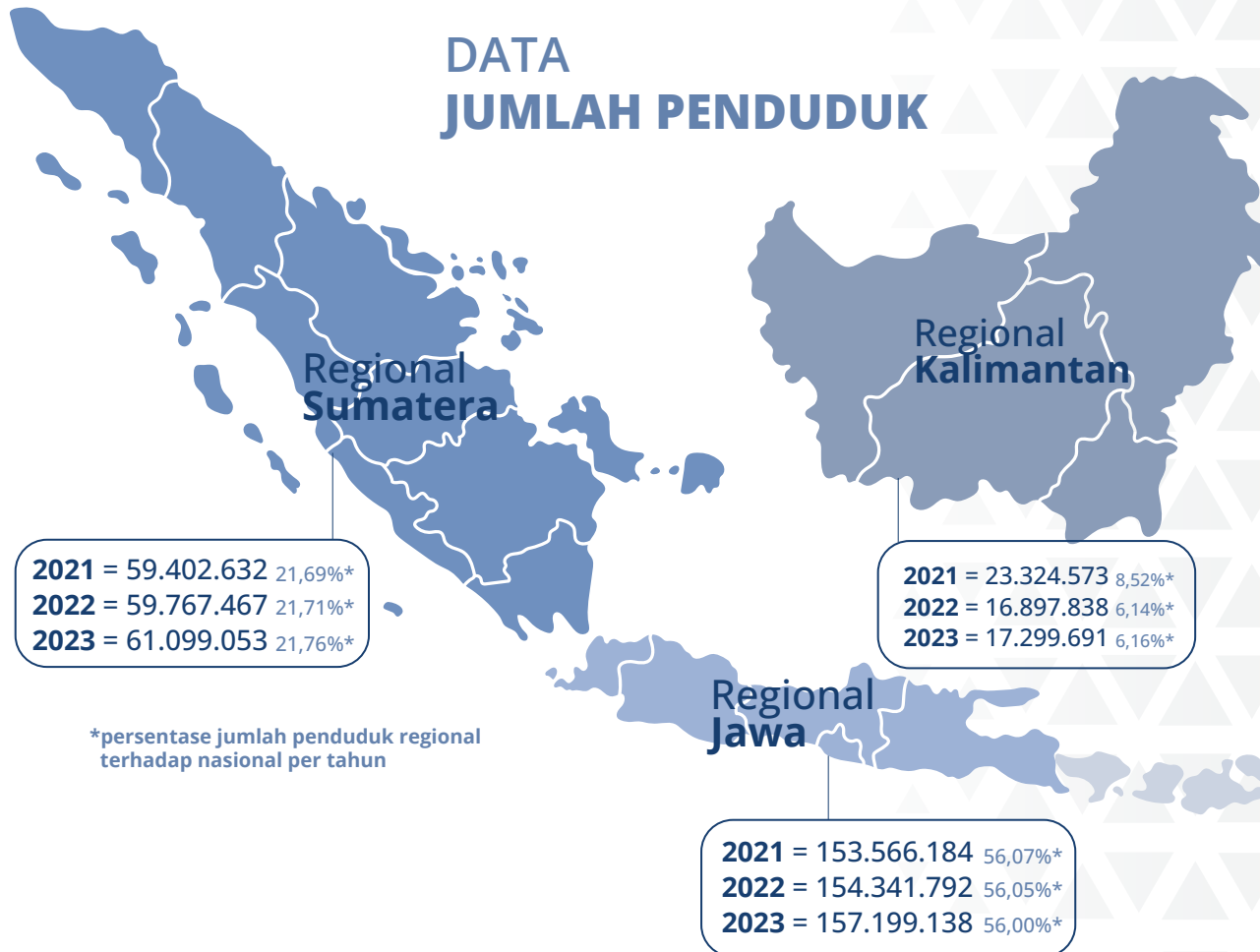
Rp69,86 T Realisasi

99,80%

Belanja Pemerintah Pusat

DASHBOARD

DATA JUMLAH PENDUDUK

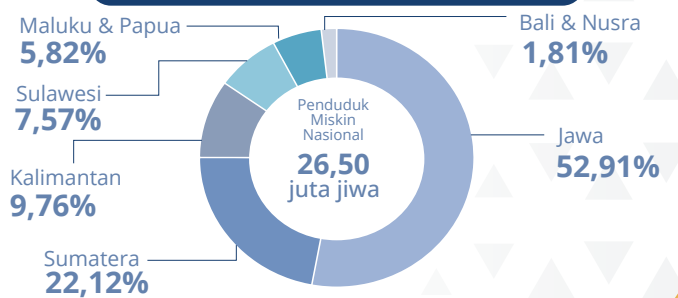


Jumlah Penduduk Nasional

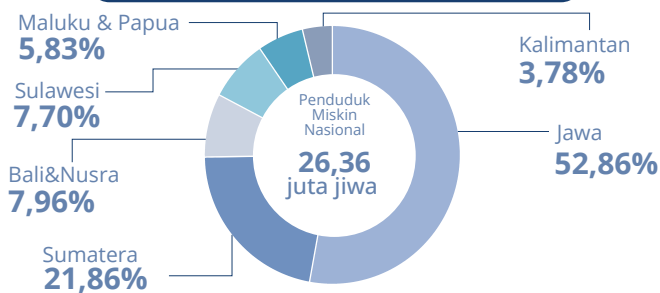


Porsi Penduduk Miskin Regional

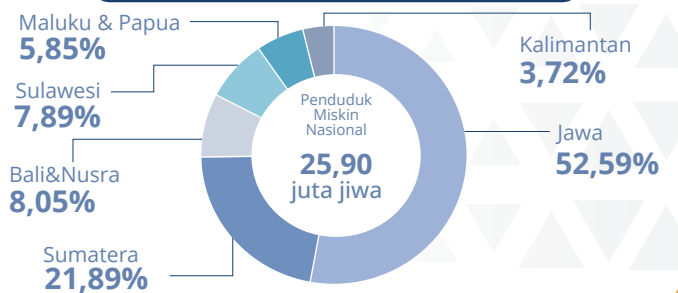
2021

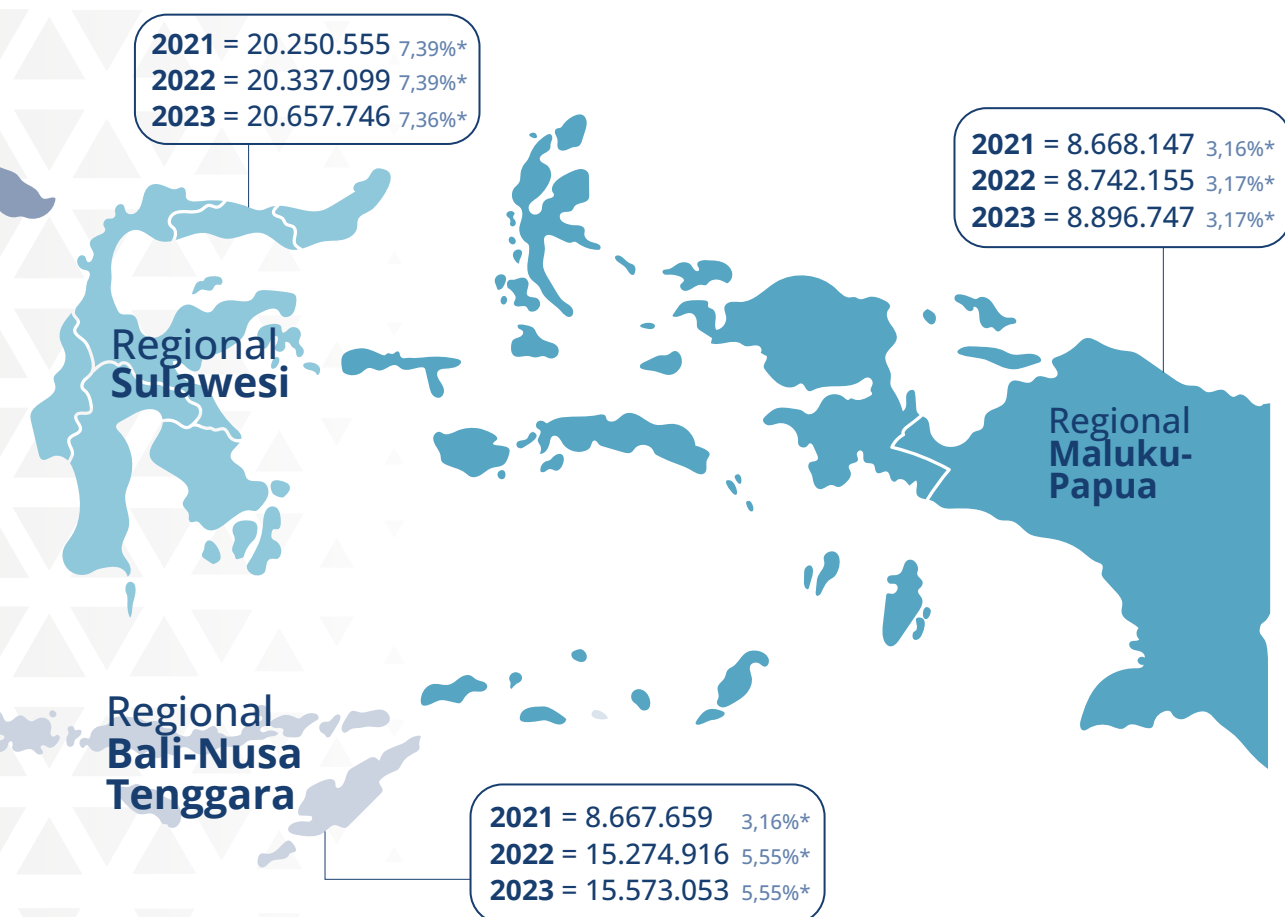


2022



2023





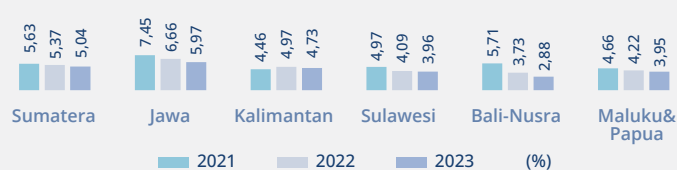
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK Indonesia tahun 2023 mampu mencapai 64,69 persen, naik sebesar 0,86 persen (yoy). Bali-Nusa Tenggara mencapai nilai tertinggi sebesar 75,28 persen.



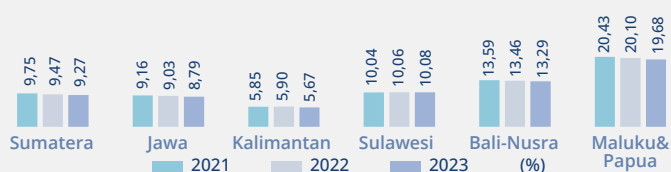
Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara spasial, dari sisi persentase, keseluruhan wilayah regional mengalami penurunan TPT sejak Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2023. Regional Jawa menjadi daerah dengan TPT tertinggi di Indonesia dimana pada Agustus 2023 mencapai sebesar 5,97%.



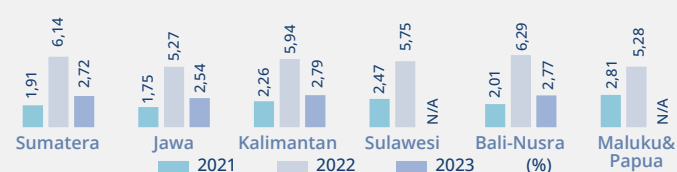
Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di wilayah regional sebanding dengan jumlah penduduknya. Persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 19,68 persen.



Inflasi Gabungan

Tingkat inflasi seluruh provinsi di Indonesia memiliki variasi yang berbeda. Maluku Utara merupakan provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional yaitu 4,41 persen (yoy). Sumbangan inflasi Kota Ternate memiliki tingkat inflasi tertinggi dibandingkan kota-kota lain.



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

18

I.

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi dan Kesejahteraan

Indikator Makro Ekonomi

30

Indikator Kesejahteraan Masyarakat

35

Kebijakan Pemerintah di Tahun 2023 untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan

47

II.

Perkembangan Fiskal APBN, APBD, dan Anggaran Konsolidasian

Overview Nasional 2023

51

Perkembangan Kinerja Anggaran Regional

62

Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Agregat

73

Dukungan Perkembangan Capaian Output Belanja Strategis (K/L & TKDD)

91

III.

Analisis Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja K/L Dan Dak Fisik

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kanwil DJPb

109

Pagu dan Realisasi Belanja K/L Secara Nasional

110

Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

115

Kendala dan Tantangan Secara Nasional

117

Regional Sumatera

119

Regional Jawa

125

Regional Sulawesi

132

Regional Kalimantan

140

Regional Bali-Nusa Tenggara

148

Regional Maluku-Papua

153



IV.

Analisis Tematik:

Sinergi Pusat-Daerah
Dalam Upaya Pengurangan
Pengangguran dan
Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja yang
Berdaya Saing

Overview Sinergi Pusat-Daerah Dalam Upaya Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing	160
Regional Sumatera	164
Regional Jawa	168
Regional Kalimantan	172
Regional Sulawesi	175
Regional Bali-Nusa Tenggara	181
Regional Maluku-Papua	184

V.

Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan	191
Rekomendasi	198



DAFTAR TABEL

I.	Tabel 1.1. Tingkat Pertumbuhan Ekomi Indonesia dan Global	31
	Tabel 1.2. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Spasial	31
	Tabel 1.3. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran 2020 – 2023	32
	Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2020 – 2023	33
	Tabel 1.5. Perkembangan IPM Tahun 2017-2023 berdasarkan Komponen Pembentuknya	36
	Tabel 1.6. Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia (persen), Maret 2022–Maret 2023	37
	Tabel 1.7. Tingkat Kemiskinan berdasarkan Regional Tahun 2023	39
	Tabel 1.8. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Regional Tahun 2023	43
	Tabel 1.9. NTP Tertinggi Dan Terendah Per Regional Tahun 2023	44
	Tabel 1.10. NTN Tertinggi Dan Terendah Per Regional Tahun 2023	46
II.	Tabel 2.1. Sebaran Pendapatan Negara di Tingkat Regional Tahun 2023	52
	Tabel 2.2. Sebaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di Tingkat Regional Tahun 2023 (triliun rupiah)	55
	Tabel 2.3. I-Account APBD 2023	57
	Tabel 2.4. APBN Regional Sumatera	63
	Tabel 2.5. APBN Regional Jawa	64
	Tabel 2.6. APBN Regional Kalimantan	65
	Tabel 2.7. APBN Regional Sulawesi	66
	Tabel 2.8. APBN Regional Bali-Nusa Tenggara	67
	Tabel 2.9. APBN Regional Maluku-Papua	68
	Tabel 2.10. APBD Regional Sumatera	69
	Tabel 2.11. APBD Regional Jawa	70
	Tabel 2.12. APBD Regional Kalimantan	71
	Tabel 2.13. APBD Regional Sulawesi	72
	Tabel 2.14. APBD Regional Bali-Nusa Tenggara	72
	Tabel 2.15. APBD Regional Maluku-Papua	73
	Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Sumatera	76
	Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Jawa	77
	Tabel 2.18. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Kalimantan	77
	Tabel 2.19. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Bali-Nusra	78
	Tabel 2.20. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Sulawesi	78
	Tabel 2.21. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Maluku-Papua	79
	Tabel 2.22. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Sumatera	80
	Tabel 2.23. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Jawa	81
	Tabel 2.24. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Kalimantan	81
	Tabel 2.25. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Bali-Nusra	81
	Tabel 2.26. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Sulawesi	82
	Tabel 2.27. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Maluku-Papua	82
	Tabel 2.28. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sumatera	84
	Tabel 2.29. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Jawa	84
	Tabel 2.30. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Kalimantan	85
	Tabel 2.31. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Bali-Nusa Tenggara	85
	Tabel 2.32. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sulawesi	86
	Tabel 2.33. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Maluku-Papua	86
	Tabel 2.34. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Sumatera	88
	Tabel 2.35. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Jawa	88
	Tabel 2.36. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Kalimantan	89
	Tabel 2.37. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Bali-Nusra	89
	Tabel 2.38. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Sulawesi	90
	Tabel 2.39. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Maluku-Papua	90
	Tabel 2.40. Realisasi Output Strategis Tahun 2023	93
	Tabel 2.41. Realisasi Output Strategis Pada Wilayah Sumatera Tahun 2023	95
	Tabel 2.42. Realisasi Output Strategis Pada Wilayah Jawa Tahun 2023	97
	Tabel 2.43. Realisasi Output Strategis Pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2023	99
	Tabel 2.44. Realisasi Output Strategis Pada Wilayah Kalimantan Tahun 2023	101
	Tabel 2.45. Realisasi Output Strategis Pada Wilayah Sulawesi Tahun 2023	104
	Tabel 2.46. Realisasi Output Strategis Pada Wilayah Maluku-Papua Tahun 2023	106

III.	Tabel 3.1. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar (miliar rupiah)	110
	Tabel 3.2. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi (miliar rupiah)	111
	Tabel 3.3. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang (miliar rupiah)	112
	Tabel 3.4. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Tahun 2023 (miliar rupiah)	113
	Tabel 3.5. Pagu Realisasi K/L Bidang Kesehatan (miliar rupiah)	113
	Tabel 3.6. Pagu Realisasi K/L Bidang Pendidikan (miliar rupiah)	114
	Tabel 3.7. Pagu Realisasi K/L Bidang Pertanian (miliar rupiah)	114
	Tabel 3.8. Pagu Realisasi K/L Bidang Transportasi Perdesaan (miliar rupiah)	115
	Tabel 3.9. Cluster Tantangan Penganggaran	117
	Tabel 3.10. Cluster Tantangan Pengadaan Barang dan Jasa	118
	Tabel 3.11. Cluster Tantangan Eksekusi Kegiatan	118
	Tabel 3.12. Cluster Tantangan Regulasi Dalam Pelaksanaan Anggaran	118
	Tabel 3.13. Cluster Tantangan SDM	119
	Tabel 3.14. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Sumatera (miliar rupiah)	119
	Tabel 3.15. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Sumatera (dalam miliar)	119
	Tabel 3.16. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Sumatera (dalam miliar)	120
	Tabel 3.17. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Jalan (miliar rupiah)	121
	Tabel 3.18. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Kesehatan dan KB Regional Sumatera (miliar rupiah)	122
	Tabel 3.19. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Pendidikan Regional Sumatera (miliar rupiah)	123
	Tabel 3.20. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Pertanian Regional Sumatera (miliar rupiah)	124
	Tabel 3.21. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Transportasi Pedesaan Regional Sumatera (miliar rupiah)	124
	Tabel 3.22. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Jawa (miliar rupiah)	125
	Tabel 3.23. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Jawa (miliar rupiah)	126
	Tabel 3.24. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Jawa (miliar rupiah)	126
	Tabel 3.25. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Jalan (miliar rupiah)	127
	Tabel 3.26. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Kesehatan dan KB Regional Jawa (miliar rupiah)	128
	Tabel 3.27. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Pertanian Regional Jawa (miliar rupiah)	130
	Tabel 3.28. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Transportasi Pedesaan Regional Jawa (miliar rupiah)	131
	Tabel 3.29. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Sulawesi (miliar rupiah)	132
	Tabel 3.30. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Sulawesi (miliar rupiah)	132
	Tabel 3.31. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Sulawesi (miliar rupiah)	133
	Tabel 3.32. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Regional Sulawesi (miliar rupiah)	134
	Tabel 3.33. Pagu Realisasi K/L Bidang Kesehatan dan KB Regional Sulawesi (miliar rupiah)	135
	Tabel 3.34. Pagu Realisasi K/L Bidang Pendidikan Regional Sulawesi (miliar rupiah)	137
	Tabel 3.35. Pagu Realisasi K/L Bidang Pertanian Regional Sulawesi (miliar rupiah)	138
	Tabel 3.36. Pagu Realisasi K/L Bidang Transportasi Pedesaan Regional Sulawesi (miliar rupiah)	139
	Tabel 3.37. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Kalimantan (miliar rupiah)	140
	Tabel 3.38. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Kalimantan (miliar rupiah)	140
	Tabel 3.39. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Kalimantan (miliar rupiah)	141
	Tabel 3.40. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Regional Kalimantan (miliar rupiah)	142
	Tabel 3.41. Pagu Realisasi K/L Bidang Kesehatan dan KB Regional Kalimantan (miliar rupiah)	143
	Tabel 3.42. Pagu Realisasi K/L Bidang Pendidikan Regional Kalimantan (miliar rupiah)	145
	Tabel 3.43. Pagu Realisasi K/L Bidang Pertanian Regional Kalimantan (miliar rupiah)	146
	Tabel 3.44. Pagu Realisasi K/L Bidang Transportasi Pedesaan Regional Kalimantan (miliar rupiah)	147
	Tabel 3.45. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Bali Nusra (miliar rupiah)	148
	Tabel 3.46. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Bali Nusra (miliar rupiah)	148
	Tabel 3.47. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Bali Nusra (miliar rupiah)	149
	Tabel 3.48. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Regional Bali Nusra (miliar rupiah)	150
	Tabel 3.49. Pagu Realisasi K/L Bidang Kesehatan dan KB Regional Bali Nusra (miliar rupiah)	150
	Tabel 3.50. Pagu Realisasi K/L Bidang Pendidikan Regional Bali Nusra (miliar rupiah)	151
	Tabel 3.51. Pagu Realisasi K/L Bidang Pertanian Regional Bali Nusra (miliar rupiah)	152
	Tabel 3.52. Pagu Realisasi K/L Bidang Transportasi Pedesaan Regional Bali Nusra (miliar rupiah)	153
	Tabel 3.53. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Maluku Papua (miliar rupiah)	154
	Tabel 3.54. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Maluku Papua (miliar rupiah)	154
	Tabel 3.55. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Maluku Papua (miliar rupiah)	154
	Tabel 3.56. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Regional Maluku Papua (miliar rupiah)	155
	Tabel 3.57. Pagu Realisasi K/L Bidang Kesehatan dan KB Regional Maluku Papua (miliar rupiah)	156
	Tabel 3.58. Pagu Realisasi K/L Bidang Pendidikan Regional Maluku Papua (miliar rupiah)	158
	Tabel 3.59. Pagu Realisasi K/L Bidang Pertanian Regional Maluku Papua (miliar rupiah)	158
	Tabel 3.60. Pagu Realisasi K/L Bidang Transportasi Pedesaan Regional Maluku Papua (miliar rupiah)	159

IV.	Tabel 4.1 : Laju Tenaga Kerja dan PDRB Tahun 2019-2023	163
	Tabel 4.2 : Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja	163
	Tabel 4.3 : Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja Regional Sumatera	165
	Tabel 4.4 : Laju Tenaga Kerja dan PDRB Regional Sumatera Tahun 2019-2023	166
	Tabel 4.5 : Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja Regional Jawa	168
	Tabel 4.6 : Laju Tenaga Kerja dan PDRB Regional Jawa Tahun 2019-2023	169
	Tabel 4.7 : Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja Regional Kalimantan	173
	Tabel 4.8 : Laju Tenaga Kerja dan PDRB Regional Kalimantan Tahun 2019-2023	173
	Tabel 4.9 : Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja Regional Sulawesi	176
	Tabel 4.10 : Laju Tenaga Kerja dan PDRB Regional Sulawesi Tahun 2019-2023	177
	Tabel 4.11 : Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja Regional Bali Nusra	181
	Tabel 4.12 : Laju Tenaga Kerja dan PDRB Regional Bali Nusra Tahun 2019-2023	182
	Tabel 4.13 : Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja Regional Maluku-Papua	185
	Tabel 4.14 : Laju Tenaga Kerja dan PDRB Regional Maluku-Papua Tahun 2019-2023	186

DAFTAR GRAFIK

I.	Grafik 1.1. Produk Domestik Bruto 2020 – 2023	30
	Grafik 1.2. Distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2023	32
	Grafik 1.3. Laju Inflasi Nasional	34
	Grafik 1.4. Tingkat Inflasi Regional Tahun 2023	35
	Grafik 1.5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017-2023	35
	Grafik 1.6. Perbandingan IPM 2023 per Provinsi	36
	Grafik 1.7. Perkembangan Rasio Gini di Indonesia Tahun 2017-2023	37
	Grafik 1.8. Perbandingan Rasio Gini Maret 2023 berdasarkan Provinsi	38
	Grafik 1.9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017-2023 (Juta/%)	39
	Grafik 1.10. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2017-2023	39
	Grafik 1.11. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2017-2023	40
	Grafik 1.12. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023	40
	Grafik 1.13. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 menurut Tempat Tinggal	41
	Grafik 1.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 menurut Jenis Kelamin	41
	Grafik 1.15. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022-2023 menurut Tingkat Pendidikan (%)	42
	Grafik 1.16. Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2022-2023 (%)	42
	Grafik 1.17. Nilai Tukar Petani Per Provinsi Tahun 2023	44
	Grafik 1.18. Nilai Tukar Nelayan Per Provinsi Tahun 2023	45

II.	Grafik 2.1. Sebaran Pendapatan Negara Tingkat Daerah Selain di Regional Jawa Tahun 2023	53
	Grafik 2.2. Sebaran Belanja Pemerintah Pusat Selain di DKI Jakarta Tahun 2023	54
	Grafik 2.3. Distribusi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Pada Tingkat Daerah Tahun 2023	55
	Grafik 2.4. Perkembangan Target Komponen APBD 2021 – 2023 (triliun rupiah)	57
	Grafik 2.5. Pertumbuhan Realisasi APBD Regional Dibandingkan Nasional Tahun 2023	58
	Grafik 2.6. Kontribusi Realisasi Komponen PAD Tahun 2022 - 2023	58
	Grafik 2.7. Pertumbuhan Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2023	59
	Grafik 2.8. Perkembangan Pendapatan Regional Per Jenis Tahun 2023	59
	Grafik 2.9. Komposisi Belanja APBD Tahun 2023	59
	Grafik 2.10. Realisasi Komponen Belanja Operasi Regional Tahun 2023	60
	Grafik 2.11. Pertumbuhan Belanja Operasi Per Regional (2022-2023)	60
	Grafik 2.12. Presentase Pertumbuhan Belanja Diluar Operasi Per Regional (2022-2023)	60
	Grafik 2.13. Pertumbuhan Komponen Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan SILPA (2021-2023) (triliun rupiah)	61
	Grafik 2.14. Komposisi dan Perkembangan Penerimaan Pembiayaan (2022-2023) (triliun rupiah)	61
	Grafik 2.15. Komposisi dan Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan (2022-2023) (triliun rupiah)	62
	Grafik 2.16. Perkembangan Pembiayaan Regional (Dalam Miliar Rupiah) (2022-2023)	63
	Grafik 2.17. Komposisi Belanja Regional Sumatera	63
	Grafik 2.18. Komposisi Belanja Regional Jawa	64
	Grafik 2.19. Komposisi Belanja Regional Kalimantan	65
	Grafik 2.20. Komposisi Belanja Regional Sulawesi	66
	Grafik 2.21. Komposisi Belanja Regional Bali-Nusa Tenggara	67
	Grafik 2.22. Komposisi Belanja Regional Maluku-Papua	68
	Grafik 2.23. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 (c-to-c) Menurut Lapangan Usaha	74
	Grafik 2.24. Pertumbuhan Ekonomi PDB Tahun 2023 (c-to-c) Menurut Pengeluaran	75
	Grafik 2.25. Pertumbuhan Ekonomi PDRB Tahun 2023 (c-to-c) Menurut Pengeluaran	75
	Grafik 2.26. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Sumatera	76
	Grafik 2.27. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Jawa	76
	Grafik 2.28. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Kalimantan	77
	Grafik 2.29. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Bali-Nusa Tenggara	78
	Grafik 2.30. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Sulawesi	78
	Grafik 2.31. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Maluku-Papua	79
	Grafik 2.32. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Tiap Regional terhadap PDRB 2023	79
	Grafik 2.33. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Sumatera	80
	Grafik 2.34. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Jawa	80
	Grafik 2.35. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Kalimantan	81
	Grafik 2.36. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Bali-Nusra	81
	Grafik 2.37. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Sulawesi	82
	Grafik 2.38. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Maluku-Papua	82
	Grafik 2.39. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tiap Regional terhadap PDRB 2023	83
	Grafik 2.40. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Sumatera	84
	Grafik 2.41. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Jawa	84

Grafik 2.42. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Kalimantan	85
Grafik 2.43. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Bali-Nusa Tenggara	85
Grafik 2.44. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Sulawesi	86
Grafik 2.45. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Maluku-Papua	86
Grafik 2.46. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Tiap Regional terhadap PDRB 2023	87
Grafik 2.47. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Sumatera	88
Grafik 2.48. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Jawa	88
Grafik 2.49. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Kalimantan	89
Grafik 2.50. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Bali-Nusra	89
Grafik 2.51. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Sulawesi	90
Grafik 2.52. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Maluku-Papua	90
Grafik 2.53. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Tiap Regional terhadap PDRB 2023	90

III. Grafik 3.1. Permasalahan/Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik s.d Triwulan III 2023	117
Grafik 3.2. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan Regional Jawa	129
Grafik 3.3. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian Regional Jawa	129
Grafik 3.4. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Transportasi Pedesaan Regional Jawa	131
Grafik 3.5. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Jalan Regional Sulawesi	134
Grafik 3.6. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Regional Sulawesi	136
Grafik 3.7. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan Regional Sulawesi	137
Grafik 3.8. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian Regional Sulawesi	138
Grafik 3.9. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Transportasi Pedesaan Regional Sulawesi	139

IV. Grafik 4.1 : Tingkat Pengangguran Indonesia Tahun 2019-2023	160
Grafik 4.2 : Penduduk Bekerja di Kegiatan Formal/Informal (%)	162
Grafik 4.3 : Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan (%)	162
Grafik 4.4 : Laju Tingkat Pengangguran Regional Sumatera Tahun 2019-2023	165
Grafik 4.5 : Scatter Plot Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Regional Sumatera Tahun 2020-2023	167
Grafik 4.6 : Laju Tingkat Pengangguran Regional Jawa Tahun 2019-2023	168
Grafik 4.7 : Scatter Plot Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Regional Jawa Tahun 2020-2023	170
Grafik 4.8 : Laju Tingkat Pengangguran Regional Kalimantan Tahun 2019-2023	172
Grafik 4.9 : Scatter Plot Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Regional Kalimantan Tahun 2020-2023	174
Grafik 4.10 : Laju Tingkat Pengangguran Regional Sulawesi Tahun 2019-2023	176
Grafik 4.11 : Scatter Plot Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Regional Sulawesi Tahun 2020-2023	177
Grafik 4.12 : Laju Tingkat Pengangguran Regional Bali Nusra Tahun 2019-2023	181
Grafik 4.13 : Scatter Plot Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Regional Bali Nusra Tahun 2020-2023	183
Grafik 4.14 : Laju Tingkat Pengangguran Regional Maluku-Papua Tahun 2019-2023	185
Grafik 4.15 : Scatter Plot Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Regional Maluku-Papua Tahun 2020-2023	186

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Sebaran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Regional Tahun 2023	32
Gambar 2.1. Pelaksanaan APBD di Tingkat Regional Tahun 2023	57
Gambar 4.1 : TPT Regional Sumatera Agustus Tahun 2023	164
Gambar 4. 2 : Sebaran Penerima Kartu Pra Kerja Regional Sumatera Tahun 2020-2023	166
Gambar 4.3 : TPT Regional Jawa Agustus Tahun 2023	168
Gambar 4. 4 : Sebaran Penerima Kartu Pra Kerja Regional Jawa Tahun 2020-2023	172
Gambar 4.5 : TPT Regional Kalimantan Agustus Tahun 2023	172
Gambar 4.6 : Sebaran Penerima Kartu Pra Kerja Regional Kalimantan Tahun 2020-2023	174
Gambar 4.7 : TPT Regional Sulawesi Agustus Tahun 2023	176
Gambar 4.8 : Sebaran Penerima Kartu Pra Kerja Regional Sulawesi Tahun 2020-2023	178
Gambar 4.9 : TPT Regional Bali Nusra Tahun 2023	181
Gambar 4.10 : Sebaran Penerima Kartu Pra Kerja Regional Bali Nusra Tahun 2020-2023	183
Gambar 4.11 : TPT Regional Maluku-Papua Tahun 2023	184
Gambar 4.12 : Sebaran Penerima Kartu Pra Kerja Regional Maluku-Papua Tahun 2020-2023	187



RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Perekonomian dan Kinerja Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) pada Alinea ke IV yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu: alokasi, distribusi, dan stabilisasi dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Fungsi tersebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjadi stimulus investasi, dan memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia terdistribusi secara merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi fungsi APBN diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air.

Sepanjang tahun 2023, meskipun COVID-19 secara resmi telah dianggap bukan lagi sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), namun kondisi perekonomian global dihadapkan dengan berbagai tantangan yang berat. Tingginya risiko dan ketidakpastian global yang dipicu oleh tingginya tingkat inflasi pada negara-negara OECD, pelemahan ekonomi Tiongkok, volatilitas harga komoditas, *geoeconomic fragmentation*, perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, serta meletusnya perang di Palestina. Selain itu, *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur global, khususnya Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, juga masih berada dalam zona kontraksi.

Di tengah badai krisis global, kebijakan fiskal dihadapkan pada alternatif kebijakan yang tidak utopis. APBN dan APBD sebagai instrumen strategis pemerintah, dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan kebijakan ekspansif dan berperan sebagai *shock absorber* dengan risiko yang terkendali, sehingga tetap sehat dan berkelanjutan. Belanja pemerintah pusat dan daerah harus mampu menjadi bantalan perlindungan sosial sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi dan rencana pembangunan. Oleh

karena itu, kualitas penganggaran dan pelaksanaan belanja pemerintah menjadi penting dan menentukan, sehingga mampu menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.

Kinerja Fiskal, Perekonomian, dan Kesejahteraan Tahun 2023

APBN

a. Realisasi Pendapatan	Rp2.118,35 T (101,69%)
b. Realisasi Belanja	Rp3.121,22 T (100,13%)
c. Defisit	Rp337,29 T (70,28%)
d. Pembiayaan	Rp356,66 T (74,32%)
e. SiLPA	Rp19,38 T

APBD Konsolidasi

a. Realisasi Pendapatan	Rp1.256,43 T (102,07%)
b. Realisasi Belanja	Rp1.263,87 T (97,44%)
c. Defisit	Rp7,44 T
d. Pembiayaan	Rp98,35 T
e. SiLPA	Rp90,91 T

Makro Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi	5,05%
b. Produk Domestik Bruto	Rp20.892,4 T
c. Inflasi	2,61%

Kesejahteraan

a. IPM	74,39
b. Rasio Gini	0,388
c. Pengangguran	5,32%
d. Kemiskinan	9,36%

Sepanjang tahun 2023, ekonomi Indonesia menunjukkan performa yang *resilient* dengan menjaga momentum pertumbuhan meskipun dihadapkan pada sejumlah tekanan dan ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 mencapai 5,05 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan tersebut masih berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi global dan telah mendekati asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN sebesar 5,30 persen. Pertumbuhan positif juga ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan tertinggi tercatat berada pada wilayah Maluku-Papua sebesar 6,94 persen, sedangkan wilayah Bali- Nusa Tenggara mencatatkan pertumbuhan terendah

dibandingkan wilayah lain dengan pertumbuhan sebesar 4,00 persen.

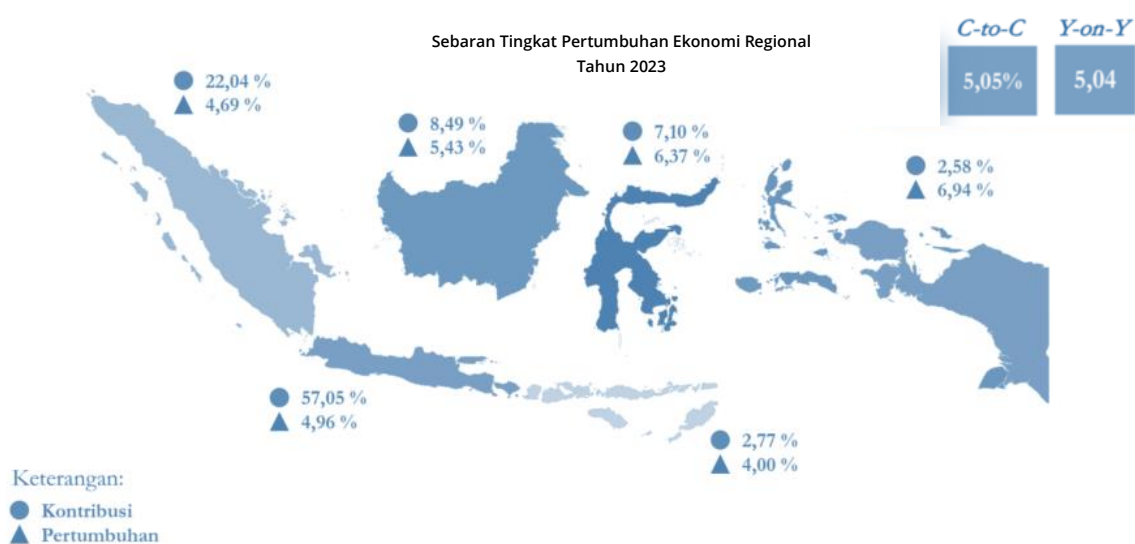
Hal tersebut menandakan bahwa momentum perbaikan pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga meski di tengah gejolak tantangan global melalui perbaikan indikator pada berbagai sektor. Sektor konsumsi dan investasi mengalami perbaikan yang ditandai dengan menguatnya daya beli masyarakat, terjaganya indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan penjualan eceran, terjaganya PMI manufaktur pada level ekspansi, serta kredit perbankan yang tumbuh mencapai 10,38 persen pada tahun 2023. Capaian positif juga turut ditunjukkan sektor eksternal yang ditandai dengan surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang didorong oleh ekspor komoditas utama seperti batu bara, *palm oil*, dan nikel, serta terjaganya cadangan devisa dan rasio utang pada level aman. Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2023, menghasilkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2023 mencapai Rp20.892,4 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar Rp19.588,4 triliun. PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US\$4.919,7, sehingga Indonesia termasuk kedalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (*upper-middle income country*).

tahun 2023. Realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2023 yang ditetapkan pada Perpres Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp2.634,15 triliun (105,69 persen) dan pada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 (APBN 2023) sebesar 2.462,61 triliun (113,05 persen).

Dilihat secara spasial, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh perkembangan aktivitas ekonomi di regional Jawa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 57,05 persen, diikuti oleh regional Sumatera sebesar 22,04 persen, dan regional Kalimantan 8,49 persen, sedangkan regional Sulawesi memiliki kontribusi sebesar 7,10 persen, Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,78 persen, serta regional Maluku-Papua sebesar 2,58 persen. Berdasarkan *share* PDB tersebut,

sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tumbuh sebesar 1,80 persen.

Pada capaian tingkat inflasi nasional di tahun 2023, tingkat inflasi Indonesia sebesar 2,61 persen lebih rendah dari inflasi tahun 2022 sebesar 5,51 persen (*y-o-y*) dan berada di bawah asumsi makro inflasi sebesar 3,60 persen. Tingkat inflasi yang tinggi ini merupakan inflasi tertinggi sejak tahun 2008. Penurunan tingkat inflasi tersebut ditopang oleh terjaganya berbagai komponen inflasi.

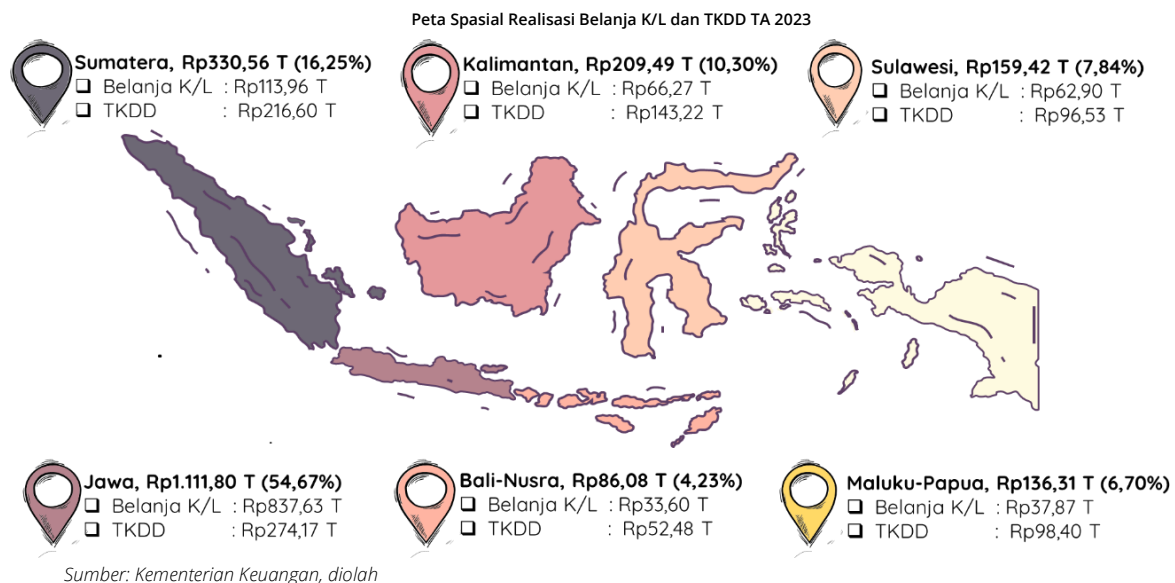


variasi angka kontribusi PDB setiap regional menunjukkan bahwa distribusi PDB masih didominasi oleh provinsi-provinsi di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI). Namun demikian, pemerintah telah berupaya untuk mendorong peningkatan kontribusi PDB ini ke Kawasan Indonesia Timur (KIT) melalui sejumlah program prioritas di bidang infrastruktur dan kesejahteraan baik yang didanai melalui APBN maupun APBD. Secara laju pertumbuhan, Provinsi Maluku Utara mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 20,49 persen,

Inflasi terjaga rendah sejalan dengan pengendalian inflasi oleh Pemerintah dan Bank Indonesia, meliputi kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar Rupiah, pengendalian harga pangan, termasuk beras dan komoditas pangan strategis lainnya dari dampak El Nino.

Kinerja APBN

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN 2023 masih memiliki daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya dengan



pengelolaan yang *prudent* dan *sustainable*. Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, melampaui target. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat tumbuh sebesar 5,88 persen dari sebesar Rp2.034,55 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp2.154,21 triliun pada tahun 2023. Realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2023 yang ditetapkan pada Perpres Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp2.634,15 triliun atau tercapai sebesar 105,69 persen. Peningkatan Pendapatan Negara dan Hibah terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dunia, membaiknya harga komoditas, dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, realisasi belanja negara pada TA 2023 sebesar Rp3.121,22 triliun atau 100,13 persen. Capaian tersebut tumbuh sebesar 0,81 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Realisasi belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.239,79 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp881,43 triliun.

Pada bagian BPP, belanja pembayaran bunga utang merupakan belanja dengan porsi terbesar, yaitu sebesar Rp439,88 triliun atau 19,64 persen dari total belanja negara, disusul belanja barang sebesar Rp432,71 triliun (19,32 persen dari total belanja), belanja pegawai sebesar Rp412,71 triliun (18,43 persen total belanja), belanja modal sebesar Rp 303,04 triliun (13,53 persen total belanja), belanja subsidi sebesar Rp269,59 triliun (12,04 persen total belanja), kemudian belanja bantuan sosial sebesar Rp156,60 triliun (6,99 persen total belanja). Belanja negara baik dalam bentuk BPP maupun TKDD berperan cukup besar dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Optimalisasi belanja pada tahun 2023 dilakukan dalam kerangka belanja yang responsif dan fleksibel, seiring dengan tingginya realisasi belanja pemerintah, kondisi perekonomian pada tahun 2023 terus berupaya untuk pulih.

Dilihat secara spasial, porsi belanja negara tersebut sebagian besar berada di wilayah Jawa yang memiliki jumlah penduduk besar

dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata serta pencairan bantuan sosial yang dilakukan terpusat, sehingga belanja tersebut diakui dilakukan di wilayah Jawa, meskipun penerima manfaat tersebar di seluruh Indonesia. Tahun 2023, regional Jawa memiliki kontribusi sebesar 54,67 persen untuk pencairan anggaran belanja K/L dan TKDD, disusul oleh regional Sumatera sebesar 16,25 persen. Porsi terendah dari realisasi anggaran berada di regional Bali-Nusa Tenggara dengan kontribusi sebesar 4,23 persen.

Sejumlah upaya strategi fiskal Pemerintah dalam mengembangkan wilayah lain telah dilakukan, khususnya pengembangan Kawasan Indonesia Timur. Dibandingkan tahun 2022, persentase pertumbuhan Belanja Negara melalui Belanja K/L dan TKDD pada tahun 2023 di wilayah luar Jawa yaitu Kalimantan (35,7 persen), Sulawesi (11,1 persen), Sumatera (8,4 persen), Maluku-Papua (6,1 persen), serta Bali-Nusa Tenggara (4,5 persen) terealisasi lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pertumbuhan di wilayah Jawa (2,2 persen).

Secara akumulatif pada tahun 2023, persentase kontribusi total Belanja K/L dan TKD di wilayah Jawa terhadap belanja secara nasional mengalami penurunan sebesar 2,5 persen. Penurunan tersebut memberikan ruang distribusi kapasitas fiskal melalui peningkatan Belanja K/L dan TKD di wilayah-wilayah luar Jawa. Realisasi Belanja K/L dan TKD di wilayah Kalimantan juga meningkat pesat, khususnya dipengaruhi oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan perhatian Pemerintah Pusat

terhadap pembangunan wilayah di luar Jawa sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi untuk mendorong keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Kebijakan APBN yang bersifat ekspansif dan *countercyclical* menghasilkan realisasi defisit anggaran pada tahun 2023 Rp337,29 triliun atau mencapai 1,61 persen dari PDB. Capaian tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu defisit APBN tahun 2022 sebesar Rp460,42 triliun atau mencapai 2,35 persen dari PDB. Realisasi defisit tahun 2023 lebih rendah dari target defisit pada Perpres Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp479,9 triliun (2,27 persen dari PDB) dan pada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 (APBN 2023) sebesar Rp598,2 triliun (2,84 persen dari PDB) seiring dengan realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP yang melampaui target. Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023 menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan realisasi defisit di bawah 3 persen sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2020. Defisit anggaran tersebut selanjutnya ditutup dengan pembiayaan (*neto*) sebesar Rp356,66 triliun. Dengan demikian, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk TA 2023 sebesar Rp19,38 triliun yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembiayaan APBN pada tahun-tahun berikutnya.

Kinerja APBD

Dari sisi fiskal daerah, konsolidasi APBD secara nasional di tahun 2023 baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah mengalami pertumbuhan. Konsolidasi realisasi pendapatan APBD secara nasional

(gabungan) adalah sebesar Rp1.256,43 triliun atau tumbuh sebesar 8,39 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan sebesar Rp50,66 triliun, sedangkan dana transfer (TKDD) mengalami peningkatan sebesar Rp49,57 triliun. Dana transfer merupakan kontributor utama dalam pendapatan daerah, yakni sebesar Rp887,28 triliun atau sekitar 70,67 persen dari total pendapatan daerah. Pada pos belanja daerah, terjadi pertumbuhan belanja sebesar 6,01 persen menjadi Rp1.263,87 triliun di tahun 2023. Berdasarkan komposisi, belanja operasi merupakan jenis belanja APBD 2023 terbesar dengan realisasi mencapai Rp854,00 triliun atau 67,57 persen dari seluruh belanja. Pada posisi kedua dan ketiga, belanja modal dan transfer berkontribusi sebesar 16,92 persen dan 15,31 persen atau sebesar Rp213,84 triliun dan Rp193,51 triliun. Selain ketiga belanja ini, terdapat belanja tidak terduga yang berkontribusi sebesar 0,20 persen atau setara Rp2,52 triliun. Secara ideal, proporsi alokasi dan serapan belanja modal yang bersumber dari APBD hendaknya lebih ditingkatkan lagi agar menjadi lebih besar atau cenderung mendekati kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang, sehingga belanja yang bersifat investasi dapat memberikan stimulus yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Dengan pendapatan daerah yang lebih rendah daripada realisasi belanjanya, maka secara konsolidasi APBD dihasilkan angka defisit anggaran sebesar Rp7,44 triliun, ditambah dengan pembiayaan

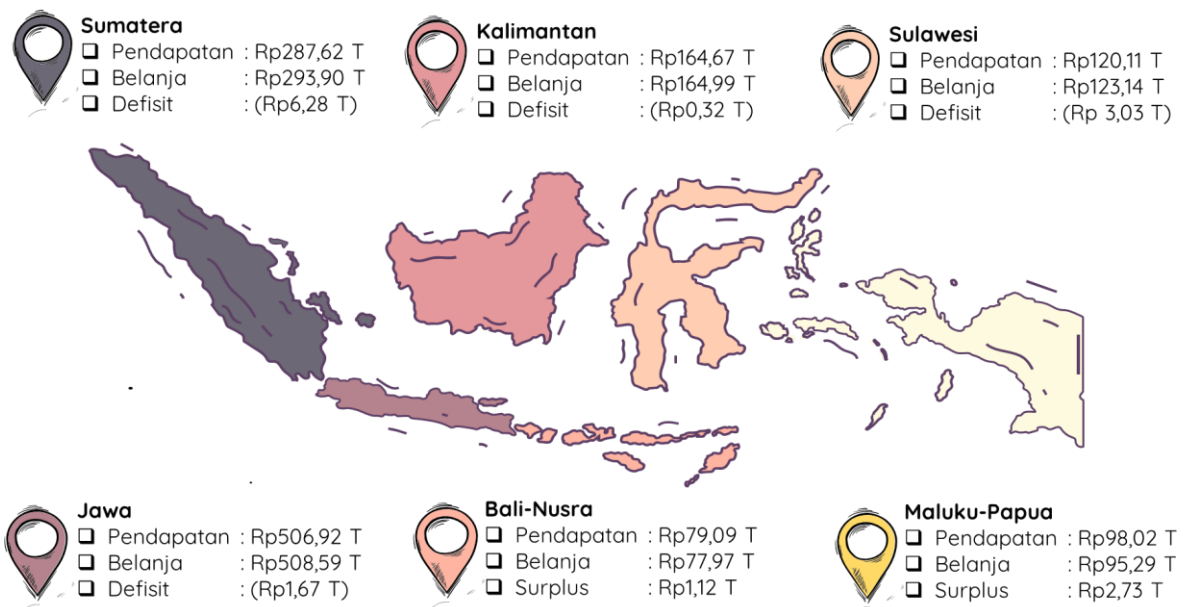
neto yang telah direalisasikan sebesar Rp98,53 triliun, maka SiLPA Daerah di tahun 2023 mencapai Rp90,91 triliun.

Dilihat secara spasial, pada tahun 2023 belanja daerah dikontribusikan secara signifikan oleh pemerintah daerah di regional Jawa sebesar 40,35 persen dari total belanja APBD konsolidasi, disusul oleh regional Sumatera dengan kontribusi sebesar 22,89 persen. Adapun dari sisi postur APBD secara umum, dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) regional mengalami defisit anggaran, yaitu regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Defisit anggaran terbesar terjadi di regional Sumatera sebesar Rp6,28 triliun, sedangkan terendah berada di regional Kalimantan sebesar Rp0,31 triliun. Sedangkan untuk sektor pembiayaan, tingkat pertumbuhan pembiayaan tiap regional juga sangat variatif, baik dari penerimaan maupun pengeluaran. Regional Kalimantan tercatat sebagai regional dengan pertumbuhan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tertinggi, yaitu sebesar 116,80 persen dan 239,06 persen.

Kinerja Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama (*ultimate goal*) dari setiap perumusan dan implementasi kebijakan fiskal. Pemerintah terus berupaya untuk membangun keselarasan antara pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan perbaikan indikator kesejahteraan. Oleh sebab itu, peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai ukuran yang menggambarkan meningkatnya kualitas

Peta Spasial Realisasi APBD Tahun 2023



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

hidup masyarakat yang tercermin ke dalam 3 aspek, yaitu: akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang layak. Pada tahun 2023, capaian tingkat IPM nasional sebesar 74,39 atau meningkat sebesar 1,48 basis poin dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 72,91. Provinsi DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi dan termasuk dalam kategori sangat tinggi mencapai 83,55, sedangkan provinsi Papua masih menjadi yang terendah dengan indeks sebesar 63,01 meskipun pada 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,62 basis poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata IPM di wilayah Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia bagian timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di KTI masih menjadi tantangan tersendiri.

Dari indikator kesejahteraan yang lain, tingkat kemiskinan nasional telah mengalami penurunan dari 9,57 persen di tahun 2022

menjadi 9,36 persen di tahun 2023. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 26,36 juta orang (2022) menjadi sebanyak 25,90 juta orang di tahun 2023. Penurunan angka kemiskinan merupakan target dari program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, dan ini terus menerus dilakukan melalui belanja negara terutama pada sektor perlindungan sosial, kesehatan, serta dukungan permodalan usaha mikro, kecil, menengah. Sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional, mayoritas provinsi di Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan, tetapi terdapat tujuh provinsi yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tingkat kemiskinan tertinggi dialami oleh Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 1,42 persen, sedangkan terendah dialami Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,22 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi (di atas 15 persen) masih terjadi pada provinsi-provinsi di KTI, seperti Papua (26,03 persen), Papua Barat (20,49

persen), Nusa Tenggara Timur (19,96 persen), Maluku (16,42 persen), dan Gorontalo (15,15 persen), sedangkan di KBI Provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan sebesar (14,45 persen). Hal ini menandakan bahwa pemerintah perlu untuk terus fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan pada kantong-kantong atau daerah miskin dan terarah dalam mengatasi akar penyebabnya, termasuk meningkatkan produktivitas masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatannya.

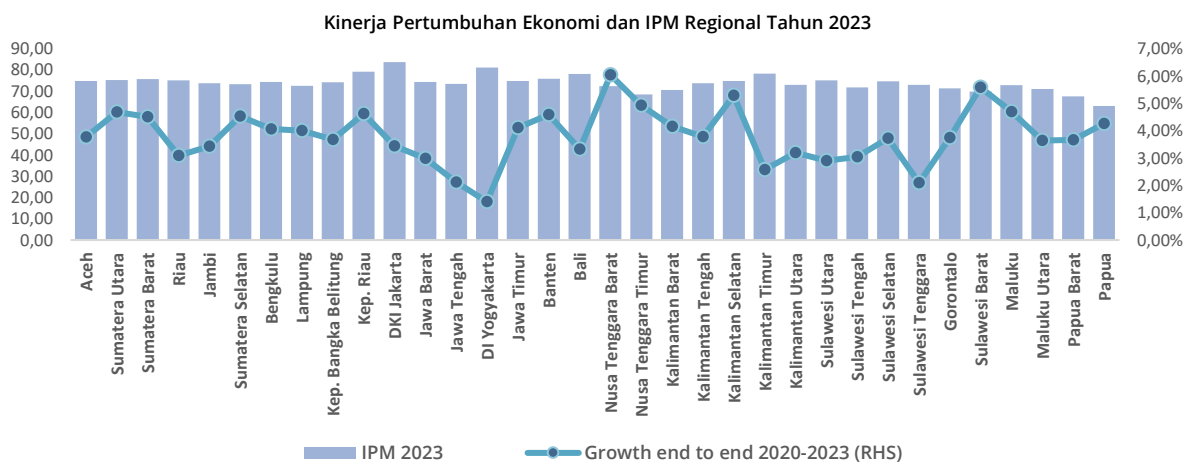
Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan mengalami perubahan dengan peningkatan nilai rasio gini secara nasional sebesar 0,388 dibandingkan dengan tingkat ketimpangan tahun sebelumnya. Sebagian besar provinsi menunjukkan indeks dibawah angka nasional. Ketimpangan terendah terjadi pada Provinsi Bangka Belitung dengan gini rasio 0,245 sedangkan tertinggi terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan gini rasio 0,449. Selain itu, tingkat pengangguran di Indonesia dalam 2 tahun terakhir terus mengalami perbaikan meskipun belum signifikan. Penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,54 persen poin, dari 5,86 persen pada tahun 2022 menjadi 5,32 persen di

tahun 2023. Jumlah pengangguran turun dari 8,43 juta jiwa pada tahun 2022 menjadi 7,86 juta jiwa di tahun 2023.

Harmonisasi Belanja K/L dan TKDD

Kebijakan fiskal yang dituangkan dalam APBN dan APBD merupakan instrumen kebijakan yang langsung berdampak dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang efektif harus memperhatikan kebutuhan daerah yang sesuai dengan karakteristik daerah, kultur masyarakat, dan potensi ekonomi pada masing-masing wilayah.

Pengembangan wilayah yang dirumuskan dalam RPJMN bertujuan untuk percepatan pemerataan pembangunan sampai ke pelosok wilayah melalui program-program berbasis infrastruktur dan ekonomi yang akan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah senantiasa memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah dalam mengalokasikan dana APBN dan APBD



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

tersebut. Kemandirian fiskal daerah harus semakin ditingkatkan dengan upaya-upaya konstruktif, sehingga daerah semakin mampu dalam membiayai kebutuhan daerah.

Harmonisasi belanja pusat dan daerah terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Dalam UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu pilarnya adalah harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah merupakan hal yang penting di tengah naiknya belanja negara setiap tahunnya. Kenaikan alokasi tersebut perlu diiringi dengan peningkatan akuntabilitas, perbaikan tata kelola serta harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip *value for money*.

Adapun Ruang lingkup monev belanja K/L yang mendukung DAK Fisik yang dilakukan Kanwil DJPb berfokus pada spasial/kewilayahan. Pada masa transisi

(khusus tahun 2023) fokus pada pendekatan monitoring kinerja belanja K/L yang mendukung DAK Fisik dengan *cut off* data di tahun berjalan (30 September 2023) ditambah dengan analisis kinerja pelaksanaan anggaran di masing-masing wilayah. Monev sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan DAK Fisik dilakukan terhadap 5 (lima) bidang yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran yaitu:

- Bidang Kesehatan dan KB (Kementerian Kesehatan dan BKKBN);
- Bidang Pertanian (Kementerian Pertanian);
- Bidang Pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Perpustakaan Nasional);
- Bidang Jalan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Anggaran Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik Tahun 2023

Kode BA	NAMA K/L	PAGU MENDUKUNG DAK FISIK	TOTAL PAGU	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
018	KEMENTAN	4,165.11	14,808.87	28.13%	408	1343
023	KEMENDIKBUDRISTEK	23,385.31	84,527.63	27.67%	123	334
024	KEMENKES	46,724.57	97,443.04	47.95%	68	565
033	KEMENPUPR	70,243.83	182,020.76	38.59%	188	1420
057	PERPUSNAS RI	362.33	714.27	50.73%	36	64
067	KEMENDES PDPT	63.04	3,174.54	1.99%	54	95
068	BKKBN	1,420.77	4,089.87	34.74%	38	612
TOTAL		146,364.96	386,778.98	37.84%	915	4433

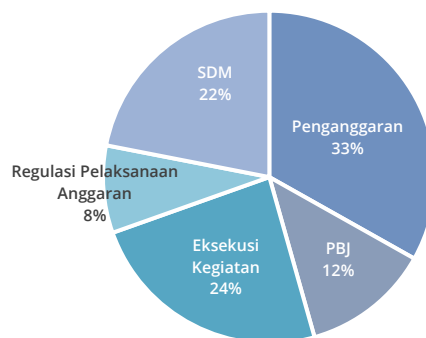
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

- e. Bidang Transportasi Pedesaan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi).

Hasil identifikasi menunjukkan Secara nasional, anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik tahun 2023 teridentifikasi sebesar Rp146.364,96 miliar atau 37,84 persen. Perpunas RI merupakan K/L yang memiliki alokasi porsi terbesar dengan pagu yang mendukung DAK Fisik mencapai Rp362,33 miliar atau 50,73 persen dari seluruh anggaran Perpunas RI tahun 2023. Sedangkan dari sisi nominal, Kementerian PUPR merupakan K/L yang memiliki alokasi paling besar dalam mendukung belanja DAK Fisik yaitu sebesar Rp70.243,83 miliar atau mencapai 38,59 persen dari seluruh anggaran K/L pengampu. Alokasi anggaran tersebut Sebagian besar digunakan untuk mendukung DAK Fisik bidang jalan.

Berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas sinkronisasi sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan DAK Fisik, secara nasional terdapat 5 *cluster* permasalahan atau tantangan yang dihadapi Saker dan telah diidentifikasi sampai dengan triwulan III tahun 2023. Permasalahan atau tantangan tersebut meliputi (1) tantangan penganggaran, (2) tantangan pengadaan barang dan jasa (PBJ), (3) tantangan eksekusi kegiatan, (4) tantangan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan dan (5) tantangan SDM dengan rincian sebagai berikut:

Tantangan atas Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik Tahun 2023



Hasil identifikasi dari Kanwil DJPb tiap provinsi menunjukkan bahwa tantangan penganggaran menempati peringkat pertama atas permasalahan yang terjadi di lapangan. Salah satu permasalahan dalam penganggaran adalah penambahan maupun pengurangan pagu anggaran di pertengahan tahun anggaran sehingga juga berdampak pada deviasi halaman III DIPA. Sedangkan, tantangan dengan persentase terendah/peringkat terakhir adalah tantangan dalam sisi Regulasi Pelaksanaan Anggaran. Salah satu permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu dalam pelaksanaan anggaran pada regulasi K/L. Misalnya, terdapat diklat yang memerlukan juknis dari Eselon I K/L, kebijakan terkait pelaksanaan pekerjaan dukungan penanganan jalan daerah yang baru ditetapkan di bulan Juli/Agustus menyebabkan pelaksanaan pekerjaan baru dapat dieksekusi di Triwulan II dan yang lainnya. Upaya sinkronisasi atas belanja harmonis di daerah oleh satker di level daerah dan pemerintah daerah terus dilakukan. Sinkronisasi belanja K/L dengan DAK Fisik dilakukan dengan memprioritaskan alokasi belanja K/L untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah di lokasi

yang didanai oleh DAK Fisik. Dengan demikian, secara tidak langsung peran Pemerintah Daerah dan Satker level daerah sangat penting untuk melihat di daerah tersebut apakah terdapat tumpang tindih atau duplikasi kegiatan yang dibiayai dari Belanja K/L dengan DAK Fisik.

Analisis Tematik: Sinergi Pusat-Daerah Dalam Upaya Pengurangan Pengangguran Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dinilai melalui berbagai indikator. Salah satu indikator utama adalah pertumbuhan ekonomi serta tingkat pengangguran. Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada interaksi dan partisipasi sumber daya manusia (SDM), yang berperan sebagai input pembangunan, tenaga kerja, dan konsumen hasil pembangunan. Namun, meskipun jumlah penduduk terus meningkat dan tenaga kerja tersedia melimpah, hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Akibatnya, rendahnya penyerapan tenaga kerja tersebut memicu tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase angkatan kerja yang belum bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana tenaga kerja yang tersedia tidak terserap di pasar kerja suatu negara atau wilayah. Menurut rilis Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), TPT



Sumber: BPS, diolah

Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen dibandingkan dengan Agustus 2022. Pada tahun 2023, tiga provinsi dengan TPT tertinggi adalah Banten 7,52 persen, Jawa Barat 7,44 persen dan Kepulauan Riau 6,80 persen. Sedangkan provinsi dengan TPT terendah adalah Sulawesi Barat 2,27 persen, Papua 2,67 persen dan Bali 2,69 persen.

Selaras dengan kondisi di atas, pengurangan tingkat pengangguran juga merupakan salah satu sasaran pembangunan pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pemerintah menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,6–4,3 persen pada tahun 2024.

Pengangguran adalah salah satu masalah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah agar tidak menimbulkan dampak ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial, di masa mendatang. Oleh karena itu, intervensi pemerintah di segala sektor sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya diharapkan dapat menekan angka pengangguran.



I. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN



Sepanjang tahun 2023, ekonomi Indonesia menunjukkan performa yang resilient dengan menjaga momentum pertumbuhan meskipun dihadapkan pada sejumlah tekanan dan ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 mencapai 5,05 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan tersebut masih berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi global dan telah mendekati asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN sebesar 5,30 persen.

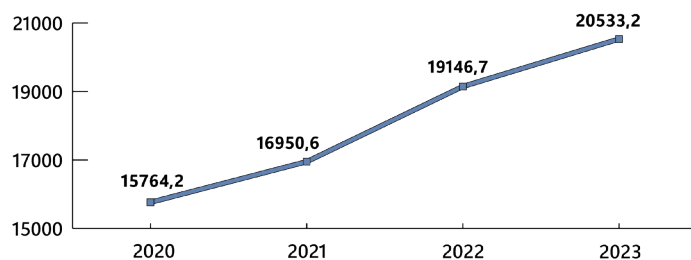
I. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

I.1. INDIKATOR MAKRO EKONOMI

I.1.A. Pertumbuhan Ekonomi

Awal tahun 2023, COVID-19 secara resmi telah dianggap lagi bukan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meskipun begitu selain dampak yang masih terasa, ternyata perekonomian global telah dihadapkan dengan beragam tantangan baru seperti Konflik Rusia-Ukraina, ketegangan ekonomi Amerika Serikat-Tiongkok, maupun perang Palestina. Kondisi tersebut mempengaruhi kondisi perekonomian global, menyebabkan tantangan yang berat, mewarnai ketidakpastian dan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi juga diperburuk dengan menurunnya perkembangan harga komoditas unggulan perdagangan Indonesia pada tahun 2023. Di tengah risiko volatilitas kondisi global, APBN Tahun 2023 berperan penting sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejolak perekonomian global. Kerja keras APBN 2023 diwujudkan melalui akselerasi belanja negara terutama untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga. Selain mampu menjalankan fungsinya secara efektif, kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023 juga menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan ditopang pendapatan negara yang meningkat signifikan sehingga realisasi defisit berada pada angka 1,61 persen yang merupakan defisit terendah dalam 12 tahun terakhir. Selanjutnya, keseimbangan primer berhasil kembali mencapai nilai positif setelah surplus terakhir di tahun 2011.

Grafik 1. 1. Produk Domestik Regional Bruto 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Sepanjang tahun 2023, perdagangan global tumbuh negatif yang utamanya disebabkan oleh penurunan nilai perdagangan barang. Hal tersebut juga berdampak pada perkembangan harga komoditas-komoditas unggulan perdagangan Indonesia yang ikut turun sepanjang periode 2022 sampai dengan 2023, beberapa penurunan tersebut terjadi pada komoditas seperti minyak kelapa sawit mengalami penurunan sebesar -13,49 persen (yoy), batubara sebesar -62,60 persen (YoY), nikel -43,13 persen (YoY), gas alam -54,09 persen (YoY), serta minyak mentah -3,01 persen (YoY), hanya terdapat salahsatu komoditas unggulan yang sedikit mengalami kenaikan yaitu bijih besi sebesar 22,54 persen (YoY).

Tabel 1. 1. Tingkat Pertumbuhan Ekomi Indonesia dan Global

Negara/Kelompok Negara	2019	2020	2021	2022	2023
Dunia	2,8	-2,7	6,5	3,5	3,2
Negara Maju	1,8	-3,9	5,7	2,6	1,6
Amerika Serikat	2,2	-2,2	5,8	1,9	2,5
Eropa	1,6	-6,1	5,9	3,4	0,4
Jepang	-0,4	-4,1	2,6	1	1,9
Negara Berkembang	3,6	-1,8	7	4,1	4,3
ASEAN-5	4,3	-4,4	4,1	5,5	4,1
Tiongkok	6	2,2	8,4	3	5,2
India	3,9	-5,8	9,7	7	7,8
Indonesia	5	-2,1	3,7	5,3	5

Sumber: World Economics Outlook IMF, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Meskipun kondisi ekonomi global yang dipenuhi ketidakpastian dan risiko, namun pada tahun 2023 kinerja perekonomian Indonesia terbukti menunjukkan performa yang resilient dengan berhasil menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp20.892,4 triliun yang secara historis berhasil menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen dari periode sebelumnya tahun 2022 yaitu sebesar Rp19.146,7 triliun. Pertumbuhan tersebut masih berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi global dan telah mendekati asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN sebesar 5,04 persen (yoy) dan 5,05 persen (c-to-c).

I.1.A.1. Pertumbuhan Ekonomi Spasial

Pertumbuhan positif juga ditunjukkan secara spasial, pertumbuhan ekonomi masih didominasi regional Jawa yang memberikan kontribusi sebesar 57,05 persen, diikuti regional Sumatera 22,01 persen, regional Kalimantan 8,49 persen, regional Sulawesi 7,10 persen, regional Bali-Nusa Tenggara 2,77 persen, dan regional Maluku-Papua sebesar 2,58 persen. Namun, regional Maluku-Papua memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi dibandingkan regional lain, sebesar 6,94 persen. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan beragam program prioritas di bidang infrastruktur dan kesejahteraan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi paling rendah terdapat pada regional Bali-Nusra dengan tingkat pertumbuhan 4 persen.

Porsi perekonomian yang masih tersentralisasi pada pulau Jawa memberikan dampak sangat signifikan pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan signifikannya pengaruh porsi perekonomian pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi pulau Jawa yang berhasil mengalami peningkatan menjadi 4,86 persen (YoY) pada tahun 2023 dari 4,78 persen (YoY) pada tahun 2022.

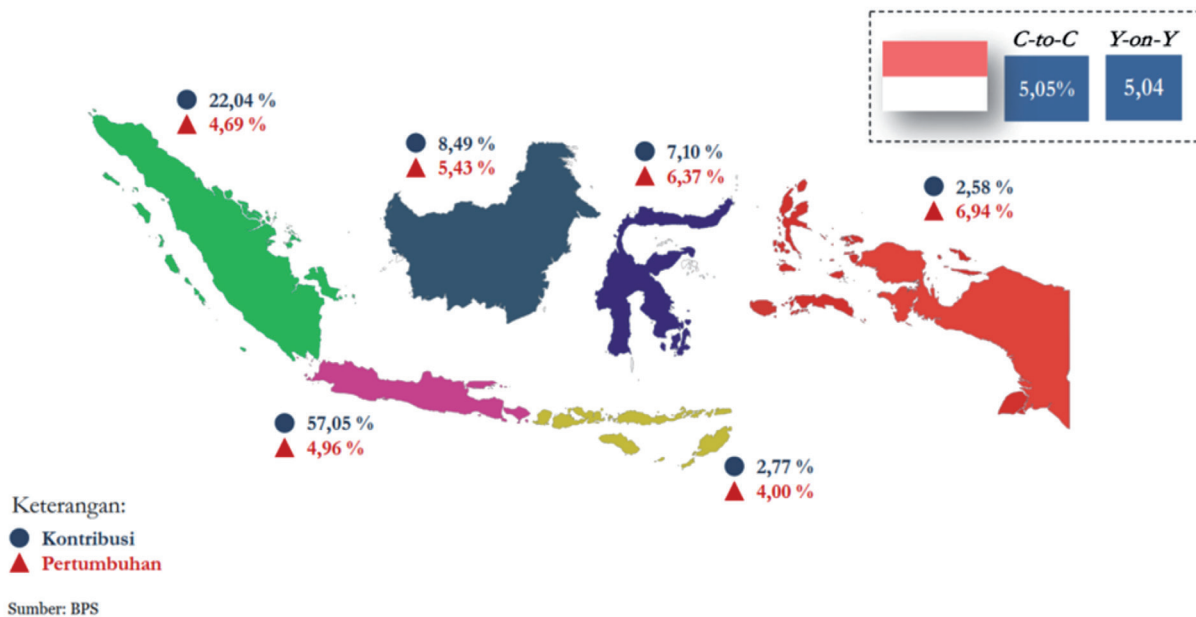
Tabel 1. 2. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Spasial

	Nominal PDRB 2023	Proporsi PDRB 2023	Pertumbuhan Ekonomi
Sumatera	4.520.133,69	22,01%	4,69%
Jawa	11.713.356,13	57,05%	4,96%
Kalimantan	1.743.461,32	8,49%	5,43%
Sulawesi	1.457.788,76	7,10%	6,37%
Bali-Nusa Tenggara	569.273,77	2,77%	4,00%
Maluku-Papua	529.213,64	2,58%	6,94%
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (C-to-C)			5,05%
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (Y-on-Y)			5,04%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Secara spasial sumber-sumber pertumbuhan ekonomi masing-masing pulau cukup

Gambar 1. 1. Sebaran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Regional Tahun 2023



bervariatif, namun apabila secara keseluruhan maka sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi pada regional yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

I.1.A.2. Perkembangan PDB Berdasarkan Pengeluaran

Pada sisi pengeluaran, Konsumsi RT menjadi penyumbang terbesar PDB nasional mengalami pertumbuhan sebesar 4,82 persen. Konsumsi RT yang terus tumbuh seiring terkendalnya inflasi dan daya beli masyarakat dengan kelompok konsumsi yang tumbuh paling tinggi adalah Transportasi dan

Komunikasi serta restoran dan hotel.

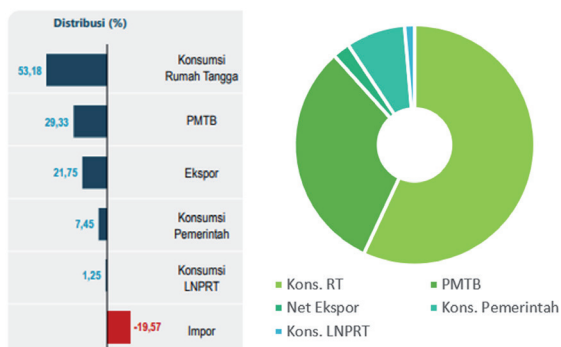
Pada tahun 2023, seluruh komponen pengeluaran menunjukkan tren perkembangan pertumbuhan yang positif. Konsumsi Rumah Tangga terus tumbuh seiring terkendalnya inflasi dan daya beli masyarakat. Kelompok konsumsi yang tumbuh tinggi antara lain Restoran dan Hotel, seiring pasca pemulihan

Tabel 1. 3. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran 2020 – 2023

	Perkembangan Pertumbuhan Komponen Pengeluaran				
	2020	2021	2022	2023	Tren
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,63	2,01	4,94	4,82	
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,21	1,62	5,66	9,83	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,12	4,25	-4,47	2,95	
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-4,96	3,8	3,87	4,4	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Grafik 1. 2. Distribusi PDB Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

pandemi COVID-19 maraknya kegiatan wisata selama libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Transportasi dan Komunikasi, mendukung

mobilitas masyarakat untuk berwisata. Selain itu, pembelian sepeda motor juga mengalami peningkatan. PMTB tumbuh positif, yang antara lain ditopang oleh pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal di Indonesia. Pembangunan perumahan seperti rusun Lanud Halim Perdana Kusuma, rusun ASN di IKN, Program Sejuta Rumah, dll. Pembangunan jalan tol: Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Jalan Tol Serpong Cinere, Jalan Tol Cinere-Jagorawi, dan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung. Pembangunan Bendungan diantaranya Bendungan Margatiga di Lampung, Bendungan Cipanas di Jawa Barat, Bendungan Karian di Banten. Ekspor tumbuh positif terutama didorong oleh pertumbuhan Ekspor barang migas, seperti peningkatan volume ekspor migas; dan Ekspor jasa seiring peningkatan jumlah wisman dan devisa masuk dari luar negeri. Meskipun Ekspor barang nonmigas mengalami kontraksi, seperti mesin/ peralatan listrik; bijih, kerak, dan abu logam; serta alas kaki.

I.1.A.3. Perkembangan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha

Dari sisi Lapangan Usaha, sektor (C) Industri Pengolahan dan (G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, menjadi penyumbang PDB terbesar pada tahun 2023. Porsi PDB pada kedua sektor tersebut mencapai sepertiga dari PDB Nasional.

Seluruh sektor menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Sektor Transportasi dan Pergudangan menunjukkan laju pertumbuhan paling tinggi sebesar 13,96 persen, sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki laju pertumbuhan paling rendah sebesar 1,3 persen. Tingginya laju pertumbuhan Sektor Transportasi dan Pergudangan sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat serta persiapan Pemilu. Seluruh moda transportasi mengalami peningkatan seperti angkutan rel 20,39 persen (YoY) dan 34,07 persen (ctoc), angkutan laut sebesar 10,62 persen (YoY) dan 11,69 persen (ctoc), dan angkutan udara sebesar 16,446

persen (YoY) dan 31,31 persen (ctoc). Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara akibat pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19 yang tumbuh hingga 27,72 persen (YoY) dan 98,30 persen (ctoc). Persiapan Pemilu yang meningkat dan masif bersumber dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara pemilu, seperti Rakernas, Rakerda, maupun konsolidasi nasional serta rangkaian persiapan Pemilu.

Tabel 1. 4. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2020 – 2023

PDB Lapangan Usaha	Distribusi PDB ADHB 2023	Laju Pertumbuhan			
		2021	2022	2023	Tren
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,53	1,87	2,25	1,3	
2. Pertambangan dan Penggalian	10,52	4	4,38	6,12	
3. Industri Pengolahan	18,67	3,39	4,89	4,64	
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1,04	5,55	6,61	4,91	
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	4,97	3,23	4,9	
6. Konstruksi	9,92	2,81	2,01	4,91	
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,94	4,63	5,53	4,85	
8. Transportasi dan Pergudangan	5,89	3,24	19,87	13,96	
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,52	3,88	11,94	10,01	
10. Informasi dan Komunikasi	4,23	6,82	7,73	7,59	
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,16	1,56	1,93	4,77	
12. Real Estate	2,42	2,78	1,72	1,43	
13. Jasa Perusahaan	1,83	0,73	8,77	8,24	
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,95	-0,33	2,51	1,5	
15. Jasa Pendidikan	2,79	0,11	0,57	1,78	
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,21	10,45	2,75	4,66	
17. Jasa Lainnya	1,94	2,12	9,47	10,52	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Grafik 1. 3. Laju Inflasi Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

I.1.B. Perkembangan Tingkat Inflasi

I.1.A.4. Perkembangan Inflasi Nasional

Setelah mengalami peningkatan inflasi pada tahun 2022 hingga tingkat 5,51 persen (*yoy*), pada tahun 2023 tingkat inflasi nasional berada pada angka 2,61 persen (*yoy*), hal ini berarti terjadi penurunan tingkat inflasi 2,9 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya. Capaian tingkat inflasi ini mengalami penurunan beriringan dengan kondisi perekonomian global yang dihadapkan tantangan berat, yang disebabkan oleh tingginya risiko dan ketidakpastian global yang dipicu oleh tingginya tingkat inflasi negara-negara lain seperti Tiongkok, volatilitas harga komoditas, perang Rusia-Ukraina, serta krisis geopolitik timur tengah. Selain itu, *Purchasing Manager Index (PMI)* manufaktur global, khususnya Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, juga masih berada dalam zona kontraksi. Di tengah risiko volatilitas kondisi global, APBN Tahun 2023 berperan penting sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejolak perekonomian global.

Laju inflasi dalam beberapa tahun memiliki pola yang cenderung sama yaitu terjadi peningkatan pada periode kuartal ke-2 serta kuartal ke-4. Laju inflasi yang meningkat pada periode kuartal ke-2 dan kuartal ke-4 bertepatan peningkatan konsumsi masyarakat pada momentum hari raya keagamaan dan

libur sekolah. Namun pada tahun 2023 laju inflasi memiliki pola yang lebih stabil, tidak terdapat kenaikan yang signifikan maupun penurunan yang drastis apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi bulanan Desember 2023 memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu.

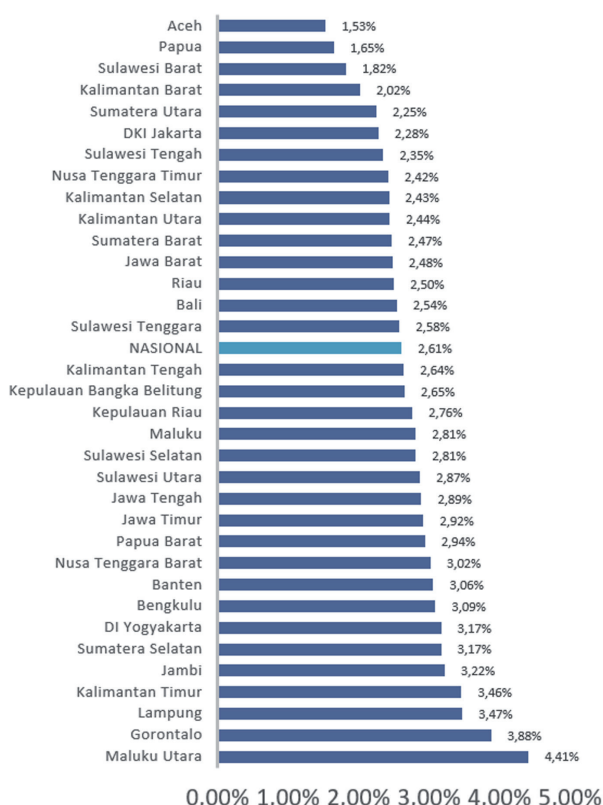
Secara nasional-tahunan, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memiliki tingkat inflasi tertinggi yaitu pada angka 6,18 persen (*yoy*) dengan andil inflasi 1,60 persen. Pada posisi selanjutnya terdapat kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 3,55 persen (*yoy*) dengan andil inflasi 0,22 persen, serta pada tingkat ketiga terdapat kelompok pengeluaran Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan tingkat inflasi 2,07 persen (*yoy*) dan andil inflasi sebesar 0,18 persen.

I.1.A.5. Perkembangan Inflasi Regional

Tingkat inflasi seluruh provinsi di Indonesia memiliki variasi yang berbeda. Maluku Utara merupakan provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional yaitu 4,41 persen (*yoy*). Capaian ini juga lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berada pada 3,37 persen (*yoy*).

Inflasi provinsi Maluku Utara yang tinggi disebabkan oleh sumbangan inflasi Kota

Grafik 1. 4. Tingkat Inflasi Regional Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Ternate yang memiliki tingkat inflasi tertinggi dibandingkan kota-kota lain dengan perbandingan *m-to-m*. Inflasi Kota Ternate berada pada angka 1,64 persen (*m-to-m*). Sedangkan deflasi terdalam adalah kota Meulaboh dengan angka 0,67 persen (*m-to-m*).

Sedangkan dengan perbandingan (*yoy*), kota dengan tingkat inflasi tertinggi pada tahun 2023 adalah Sumenep tercatat pada angka 5,08 persen (*yoy*) dan inflasi terendah terjadi pada kota Bandung tercatat pada angka 0,63 persen (*yoy*). Adapun inflasi tinggi yang terjadi pada Sumenep disebabkan oleh andil sumbangan inflasi dari komoditas beras (1,38 persen), emas perhiasan (0,51 persen), dan cabai merah (0,38 persen).

I.2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

I.2.A. Indeks Pembangunan Manusia

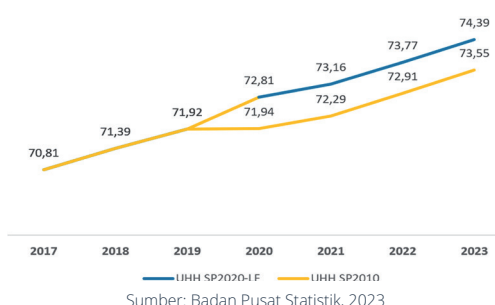
I.2.A.1. Perkembangan Indeks

Pembangunan Manusia

Secara agregat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia untuk tahun 2023 menunjukkan konsistensi untuk berkembang secara positif. Hal tersebut menggambarkan kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat tantangan ketimpangan IPM antar wilayah masih perlu diatasi. Keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang disertai upaya pemulihan ekonomi menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

Sejak tahun 2017, IPM Indonesia meningkat secara konsisten walaupun tingkat pertumbuhan cukup berfluktuasi dari tahun ke tahun. Sebagaimana terdapat pada Grafik 1.5, berdasarkan hasil perhitungan Umur Harapan Hidup berdasarkan SP2010, pertumbuhan tingkat pembangunan manusia sejak 2017 sampai dengan 2023 rata-rata sebesar 0,45 poin, walaupun, terdapat peningkatan yang sangat kecil di 2020 (0,02 poin) sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Sedangkan, berdasarkan perhitungan SP2020-LF, pada tahun 2023, tingkat pembangunan manusia di Indonesia mencapai 74,39, atau meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun 2022 (73,77). IPM 2023 sedikit tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di tahun 2021 yang hanya sebesar 0,35 poin.

Grafik 1. 5. Perkembangan IPM Tahun 2017-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 1. 5. Perkembangan IPM Tahun 2017-2023 Berdasarkan Komponen Pembentuknya

Komponen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Trend
UHH	71,06	71,20	71,34	73,37	73,46	73,70	73,93	
HLS	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15	
RLS	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77	
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp)	10.664	11.059	11.200	11.013	11.156	11.479	11.899	

Sumber: Badan Pusat Statistik

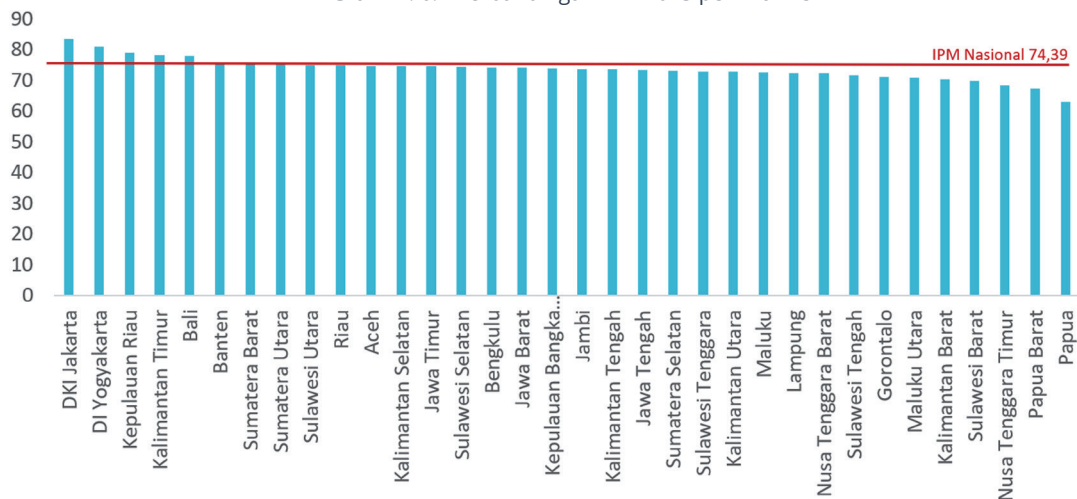
Seluruh dimensi yang menjadi pembentuk IPM meningkat, hal tersebut tercermin utamanya pada standar hidup layak dan pengetahuan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang tergambar pada indeks Umur Harapan Hidup (UHH), bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,93 tahun, meningkat 0,56 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2020. Sedangkan pada dimensi pengetahuan, tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat dari 13,10 tahun menjadi 13,15 tahun. Adapun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,69 tahun pada 2022 menjadi 8,77 tahun pada 2023. Dimensi standar hidup layak diukur berdasarkan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita sebesar Rp11,8 juta, atau meningkat 420 ribu rupiah (3,66 persen) dibandingkan tahun 2022. Dalam kurun waktu tujuh tahun, pengeluaran riil meningkat sebesar Rp1,23 juta. Peningkatan tersebut

tentunya tidak lepas dari peningkatan kualitas lingkungan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur yang semakin memadai.

Tren perkembangan IPM per wilayah menggambarkan bahwa tingkat IPM provinsi secara umum tinggi dan meningkat secara konsisten. Berdasarkan pembagian kategori status BPS, terdapat 28 provinsi yang nilainya di atas 70 ($70 \leq \text{IPM} < 80$) atau masuk kategori “tinggi”. Bahkan, Jakarta dan DI Yogyakarta termasuk ke dalam kategori sangat tinggi karena nilainya di atas 80 ($\text{IPM} \geq 80$). Sementara, terdapat empat provinsi yang masih memiliki tantangan besar dalam kaitannya dengan pembangunan manusia karena masih berada di kategori “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) yaitu provinsi: Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua.

Sejalan dengan perkembangan IPM di tahun 2022, peningkatan indeks IPM di tahun 2023 juga terjadi di seluruh provinsi. Dari sisi peringkat, DKI Jakarta terus menjadi provinsi yang memiliki IPM tertinggi (83,55) sedangkan

Grafik 1. 6. Perbandingan IPM 2023 per Provinsi



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

urutan IPM terendah masih ditempati oleh Papua (63,01). Beberapa provinsi juga telah berhasil menaikkan statusnya. Sebagai contoh, pembangunan manusia di Kalimantan Barat telah mengalami peningkatan dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM 70,47. Dalam kurun waktu 2020–2023, peningkatan status dari “sedang” ke “tinggi” juga dialami Gorontalo dan Maluku Utara. Sejak tahun 2018, tidak ada lagi provinsi yang memiliki IPM “rendah” setelah Papua berhasil meningkatkan kualitas pembangunan manusia dari “rendah” menjadi “sedang”.

I.2.A.2. Perkembangan Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Pada level nasional, sejak Maret 2017 sampai dengan September 2019, angka *Gini Ratio* terus mengalami penurunan dari 0,393 menjadi 0,38. Kondisi tersebut menggambarkan terjadinya perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Indonesia. Namun demikian, Pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya *trend* positif tersebut. Angka *Gini Ratio* mengalami kenaikan pada Maret 2020 (0,381) dan September 2020 (0,385) mengalami kenaikan. Selanjutnya, angka *Gini Ratio* bergerak fluktuasi cenderung meningkat hingga mencapai 0,388 pada Maret 2023.

Secara umum, angka *Gini Ratio* di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Pada bulan Maret 2023, *Gini Ratio* di perkotaan sebesar 0,409. Secara tren, terjadi kenaikan kenaikan sebesar 0,007 poin dibanding September 2022. Angka ini merupakan

angka *Gini Ratio* tertinggi sejak Maret 2017. Kondisi ini berbeda dengan angka *Gini Ratio* di wilayah pedesaan dimana pada September 2022 tercatat sebesar 0,313. Secara agregat, *Gini Ratio* di pedesaan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan Maret 2017 yang sebesar. Sepanjang periode tersebut, pergerakan *trend* mengalami fluktuasi yang rendah, bahkan ketika terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Tabel 1.6. Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia (persen), Maret 2022–Maret 2023

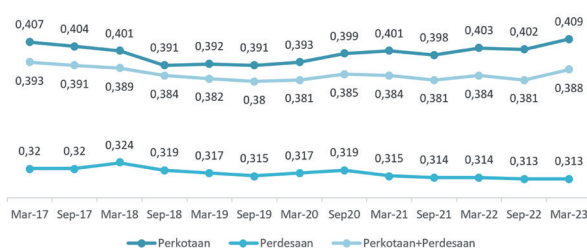
Tahun	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan+Pedesaan		
	Penduduk 40% Terendah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Tertinggi	Penduduk 40% Terendah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Tertinggi	Penduduk 40% Terendah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Tertinggi
Maret 2022	17,07	35	47,93	21,01	38,91	40,08	18,06	35,74	46,2
Sept 2022	17,19	34,99	47,82	21,06	38,97	39,97	18,24	35,78	45,98
Maret 2023	16,99	34,42	48,59	21,18	38,61	40,21	18,04	35,25	46,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Bank Dunia untuk mengukur ketimpangan. Instrumen ini dapat digunakan sebagai pembanding *Gini Ratio*. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada periode Maret 2022 s.d. Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah berada pada angka 18 persen walaupun terdapat sedikit kenaikan di bulan September 2022 (18,24). Kondisi tersebut menggambarkan ketimpangan yang masuk dalam kategori rendah. Ditinjau dari pembagian wilayah perkotaan dan pedesaan, pada Maret 2023 persentase

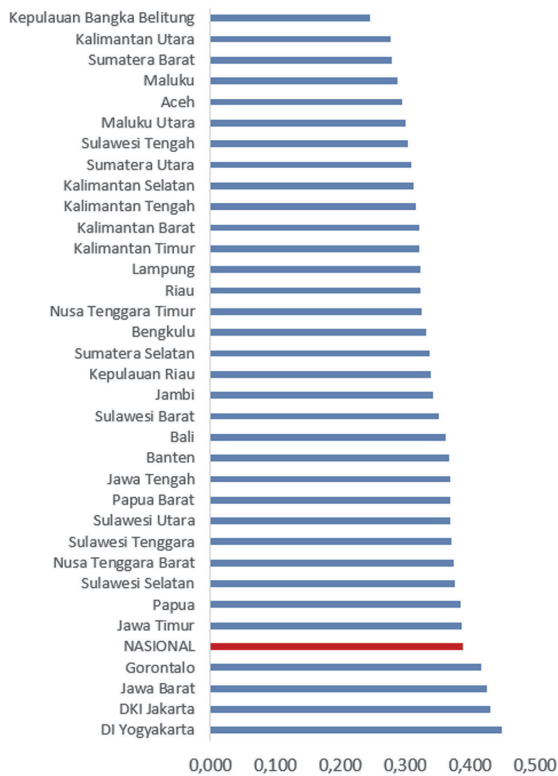
Grafik 1. 7. Perkembangan Rasio Gini di Indonesia Tahun 2017-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perkotaan adalah sebesar 16,99 persen yang dapat diartikan ketimpangan yang terjadi di perkotaan masuk kategori tinggi. Kondisi tersebut terbalik dengan persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di pedesaan yang sebesar 21,18. Sejalan dengan pengukuran menggunakan *Gini Ratio*, dapat dikatakan bahwa ketimpangan yang terjadi di perkotaan tergolong pada kategori ketimpangan sedang sementara ketimpangan di perdesaan tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

Grafik 1. 8. Perbandingan Rasio Gini Maret 2023 Berdasarkan Provinsi



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Secara spasial, Angka *Gini Ratio* tertinggi dan terendah pada Maret 2023 sama dengan kondisi pada September 2022 dimana *Gini Ratio* DI Yogyakarta tertinggi (0,459) sedangkan provinsi dengan *Gini Ratio* terendah tercatat di Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,255. Terdapat empat provinsi dengan angka *Gini*

Ratio lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu DI Yogyakarta (0,459), DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,425), dan Gorontalo (0,417).

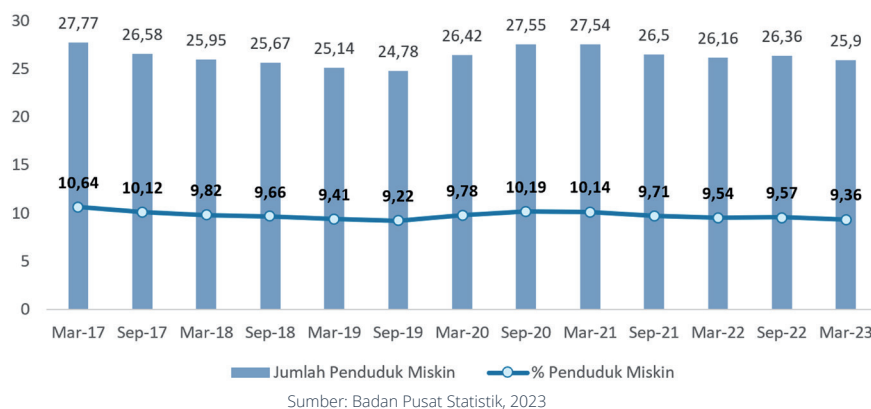
I.2.A.3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Dalam kurun waktu tahun 2017-2023, tingkat dan persentase penduduk miskin di Indonesia terus menurun walaupun dalam prosesnya terdapat fluktuasi utama saat terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 juta orang. Jika dibandingkan dengan September 2022, terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 460 ribu orang (0,2 persen). Sedangkan jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen, menurun 0,18 persen terhadap Maret 2022. Jumlah dan persentase penduduk miskin di perkotaan jauh lebih besar dibandingkan di pedesaan. Pada periode September 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,24 juta orang, sedangkan di pedesaan turun sebesar 0,22 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,53 persen menjadi 7,29 persen. Sementara itu, di pedesaan turun dari 12,36 persen menjadi 12,22 persen.

Dalam kurun waktu enam tahun (2017-2023), terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1,87 juta orang. Fluktuasi yang terjadi September 2022 dikarenakan adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Tingkat kemiskinan di wilayah regional sebanding dengan jumlah penduduknya. Pada Maret 2023, distribusi kemiskinan terbesar

Grafik 1. 9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017-2023 (Juta/%)



Tabel 1. 7. Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Regional Tahun 2023

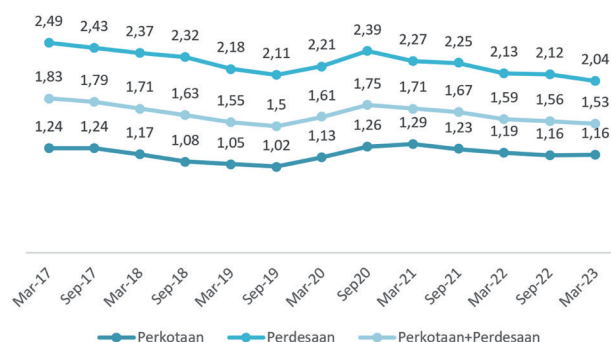
No.	Regional	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Distribusi Kemiskinan
1	Regional Sumatera	9,27%	5,67	21,89%
2	Regional Jawa	8,79%	13,62	52,59%
3	Regional Kalimantan	5,67%	2,09	3,72%
4	Regional Sulawesi	10,08%	0,97	7,89%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara	13,29%	2,04	8,05%
6	Regional Maluku-Papua	19,68%	1,51	5,85%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

berada di pulau Jawa dengan persentase sebesar 52,59 persen. Namun demikian, persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 19,68 persen, sedikit menurun dibandingkan September 2022 (20,10 persen). Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,67 persen. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (13,62 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (2,09 juta orang). Sementara, jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Sulawesi yaitu 0,97 juta orang.

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada Maret 2023 menunjukkan adanya perbaikan pasca terjadinya pandemi Covid-19. Pada periode September 2021—Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 1,53, turun dibandingkan September 2022 yang sebesar

Grafik 1. 10. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2017-2023

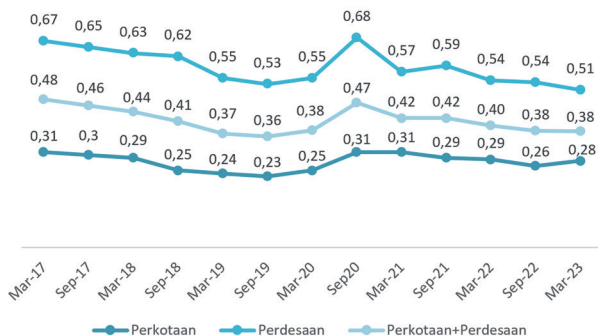


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

1,56. Pada Maret 2023, indeks kedalaman kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 1,53. Angka ini menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dibandingkan dengan September 2022 yang mencapai 1,56, terdapat sedikit penurunan. Di wilayah perkotaan, indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 1,163, sementara di pedesaan lebih tinggi, mencapai 2,035. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di daerah pedesaan cenderung lebih dalam dibandingkan di perkotaan.

Indeks Keparahannya Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 0,38, kurang lebih sama dengan kondisi pada September 2022. Di wilayah perkotaan, indeks keparahan kemiskinan tercatat sebesar 0,281, sementara di pedesaan lebih tinggi, yaitu 0,511. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini menunjukkan bahwa, meskipun terjadi perbaikan kecil, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin masih cukup tinggi.

Grifik 1. 11. Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)
Tahun 2017-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Kearifan Kemiskinan pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 1,16, sedangkan di pedesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 2,035. Demikian pula untuk nilai Indeks Kearifan Kemiskinan di perkotaan sebesar 0,28, sedangkan nilai di pedesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,511. Kondisi ini menegaskan bahwa walaupun secara jumlah, orang miskin di perkotaan lebih banyak dibandingkan di pedesaan, namun demikian, kemiskinan di pedesaan tidak hanya lebih dalam tetapi juga lebih parah dibandingkan di perkotaan.

Sebagaimana dijelaskan pada Berita Resmi Statistik tentang Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, terdapat beberapa faktor yang

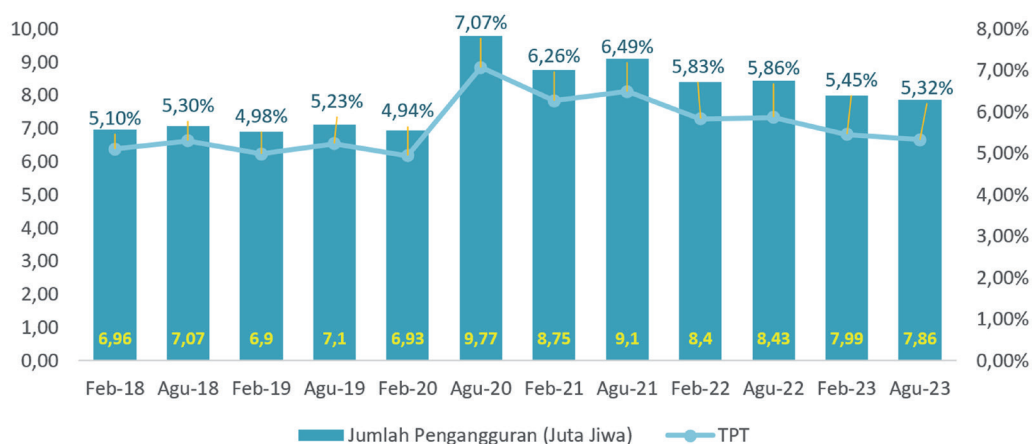
mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode September 2022–Maret 2023, antara lain: (i) terdapat penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), (ii) peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), (iii) laju inflasi yang menunjukkan penurunan, (iv) peningkatan konsumsi rumah tangga, serta (v) adanya bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.

1.2.A.4. Perkembangan Tingkat Pengangguran

Penduduk usia kerja—semua orang yang berumur 15 tahun ke atas, cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 212,59 juta orang, naik sebanyak 3,17 juta orang dibandingkan Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 147,71 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 64,88 juta orang. Sedangkan berdasarkan komposisi angkatan kerja, pada Agustus 2023 terdapat 139,85 juta orang penduduk yang bekerja dan 7,86 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 3,99 juta orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 4,55 juta orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 0,56 juta orang.

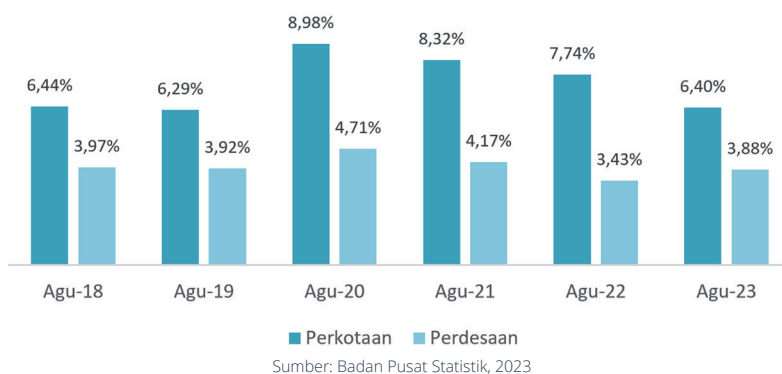
Perkembangan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejak tahun 2010 terus mengalami penurunan

Grifik 1. 12. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023

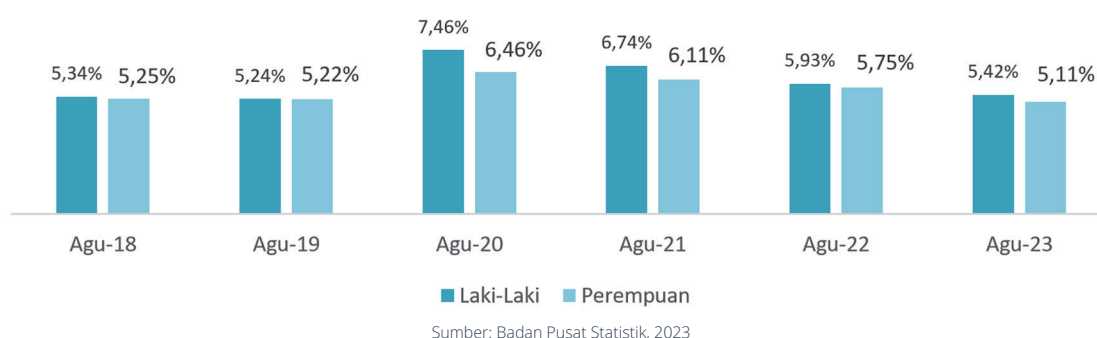


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Grafik 1. 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 Menurut Tempat Tinggal



Grafik 1. 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 Menurut Jenis Kelamin



namun belum dapat mencapai tingkat seperti pada kondisi sebelum Pandemi Covid-19. Jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,54 juta jiwa, yaitu dari 8,4 juta jiwa pada Agustus 2022 menjadi 7,86 juta jiwa pada Agustus 2023. Jumlah pengangguran pada Agustus 2023 masih sedikit lebih besar dari kondisi sebelum pandemi, dimana pada Agustus 2019 jumlah pengangguran sebesar 7,10 juta jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,54 persen poin, yaitu dari 5,86 persen pada Agustus 2021 menjadi 5,32 persen pada Agustus 2023. Walaupun secara konsisten semakin mendekati, namun demikian, penurunan tersebut juga belum berada pada level sebelum pandemi dimana pada Agustus 2020 tercatat sebesar 5,23 persen. Dampak berkelanjutan dari Pandemi Covid-19 yang mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi serta adanya konflik geopolitik yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi masih menjadi faktor yang menghambat terserapnya angkatan kerja.

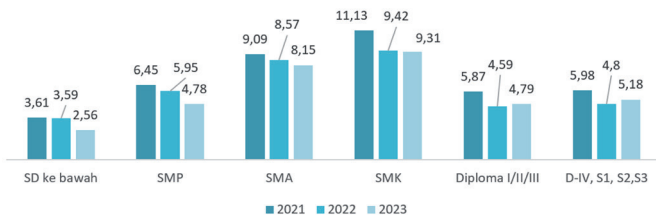
Ditinjau dari daerah tempat tinggal, TPT di wilayah perkotaan (6,40 persen) jauh lebih

tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (3,88 persen). Dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,34 persen poin. Sebaliknya, TPT perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,45 persen poin.

Berdasarkan jenis kelamin, perbandingan antara komposisi laki-laki dan perempuan cukup berimbang, kecuali pada saat pandemi tahun 2020 dimana TPT laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan. Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 5,42 persen, sedikit lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,15 persen. Trend TPT laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama dengan TPT nasional yaitu terjadinya penurunan dibandingkan Agustus 2022, masing-masing sebesar 0,51 persen poin dan 0,60 persen poin.

Ditinjau dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2023 memiliki pola yang mirip dibandingkan dengan Agustus 2021 dan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT

Grafik 1. 15. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022-2023 Menurut Tingkat Pendidikan (%)

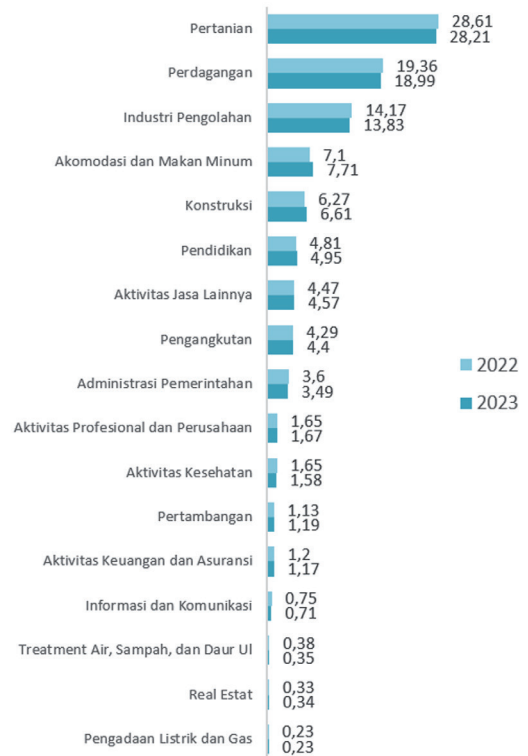


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,31 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,56 persen. Penurunan TPT terjadi pada hampir pada semua tingkat pendidikan, dengan penurunan terbesar pada yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, yaitu sebesar 1,17 persen poin. Sementara, terdapat peningkatan TPT pada kelompok lulusan Diploma I/II/III sebesar 0,20 persen dan kelompok lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 0,38 persen poin.

Terdapat tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,21 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,99 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 13,83 persen. Jika dibandingkan dengan komposisi lapangan usaha di tahun 2022, pola yang terbentuk dalam menyerap tenaga kerja ini masih relatif sama. Dibandingkan Agustus 2022, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase jumlah tenaga kerja yaitu Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (0,61 persen); Konstruksi (0,34 persen); dan Pendidikan (0,14 persen). Beberapa lapangan usaha mengalami penurunan dimana terdapat tiga kelompok usaha yang mengalami penurunan persentase terbesar yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (-0,4 persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda

Grafik 1. 16. Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2022-2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Motor (-0,37 persen); serta Industri Pengolahan (-0,34 persen). Walaupun demikian, dari sisi jumlah pekerjaanya, ketiga kelompok usaha tersebut tetap mengalami peningkatan masing-masing 0,75 juta orang, 0,36 juta orang, dan 0,18 juta orang.

Secara spasial, dari sisi persentase, seluruh wilayah regional mengalami penurunan TPT sejak Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2023. Namun demikian, dari sisi jumlah, regional Bali dan Nusa Tenggara mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2020 sebesar 245.822 orang menjadi 319.430 orang pada Tahun 2023. Regional Jawa menjadi daerah dengan TPT tertinggi di Indonesia dimana pada Agustus 2023 mencapai sebesar 5,97 persen diikuti oleh regional Sumatera yang mencapai 5,04 persen. Sementara, TPT di regional Bali dan Nusa Tenggara cukup rendah yaitu 2,88 persen.

Tabel 1. 8. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Regional Tahun 2023

No.	Wilayah	Jumlah Pengangguran				Tingkat Pengangguran Terbuka			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Regional Sumatera	1.810.505	1.678.731	1.636.704	1.570.467	6,14%	5,63%	5,37%	5,04%
2	Regional Jawa	6.384.250	5.948.406	5.461.052	5.019.046	8,09%	7,45%	6,66%	5,97%
3	Regional Kalimantan	594.684	548.273	423.444	418.030	4,92%	4,46%	4,97%	4,73%
4	Regional Sulawesi	529.848	491.561	417.296	412.848	5,45%	4,97%	4,09%	3,96%
5	Regional Bali-Nusra	245.822	252.378	319.430	249.479	5,65%	5,71%	3,73%	2,88%
6	Regional Maluku-Papua	202.645	182.703	168.005	185.205	5,50%	4,66%	4,22%	3,95%
NASIONAL		9.767.754	9.102.052	8.425.931	7.855.075	7,07%	6,49%	5,86%	5,32%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan wilayah provinsi, tiga provinsi yang memiliki jumlah pengangguran terbesar yaitu: Jawa Barat sebanyak 1,89 juta orang, Jawa Timur sebanyak 1,1 juta orang, dan Jawa Tengah sebanyak 1,08 juta orang. Dibandingkan dengan Agustus 2022, sebagian besar provinsi mengalami penurunan jumlah pengangguran, kecuali untuk beberapa provinsi, yaitu: Papua yang bertambah sebanyak 10.854 orang, Kalimantan Barat bertambah 9.894 orang, Maluku Utara bertambah 4.400 orang, Papua Barat bertambah 4.254 orang, Gorontalo bertambah 3.620 orang, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 2.413 orang.

I.2.A.5. Perkembangan Nilai Tukar Petani

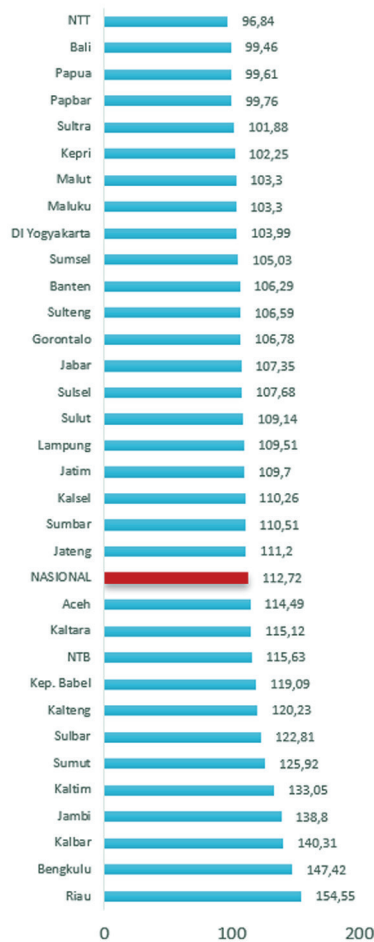
Secara nasional, Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2023 mencapai 112,72 dengan tren yang positif setiap tahunnya. Sejak tahun 2020-2022, NTP nasional terus meningkat sebesar 101,69 pada tahun 2020, 104,66 pada tahun 2021 dan 107,39 pada tahun 2022. NTP dihitung dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Pada tahun 2023, Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 131,95 dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 117,06. Sedangkan pada tahun 2022, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 112,49 dan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 120,80. Kenaikan NTP pada tahun 2023 ditandai dengan adanya kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang lebih cepat daripada kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Hal ini menunjukkan bahwa harga produk pertanian yang dijual oleh

petani mengalami kenaikan signifikan, sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan petani dari hasil penjualan produknya. Dalam artian, meskipun harga barang dan jasa yang dibutuhkan petani untuk produksi dan kebutuhan hidup sehari-hari meningkat, kenaikan tersebut tidak secepat kenaikan harga produk yang petani jual. Dengan demikian, kenaikan NTP pada tahun 2023 mencerminkan bahwa petani memiliki daya beli yang lebih baik dan secara keseluruhan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi.

NTP 2023 dipengaruhi oleh komponen pengeluaran Transportasi dan Komunikasi yang mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 9,59 basis poin (yoy). Komponen Transportasi Dan Komunikasi merupakan pengeluaran dengan indeks tertinggi pada kelompok pengeluaran Indeks Biaya Produksi dan Penambah Barang Modal (BPPBM) sebesar 122,67. Sedangkan, komponen pengeluaran dengan indeks terendah yaitu komponen Sewa dan Pengeluaran Lainnya sebesar 108,87. Disisi lain, pada kelompok pengeluaran Indeks Konsumsi Rumah Tangga, komponen pengeluaran dengan indeks tertinggi yaitu Komponen Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 120,09 dan pengeluaran dengan indeks terendah yaitu Komponen Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan sebesar 104,30.

Sepanjang tahun 2020-2023, sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki NTP lebih dari 100. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan petani atau petani mengalami surplus. Pada tahun 2023, Provinsi Riau masih menjadi daerah dengan NTP

Grafik 1. 17. Nilai Tukar Petani Per Provinsi Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

tertinggi sebesar 154,55 besaran ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 145,55. Peningkatan NTP Riau terjadi pada bulan Juli hingga Desember 2023, setelah mengalami penurunan di bulan Juni 2023. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan indeks harga terima petani (It) yang melebihi kenaikan indeks harga bayar petani (Ib). Komoditas penyumbang peningkatan indeks harga terima petani (It) berasal dari kenaikan harga kelapa sawit ditingkat petani, kenaikan harga gabah panen petani, serta komoditas berupa karet dan kelapa. Tingginya NTP Riau tidak terlepas dari dominasi subsektor tanaman perkebunan rakyat dengan komoditas utama kelapa sawit. Sementara itu, masih terdapat beberapa provinsi dengan NTP kurang dari 100 atau petani mengalami defisit. Terdapat 4 (empat) provinsi yang memiliki NTP dibawah

Tabel 1. 9. NTP Tertinggi dan Terendah Per Regional Tahun 2023

Regional	Tertinggi	Terendah
Regional Sumatera	Riau (154,55)	Kepulauan Riau (102,25)
Regional Jawa	Jawa Tengah (111,20)	DI Yogyakarta (103,99)
Regional Kalimantan	Kalimantan Barat (140,31)	Kalimantan Selatan (110,26)
Regional Sulawesi	Sulawesi Barat (122,81)	Sulawesi Tenggara (101,88)
Regional Bali-Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Barat (115,63)	Nusa Tenggara Timur (96,84)
Regional Maluku-Papua	Maluku dan Maluku Utara (103,30)	Papua (99,61)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

100 yaitu Papua Barat (99,76), Papua (99,61), Bali (99,46) dan yang terendah adalah Nusa Tenggara Timur (96,84). Namun, jika dilihat dari tren selama 3 tahun terakhir, Nusa Tenggara Timur telah memiliki perkembangan NTP yang meningkat walaupun besarnya masih berada dibawah provinsi lain.

Capaian NTP di setiap regional pada tahun 2023 cukup bervariasi dengan sebagian besar daerah mengalami peningkatan. Regional Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi mencatatkan NTP dengan angka di atas 100 untuk semua provinsi di setiap regionalnya. Sementara itu, pada regional Bali-Nusra dan Maluku-Papua, masih terdapat beberapa daerah dengan NTP kurang dari 100. NTP regional Sumatera secara rata-rata memiliki angka tertinggi pada tahun 2023, sedangkan NTP regional Maluku-Papua secara rata-rata memiliki angka terendah.

Pada regional Sumatera, NTP dengan angka tertinggi masih dicapai oleh Provinsi Riau sebesar 154,55, sedangkan NTP dengan angka terendah pada Provinsi Kepulauan Riau sebesar 102,25. Belum optimalnya pengembangan sektor pertanian pada Provinsi Kepri salah satunya disebabkan oleh kondisi geografis yang dikelilingi oleh bakau dan tanah bauksit sehingga sulit dijadikan sebagai lahan pertanian. NTP Provinsi Jawa Tengah sebesar 111,20 merupakan NTP dengan angka tertinggi di regional Jawa, sedangkan NTP Provinsi DI Yogyakarta sebesar 103,99 merupakan yang terendah. Adanya kenaikan Indeks harga

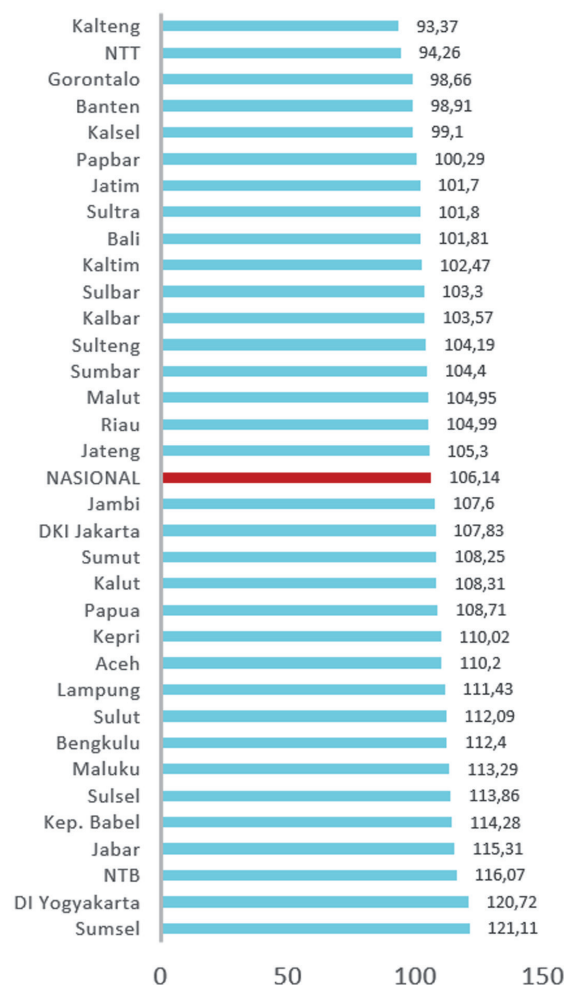
yang dibayar petani (lb) yang disumbang oleh komoditas kacang panjang, bawang merah, beras, cabai rawit dan makanan ringan/snack menjadi salah satu penyebab turunnya NTP Provinsi DI Yogyakarta. Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan NTP tertinggi pada regional Kalimantan yaitu sebesar 140,31. Capaian NTP yang tinggi didorong oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat berupa sawit dan karet yang menjadi andalan para petani atau masyarakat wilayah Kalimantan Barat. Sedangkan, provinsi dengan NTP terendah yaitu Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 110,26.

Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Barat sebesar 122,81 merupakan NTP dengan angka tertinggi di regional Sulawesi, sedangkan NTP Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 101,88 merupakan NTP dengan angka yang terendah. Meskipun demikian, terdapat peningkatan NTP Provinsi Sulawesi Tenggara jika dibandingkan dengan NTP semula tahun 2022 sebesar 99,48 atau kurang dari angka 100. Pada regional Bali-Nusra, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki NTP dengan angka tertinggi sebesar 115,63. Sedangkan, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan NTP terendah sebesar 96,84 atau kurang dari angka 100. Masih rendahnya NTP pada Provinsi Nusa Tenggara Timur disebabkan oleh pengaruh inflasi pedesaan terhadap kesejahteraan petani karena besarnya pengaruh komponen konsumsi pada indeks bayar petani (lb) sehingga capaian NTP berada dibawah batas surplus. NTP Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan NTP tertinggi pada regional Maluku-Papua yaitu sebesar 103,30. Sedangkan NTP Provinsi Papua merupakan yang terendah sebesar 99,61. Meskipun demikian, NTP Provinsi Papua telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 99,36.

1.2.A.6. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional pada tahun 2023 tercatat sebesar 106,14 yang menunjukkan sedikit penurunan dari tahun

Grafik 1. 18. Nilai Tukar Nelayan Per Provinsi Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2022 sebesar 106,45, meskipun tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 104,69 dan tahun 2020 sebesar 100,22. Nilai Tukar Nelayan mengukur kesejahteraan nelayan melalui perbandingan antara harga yang diterima nelayan dari penjualan produk perikanan (lt) dan harga yang dibayar untuk kebutuhan produksi dan konsumsi (lb). Indeks Harga yang Diterima Nelayan (lt) meningkat dari 117,71 pada tahun 2022 menjadi 122 pada tahun 2023, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (lb) juga naik dari 110,58 menjadi 115,75 dalam periode yang sama. Kenaikan ini mencerminkan bahwa pendapatan nelayan masih lebih tinggi daripada pengeluaran mereka, meskipun

margin keuntungannya sedikit menyusut pada tahun 2023. NTN berada di atas angka 100 menandakan bahwa kesejahteraan nelayan masih relatif baik, namun memerlukan perhatian dan dukungan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan yang ada.

Komponen penerimaan Penangkapan Laut merupakan komponen penerimaan yang memiliki kenaikan paling tinggi sebesar 4,43 basis poin (*yoy*). Pada tahun 2023, komponen penerimaan Penangkapan Laut memiliki indeks tertinggi pada kelompok penerimaan sebesar 122,36. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen Transportasi dan Komunikasi merupakan komponen yang memiliki kenaikan paling tinggi sebesar 10,15 basis poin (*yoy*). Dalam kelompok pengeluaran Indeks Biaya Produksi dan Penambah Barang Modal (BPPBM), komponen Transportasi dan Komunikasi merupakan komponen dengan indeks tertinggi sebesar 121. Sedangkan, komponen pengeluaran dengan indeks terendah yaitu komponen Barang Modal sebesar 108,92. Disisi lain, pada kelompok pengeluaran Indeks Konsumsi Rumah Tangga, komponen pengeluaran dengan indeks tertinggi yaitu komponen Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 119,57. Sedangkan, komponen pengeluaran dengan indeks terendah yaitu komponen Pendidikan sebesar 103,21.

Perkembangan NTN pada setiap provinsi cukup berfluktuatif selama tahun 2020-2023. Pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan NTN tertinggi sebesar 121,11 dengan tren yang positif setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, NTN Provinsi Sumatera Selatan meningkat sebesar 10,19 basis poin dari angka NTN 110,92 pada tahun 2022 dan meningkat sebesar 16,44 basis poin dari angka NTN 104,67 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan nelayan pada Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki surplus pendapatan. Namun, masih terdapat beberapa provinsi yang memperoleh NTN dibawah angka 100 yaitu Provinsi Kalimantan Selatan (99,1),

Tabel 1. 10. NTN Tertinggi dan Terendah Per Regional Tahun 2023

Regional	Tertinggi	Terendah
Regional Sumatera	Sumatera Selatan (121,11)	Sumatera Barat (104,4)
Regional Jawa	DI Yogyakarta (120,72)	Banten (98,91)
Regional Kalimantan	Kalimantan Utara (108,31)	Kalimantan Tengah (93,37)
Regional Sulawesi	Sulawesi Selatan (113,86)	Gorontalo (98,66)
Regional Bali-Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Barat (116,07)	Nusa Tenggara Timur (94,26)
Regional Maluku-Papua	Maluku (113,29)	Papua Barat (100,29)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Provinsi Banten (98,91), Provinsi Gorontalo (98,66) dan Provinsi NTT (94,26) dan yang terendah adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan capaian sebesar 93,37.

Pada tahun 2023, capaian NTN pada setiap regional cukup bervariasi dengan sebagian daerah mengalami peningkatan dan sebagian lainnya mengalami penurunan. Seluruh provinsi pada regional Sumatera dan Maluku-Papua memperoleh NTN lebih dari 100. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, hanya regional Sumatera yang memperoleh NTN dengan angka diatas 100 untuk setiap provinsinya. Hal ini menandakan adanya kenaikan NTN pada salah satu provinsi di regional Maluku-Papua yaitu Provinsi Papua Barat dengan kenaikan NTN sebesar 2,85 basis poin atau sebesar 100,29 pada tahun 2023 dari semula sebesar 97,44 pada tahun 2022. Sementara itu, pada regional Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali-Nusra, masih terdapat beberapa daerah dengan NTN kurang dari 100. NTN tahun 2023 secara rata-rata di regional Sumatera, Jawa, Bali-Nusra dan Sulawesi mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian NTN periode tahun 2022. Sementara itu, regional Kalimantan dan Maluku-Papua mengalami rata-rata capaian NTN yang menurun.

Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 121,11 merupakan NTN dengan angka tertinggi di regional Sumatera, sedangkan NTN Provinsi Sumatera Barat sebesar 104,4 merupakan yang terendah. Rendahnya NTN Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh

penurunan produksi perikanan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi menjelang akhir tahun. Pada regional Jawa, NTN dengan angka tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta sebesar 120,72 sedangkan capaian NTN terendah pada Provinsi Banten sebesar 98,91. Besaran NTN pada Provinsi Banten mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, hal ini terjadi karena menurunnya penerimaan nelayan akibat berkurangnya populasi ikan karena polusi limbah industri di Sungai Ciujung. Sementara itu, pada regional Kalimantan, NTN Provinsi Kalimantan Utara sebesar 108,31 merupakan NTN dengan angka tertinggi, sedangkan NTN Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 93,37 merupakan yang terendah. Besaran NTN Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah angka 100 sejak tahun 2022 dan kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2023, hal ini disebabkan oleh penurunan indeks harga produksi pada kelompok penangkapan baik di perairan umum maupun perairan laut serta faktor cuaca yang tidak menentu akibat El Nino yang berpengaruh pada hasil yang diperoleh para nelayan.

Pada Regional Sulawesi, NTN Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 113,86 merupakan NTN dengan angka tertinggi, sedangkan NTN Provinsi Gorontalo sebesar 98,66 merupakan yang terendah. Tren NTN Provinsi Gorontalo cenderung mengalami penurunan pada kuartal keempat tahun 2023 akibat turunnya harga berbagai komoditas perikanan tangkap, turunnya Indeks yang diterima nelayan (It) pada kelompok penangkapan di perairan umum (khususnya kepiting dan nila). NTN Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 116,07 merupakan NTN dengan angka tertinggi di regional Bali-Nusa Tenggara, sedangkan NTN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 94,26 merupakan yang terendah. Walaupun telah menunjukkan sedikit peningkatan pada tahun 2023, Provinsi NTT masih menjadi provinsi dengan NTN terendah di regionalnya, hal ini salah satunya disebabkan karena penangkapan di wilayah NTT masih pada skala kecil dan dilakukan secara tradisional sehingga belum

mampu bersaing dengan para pesaing dari luar wilayah NTT. Sementara itu, pada regional Maluku-Papua, Provinsi Maluku memiliki NTN dengan angka tertinggi sebesar 113,29, sedangkan NTN Provinsi Papua barat sebesar 100,29 merupakan yang terendah. Meskipun menjadi yang tertinggi pada regionalnya, NTN Provinsi Maluku mengalami penurunan yang disebabkan oleh turunnya harga komoditas pada kelompok penangkapan di perairan laut (khususnya komoditas ikan ketamba, ikan terbang, lobster, ikan tenggiri, ikan kuwe, ikan baronang, ikan selar, dan ikan ekor kuning).

I.3. KEBIJAKAN PEMERINTAH DI TAHUN 2023 UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, Pemerintah telah Menyusun Rencana Kerja Pemerintah RKP) Tahun 2023 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. RKP Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Penetapan tema tersebut mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Selain itu, penetapan tema tersebut juga mempertimbangkan isu strategis dan dinamika pandemi Covid-19, serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Sebagai implementasi tersebut, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan Indonesia tahun 2023, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yang meliputi:

1. Pemulihan Dunia Usaha dan Sektor Riil Pemerintah berfokus pada pemulihan sektor industri, perdagangan, dan UMKM dengan memberikan stimulus fiskal dan

kemudahan perizinan untuk mendorong investasi dan peningkatan daya saing di pasar global.

2. Transformasi Ekonomi Berbasis Digital
Pengembangan ekonomi digital menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Hal ini termasuk investasi di sektor infrastruktur digital, teknologi, dan peningkatan literasi digital masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Pemerintah menargetkan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang lebih kompeten, disesuaikan dengan kebutuhan industri. Program Kartu Prakerja tetap menjadi instrumen penting dalam upaya ini.
4. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Infrastruktur fisik dan digital menjadi fokus, termasuk percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan peningkatan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, dengan perhatian khusus pada keberlanjutan lingkungan.
5. Penguatan Sektor Kesehatan dan Ketahanan Pangan
Memperkuat sistem kesehatan nasional dan meningkatkan ketahanan pangan menjadi kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat serta menghadapi kemungkinan krisis di masa depan. Program ini termasuk dukungan pada sektor pertanian dan peningkatan kapasitas produksi pangan.
6. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pengurangan Kemiskinan
Kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan memperluas jangkauan program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program bantuan sosial lainnya.

7. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
Fokus pada eksploitasi yang ramah lingkungan, pemerintah memperkuat kebijakan energi baru dan terbarukan, serta menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.
8. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Upaya reformasi birokrasi yang efisien dan transparan tetap dilanjutkan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, dengan penekanan pada pemberantasan korupsi dan penguatan pelayanan publik yang berbasis digital.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, ditetapkanlah sasaran pembangunan tahun 2023 yang meliputi:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; dan
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Sedangkan untuk sasaran pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali.

Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2023 juga diarahkan pada tujuh Prioritas Nasional Indonesia, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas
Fokus pada peningkatan daya saing ekonomi melalui reformasi struktural,

mendorong sektor industri dan UMKM, serta memperkuat investasi dan ekspor untuk menciptakan lapangan kerja.

2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Ketimpangan dan Menjamin Pemerataan
Pemerintah berfokus pada percepatan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mendorong konektivitas antarwilayah untuk pemerataan pembangunan.
3. Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
Peningkatan pendidikan vokasional, pelatihan kerja, dan keterampilan digital untuk memperkuat kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Program Kartu Prakerja dan peningkatan akses pendidikan tinggi juga menjadi prioritas.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Fokus pada penguatan karakter bangsa melalui nilai-nilai Pancasila dan budaya, serta pembangunan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang lebih inklusif dan berwawasan global.
5. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Pembangunan infrastruktur fisik dan digital, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk meningkatkan konektivitas dan akses terhadap pelayanan dasar seperti air bersih, listrik, dan internet.
6. Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Pemerintah menargetkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.
7. Penguatan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik
Fokus pada peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional, serta reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan

publik yang transparan dan efisien, termasuk digitalisasi layanan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan tahun anggaran 2023, serta sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP Daerah Tahun 2023. Demikian pula, RKP Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), untuk selanjutnya ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Uraian dan capaian dalam pengelolaan APBN Tahun 2023 untuk mengimplementasikan kebijakan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan akan dijelaskan pada Bab II.



II. PERKEMBANGAN FISKAL APBN, APBD, DAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN



Dari sisi fiskal daerah, konsolidasi APBD secara nasional di tahun 2023 baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah mengalami pertumbuhan. Konsolidasi realisasi pendapatan APBD secara nasional (gabungan) adalah sebesar Rp1.256,43 triliun atau tumbuh sebesar 8,39 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

II. PERKEMBANGAN FISKAL APBN, APBD, DAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

II.1. OVERVIEW NASIONAL 2023

II.1.A. Analisis APBN

II.1.A.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2023 menunjukkan tren kinerja yang positif sejak awal 2023 seiring dengan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, aktivitas ekonomi dalam negeri yang semakin membaik pasca pandemi, serta upaya optimalisasi dari sisi administrasi maupun kepatuhan wajib pajak. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat tumbuh sebesar 5,62 persen dari sebesar Rp2.635,84 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp2.783,93 triliun pada tahun 2023. Realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2023 yang ditetapkan pada Perpres Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp2.634,15 triliun (105,69 persen) dan pada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 (APBN 2023) sebesar Rp2.462,61 triliun (113,05 persen). Adapun kontribusi komponen Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,88 persen dari sebesar Rp2.034,55 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp2.154,21 triliun pada tahun 2023.

Realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2023 tersebut tercapai sebesar 106,58 persen dari target APBN 2023 sebesar Rp2.021,22 triliun dan sebesar 101,69 persen dari target pada Perpres 75/2023 sebesar Rp2.118,35 triliun. Jika dilihat rinciannya, terdapat komponen Pendapatan Pajak Dalam Negeri tercapai sebesar Rp2.089,72 triliun dari target APBN 2023 sebesar Rp1.963,48 triliun (106,43 persen) dan target pada Perpres 75/2023 sebesar Rp2.045,45 triliun (102,16 persen). Adapun pada komponen Pajak Perdagangan Internasional tercapai sebesar Rp64,49 triliun dari target APBN 2023 sebesar Rp73,89 triliun (88,47 persen) dan target pada Perpres 75/2023 sebesar Rp57,74 triliun (111,69 persen). Penerimaan perpajakan yang melampaui target tersebut seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dunia, membaiknya harga komoditas, dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat tumbuh sebesar 2,84 persen dari sebesar Rp595,59 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp612,54 triliun pada tahun 2023. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp612,54 triliun dari target APBN 2023 sebesar Rp441,39 triliun (138,77 persen) dan target pada Perpres 75/2023 sebesar Rp515,80 triliun (118,75 persen). Jika dilihat rinciannya, realisasi semua komponen PNBP telah melampaui dari target yang ditetapkan. Capaian PNBP tertinggi terdapat pada komponen PNBP Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp254,20 triliun (138,77 persen dari Perpres APBN dan 113,53 persen dari Perpres 75/2023), diikuti PNBP Lainnya sebesar Rp180,42 triliun (159,24 persen dari Perpres APBN dan 137,20 persen dari Perpres 75/2023). Capaian PNBP yang melampaui target ditopang oleh kenaikan harga komoditas migas dan non migas serta kenaikan pendapatan BLU dan PNBP Kementerian/Lembaga.

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2023 sebesar Rp17,18 triliun atau telah melampaui target APBN sebesar Rp0,41 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2022 yang sebesar Rp5,69 triliun atau terjadi kenaikan sebesar 201,69 persen. Peningkatan penerimaan hibah tahun 2023 terutama dipengaruhi oleh penerimaan hibah langsung dalam negeri yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Tabel 2. 1. Sebaran Pendapatan Negara di Tingkat Regional Tahun 2023

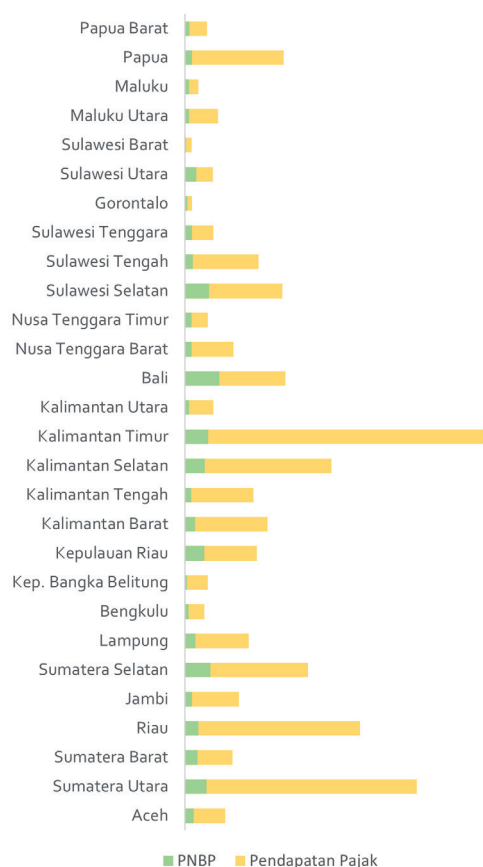
Regional	Pajak (triliun rupiah)	PNBP (triliun rupiah)
Regional Sumatera	116,20	17,11
Regional Jawa	1.873,02	569,98
Regional Kalimantan	85,42	8,74
Regional Sulawesi	33,10	7,38
Regional Bali-Nusa Tenggara	23,57	6,53
Regional Maluku-Papua	22,89	2,79

Sumber : LKPP Audited

Regional Jawa mencatatkan realisasi Pendapatan Negara tertinggi dibandingkan regional lainnya seiring dengan kegiatan ekonomi yang lebih banyak terjadi di regional Jawa dan pusat pemerintahan yang berada di regional Jawa, yaitu di DKI Jakarta. Realisasi penerimaan pajak dan PNBP di regional Jawa pada tahun 2023 berturut-turut, yaitu sebesar 86,95 persen dan 93,05 persen dari total realisasi penerimaan pajak dan PNBP seluruh daerah di Indonesia. Sementara itu, DKI Jakarta merupakan daerah yang mencatatkan realisasi tertinggi di regional Jawa, yaitu penerimaan pajak sebesar Rp1.356,88 triliun atau 62,99 persen, dan realisasi PNBP sebesar Rp543,45 triliun atau 88,72 persen dari total realisasi seluruh daerah di Indonesia. Kegiatan ekonomi tahun 2023 di regional Jawa, yaitu sebesar 57,05 persen dari total seluruh PDRB di Indonesia. Tingginya tingkat ekonomi di regional Jawa kemungkinan besar sangat memengaruhi tingginya tingkat penerimaan pajaknya. Selain itu, di DKI Jakarta terdapat Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus yang ruang lingkupnya seluruh wilayah Indonesia. Tingginya tingkat realisasi PNBP di regional Jawa tidak terlepas juga dari kantor pusat Kementerian/Lembaga yang berada di DKI Jakarta dengan ruang lingkup pengelolaan penerimaannya di seluruh wilayah Indonesia.

Penerimaan perpajakan tertinggi terjadi di daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas di tahun 2023, sementara realisasi PNBP tertinggi terjadi di daerah yang mengalami peningkatan pendapatan BLU. Penerimaan Perpajakan tertinggi selain daerah di Regional Jawa terjadi di daerah Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, realisasi terendah tercatat di daerah Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Bengkulu, dan Papua Barat. Tingginya realisasi penerimaan pajak seiring dengan tingginya harga komoditas perkebunan (CPO dan turunannya) dan tingginya harga komoditas pertambangan. Realisasi PNBP tertinggi terjadi

Grafik 2. 1. Sebaran Pendapatan Negara Tingkat Daerah Selain di Regional Jawa Tahun 2023



Sumber : LKPP Audited

di daerah Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi PNBP terendah tercatat di daerah Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Maluku Utara, dan Gorontalo. Tingginya realisasi PNBP seiring dengan peningkatan pendapatan BLU, penguatan regulasi terhadap objek dan tarif PNBP, dan optimalisasi pemanfaatan BMN.

II.1.A.2. Belanja Negara

Belanja Negara pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan. Realisasi Belanja Negara pada tahun 2023 tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,81 persen dari sebesar Rp3.096,26 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp3.121,22 triliun pada tahun 2023. Realisasi tersebut melampaui alokasi APBN 2023, yaitu 102,0 persen dari APBN 2023 atau 100,2 persen dari Perpres 75/2023. Realisasi terbesar terdapat pada realisasi Belanja

Pemerintah sebesar Rp2.239,79 triliun atau 71,76 persen dari realisasi Belanja Negara tahun 2023. Realisasi Belanja Pemerintah terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp1.152,23 triliun dan Belanja Non K/L sebesar Rp1.087,56 triliun. Realisasi belanja K/L antara lain digunakan untuk penebalan bansos, percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN, dan persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Sementara belanja non K/L antara lain untuk subsidi dan kompensasi energi.

Realisasi Belanja K/L terdistribusi pada berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah Jawa sebesar 72,7 persen diikuti dengan wilayah Sumatera sebesar 9,9 persen, wilayah Kalimantan sebesar 5,8 persen, wilayah Sulawesi sebesar 5,5 persen, wilayah Maluku-Papua sebesar 3,3 persen, serta wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,9 persen. Dibandingkan tahun 2022, terjadi kenaikan distribusi Belanja K/L pada empat wilayah yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Papua serta penurunan distribusi pada wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara. Proporsi yang berbeda dari masing-masing wilayah disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) pencatatan belanja dalam rangka kebutuhan operasional di kantor pusat K/L yang sebagian besar berlokasi di wilayah Jawa; (2) profil demografi dan geografi dari masing-masing wilayah (seperti jumlah penduduk dan luas wilayah); (3) profil tingkat pendapatan masyarakat di masing-masing wilayah yang akan berpengaruh terhadap distribusi program perlindungan sosial; dan (4) kegiatan ekonomi pada masing-masing wilayah.

Adapun dari sisi belanja non K/L, peningkatan realisasi tertinggi terdapat pada realisasi pembayaran bunga utang yang mengalami peningkatan sebesar 13,86 persen dari Rp386,34 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp439,88 triliun pada tahun 2023, serta realisasi belanja subsidi yang juga mengalami peningkatan sebesar 6,64 persen, yaitu dari Rp252,81 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp269,59 triliun pada tahun 2023. Pembayaran

Grafik 2. 2. Sebaran Belanja Pemerintah Pusat Selain di DKI Jakarta
Tahun 2023



Sumber : LKPP Audited

bunga utang mengalami peningkatan seiring dengan penambahan *outstanding* utang pemerintah, target pembiayaan utang tahun berjalan, tingkat suku bunga utang khususnya imbal hasil (*yield*) SBN yang dinamis mengikuti pergerakan pasar keuangan, dan perkembangan ekonomi domestik maupun global. Pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri melalui instrumen SBN serta kerja sama pembiayaan antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang. Sementara itu, realisasi belanja subsidi berasal dari realisasi belanja subsidi energi sebesar Rp164,29 triliun dan realisasi belanja subsidi non energi sebesar Rp105,30 triliun. Realisasi belanja subsidi

energi terdiri atas belanja subsidi BBM, LPG 3 Kg, dan subsidi listrik. Sementara itu, realisasi belanja subsidi non energi terdiri atas subsidi pupuk, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program melalui Subsidi Perumahan (SBK dan SBUM) dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM, petani dan nelayan melalui Subsidi Bunga KUR, serta Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP).

Regional Jawa terutama daerah DKI Jakarta mencatatkan realisasi Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat tertinggi dibandingkan daerah lainnya seiring dengan pusat pemerintahan yang berada di DKI Jakarta. Realisasi Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat di regional Jawa berturut-turut, yaitu sebesar 70,45 persen dan 85,94 persen dari total realisasi belanja di seluruh Indonesia. Sementara itu, realisasi Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat di daerah DKI Jakarta berturut-turut, yaitu sebesar 57,31 persen dan 78,41 persen dari total realisasi belanja di seluruh Indonesia. Belanja yang hanya dilakukan di DKI Jakarta sehubungan dengan keberadaan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, yaitu belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dan belanja hibah. Meskipun belanja subsidi dan belanja hibah tercatat di DKI Jakarta, tetapi manfaatnya didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat juga pembayaran belanja yang dicatatkan di DKI Jakarta tetapi manfaatnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu belanja pegawai untuk pensiunan dan belanja bantuan sosial.

II.1.A.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami peningkatan sebesar 7,99 persen, yaitu dari Rp816,23 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp881,43 triliun pada tahun 2023. Peningkatan realisasi TKDD terutama dipengaruhi oleh peningkatan Transfer ke Daerah sebesar 8,45 persen, yaitu dari Rp748,32 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp811,57 triliun pada tahun 2023. Alokasi Dana Desa juga mengalami peningkatan

sebesar 2,87 persen, yaitu dari Rp67,91 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp69,86 triliun pada tahun 2023. Distribusi realisasi TKD tahun 2023 terdiri atas realisasi DBH sebesar Rp205,67 triliun, dengan proporsi terbesar di wilayah Kalimantan sebesar 40,3 persen; realisasi DAU sebesar Rp398,03 triliun, dengan proporsi terbesar berada di wilayah Jawa sebesar 31,4 persen; realisasi DAK mencapai Rp181,36 triliun, dengan realisasi terbesar berada di wilayah Jawa sebesar 38,5 persen (realisasi DAK fisik mencapai Rp50,33 triliun, realisasi DAK nonfisik sebesar Rp128,08 triliun, dan realisasi Hibah kepada Daerah sebesar Rp2,94 triliun; realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp17,24 triliun dan Dana Keistimewaan (Dais) D.I. Yogyakarta sebesar Rp1,37 triliun; realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp7,91 triliun, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 28,6 persen; dan realisasi Dana Desa sebesar Rp69,86 triliun, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 34,8 persen.

Tabel 2.2. Sebaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Tingkat Regional Tahun 2023 (Triliun rupiah)

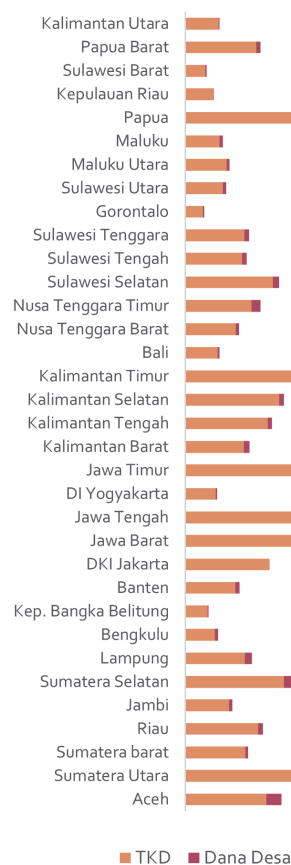
	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali Nusra	Maluku Papua
TKD	196,93	249,83	137,37	89,18	47,97	90,29
Dana Desa	19,66	24,34	5,85	7,34	4,51	8,15

Sumber : LKPP Audited

Sebaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa lebih banyak terjadi di luar regional Jawa dibandingkan sebaran Belanja Pemerintah Pusat yang lebih banyak terjadi di regional Jawa. Meskipun begitu, regional Jawa masih mencatatkan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tertinggi dibandingkan regional lainnya. Sebaran Dana Desa di regional Jawa masih yang tertinggi meskipun DKI Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang tidak mendapatkan alokasi Dana Desa. Regional Bali & Nusra mencatatkan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terendah, tetapi jika dilihat per daerah maka ketiga daerah pada regional Bali & Nusra tidak tercatat sebagai daerah dengan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terendah.

Transfer Ke Daerah tertinggi sebagian besar

Grafik 2.3. Distribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pada Tingkat Daerah Tahun 2023



Sumber : LKPP Audited

terjadi di regional Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta terjadi di Papua dan Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi Transfer Ke Daerah terendah terjadi di Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau. Sama halnya dengan Transfer Ke Daerah, daerah dengan Dana Desa tertinggi sebagian besar berada di regional Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta terjadi di Papua dan Aceh. Sementara itu, DKI Jakarta tidak mendapatkan alokasi Dana Desa, dan realisasi Dana Desa terendah terjadi di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara.

II.1.A.4. Surplus/Defisit APBN

Realisasi defisit APBN tahun 2023 sebesar Rp337,29 triliun atau mencapai 1,61 persen

dari PDB. Capaian tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu defisit APBN tahun 2022 sebesar Rp460,42 triliun atau mencapai 2,35 persen dari PDB. Realisasi defisit tahun 2023 lebih rendah dari target defisit pada Perpres Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp479,9 triliun (2,27 persen dari PDB) dan pada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 (APBN 2023) sebesar Rp598,2 triliun (2,84 persen dari PDB) seiring dengan realisasi penerimaan perpajakan dan PNPB yang melampaui target. Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023 menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan realisasi defisit di bawah 3 persen sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2020. Selama tahun 2023, APBN telah berperan sebagai *shock absorber* dalam upaya meredam dampak gejolak perekonomian global agar momentum pemulihan ekonomi semakin menguat dan melindungi daya beli masyarakat, sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan. Peran APBN sebagai *shock absorber* akan terus dioptimalkan dalam menghadapi tantangan di masa depan dan mendukung transformasi ekonomi, serta instrumen mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat defisit, pada tahun 2023 terdapat surplus keseimbangan primer sebesar Rp102,59 triliun. Surplus keseimbangan primer pada tahun 2023 ini adalah surplus keseimbangan primer pertama kalinya sejak tahun 2012.

Defisit anggaran tahun 2023 dibiayai melalui pembiayaan anggaran dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal. Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp356,66 triliun atau 74,32 persen dari target sebesar Rp479,93 triliun (Perpres Nomor 75 Tahun 2023) dan 59,63 persen dari target sebesar Rp598,15 triliun (Perpres Nomor 130 Tahun 2022). Pembiayaan anggaran tersebut terdiri atas Pembiayaan Utang dengan proporsi terbesar sebesar Rp403,95 triliun, Pembiayaan Investasi sebesar Rp89,90 triliun, Pemberian Pinjaman sebesar Rp4,47 triliun, Kewajiban Penjaminan sebesar Rp0,33 triliun, dan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp38,47 triliun.

Pembiayaan utang mengalami penurunan sebesar 41,96 persen dari tahun 2022 sebesar Rp696,02 triliun menjadi Rp403,95 triliun pada tahun 2023.

Penurunan realisasi pembiayaan antara lain dikarenakan adanya penurunan defisit APBN tahun 2023 yang sejalan dengan konsolidasi fiskal yang dilakukan Pemerintah dalam upaya untuk menjaga defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB, pengelolaan utang yang prudent dan sustainable, pemanfaatan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi danantisipasi ketidakpastian, inovasi pembiayaan dengan penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMV serta mendorong skema KPBU lebih masif, serta pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga fiscal buffer yang andal dan efisien.

II.1.B. Analisis APBD

II.1.B.1. Gambaran Umum APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang digunakan pemerintah daerah dalam upaya memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa, dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penanganan yang dimaksud meliputi dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan pelaksanaan program vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*, insentif tenaga kesehatan, dan dukungan penanganan dan

pengendalian pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan realokasi program dan kegiatan yang bukan prioritas kepada belanja yang lebih bersifat urgent dalam rangka mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi.

Secara nasional, target pendapatan APBD 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp69,73 triliun (6,00 persen, yoy). Selaras dengan kenaikan target pendapatan, realisasi pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp97,25 triliun (8,39 persen, yoy). Sementara itu, dari sisi belanja, alokasi pagu mengalami kenaikan sebesar Rp66,51 triliun (5,41 persen, yoy), serta peningkatan realisasi belanja sebesar Rp71,69 triliun (6,01 persen, yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.3. I-Account APBD 2023

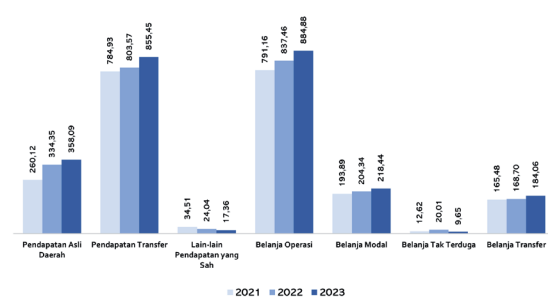
I-ACCOUNT NASIONAL				
(dalam triliun rupiah)	Pagu (2023)	Realisasi (2023)	% Realisasi	% Growth Realisasi (yoy)
PENDAPATAN DAERAH	1.230,89	1.256,43	102,07%	8,39%
BELANJA DAERAH	1.297,03	1.263,87	97,44%	6,01%
SURPLUS/(DEFISIT)	-65,33	-7,44	11,39%	-77,45%
PEMBIAYAAN	67,40	98,35	145,93%	-7,93%
SILPA	2,07	90,91		

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Dalam kurun waktu 2021 - 2023, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Target pendapatan mengalami peningkatan (yoy) baik di komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,10 persen dari Rp334,35 triliun menjadi Rp358,09 triliun dan pada komponen Pendapatan Transfer sebesar 6,46 persen dari Rp803,57 triliun menjadi Rp855,45 triliun. Sebaliknya, untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah (LLPD) mengalami penurunan sebesar (-27,80 persen) dari Rp24,04 triliun menjadi Rp17,36 triliun.

Dari sisi belanja, penurunan alokasi belanja dibandingkan

Grafik 2.4. Perkembangan Target Komponen APBD 2021-2023 (triliun rupiah)

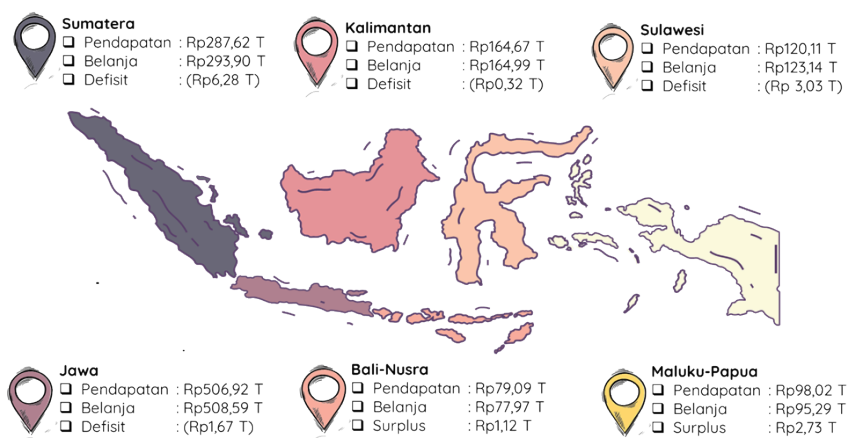


Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

tahun sebelumnya terjadi pada komponen belanja tidak terduga sebesar (-51,77 persen), semula Rp20,01 triliun menjadi Rp9,65 triliun pada tahun 2023.. Sebaliknya, alokasi belanja Transfer dan Modal mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 9,10 persen dan 6,90 persen. Kenaikan belanja transfer digunakan setiap pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan berupa bantuan keuangan ke desa maupun bantuan ke kota/kab. Sedangkan kenaikan alokasi belanja modal mengindikasikan komitmen penuh pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya masing-masing.

Defisit nasional mengalami penyempitan dari target yang diestimasikan, defisit APBD secara nasional berkurang sebesar (-77,45 persen) dari -Rp33,00 triliun menjadi -Rp7,44 triliun pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa secara nasional pendapatan tiap daerah mengalami peningkatan jika dibandingkan

Gambar 2.1. Pelaksanaan APBD di Tingkat Regional Tahun 2023

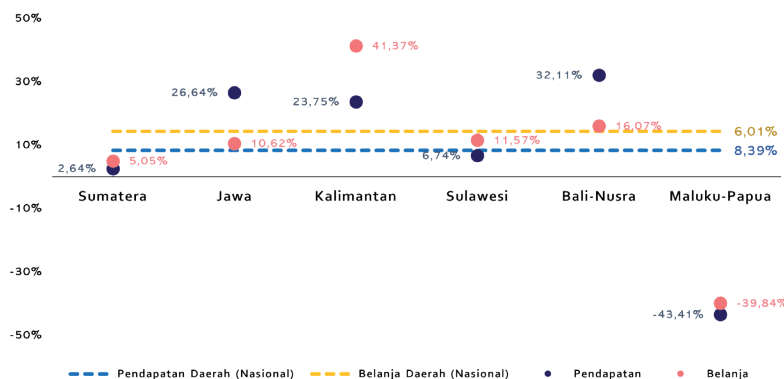


Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

dengan alokasi belanja yang akan dikeluarkan. Untuk menutup defisit, maka pemerintah daerah menggunakan mekanisme pembiayaan agar kegiatan belanja pemerintah daerah dapat terus berjalan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, alokasi pembiayaan mengalami penurunan sebesar -13,16 persen seiring dengan penurunan realisasi pembiayaan sebesar -7,93 persen, dari semula Rp106,83 triliun menjadi Rp98,35 triliun pada tahun 2023.

Di tingkat regional, wilayah Jawa dan sekitarnya masih menjadi kontributor terbesar pendapatan daerah dengan porsi (40,35 persen) diikuti oleh Regional Sumatera (22,89 persen), Kalimantan (13,11 persen), Sulawesi (9,56 persen), Maluku Papua (7,80 persen), dan Bali Nusra (6,29 persen). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase pertumbuhan pendapatan 5 (lima) regional, yaitu Regional Bali-Nusra (32,11 persen), Regional Jawa (26,64 persen), Regional Kalimantan (23,75 persen), Regional Sulawesi (6,74 persen), dan Regional Sumatera (2,64 persen) mengalami peningkatan, sementara Regional Maluku-Papua (-43,41 persen) memiliki penurunan pendapatan dari tahun sebelumnya. Dari sisi belanja, 5 (lima) regional yakni Regional Kalimantan (41,37 persen), Regional Bali-Nusra (16,07 persen), Regional Sulawesi (11,57 persen), Regional Jawa (10,62 persen), dan Regional Sumatera (5,05

Grafik 2. 5. Pertumbuhan Realisasi APBD Regional Dibandingkan Nasional Tahun 2023



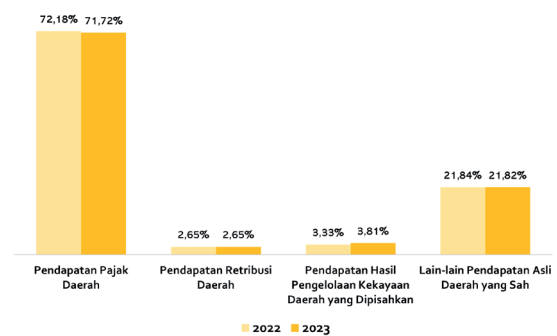
Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

persen) memiliki tingkat pertumbuhan belanja positif, sedangkan Regional Maluku-Papua (-39,84 persen) mengalami kontraksi. Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan tertinggi terjadi pada Regional Kalimantan (97,61 persen) dan Regional Bali-Nusra (15,60 persen), sementara 4 (empat) regional lainnya mengalami penurunan pembiayaan. Adapun defisit tertinggi terjadi pada Regional Sumatera sebesar Rp6,28 triliun.

II.1.B.2. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2023

Grafik 2. 6. Kontribusi Realisasi Komponen PAD Tahun 2022-2023

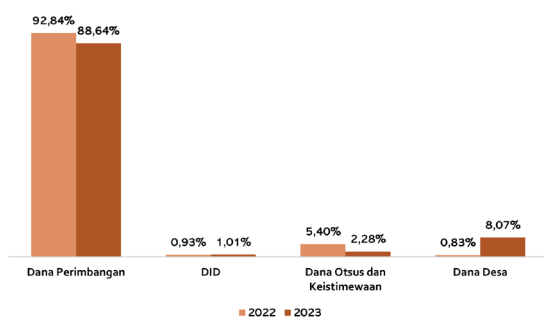


Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

tercatat Rp1.256,43 triliun atau mencapai 102,07 persen dari target pendapatan akumulatif sampai dengan akhir tahun sebesar Rp1.230,89 triliun, serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 8,39 persen. Pajak Daerah masih menjadi pendapatan penopang terbesar PAD. Pada tahun 2023, terjadi kenaikan capaian realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp258,87 triliun atau Rp34,91 triliun lebih besar dibandingkan tahun lalu. Selain pajak, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami peningkatan terbesar sebesar 32,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di samping PAD, dana perimbangan memegang peranan penting bagi kelangsungan pemulihan ekonomi di daerah. Di Tahun

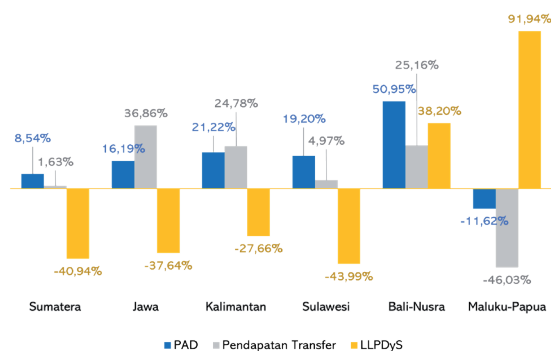
Grafik 2. 7. Pertumbuhan Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2023



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

2023, kontribusi dana transfer mencapai Rp887,28 triliun atau 70,62 persen dari total seluruh pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan pemda masih menggantungkan dana transfer ketimbang pendapatannya sendiri untuk menggerakkan perekonomian. Nilai ini sebagian besar direalisasikan dalam bentuk Transfer Dana Perimbangan seperti (DBH, DAU, dan DAK). Realisasi Dana Perimbangan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp58,40 triliun (8,82 persen), dari tahun sebelumnya sebesar Rp662,09 menjadi Rp720,50 triliun. Secara keseluruhan, PAD regional mengalami peningkatan realisasi sebesar 16,33 persen dibandingkan tahun lalu. Peningkatan PAD tertinggi terjadi pada Regional Bali-Nusra sebesar 50,95 persen. Beberapa pendapatan tertinggi pada Regional Bali-Nusra didapat dari pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp2,40 triliun, Bea Balik Kendaraan Bermotor sebesar Rp1,24 triliun, dan Pajak Hotel sebesar Rp1,65 triliun. Peningkatan pendapatan pada ketiga objek pajak tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas perekonomian pada tahun 2023 mengalami pemulihan. Meskipun pendapatan transfer masih tinggi dan meningkat dari sebesar 25,16 persen dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar Rp54,49 triliun, namun dengan meningkatnya PAD memberikan harapan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatannya melebihi tahun anggaran sebelumnya dan melepas ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat.

Grafik 2. 8. Perkembangan Pendapatan Regional Per Jenis Tahun 2023



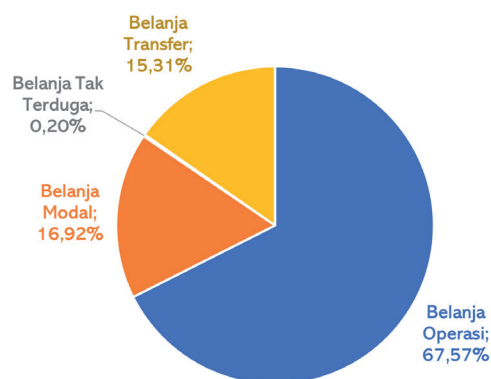
Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Selain Regional Bali-Nusra, 4 (empat) regional lainnya juga mengalami peningkatan PAD, yaitu Regional Kalimantan (21,22 persen), Regional Sulawesi (19,20 persen), Regional Jawa (16,19 persen), dan Regional Sumatera (8,54 persen). Sementara itu, Regional Maluku-Papua (-11,62 persen) mengalami penurunan PAD dari tahun sebelumnya.

II.1.B.3. Belanja Daerah

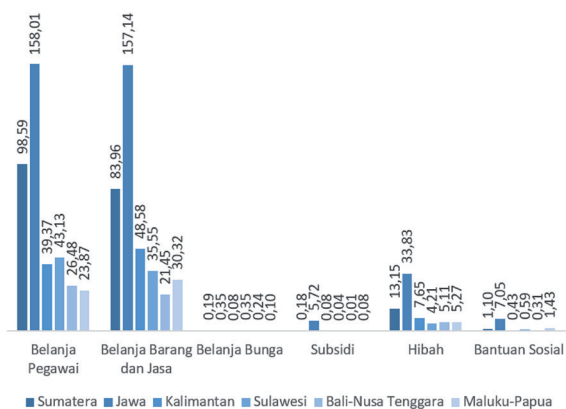
Realisasi belanja daerah Tahun 2023 tercatat Rp1.263,87 triliun atau mencapai 97,44 persen dari target belanja yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran. Persentase capaian belanja ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu (96,88 persen). Peningkatan realisasi belanja tersebut seiring dengan program pemulihan ekonomi daerah, penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan

Grafik 2. 9. Komposisi Belanja APBD Tahun 2023



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 10. Realisasi Komponen Belanja Operasi Regional Tahun 2023



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

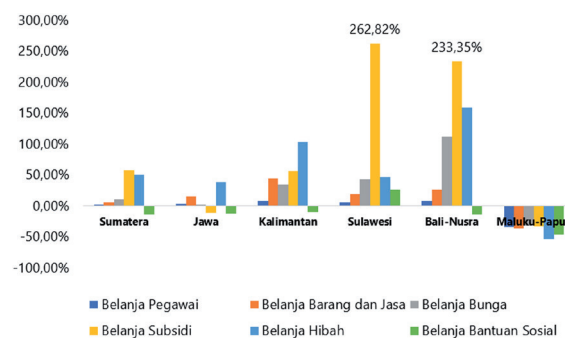
penyediaan layanan publik, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan komposisi, belanja operasi merupakan jenis belanja APBD 2023 terbesar dengan realisasi mencapai Rp854 triliun atau 67,57 persen dari seluruh belanja. Pada posisi kedua dan ketiga, belanja modal dan transfer terealisasi sebesar 16,92 persen dan 15,31 persen atau sebesar Rp213,84 triliun dan Rp193,51 triliun. Selain ketiga belanja ini, terdapat belanja tidak terduga yang terealisasi sebesar 0,20 persen atau setara Rp2,52 triliun.

Belanja operasi didominasi oleh pembayaran belanja pegawai pada hampir seluruh regional, kecuali Regional Kalimantan dan Regional Maluku-Papua yang didominasi oleh belanja barang dan jasa. Realisasi belanja pegawai menunjukkan peningkatan sebesar 0,59 persen, yaitu sebesar Rp387,16 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp389,46 triliun pada tahun 2023. Regional Jawa menempati peringkat teratas dengan besaran belanja pegawai sebesar Rp158,01 triliun atau 40,57 persen secara nasional. Sedangkan regional Maluku-Papua menempati peringkat terbawah realisasi belanja pegawai yang hanya sebesar Rp23,87 triliun atau 6,13 persen dari total nasional.

Pertumbuhan belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bansos cukup variatif di tiap regional. Adapun belanja barang dan jasa

Grafik 2. 11. Pertumbuhan Belanja Operasi Per Regional 2022-2023

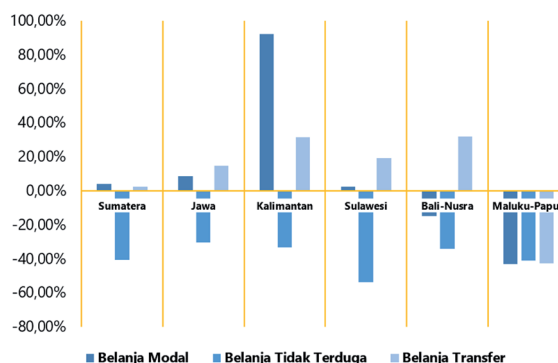


Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

pada tahun 2023 secara nasional mengalami pertumbuhan sebesar 9,55 persen. Penurunan belanja barang dan jasa tertinggi terjadi pada Regional Maluku-Papua (-36,45 persen), sedangkan peningkatan belanja tertinggi terjadi pada Regional Kalimantan (43,70 persen).

Pada jenis belanja bunga, pertumbuhan belanja terjadi pada Regional Bali-Nusra (111,22 persen), Regional Sulawesi (42,67 persen), Regional Kalimantan (34,97 persen), Sumatera (10,70 persen), dan Jawa (2,45 persen), sedangkan Regional Maluku Papua mengalami kontraksi sebesar 31,92 persen. Pada jenis belanja subsidi, hanya Regional Sulawesi dan Bali-Nusra yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 262,82 persen dan 233,35 persen. Pada jenis belanja hibah, kenaikan belanja tertinggi Tahun 2023 terjadi di Regional Maluku-Bali-Nusra (158,86 persen). Sedangkan untuk belanja bansos, pertumbuhan belanja hanya terjadi di Regional Sulawesi yang tumbuh

Grafik 2. 12. Persentase Pertumbuhan Belanja diluar Operasi Per Regional 2022-2023



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

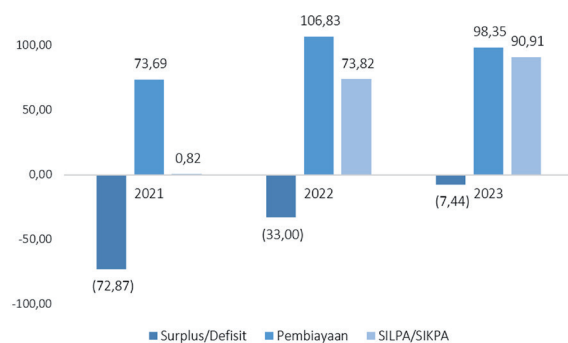
sebesar 26,54 persen.

Adapun jenis belanja tidak terduga tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 38,23 persen dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian, seluruh regional mengalami kontraksi belanja tidak terduga dengan kontraksi terbesar terdapat di Regional Sulawesi (53,70 persen). Di sisi lain, terjadi pertumbuhan pada belanja modal sebesar 5,35 persen, serta pertumbuhan belanja transfer sebesar 7,76 persen. Pertumbuhan belanja transfer tertinggi terdapat pada Regional Kalimantan (92,11 persen), sedangkan pertumbuhan belanja transfer pertumbuhan tertinggi terdapat pada Regional Bali-Nusra (31,90 persen). Sementara itu, belanja transfer mengalami kontraksi pada Regional Maluku-Papua sebesar 42,66 persen.

II.1.B.4. Surplus/Defisit dan Pembiayaan

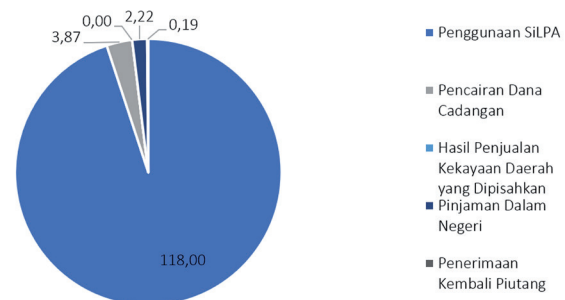
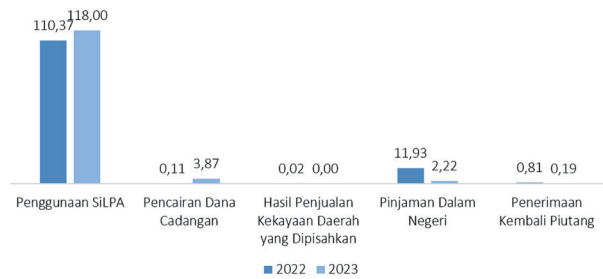
Realisasi defisit APBD Tahun 2023 sebesar Rp7,44 triliun. Nilai defisit tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp33,00 triliun di Tahun 2022. Defisit anggaran tahun 2023 dibiayai terutama melalui penggunaan SiLPA. Adapun pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp98,35 triliun, difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terutama digunakan untuk membiayai keberlanjutan penanganan pandemi Covid-19, seperti pemulihan ekonomi daerah, penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi

Grafik 2. 13. Pertumbuhan Komponen Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan SiLPA 2021-2023 (triliun rupiah)

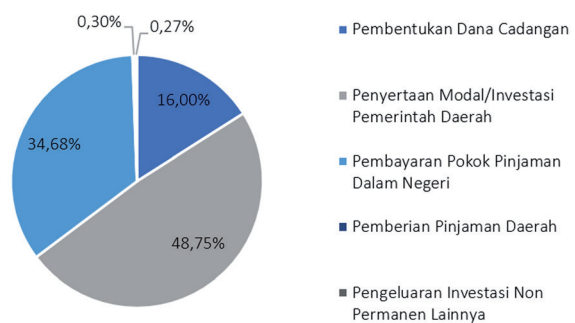
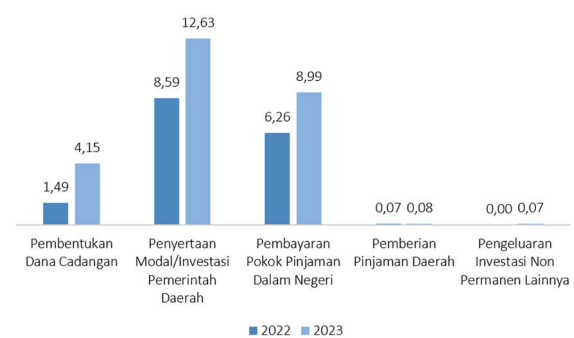


Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 14. Komposisi dan Perkembangan Penerimaan Pembiayaan 2022-2023 (dalam Triliun rupiah)



Grafik 2. 15. Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan 2022-2023 (dalam Triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

kesenjangan penyediaan layanan publik, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persentase SiLPA mengalami pertumbuhan sebesar 23,14 persen, dari semula Rp73,82 triliun di 2022 menjadi Rp90,91 triliun di tahun 2023.

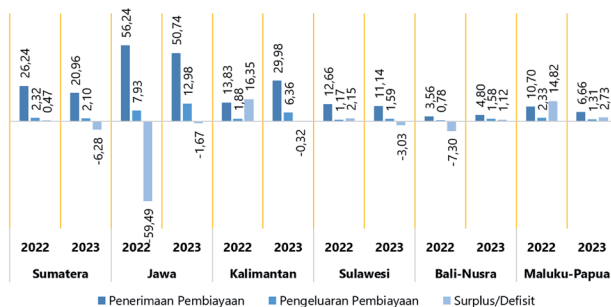
Dari realisasi pembiayaan sebesar Rp98,35 triliun, kontributor terbesar penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp118,00 triliun atau setara 94,95 persen dari seluruh penerimaan pembiayaan. Komponen ini mengalami peningkatan 6,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp110,37 triliun.

Sementara pada Komponen pengeluaran pembiayaan, Penyertaan Modal/Investasi Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri menjadi dua komponen pengeluaran tertinggi dengan nilai masing-masing sebesar Rp12,63 triliun dan Rp8,90 triliun.

Perkembangan surplus/defisit tiap regional sangat variatif, terdapat empat regional (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa) masih mengalami defisit hingga TA 2023 berakhir, sementara dua regional lainnya (Bali-Nusra dan Maluku-Papua) telah mengalami surplus. Sedangkan untuk sektor pembiayaan, tingkat pertumbuhan pembiayaan tiap regional juga sangat variatif baik dari penerimaan maupun pengeluaran. Regional Kalimantan tercatat sebagai regional dengan pertumbuhan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tertinggi, yaitu sebesar 116,80 persen dan 239,06 persen.

II.2. PERKEMBANGAN KINERJA ANGGARAN REGIONAL

Grafik 2. 16. Perkembangan Pembiayaan Regional 2022-2023
(dalam Miliar rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

II.2.A. APBN Regional

II.2.A.1. Gambaran Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran. APBN mencerminkan gambaran umum mengenai alokasi dana untuk berbagai sektor dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

APBN terdiri dari dua komponen utama, yaitu pendapatan dan belanja. Pendapatan APBN berasal dari berbagai sumber, seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dan pembiayaan lainnya. Sementara itu, belanja APBN mencakup belanja pemerintah, belanja transfer ke daerah, dan belanja lainnya seperti belanja modal.

Dalam APBN, alokasi dana dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas dan kebijakan pemerintah. Setiap sektor atau program mendapatkan alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa sektor yang biasanya mendapatkan perhatian dalam APBN adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan pembangunan ekonomi.

Selain itu, APBN juga mencerminkan target surplus atau defisit anggaran. Jika pendapatan negara melebihi belanja negara, maka terdapat surplus anggaran. Sebaliknya, jika belanja negara melebihi pendapatan negara, maka terdapat defisit anggaran. Surplus anggaran dapat digunakan untuk membayar utang, memperkuat cadangan devisa, atau diinvestasikan dalam pembangunan jangka panjang, sedangkan defisit anggaran dapat diatasi melalui pembiayaan seperti pinjaman.

Penyusunan APBN dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan keuangan negara. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, serta kebijakan fiskal dan moneter menjadi pertimbangan dalam menentukan target pendapatan dan alokasi belanja.

Tujuan utama dari APBN adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan nasional. Dalam APBN, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan penggunaan dana publik untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan efektif kepada masyarakat.

Melalui APBN, pemerintah berperan dalam mengelola keuangan negara dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. APBN menjadi landasan bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan APBN harus dilakukan dengan seksama dan berdasarkan prinsip-prinsip yang menguntungkan bagi rakyat dan negara.

II.2.A.2. Regional Sumatera

Hasil konsolidasi antara laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasi di regional Sumatera menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir mengalami defisit. Pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah hanya mampu menutup defisit anggaran menghasilkan SiKPA Rp197,48 triliun atau naik 22,28 persen dari tahun sebelumnya. Penerimaan negara dari sisi perpajakan

mengalami fluktuasi pada tahun 2021 hingga 2023. Setelah sebelumnya sempat mengalami peningkatan di tahun 2022, penerimaan negara dan penerimaan perpajakan justru mengalami penurunan pada tahun 2023. Hingga akhir tahun 2023, realisasi pendapatan negara dan hibah konsolidasian regional Sumatera sebesar Rp133,31 triliun atau mengalami penurunan sebesar 8,19 persen (*yoy*). Penurunan ini terjadi dikarenakan dampak dari sektor penerimaan perpajakan pada regional Sumatera yang turut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu sebesar 11,50 persen (*yoy*). Hal ini disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas yang dapat mempengaruhi pertumbuhan PPh Badan.

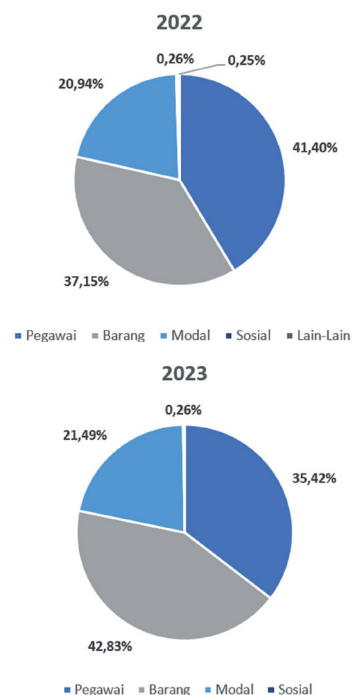
Di sisi lain, penerimaan bukan pajak juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 23,01 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam diversifikasi sumber pendapatan negara di luar sektor perpajakan, serta menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan

Tabel 2. 4. APBN Regional Sumatera

Uraian	2021	2022	2023	growth 23 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	113,33	145,20	133,31	-8,19%
Penerimaan Perpajakan	100,43	131,30	116,20	-11,50%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,89	13,91	17,11	23,01%
Penerimaan Hibah	0	0	0	0%
Belanja Negara	309,39	306,70	330,80	7,86%
Belanja Pemerintah	99,38	96,48	114,20	18,37%
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa	210,02	210,22	216,60	3,03%
Surplus/Defisit Anggaran	(196,06)	(161,50)	(197,48)	22,28%
SILPA/SIKPA	(196,06)	(161,50)	(197,48)	22,28%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 17. Komposisi Belanja Regional Sumatera



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

lainnya.

Dari sisi belanja negara, belanja pemerintah maupun belanja daerah mengalami kenaikan pada tahun 2023. Belanja pemerintah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 18,37 persen dari tahun sebelumnya. Secara total, belanja pemerintah pusat dengan proporsi tertinggi pada tahun 2023 terdapat pada belanja barang sebesar 42,83 persen. Proporsi belanja tersebut mengalami pergeseran dari tahun 2022, di mana proporsi belanja tertinggi terdapat pada belanja pegawai sebesar 41,40 persen. Sementara itu, proporsi Belanja Modal juga mengalami peningkatan proporsi menjadi 21,49 persen di tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi nasional serta pembangunan sudah mulai terlihat membaik dengan adanya pertumbuhan pada belanja tersebut.

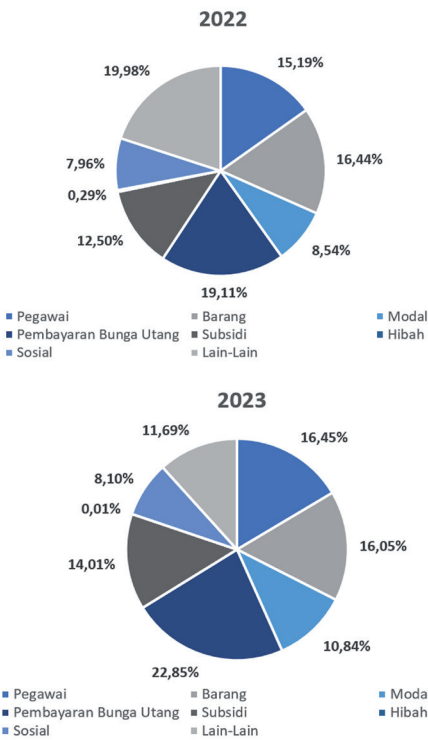
II.2.A.3. Regional Jawa

Hasil Konsolidasi antara laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Regional Jawa mengalami defisit anggaran sebesar Rp222,46 triliun. Kontraksi anggaran yang dialami pada tahun 2021 sebagai akibat pandemi Covid-19 masih mengganggu perekonomian negara. Namun di tahun 2022

hingga 2023, Regional Jawa mengalami surplus anggaran, sebesar Rp640,47 triliun pada tahun 2022 dan sebesar Rp617,86 triliun pada tahun 2023.

Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara dan hibah konsolidasian regional Jawa mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 5,64 persen menjadi Rp2.460,19 triliun pada tahun 2023. Peningkatan pendapatan negara terbesar terdapat pada penerimaan hibah yang tumbuh signifikan pada tahun 2023 sebesar 201,93 persen dari tahun sebelumnya

Grafik 2. 18. Komposisi Belanja Regional Jawa



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 2. 5. APBN Regional Jawa

Uraian	2021	2022	2023	growth 23 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.781,75	2.328,91	2.460,19	5,64%
Penerimaan Perpajakan	1.345,64	1.759,30	1.873,02	6,46%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	431,11	563,92	569,98	1,07%
Penerimaan Hibah	4,99	5,69	17,18	201,93%
Belanja Negara	2.004,21	2.279,42	2.198,99	-3,53%
Belanja Pemerintah	1.738,71	2.022,17	1.924,82	-4,81%
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa	265,51	257,25	274,17	6,58%
Surplus/Defisit Anggaran	(222,46)	49,49	261,20	427,78%
SILPA/SIKPA	649,26	640,47	617,86	-3,53%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

menjadi Rp17,18 triliun pada tahun 2023. Penerimaan hibah tersebut utamanya diperuntukkan untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Berbeda dengan pendapatan negara yang tumbuh pada tahun 2023, Belanja Negara justru mengalami penurunan sebesar 3,53 persen, sejalan dengan adanya kontraksi Belanja Pemerintah sebesar 4,81 persen. Penurunan Belanja Pemerintah antara lain disebabkan adanya beberapa program

yang tidak dapat dilaksanakan, serta tingkat penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga yang masih belum maksimal.

Dari Grafik 2.18 di atas dapat terlihat bahwa terdapat proporsi belanja terbesar antara tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, proporsi terbesar terdapat pada Belanja Lain-Lain sebesar 19,98 persen dari total belanja regional Jawa. Sementara itu, pada tahun 2023, proporsi terbesar terdapat pada Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar 22,85 persen seiring dengan penambahan outstanding utang pemerintah dalam rangka pembiayaan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, serta pembiayaan berbagai proyek pembangunan dan infrastruktur.

II.2.A.4. Regional Kalimantan

Hasil konsolidasian antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah regional Kalimantan menunjukkan bahwa pendapatan negara dan hibah mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Pendapatan negara dan hibah menunjukkan peningkatan sebesar 20,04 persen pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penerimaan negara.

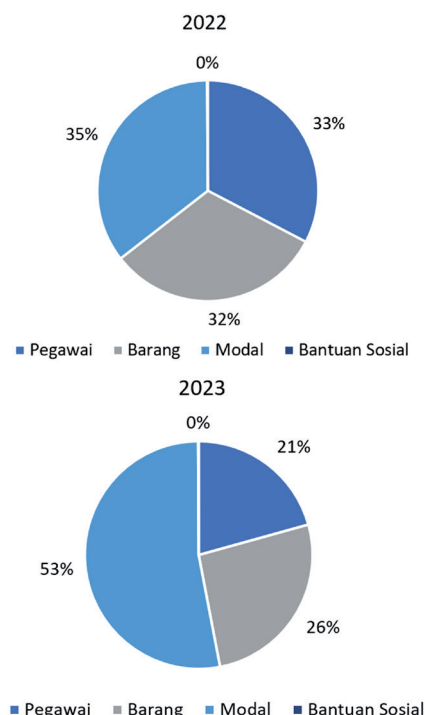
Selain Pendapatan Negara yang tumbuh, Belanja Negara pada regional Kalimantan juga

Tabel 2. 6. APBN Regional Kalimantan

Uraian	2021	2022	2023	growth 2023 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	51,58	78,44	94,16	20,04%
Penerimaan Perpajakan	47,15	73,15	85,42	16,78%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,43	5,29	8,74	65,16%
Penerimaan Hibah	0	0	0	0%
Belanja Negara	123,88	154,72	209,49	35,40%
Belanja Pemerintah Pusat	40,85	41,97	66,27	57,91%
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa	83,03	112,75	143,22	27,02%
Surplus/Defisit Anggaran	(72,30)	(76,28)	(115,33)	51,19%
SILPA/SIKPA	(72,30)	(76,28)	(115,33)	51,19%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 19. Komposisi Belanja Regional Kalimantan



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

tumbuh sebesar 35,40 persen. Pertumbuhan terbesar terdapat pada Belanja Pemerintah Pusat sebesar 57,91 persen yang dipengaruhi adanya alokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur Selain Belanja Pemerintah Pusat, Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga mengalami peningkatan sebesar 27,02 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya alokasi dana yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat daerah.

Secara total, belanja pemerintah pusat dengan proporsi tertinggi sekaligus menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 terdapat pada belanja modal sebesar 52,93 persen. Peningkatan belanja modal tersebut sebagian besar digunakan untuk pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur yang telah dimulai sejak tahun 2022. Selain itu, peningkatan tersebut juga mencerminkan adanya investasi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di Kalimantan.

Peningkatan belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

II.2.A.5. Regional Sulawesi

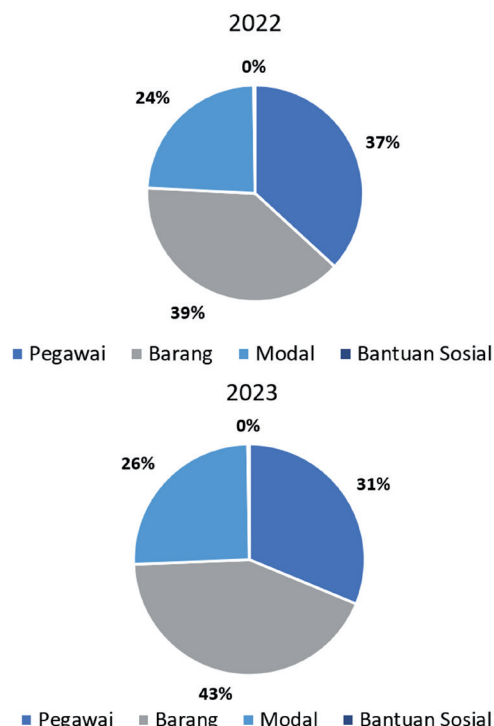
Pendapatan negara dan hibah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat, yang dapat diatribusikan kepada berbagai faktor seperti kebijakan perpajakan yang efektif dan peningkatan aktivitas ekonomi. Peningkatan pendapatan negara dan hibah memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan pendapatan negara dan hibah pada tahun 2023 sebesar 9,09 persen menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan efektivitas dalam pengumpulan pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami pertumbuhan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain selain pajak, seperti dividen, aset negara, dan lain sebagainya. Peningkatan yang relatif signifikan pada tahun 2023 (24,58 persen) menunjukkan adanya potensi dalam meningkatkan penerimaan negara dari sumber-sumber tersebut.

Tabel 2. 7. APBN Regional Sulawesi

Uraian	2021	2022	2023	growth 2023 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	28,94	37,11	40,48	9,09%
Penerimaan Perpajakan	23,71	31,18	33,10	6,14%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,23	5,93	7,38	24,58%
Penerimaan Hibah	0	0	0	0%
Belanja Negara	144,04	144,00	159,42	10,71%
Belanja Pemerintah Pusat	52,41	52,79	62,89	19,14%
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa	91,63	91,21	96,53	5,83%
Surplus/Defisit Anggaran	(115,10)	(106,89)	(118,94)	11,27%
SILPA/SIKPA	(115,10)	(106,89)	(118,94)	11,27%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 20. Komposisi Belanja Regional Sulawesi



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Belanja Negara mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2023, dengan pertumbuhan moderat. Peningkatan belanja negara mencerminkan alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan, proyek, dan program pemerintah. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2023 (10,71 persen) menunjukkan adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara total, belanja pemerintah pusat dengan proporsi tertinggi sekaligus menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2023 terdapat pada belanja barang sebesar 43,11 persen. Kenaikan anggaran belanja barang dari tahun 2022 ke tahun 2023 tersebut menunjukkan peningkatan kebutuhan akan barang dan perlengkapan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan di wilayah Sulawesi. Hal ini dapat mengindikasikan pertumbuhan sektor ekonomi di daerah tersebut, termasuk peningkatan aktivitas bisnis dan perdagangan.

II.2.A.6. Regional Bali-Nusa Tenggara

Hasil konsolidasian antara Laporan Keuangan

Pemerintah Konsolidasian pada regional Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami defisit. Meski begitu, pendapatan negara dan hibah mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan pada tahun 2021 hingga 2023 dapat diatribusikan kepada upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan perbaikan kondisi perekonomian secara umum. Komponen pendapatan negara berupa Penerimaan perpajakan juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023.

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 hingga 2023 mencerminkan pemulihan

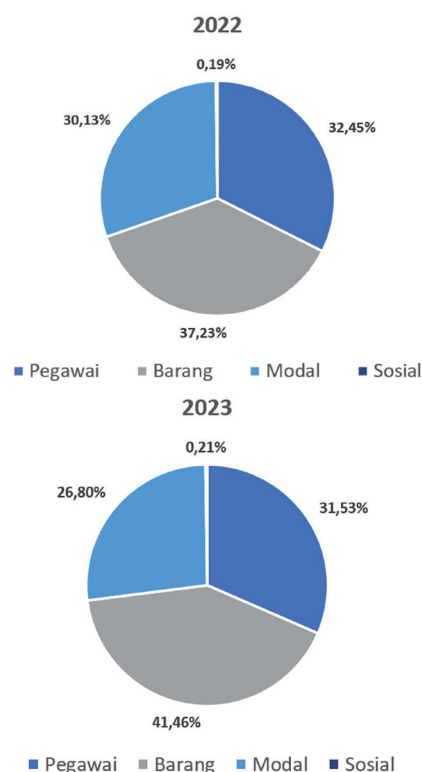
Tabel 2. 8. APBN Regional Bali-Nusa Tenggara

Uraian	2021	2022	2023	growth 23 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	17,77	23,28	30,10	29,30%
Penerimaan Perpajakan	14,44	18,58	23,57	26,86%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,33	4,70	6,53	38,94%
Penerimaan Hibah	0	0	0	0%
Belanja Negara	82,45	82,61	86,08	4,20%
Belanja Pemerintah	33,01	32,71	33,60	2,72%
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa	49,45	49,90	52,48	5,17%
Surplus/Defisit Anggaran	(64,69)	(59,33)	(55,98)	(5,65%)
SILPA/SIKPA	(64,69)	(59,33)	(55,98)	(5,65%)

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

ekonomi dan upaya pengembalian aktivitas ekonomi yang lebih kuat di sisi lain kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak juga semakin meningkat diiringi dengan peningkatan daya beli pada masyarakat. Penerimaan negara bukan pajak juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih proaktif dalam meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari sektor energi, pengelolaan aset negara, atau

Grafik 2. 21. Komposisi Belanja Regional Bali-Nusa Tenggara



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

dana-dana lainnya.

Sementara itu, belanja negara menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, belanja negara masih dalam keadaan tekanan ekonomi yang ketat karena adanya kebijakan pemotongan anggaran dan penyesuaian keuangan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 dan 2023, belanja negara mengalami peningkatan yang moderat, menunjukkan upaya pemulihan ekonomi dan pengembalian kegiatan pemerintah.

Dari Grafik 2.21 dapat terlihat bahwa terdapat penurunan proporsi belanja pegawai dari tahun 2022 ke 2023. Hal ini dapat mengindikasikan adanya penurunan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik di wilayah Bali-Nusra. Berbeda dengan belanja pegawai, belanja barang justru mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memenuhi

kebutuhan barang dan jasa di wilayah tersebut. Di sisi lain terjadi penurunan proporsi belanja modal dari tahun 2022 ke 2023. Hal ini dapat menunjukkan adanya pengurangan investasi dalam pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek pengembangan di wilayah Bali Nusa. Selain itu, terdapat peningkatan proporsi pada belanja bantuan sosial. Hal ini merupakan respons pemerintah daerah terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang membutuhkan dukungan tambahan, terutama masa pemulihan aktivitas perekonomian setelah pandemi COVID-19.

II.2.A.7. Regional Papua-Maluku

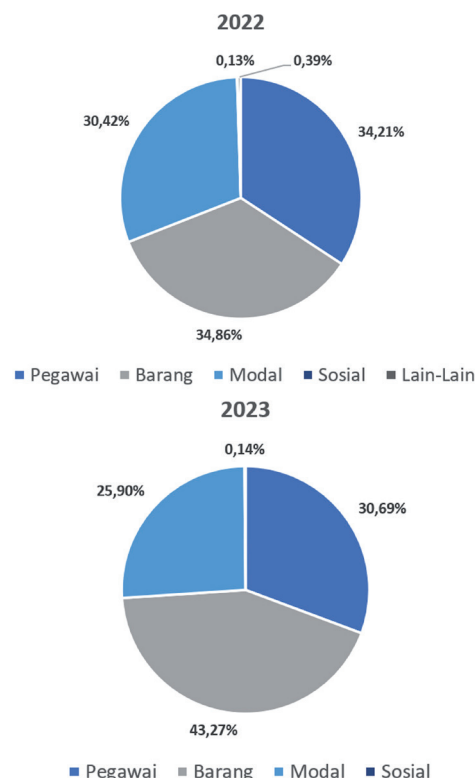
Hasil Konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah regional Maluku dan Papua menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami defisit anggaran. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan penanganan masalah keuangan yang muncul dalam periode tersebut. Pendapatan Negara dan Hibah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan dalam aktivitas ekonomi, kebijakan perpajakan yang efektif, dan penerimaan hibah dari lembaga

Tabel 2. 9. APBN Regional Papua-Maluku

Uraian	2021	2022	2023	growth 23 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	18,04	22,88	25,69	12,28%
Penerimaan Perpajakan	16,51	21,05	22,89	8,74%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,54	1,83	2,79	52,46%
Penerimaan Hibah	0	0	0	0%
Belanja Negara	122,44	128,81	136,44	5,92%
Belanja Pemerintah	36,37	33,90	38,00	12,09%
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa	86,08	94,90	98,44	3,73%
Surplus/Defisit Anggaran	(104,40)	(105,92)	(110,75)	4,56%
SILPA/SIKPA	(104,40)	(105,92)	(110,75)	4,56%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 22. Komposisi Belanja Regional Maluku-Papua



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

donor atau mitra negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, peningkatan ini dapat disebabkan oleh perluasan basis penerimaan negara di luar sektor perpajakan, seperti penerimaan dari sektor sumber daya alam, investasi, dan sektor non-pajak lainnya.

Terdapat fluktuasi dan perubahan dalam belanja negara, belanja pemerintah, belanja transfer ke daerah dan dana desa dari tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan belanja negara pada tahun 2023 digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya. Adapun peningkatan transfer ke daerah dan dana desa mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan keuangan kepada daerah untuk pembangunan lokal.

Dari Grafik 2.22 dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan signifikan pada proporsi belanja barang dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan kebutuhan akan barang dan perlengkapan dalam menjalankan

berbagai program dan kegiatan di wilayah Maluku dan Papua. Berbeda dengan belanja barang, proporsi belanja modal mengalami penurunan dari tahun 2022. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan pengurangan investasi dalam pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek pengembangan serta penyesuaian kebutuhan infrastruktur di wilayah Maluku dan Papua.

II.2.B. APBD Regional

II.2.B.1. Gambaran Umum

Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan rencana keuangan mereka untuk tahun tersebut. APBD tahun 2023 memberikan gambaran umum mengenai sumber pendapatan dan alokasi belanja yang akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Dalam APBD Tahun 2023, terdapat beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, dan Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah. Pendapatan ini akan menjadi sumber dana untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah daerah.

Selanjutnya, alokasi belanja daerah juga menjadi bagian penting dari APBD Tahun 2023. Belanja daerah mencakup berbagai jenis belanja, seperti belanja operasional, belanja pembangunan infrastruktur, belanja program sosial, dan belanja administrasi pemerintahan daerah. Tujuan dari alokasi belanja ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, APBD Tahun 2023 juga mencerminkan surplus atau defisit anggaran. Jika pendapatan daerah melebihi belanja daerah, maka terdapat surplus anggaran. Sebaliknya, jika belanja daerah melebihi pendapatan daerah, maka terdapat defisit anggaran. Surplus anggaran dapat digunakan

untuk kegiatan investasi atau memperkuat cadangan keuangan daerah, sedangkan defisit anggaran dapat diatasi melalui pembiayaan daerah.

Dalam APBD Tahun 2023, juga terdapat pembiayaan daerah yang merupakan sumber dana tambahan untuk memenuhi kekurangan pendapatan atau pembiayaan belanja yang tidak dapat ditutupi oleh pendapatan daerah. Pembiayaan daerah dapat berasal dari pinjaman, hibah, penjualan aset, atau sumber-sumber lainnya.

Terakhir, APBD Tahun 2023 juga mencakup sisa anggaran dari tahun sebelumnya yang disebut sebagai SiLPA/SiKPA. Sisa anggaran ini dapat dialokasikan kembali untuk kegiatan atau program lain pada tahun berikutnya.

Dalam rangkaian pengelolaan APBD Tahun 2023 pemerintah daerah akan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta kondisi ekonomi dan keuangan saat itu. Tujuan utama dari APBD Tahun 2023 adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik di wilayah pemerintah daerah tersebut.

II.2.B.2. Regional Sumatera

Secara umum, terdapat peningkatan

Tabel 2. 10. APBD Regional Sumatera

Sumatera	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	280,59	280,23	287,62
Pendapatan Asli Daerah	54,71	57,29	62,18
Pendapatan Transfer	218,19	220,28	223,87
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7,70	2,67	1,58
Belanja Daerah	293,71	279,76	293,90
Belanja Operasi	200,14	185,99	197,16
Belanja Modal	46,15	48,03	50,12
Belanja Tidak Terduga	2,82	0,54	0,32
Belanja Transfer	44,60	45,21	46,29
Surplus/Defisit	(13,12)	0,47	(6,28)
Pembiayaan Daerah	13,52	23,92	18,86
Penerimaan Pembiayaan	16,11	26,24	20,96
Pengeluaran Pembiayaan	2,59	2,32	2,10
SiLPA/SiKPA	0,41	24,39	12,58

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar 2,64 persen, semula Rp280,23 triliun menjadi Rp287,62 triliun. Kenaikan pendapatan daerah menunjukkan peningkatan adanya perbaikan yang signifikan dalam penerimaan negara seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi baik dalam hal produksi maupun konsumsi pada tahun 2023. Hal tersebut juga ditunjukkan dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, antara lain berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp9,45 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp6,42 triliun, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp7,70 triliun.

Selain itu, terdapat peningkatan pendapatan transfer dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 1,63 persen, semula Rp220,28 triliun menjadi Rp223,87 triliun seiring dengan kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah. Dari sisi belanja daerah, terdapat peningkatan belanja sebesar 5,05 persen, semula Rp279,76 triliun menjadi Rp293,90 triliun pada tahun 2023. Alokasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masih menjadi belanja daerah dengan proporsi terbesar, yaitu sebesar Rp98,59 triliun dan Rp83,96 triliun.

Dari sisi surplus/defisit anggaran, terjadi defisit pada tahun 2023 sebesar Rp6,28 triliun. Hal tersebut dapat disebabkan oleh peningkatan belanja daerah yang melampaui pendapatan yang diterima. Pembiayaan daerah juga mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Penggunaan SiLPA dalam rangka menutup defisit anggaran menyebabkan penurunan yang signifikan sebesar 48,42 persen pada SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kas Peraturan Penggunaan Anggaran) tahun 2023.

II.2.B.3. Regional Jawa

Secara umum, terdapat peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar 26,64 persen, semula Rp400,28 triliun menjadi Rp506,92 triliun. Kenaikan pendapatan

Tabel 2. 11. APBD Regional Jawa

Jawa	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	474,70	400,28	506,92
Pendapatan Asli Daerah	187,20	179,14	208,15
Pendapatan Transfer	273,95	215,95	295,54
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13,55	5,19	3,23
Belanja Daerah	505,65	459,76	508,59
Belanja Operasi	358,57	328,45	362,10
Belanja Modal	68,04	60,09	65,31
Belanja Tidak Terduga	5,42	1,18	0,82
Belanja Transfer	73,62	70,05	80,36
Surplus/Defisit	(30,95)	(59,49)	(1,67)
Pembiayaan Daerah	30,97	48,31	37,76
Penerimaan Pembiayaan	44,42	56,24	50,74
Pengeluaran Pembiayaan	13,45	7,93	12,98
SiLPA/SiKPA	0,03	(11,18)	36,09

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

daerah menunjukkan peningkatan adanya perbaikan yang signifikan dalam penerimaan negara seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi baik dalam hal produksi maupun konsumsi pada tahun 2023. Hal tersebut juga ditunjukkan dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, antara lain berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp36,22 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp22,81 triliun, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp22,39 triliun.

Selain itu, terdapat peningkatan pendapatan transfer dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 36,86 persen, semula Rp215,95 triliun menjadi Rp295,54 triliun seiring dengan kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah. Dari sisi belanja daerah, terdapat peningkatan belanja sebesar 10,62 persen, semula Rp459,76 triliun menjadi Rp508,59 triliun pada tahun 2023. Alokasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masih menjadi belanja daerah dengan proporsi terbesar, yaitu sebesar Rp158,01 triliun dan Rp157,14 triliun.

Dari sisi surplus/defisit anggaran, terjadi penurunan defisit yang signifikan pada

tahun 2023 sebesar 97,20 persen, semula Rp59,49 triliun menjadi Rp1,67 triliun seiring dengan peningkatan pendapatan daerah yang diterima untuk membiayai berbagai belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Penurunan pembiayaan dikarenakan adanya kenaikan yang signifikan pada komponen pengeluaran pembiayaan sebesar 63,68 persen, antara lain digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Adapun SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kas Peraturan Penggunaan Anggaran) yang sebelumnya menunjukkan nilai negatif, pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sebesar 422,81 persen. Peningkatan ini dapat mencerminkan adanya pengelolaan keuangan yang lebih baik di daerah Jawa.

II.2.B.4. Regional Kalimantan

Secara umum, terdapat peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar 23,75 persen, semula Rp133,06 triliun menjadi Rp164,67 triliun. Kenaikan pendapatan daerah menunjukkan peningkatan adanya perbaikan yang signifikan dalam penerimaan negara seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi baik dalam hal produksi maupun

Tabel 2. 12. APBD Regional Kalimantan

Kalimantan	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	107,30	133,06	164,67
Pendapatan Asli Daerah	22,97	28,85	34,97
Pendapatan Transfer	82,61	103,56	129,23
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1,72	0,65	0,47
Belanja Daerah	116,92	116,71	164,99
Belanja Operasi	75,85	74,72	96,18
Belanja Modal	21,85	22,80	43,80
Belanja Tidak Terduga	1,55	0,37	0,25
Belanja Transfer	17,68	18,82	24,77
Surplus/Defisit	(9,62)	16,35	(0,32)
Pembiayaan Daerah	9,95	11,95	23,62
Penerimaan Pembiayaan	10,88	13,83	29,98
Pengeluaran Pembiayaan	0,94	1,88	6,36
SiLPA/SiKPA	0,33	28,30	23,30

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

konsumsi pada tahun 2023. Hal tersebut juga ditunjukkan dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, antara lain berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3,48 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp3,53 triliun, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp10,03 triliun.

Selain itu, terdapat peningkatan pendapatan transfer dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 24,78 persen, semula Rp103,56 triliun menjadi Rp129,23 triliun seiring dengan kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah. Dari sisi belanja daerah, terdapat peningkatan belanja sebesar 41,37 persen, semula Rp116,71 triliun menjadi Rp164,99 triliun pada tahun 2023. Alokasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masih menjadi belanja daerah dengan proporsi terbesar, yaitu sebesar Rp39,37 triliun dan Rp48,58 triliun.

Dari sisi surplus/defisit anggaran, setelah sebelumnya surplus pada tahun 2022, terjadi defisit pada tahun 2023 sebesar Rp0,32 triliun seiring dengan peningkatan belanja daerah yang melampaui pendapatan yang diterima. Di sisi lain, pembiayaan daerah mengalami peningkatan sebesar 97,61 persen dari tahun 2022 ke 2023. Peningkatan pembiayaan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang signifikan pada komponen penerimaan pembiayaan sebesar 116,80 persen, yaitu menjadi sebesar Rp29,28 triliun, antara lain berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Adapun SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kas Peraturan Penggunaan Anggaran) mengalami penurunan sebesar 17,69 persen pada tahun 2023, antara lain karena adanya pembiayaan untuk menutup defisit anggaran, serta penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebesar Rp5,12 triliun.

II.2.B.5. Regional Sulawesi

Secara umum, terdapat peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar 6,74 persen, semula Rp112,53 triliun menjadi

Tabel 2. 13. APBD Regional Sulawesi

Sulawesi	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	110,14	112,53	120,11
Pendapatan Asli Daerah	18,91	19,14	22,81
Pendapatan Transfer	88,23	91,90	96,46
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3,00	1,49	0,83
Belanja Daerah	117,91	110,37	123,14
Belanja Operasi	77,33	74,20	83,88
Belanja Modal	24,23	21,40	21,93
Belanja Tidak Terduga	0,92	0,44	0,20
Belanja Transfer	15,44	14,33	17,13
Surplus/Defisit	(7,78)	2,15	(3,03)
Pembiayaan Daerah	7,78	11,49	9,55
Penerimaan Pembiayaan	8,81	12,66	11,14
Pengeluaran Pembiayaan	1,04	1,17	1,59
SiLPA/SiKPA	0,00	13,64	6,51

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Rp120,11 triliun. Kenaikan pendapatan daerah menunjukkan peningkatan adanya perbaikan yang signifikan dalam penerimaan negara seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi baik dalam hal produksi maupun konsumsi pada tahun 2023. Hal tersebut juga ditunjukkan dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, antara lain berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp2,67 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1,94 triliun, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp1,84 triliun.

Selain itu, terdapat peningkatan pendapatan transfer dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 4,97 persen, semula Rp91,90 triliun menjadi Rp96,46 triliun seiring dengan kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah. Dari sisi belanja daerah, terdapat peningkatan belanja sebesar 11,57 persen, semula Rp110,37 triliun menjadi Rp123,14 triliun pada tahun 2023. Alokasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masih menjadi belanja daerah dengan proporsi terbesar, yaitu sebesar Rp43,13 triliun dan Rp35,55 triliun.

Dari sisi surplus/defisit anggaran, setelah sebelumnya surplus pada tahun 2022, terjadi

defisit pada tahun 2023 sebesar Rp3,03 triliun seiring dengan peningkatan belanja daerah yang melampaui pendapatan yang diterima. Pembiayaan daerah juga mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Penggunaan SiLPA dalam rangka menutup defisit anggaran menyebabkan penurunan yang signifikan sebesar 52,25 persen pada SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/ Sisa Kas Peraturan Penggunaan Anggaran) tahun 2023.

II.2.B.6. Regional Bali-Nusa Tenggara

Secara umum, terdapat peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar 32,11 persen, semula Rp59,86 triliun menjadi Rp79,09 triliun. Kenaikan pendapatan daerah menunjukkan peningkatan adanya perbaikan yang signifikan dalam penerimaan negara seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi baik dalam hal produksi maupun konsumsi pada tahun 2023. Hal tersebut juga ditunjukkan dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, antara lain berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp2,28 triliun, Pajak Hotel sebesar Rp5,34 triliun, dan Pajak Restoran sebesar Rp2,20 triliun.

Selain itu, terdapat peningkatan pendapatan

Tabel 2. 14. APBD Regional Bali-Nusa Tenggara

Bali-Nusa Tenggara	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	72,21	59,86	79,09
Pendapatan Asli Daerah	16,95	15,94	24,06
Pendapatan Transfer	53,17	43,54	54,49
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2,09	0,39	0,53
Belanja Daerah	78,80	67,17	77,97
Belanja Operasi	53,69	43,74	53,60
Belanja Modal	13,54	13,73	11,70
Belanja Tidak Terduga	0,50	0,18	0,12
Belanja Transfer	11,08	9,51	12,55
Surplus/Defisit	(6,59)	(7,30)	1,12
Pembiayaan Daerah	6,59	2,79	3,22
Penerimaan Pembiayaan	7,52	3,57	4,80
Pengeluaran Pembiayaan	0,93	0,78	1,58
SiLPA/SiKPA	0,00	(4,52)	4,35

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

transfer dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 25,16 persen, semula Rp43,54 triliun menjadi Rp54,49 triliun seiring dengan kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah. Dari sisi belanja daerah, terdapat peningkatan belanja sebesar 16,07 persen, semula Rp67,17 triliun menjadi Rp77,97 triliun pada tahun 2023. Alokasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masih menjadi belanja daerah dengan proporsi terbesar, yaitu sebesar Rp26,48 triliun dan Rp21,45 triliun.

Dari sisi surplus/defisit anggaran, setelah sebelumnya defisit pada tahun 2022, terjadi surplus pada tahun 2023 sebesar Rp1,12 triliun seiring dengan peningkatan pendapatan daerah yang diterima untuk membiayai berbagai belanja daerah. Pembiayaan daerah juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Sejalan dengan hal tersebut, SiLPA/ SiKPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kas Peraturan Penggunaan Anggaran) yang sebelumnya menunjukkan nilai negatif, pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sebesar 196,16 persen. Peningkatan ini dapat mencerminkan adanya pengelolaan keuangan yang lebih baik di daerah Bali-Nusra.

II.2.B.7. Regional Papua-Maluku

Secara umum, terdapat penurunan pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar 43,41 persen, semula Rp173,21 triliun menjadi Rp98,02 triliun. Penurunan pendapatan daerah tersebut sebagian besar dikontibusi oleh penurunan Pendapatan Transfer sebesar 46,03 persen, semula Rp162,48 triliun menjadi Rp87,69 triliun.

Dari sisi belanja daerah juga terdapat penurunan belanja sebesar 39,84 persen, semula Rp158,40 triliun menjadi Rp95,29 triliun pada tahun 2023. Alokasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masih menjadi belanja daerah dengan proporsi terbesar, yaitu sebesar Rp23,87 triliun dan Rp30,32 triliun. Dari sisi surplus/defisit anggaran, setelah sebelumnya surplus pada tahun 2022, pada

Tabel 2. 15. APBD Regional Papua-Maluku

Papua-Maluku	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	95,95	173,21	98,02
Pendapatan Asli Daerah	8,10	9,91	8,76
Pendapatan Transfer	86,33	162,48	87,69
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1,52	0,82	1,57
Belanja Daerah	100,77	158,40	95,29
Belanja Operasi	63,35	98,43	61,07
Belanja Modal	19,82	36,93	20,98
Belanja Tidak Terduga	0,78	1,38	0,81
Belanja Transfer	16,82	21,66	12,42
Surplus/Defisit	(4,82)	14,82	2,73
Pembiayaan Daerah	4,88	8,37	5,35
Penerimaan Pembiayaan	6,49	10,70	6,66
Pengeluaran Pembiayaan	1,61	2,33	1,31
SiLPA/SiKPA	0,06	23,18	8,08

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Regional Maluku-Papua kembali terjadi surplus pada tahun 2023 sebesar Rp2,73 triliun seiring dengan belanja daerah yang tetap terkendali. Adapun SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kas Peraturan Penggunaan Anggaran) tetap menunjukkan nilai yang positif, yaitu sebesar Rp8,08 triliun, meskipun mengalami penurunan sebesar 65,13 persen pada tahun 2023, antara lain karena adanya pembiayaan untuk menutup defisit anggaran, serta penurunan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2023.

II.3. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGRERAT

II.3.A. Pendahuluan

Secara garis besar, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terkait penerimaan dan belanja negara untuk mencapai tujuan pemerintah seperti penurunan ketimpangan dan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan. Umumnya, kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*) dan kebijakan fiskal kontraksi (*contractionary fiscal policy*). Perbedaan keduanya terletak pada pendirian pemerintah mengenai penerimaan dan belanjanya.

Kebijakan fiskal yang ekspansif terjadi ketika

pemerintah meningkatkan belanjanya serta menurunkan penerimaan pajak. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi ekspansif adalah mendorong perekonomian. Sebaliknya, suatu kebijakan fiskal dapat dikategorikan kontraksioner ketika pemerintah menurunkan pengeluarannya dan meningkatkan tarif pajak. Kebijakan fiskal kontraksioner bertujuan untuk meredam tekanan inflasi yang terjadi ketika perekonomian mengalami *overheating*.

Selanjutnya, berdasarkan polanya terhadap siklus bisnis (*business cycle*) kebijakan fiskal dapat dikategorikan menjadi prosiklikal (*pro-cyclical fiscal policy*) dan kontrasiklikal (*counter-cyclical fiscal policy*). Kebijakan fiskal prosiklikal bersifat mengikuti pola siklus bisnis, apabila perekonomian sedang berada dalam resesi maka pengeluaran pemerintah juga ikut rendah. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontrasiklikal bersifat bertentangan dengan siklus bisnis, sehingga ketika perekonomian sedang dalam kondisi resesi maka pengeluaran pemerintah justru meningkat.

Pada tahun 2023 Indonesia masih menghadapi tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal. Tantangan pembangunan antara lain penguatan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, reformasi struktural (bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan reformasi birokrasi), serta dalam merespon dampak perubahan iklim dan disrupsi digitalisasi ekonomi. Sejalan dengan reformasi struktural dan konsolidasi fiskal, maka arah kebijakan fiskal tahun 2023 adalah ekspansif-konsolidatif secara bertahap dalam jangka menengah.

Secara umum, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
- akselerasi pembangunan infrastruktur;
- pemantapan reformasi birokrasi;

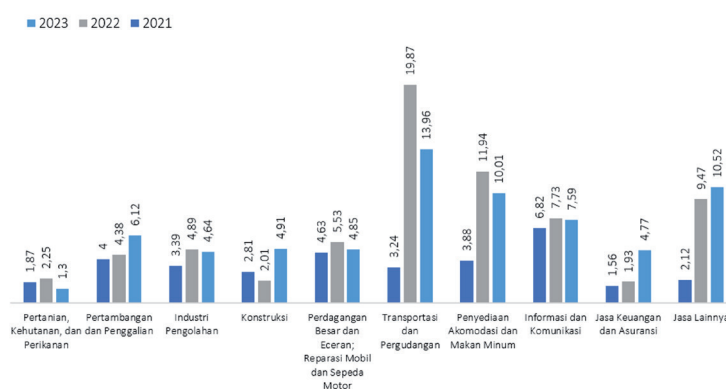
d. revitalisasi industri; dan

e. pembangunan ekonomi hijau.

Untuk mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2023, dibutuhkan keberlanjutan reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas dan efisiensi belanja, serta keberlanjutan pembiayaan.

Dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal suatu negara memiliki efek *multiplier* bagi pertumbuhan ekonomi. Instrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak, digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi global, serta mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah risiko volatilitas kondisi global, pengeluaran pemerintah melalui APBN Tahun 2023 berperan penting sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejala perekonomian global. Kerja keras APBN 2023 diwujudkan melalui akselerasi belanja negara terutama untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan

Grafik 2. 23. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 (c-to-c) Menurut Lapangan Usaha

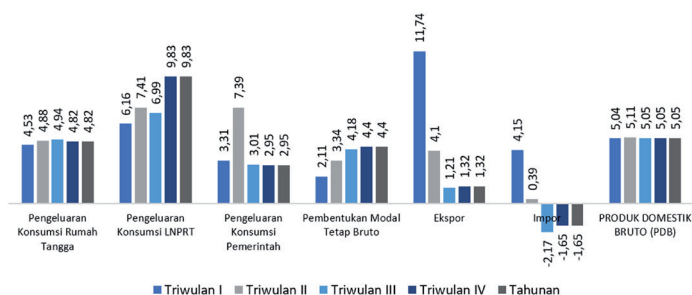


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga. Selain mampu menjalankan fungsinya secara

efektif, kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023 juga menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan ditopang pendapatan negara yang meningkat signifikan sehingga realisasi defisit berada pada angka 1,61 persen. Sepanjang tahun 2023, ekonomi Indonesia

Grafik 2. 24. Pertumbuhan Ekonomi PDB Tahun 2023 (c-to-c) Menurut Pengeluaran (Nasional)

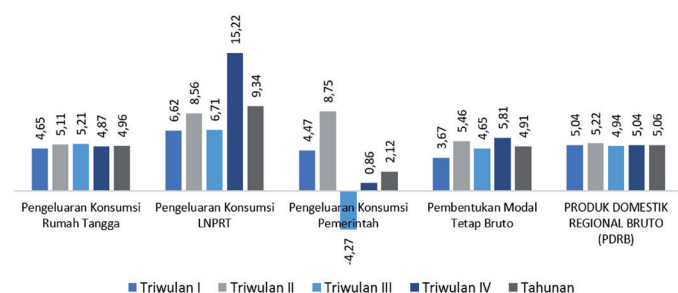


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

menunjukkan performa yang *resilient* dengan menjaga momentum pertumbuhan meskipun dihadapkan pada sejumlah tekanan dan ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 mencapai 5,05 persen (c-to-c). Pertumbuhan tersebut masih berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi global dan telah mendekati asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN sebesar 5,30 persen. Pertumbuhan positif juga ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat terlihat pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen seiring dengan meningkatnya aktivitas

Grafik 2. 25. Pertumbuhan Ekonomi PDB Tahun 2023 (c-to-c) Menurut Pengeluaran (Regional)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

logistik, angkutan penumpang, dan pengiriman barang; diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30 persen dan 4,85 persen.

Dari sisi output nasional, laju PDB tahun 2023 menurut Pengeluaran mengalami pertumbuhan hampir pada semua komponen kecuali komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) berkontraksi sebesar 1,65 persen. Komponen pengeluaran yang tumbuh signifikan adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,82 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,40 persen.

Dari sisi output regional, laju pertumbuhan PDRB seluruh provinsi tahun 2023 juga mengalami pertumbuhan dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai berturut-turut sebesar 5,04 persen; 5,22 persen; 4,94 persen; dan 5,04 persen sehingga pertumbuhan tahunan naik sebesar 5,06 persen.

II.3.B. Kontribusi Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB (PK-P)

II.3.B.1. Gambaran Umum

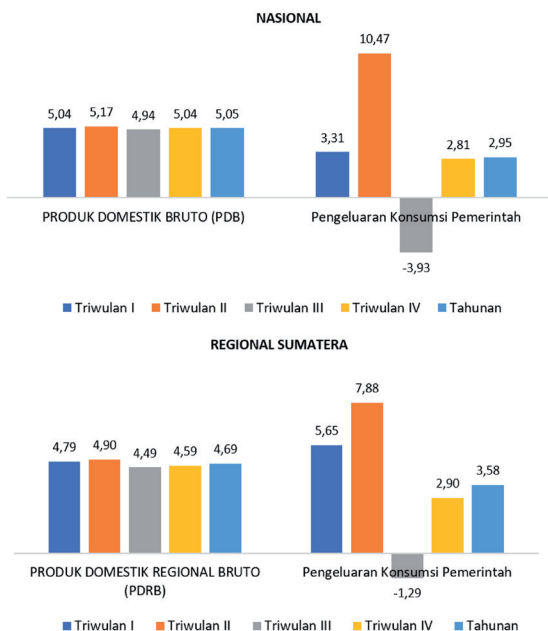
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tdk signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (*social transfer in kind-purchased market production*). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dicerminkan dari nilai yang berasal dari

kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa.

II.3.B.2. Regional Sumatera

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Sumatera mengalami pertumbuhan setiap triwulannya, kecuali triwulan III dengan nilai berturut-

Grifik 2. 27. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Sumatera



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 16. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Sumatera

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
ACEH	4,64	0,85	4,37	10,26	3,78	1,41	4,15	-8,74	4,23	-0,12
SUMATERA UTARA	4,87	4,93	5,19	6,16	4,94	-0,04	5,02	4,81	5,01	3,98
SUMATERA BARAT	4,80	4,83	5,13	5,55	4,28	-5,85	4,30	-1,04	4,62	0,39
RIAU	3,90	8,62	4,92	8,89	4,01	-1,37	4,02	15,38	4,21	7,94
JAMBI	4,94	8,40	4,86	9,93	4,84	-11,5	4,03	3,58	4,66	1,97
SUMATERA SELATAN	5,09	12,13	5,22	10,23	5,08	0,14	4,94	1,57	5,08	5,10
BENGKULU	4,10	2,41	4,18	10,61	3,97	6,20	4,76	5,33	4,26	6,23
LAMPUNG	4,94	3,01	4,00	4,62	3,93	-2,94	5,40	3,36	4,55	2,06
KEP. BANGKA										
BELITUNG	4,40	8,33	5,13	3,18	4,01	0,08	4,00	11,07	4,38	5,67
KEP. RIAU	6,51	5,29	5,04	10,35	4,88	1,18	4,45	8,58	5,20	6,84
REGIONAL SUMATERA	4,79	5,65	4,90	7,88	4,49	-1,29	4,59	2,90	4,69	3,58

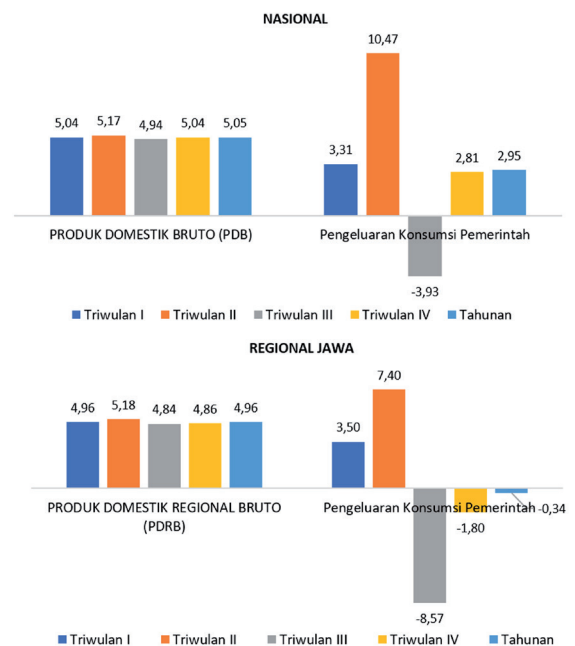
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

turut sebesar 5,65 persen; 7,88 persen; -1,29 persen; dan 2,9 persen sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 3,58 persen (*y-on-y*). Berdasarkan hal tersebut, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah relatif seimbang dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Adapun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada regional Sumatera telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 6,45 persen pada tahun 2023.

II.3.B.3. Regional Jawa

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Jawa menjadi salah satu komponen penyusun PDRB yang mengalami kontraksi penurunan dengan nilai sebesar 8,57 persen (*y-on-y*) pada triwulan III 2023 dan 1,80 persen pada triwulan IV 2023, sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi

Grifik 2. 26. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Jawa



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 17. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Jawa

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
DKI JAKARTA	4,93	1,93	5,14	5,88	4,94	-16,18	4,85	-5,04	4,96	-3,86
JAWA BARAT	5,01	8,45	5,25	13,76	4,58	-4,62	5,15	5,84	5,00	5,30
JAWA TENGAH	5,04	5,89	5,23	9,19	4,93	2,97	4,73	-2,35	4,98	2,85
DI YOGYAKARTA	5,31	2,15	5,17	4,42	4,96	0,68	4,86	2,21	5,07	2,35
JAWA TIMUR	4,96	1,93	5,26	5,77	4,87	1,46	4,69	-0,02	4,95	2,15
BANTEN	4,66	8,85	4,76	5,10	4,97	-11,56	4,85	0,11	4,81	0,07
REGIONAL JAWA	4,96	3,50	5,18	7,40	4,84	-8,57	4,86	-1,80	4,96	-0,34

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

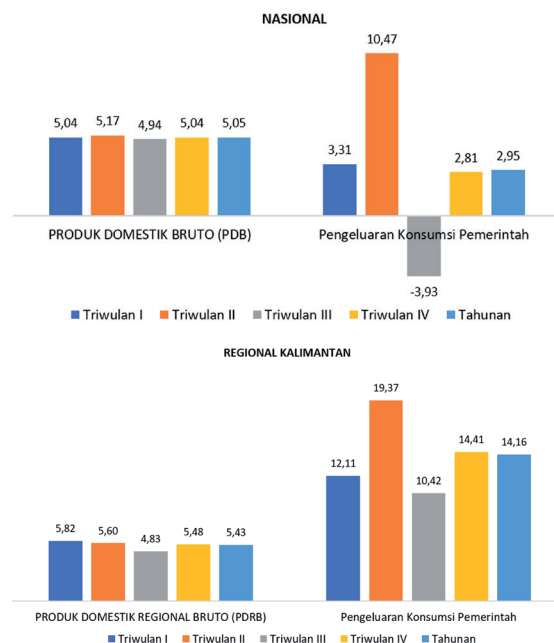
pemerintah turun sebesar 0,34 persen. Berdasarkan hal tersebut, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah relatif seimbang dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Adapun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada regional Jawa telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 4,07 persen pada tahun 2023.

II.3.B.4. Regional Kalimantan

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Kalimantan mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,42 persen (*y-on-y*) pada triwulan III 2023 dan 14,41 persen pada triwulan IV 2023, sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 14,61 persen (*y-on-y*). Berdasarkan hal tersebut laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Adapun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada regional Kalimantan telah memberikan kontribusi pada

PDRB sebesar 7,78 persen pada tahun 2023.

Grafik 2. 28. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Kalimantan



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 18. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Kalimantan

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
KALIMANTAN BARAT	4,65	15,84	4,00	16,03	4,27	-0,33	4,90	1,37	4,46	7,73
KALIMANTAN TENGAH	3,22	2,92	2,96	15,86	3,74	4,08	6,49	2,22	4,14	6,08
KALIMANTAN SELATAN	5,15	3,73	4,98	9,91	4,58	-0,83	4,69	6,09	4,84	4,83
KALIMANTAN TIMUR	6,99	26,1	6,89	37,82	5,30	38,42	5,76	38,15	6,22	36,40
KALIMANTAN UTARA	5,30	9,62	5,12	9,90	4,78	3,82	4,61	1,23	4,94	5,56
REGIONAL KALIMANTAN	5,82	12,11	5,60	19,37	4,83	10,42	5,48	14,41	5,43	14,16

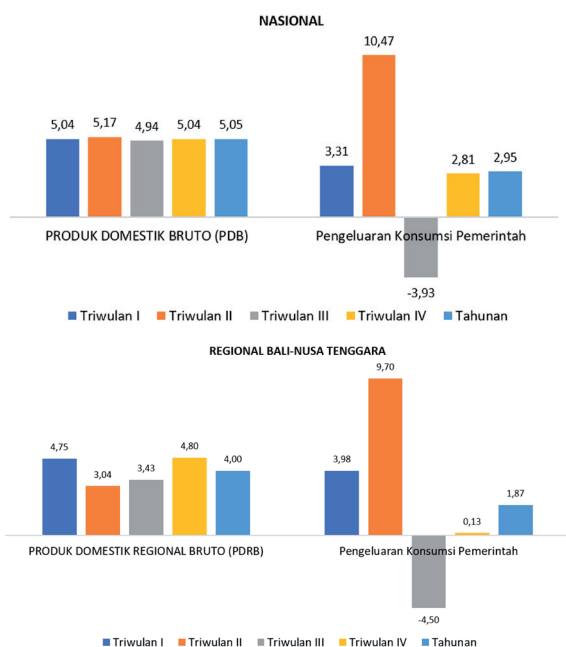
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

II.3.B.5. Regional Bali-Nusa Tenggara

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Bali-Nusa Tenggara mengalami kontraksi sebesar 4,50 persen (*y-on-y*) pada triwulan III 2023, kemudian tumbuh sebesar 0,13 persen pada triwulan IV 2023, sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 1,87 persen (*y-on-y*). Berdasarkan hal tersebut, laju pertumbuhan pengeluaran

konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah relatif seimbang dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Adapun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada regional Bali-Nusra telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 13,67 persen pada tahun 2023.

Grafik 2. 29. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Bali-Nusa Tenggara



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 19. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Bali-Nusa Tenggara

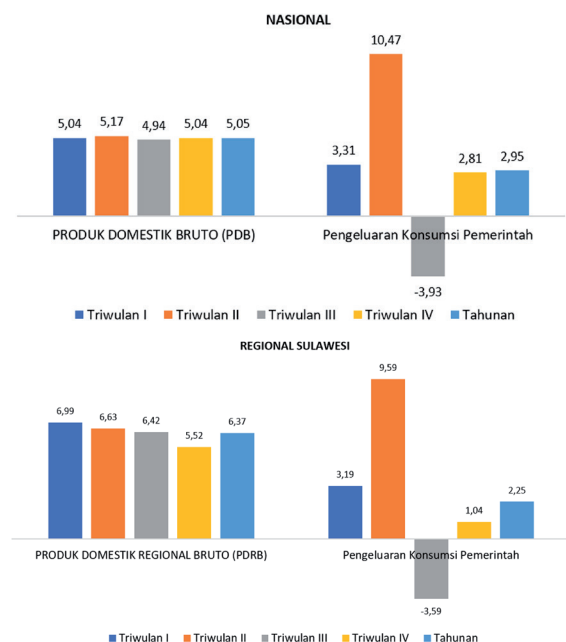
Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
BALI	6,07	3,64	5,58	14,00	5,36	-6,15	5,86	-3,76	5,71	1,09
NUSA TENGGARA BARAT	3,55	0,12	-1,54	5,20	1,58	-1,33	3,66	2,70	1,80	1,72
NUSA TENGGARA TIMUR	3,71	9,91	4,21	8,95	2,04	-5,31	4,14	2,35	3,52	2,83
REGIONAL BALI NUSRA	4,75	3,98	3,04	9,70	3,43	-4,50	4,80	0,13	4,00	1,87

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

II.3.B.6. Regional Sulawesi

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Sulawesi mengalami kontraksi sebesar 3,59 persen (yoy) pada triwulan III 2023, kemudian tumbuh sebesar 1,04 persen pada triwulan IV 2023, sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah naik sebesar 2,25 persen (yoy). Berdasarkan hal tersebut, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah relatif seimbang dibandingkan pertumbuhan

Grafik 2. 30. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Sulawesi



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 20. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Sulawesi

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
SULAWESI UTARA	5,25	0,16	6,28	2,22	5,40	-1,23	5,01	3,06	5,48	1,21
SULAWESI TENGAH	13,20	3,41	11,88	4,81	13,07	1,94	9,73	2,34	11,91	3,02
SULAWESI SELATAN	5,29	4,33	5,00	14,50	4,05	-8,00	3,79	-3,44	4,51	0,49
SULAWESI TENGGARA	6,48	4,15	4,85	14,18	4,92	5,15	5,25	3,27	5,35	6,64
GORONTALO	4,23	1,32	4,24	3,42	4,60	-0,10	4,92	-1,74	4,50	0,53
SULAWESI BARAT	3,43	7,81	6,12	9,23	6,91	-17,52	4,44	19,73	5,25	4,36
REGIONAL SULAWESI	6,99	3,19	6,63	9,59	6,42	-3,59	5,52	1,04	6,37	2,25

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Adapun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada regional Sulawesi telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 9,34 persen pada tahun 2023.

II.3.B.7. Regional Papua-Maluku

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Papua-Maluku mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,88 persen (*y-on-y*) pada triwulan III 2023 dan 2,70 persen pada triwulan IV 2023, sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah naik sebesar 4,91 persen. Berdasarkan hal tersebut, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah relatif seimbang dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi

Tabel 2. 21. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Papua-Maluku

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
MALUKU	5,75	1,27	5,81	18,37	4,53	-9,15	4,77	-3,4	5,21	0,49
MALUKU UTARA	17,01	4,64	21,91	7,68	25,13	3,98	17,99	6,85	20,49	5,93
PAPUA BARAT	3,13	3,67	2,91	20,15	3,69	24,35	5,89	5,92	3,91	12,87
PAPUA	-2,39	2,21	3,81	3,17	8,27	5,93	10,79	2,67	5,22	3,52
REGIONAL MALUKU PAPUA	2,09	2,65	6,17	8,86	9,10	5,88	10,15	2,70	6,94	4,91

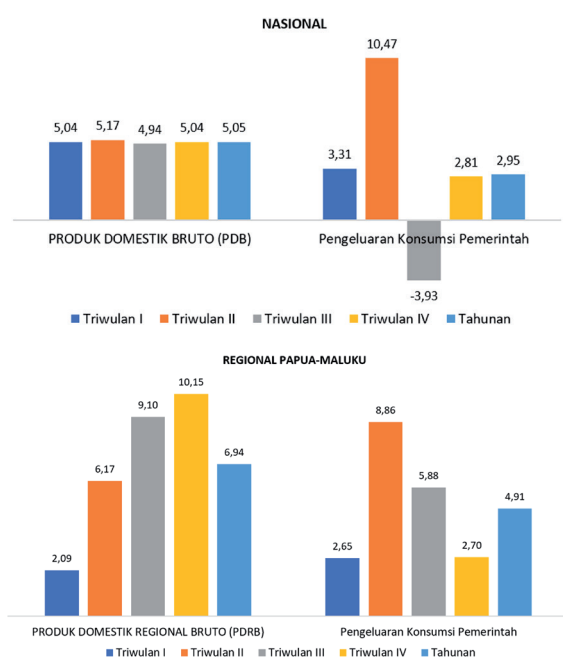
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Adapun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada regional Papua-Maluku telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 18,84 persen pada tahun 2023.

II.3.B.8. Kesimpulan

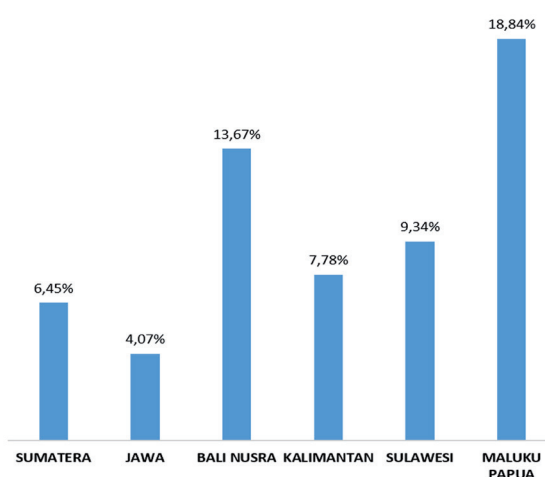
Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB tahun 2022 di tiap regional berkisar antara 4,07 persen – 18,84 persen. Dengan gap sebesar 14,76 persen, Regional Maluku-Papua menjadi kawasan yang memiliki kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB terbesar dan Regional Jawa menjadi kawasan dengan nilai kontribusi terendah.

Grafik 2. 31. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Papua-Maluku



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Grafik 2. 32. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Tiap Regional Terhadap PDRB 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

II.3.C. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto

II.3.C.1. Gambaran Umum

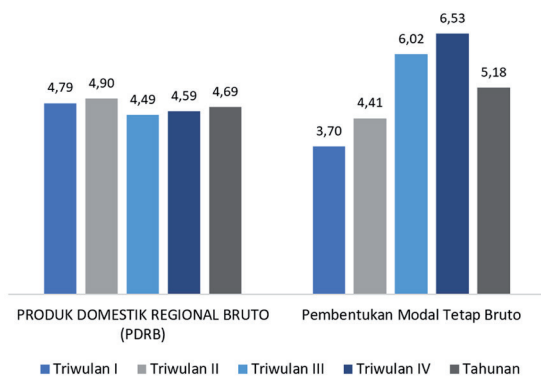
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Berdasarkan sistem informasi rujukan statistik di Badan Pusat Statistik (BPS), secara garis besar Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu.

II.3.C.2. Regional Sumatera

Pada tahun 2023, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Sumatera mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 3,70 persen; 4,41 persen; 6,02 persen; dan 6,53 persen, sehingga nilai Pembentukan

Grafik 2. 33. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Sumatera



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 22. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Sumatera

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
ACEH	4,64	5,46	4,37	7,78	3,78	5,50	4,15	4,88	4,23	5,88
SUMATERA UTARA	4,87	3,47	5,19	3,46	4,94	4,72	5,02	6,21	5,01	4,48
SUMATERA BARAT	4,80	6,70	5,13	6,63	4,28	9,30	4,30	8,13	4,62	7,70
RIAU	3,90	2,68	4,92	2,71	4,01	7,20	4,02	7,07	4,21	4,89
JAMBI	4,94	7,41	4,86	13,19	4,84	9,75	4,03	9,34	4,66	9,88
SUMATERA SELATAN	5,09	0,49	5,22	3,05	5,08	2,12	4,94	4,18	5,08	2,47
BENGKULU	4,10	3,25	4,18	2,25	3,97	5,19	4,76	2,04	4,26	3,17
LAMPUNG	4,94	2,81	4,00	2,14	3,93	4,37	5,4	7,08	4,55	4,14
KEP. BANGKA BELITUNG	4,40	1,91	5,13	5,35	4,01	8,01	4,00	4,17	4,38	4,85
KEP. RIAU	6,51	7,71	5,04	7,81	4,88	10,12	4,45	9,16	5,20	8,72
REGIONAL SUMATERA	4,79	3,70	4,90	4,41	4,49	6,02	4,59	6,53	4,69	5,18

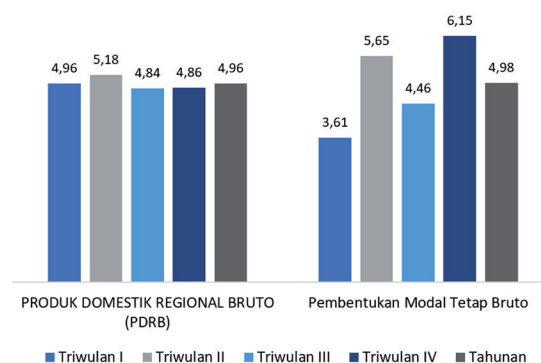
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Sumatera tumbuh sebesar 5,18 persen (*y-o-y*). Provinsi Jambi menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran PMTB dengan nilai sebesar 9,88 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 2,47 persen (*y-o-y*). Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto pada regional Sumatera telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 31,53 persen pada tahun 2023.

II.3.C.3. Regional Jawa

Pada tahun 2023, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Jawa mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 3,61 persen; 5,65 persen; 4,46 persen; dan 6,15 persen, sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada

Grafik 2. 34. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Jawa



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 23. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Jawa

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
DKI JAKARTA	4,93	1,56	5,14	4,42	4,94	4,38	4,85	5,17	4,96	3,89
JAWA BARAT	5,01	2,98	5,25	7,08	4,58	8,4	5,15	12,39	5,00	7,73
JAWA TENGAH	5,04	5,43	5,23	6,90	4,93	1,47	4,73	4,02	4,98	4,36
DI YOGYAKARTA	5,31	5,68	5,17	6,56	4,96	8,77	4,86	5,06	5,07	6,50
JAWA TIMUR	4,96	5,32	5,26	6,51	4,87	4,78	4,69	5,02	4,95	5,39
BANTEN	4,66	6,10	4,76	3,03	4,97	0,04	4,85	4,63	4,81	3,43
REGIONAL JAWA	4,96	3,61	5,18	5,65	4,84	4,46	4,86	6,15	4,96	4,98

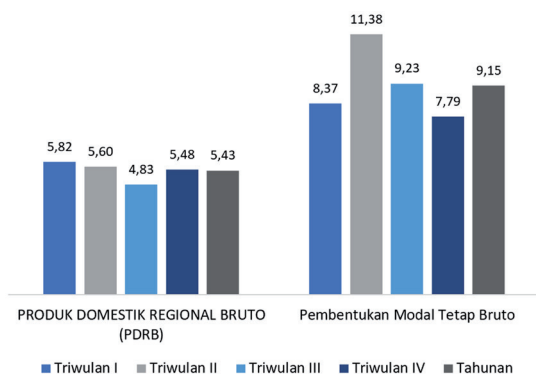
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Regional Jawa tumbuh sebesar 4,98 persen (*y-o-y*). Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai sebesar 7,73 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Banten menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 3,43 persen (*y-o-y*). Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto pada regional Jawa telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 34,34 persen pada tahun 2023.

II.3.C.4. Regional Kalimantan

Pada tahun 2023, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Kalimantan mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 8,37 persen; 11,38 persen; 9,23 persen; dan 7,79 persen, sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Kalimantan tumbuh sebesar 9,15 persen (*y-o-y*). Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan

Grafik 2. 35. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Kalimantan



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 24. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Kalimantan

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
KALIMANTAN BARAT	4,65	6,04	4,00	8,62	4,27	8,69	4,90	7,58	4,46	7,75
KALIMANTAN TENGAH	3,22	4,30	2,96	5,36	3,74	5,58	6,49	5,97	4,14	5,33
KALIMANTAN SELATAN	5,15	4,02	4,98	5,32	4,58	6,27	4,69	6,43	4,84	5,55
KALIMANTAN TIMUR	6,99	11,8	6,89	14,76	5,30	11,17	5,76	8,58	6,22	11,48
KALIMANTAN UTARA	5,30	3,92	5,12	15,65	4,78	8,97	4,61	8,46	4,94	9,13
REGIONAL KALIMANTAN	5,82	8,37	5,60	11,38	4,83	9,23	5,48	7,79	5,43	9,15

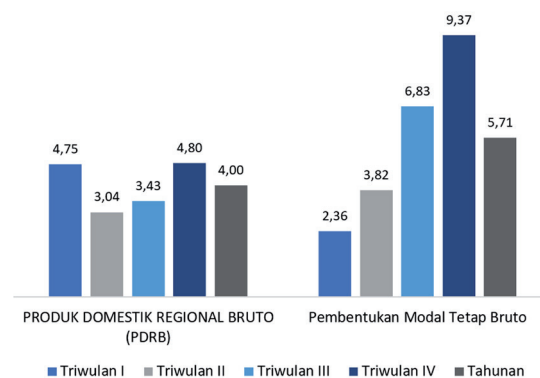
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai sebesar 11,48 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 5,33 persen (*y-o-y*). Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto pada regional Kalimantan telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 30,81 persen pada tahun 2023.

II.3.C.5. Regional Bali-Nusa Tenggara

Pada tahun 2023, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Bali-Nusra mengalami

Grafik 2. 36. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Bali-Nusa Tenggara



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 25. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Bali-Nusa Tenggara

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
BALI	6,07	-0,49	5,58	0,47	5,36	2,77	5,86	8,89	5,71	3,01
NUSA TENGGARA BARAT	3,55	6,21	-1,54	9,87	1,58	12,08	3,66	7,74	1,80	8,98
NUSA TENGGARA TIMUR	3,71	2,57	4,21	2,86	2,04	7,77	4,14	11,47	3,52	6,39
REGIONAL BALI NUSRA	4,75	2,36	3,04	3,82	3,43	6,83	4,80	9,37	4,00	5,71

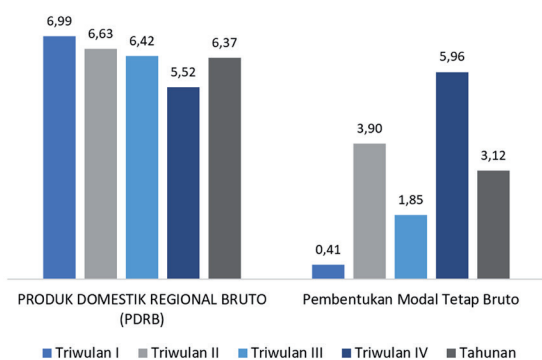
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

tren positif pada triwulan I, II, dan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 2,36 persen; 3,82 persen; 6,83 persen; dan 9,37 persen, sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Bali-Nusra tumbuh sebesar 5,71 persen (*y-o-y*). Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai sebesar 8,98 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Bali menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 3,01 persen (*y-o-y*). Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto pada regional Bali-Nusra telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 34,75 persen pada tahun 2023.

II.3.C.6. Regional Sulawesi

Pada tahun 2023, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Sulawesi mengalami tren positif pada triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 0,41 persen; 3,90 persen; 1,85 persen;

Grafik 2. 37. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Sulawesi



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 26. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Sulawesi

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
SULAWESI UTARA	5,25	-0,75	6,28	-2,53	5,40	9,67	5,01	3,15	5,48	2,58
SULAWESI TENGAH	13,20	-4,82	11,88	5,16	13,07	-3,94	9,73	8,02	11,91	1,14
SULAWESI SELATAN	5,29	5,18	5,00	5,66	4,05	1,49	3,79	6,32	4,51	4,61
SULAWESI TENGGARA	6,48	-4,04	4,85	1,63	4,92	7,42	5,25	5,36	5,35	2,82
GORONTALO	4,23	6,18	4,24	3,79	4,60	4,44	4,92	0,09	4,50	3,54
SULAWESI BARAT	3,43	-0,10	6,12	0,93	6,91	6,12	4,44	0,97	5,25	1,99
REGIONAL SULAWESI	6,99	0,41	6,63	3,90	6,42	1,85	5,52	5,96	6,37	3,12

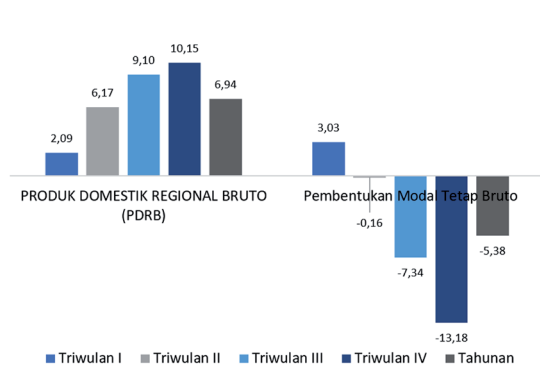
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

dan 5,96 persen, sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Sulawesi tumbuh sebesar 3,12 persen (*y-o-y*). Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai sebesar 4,61 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 1,14 persen (*y-o-y*). Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto pada regional Sulawesi telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 37,42 persen pada tahun 2023.

II.3.C.7. Regional Papua-Maluku

Pada tahun 2023, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Papua-Maluku mengalami kontraksi pada triwulan II sampai dengan triwulan IV berturut-turut sebesar 0,16 persen; 7,34 persen; dan 13,18 persen, sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Papua-Maluku turun sebesar 5,38 persen (*y-o-y*). Provinsi Papua menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan

Grafik 2. 38. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Papua-Maluku



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 27. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Papua-Maluku

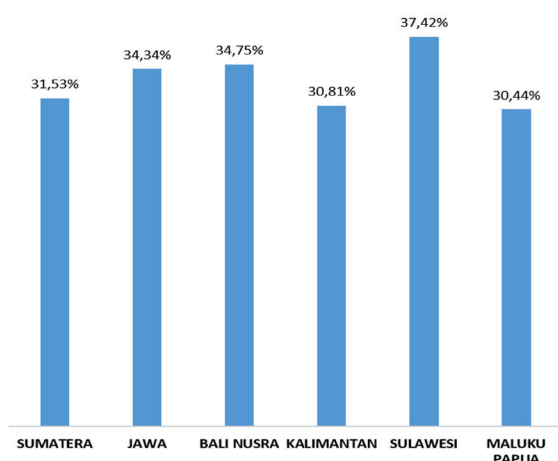
Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
MALUKU	5,75	3,87	5,81	-1,77	4,53	4,28	4,77	-2,2	5,21	0,93
MALUKU UTARA	17,01	6,38	21,91	-3,74	25,13	-25,52	17,99	-34,31	20,49	-19,59
PAPUA BARAT	3,13	-4,28	2,91	-7,05	3,69	-7,56	5,89	-18,16	3,91	-10,28
PAPUA	-2,39	2,88	3,81	3,400	8,27	2,83	10,79	3,22	5,22	3,08
REGIONAL MALUKU PAPUA	2,09	3,03	6,17	-0,16	9,10	-7,34	10,15	-13,18	6,94	-5,38

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

nilai sebesar 3,08 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi yang mengalami kontraksi tahunan tertinggi sebesar 19,59 persen (*y-o-y*). Kontraksi pertumbuhan pada Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh penurunan realisasi pembangunan dan kebutuhan bahan baku pembangunan smelter maupun infrastruktur pendukungnya di Maluku Utara. Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto pada regional Papua-Maluku telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 30,44 persen pada tahun 2023.

II.3.C.8. Kesimpulan

Grafik 2. 39. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tiap Regional Terhadap PDRB 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB tahun 2023 di tiap regional berkisar antara 30,44 persen –37,42 persen. Dengan gap sebesar 4,32 persen, Regional Sulawesi menjadi kawasan yang memiliki kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB terbesar dan Regional Maluku-Papua menjadi kawasan dengan nilai kontribusi terendah.

II.3.D. Kontribusi Konsumsi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Pemerintah (PK-LNPRT) Terhadap PDRB

II.3.D.1. Gambaran Umum

Lembaga non-profit (LNP) atau yang dikenal sebagai 'lembaga non-pemerintah memiliki peran penting di Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah

seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. LNP bergerak di bidang jasa sosial kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Kegiatan LNP memberdayakan masyarakat ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Perkumpulan Budi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1912), dan Organisasi Taman Siswa (1926) adalah LNP yang berpartisipasi meningkatkan sumber daya manusia Indonesia saat itu.

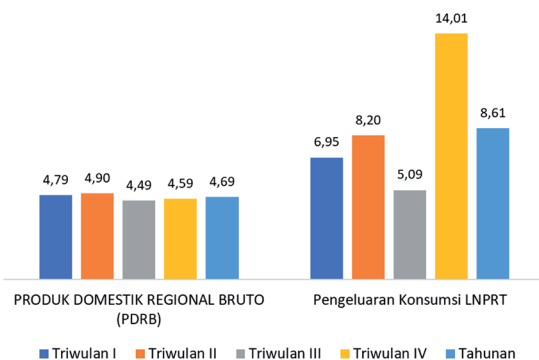
UU No. 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. LNP merupakan lembaga formal maupun informal yang dibentuk oleh perorangan, masyarakat, pemerintah, atau kalangan usaha dalam rangka menyediakan jasa sosial kemasyarakatan bagi anggota atau masyarakat tanpa ada motivasi meraih keuntungan. Salah satu jenis LNP adalah lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yaitu LNP yang tidak dikendalikan pemerintah, dibentuk dalam rangka menyediakan barang/jasa secara gratis atau dengan harga tidak signifikan secara ekonomi pada anggotanya/rumah tangga/kelompok masyarakat.

Menurut *System of National Accounts (SNA)* 2008, aktivitas LNPRT dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi. Aktivitas tersebut mencakup produksi, konsumsi, dan investasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa LNPRT merupakan salah satu pelaku dalam perekonomian nasional disamping pelaku ekonomi lain yang telah dikenal seperti rumah tangga, pemerintah, dan korporasi.

II.3.D.2. Regional Sumatera

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Sumatera mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan

Grafik 2. 40. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Sumatera



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 28. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sumatera

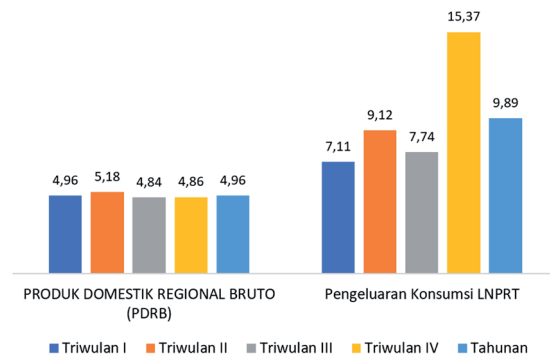
Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT
ACEH	4,64	5,14	4,37	4,81	3,78	0,59	4,15	21,88	4,23	8,21
SUMATERA UTARA	4,87	7,46	5,19	7,69	4,94	8,72	5,02	13,04	5,01	9,27
SUMATERA BARAT	4,80	4,10	5,13	6,98	4,28	0,65	4,30	15,89	4,62	6,79
RIAU	3,90	6,18	4,92	10,15	4,01	6,23	4,02	12,49	4,21	8,90
JAMBI	4,94	3,64	4,86	8,11	4,84	8,13	4,03	21,1	4,66	10,31
SUMATERA SELATAN	5,09	9,71	5,22	9,48	5,08	0,49	4,94	7,70	5,08	6,78
BENGKULU	4,10	9,12	4,18	8,77	3,97	9,42	4,76	13,4	4,26	10,22
LAMPUNG	4,94	6,90	4,00	9,29	3,93	8,53	5,40	17,36	4,55	10,59
KEP. BANGKA BELITUNG	4,40	3,81	5,13	5,05	4,01	1,04	4,00	12,16	4,38	5,54
KEP. RIAU	6,51	0,65	5,04	5,40	4,88	5,48	4,45	15,82	5,20	6,77
REGIONAL SUMATERA	4,79	6,95	4,90	8,20	4,49	5,09	4,59	14,01	4,69	8,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 6,95 persen; 8,2 persen; 5,09 persen; dan 14,01 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Sumatera tumbuh sebesar 8,61 persen (*y-o-y*). Provinsi Lampung menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 10,59 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 5,54 persen (*y-o-y*). Adapun Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada regional Sumatera telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 0,98 persen pada tahun 2023.

II.3.D.3. Regional Jawa

Grafik 2. 41. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Jawa



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 29. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Jawa

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT
DKI JAKARTA	4,93	7,95	5,14	9,53	4,94	6,27	4,85	15,43	4,96	9,84
JAWA BARAT	5,01	4,29	5,25	15,31	4,58	16,75	5,15	19,35	5,00	14,02
JAWA TENGAH	5,04	5,61	5,23	4,96	4,93	6,27	4,73	12,41	4,98	7,34
DI YOGYAKARTA	5,31	6,25	5,17	9,33	4,96	7,95	4,86	11,32	5,07	8,75
JAWA TIMUR	4,96	8,24	5,26	8,16	4,87	8,43	4,69	16,13	4,95	10,30
BANTEN	4,66	3,11	4,76	2,13	4,97	-1,35	4,85	10,72	4,81	3,62
REGIONAL JAWA	4,96	7,11	5,18	9,12	4,84	7,74	4,86	15,37	4,96	9,89

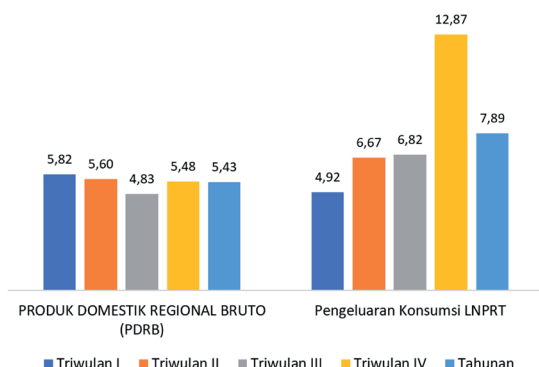
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Jawa mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 7,11 persen; 9,12 persen; 7,74 persen; dan 15,37 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Jawa tumbuh sebesar 9,89 persen (*y-o-y*). Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 14,02 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Banten menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 3,62 persen (*y-o-y*). Adapun Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada regional Jawa telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 0,42 persen pada tahun 2023.

II.3.D.4. Regional Kalimantan

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada

Grafik 2. 42. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Kalimantan



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 30. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Kalimantan

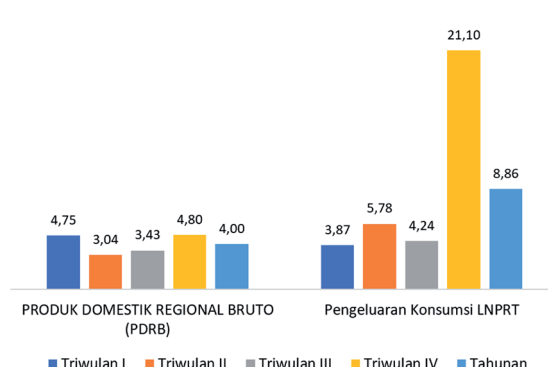
Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT
KALIMANTAN BARAT	4,65	4,11	4,00	10,08	4,27	13,07	4,9	12,26	4,46	9,98
KALIMANTAN TENGAH	3,22	3,94	2,96	3,84	3,74	7,90	6,49	14,93	4,14	7,69
KALIMANTAN SELATAN	5,15	6,54	4,98	6,93	4,58	6,76	4,69	12,85	4,84	8,32
KALIMANTAN TIMUR	6,99	5,02	6,89	5,94	5,30	0,53	5,76	11,02	6,22	5,63
KALIMANTAN UTARA	5,30	6,09	5,12	6,11	4,78	10,32	4,61	17,22	4,94	9,99
REGIONAL KALIMANTAN	5,82	4,92	5,60	6,67	4,83	6,82	5,48	12,87	5,43	7,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Regional Kalimantan mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,92 persen; 6,67 persen; 6,82 persen; dan 12,87 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Kalimantan tumbuh sebesar 7,89 persen (*y-o-y*). Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 9,99 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 5,63 persen (*y-o-y*). Adapun Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada regional Kalimantan telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 0,81 persen pada tahun 2023.

II.3.D.5. Regional Bali-Nusa Tenggara

Grafik 2. 43. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Bali-Nusa Tenggara



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 31. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Bali-Nusa Tenggara

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT
BALI	6,07	9,09	5,58	5,86	5,36	6,05	5,86	32,85	5,71	13,77
NUSA TENGGARA BARAT	3,55	0,90	-1,54	5,21	1,58	3,65	3,66	14,68	1,80	6,12
NUSA TENGGARA TIMUR	3,71	1,47	4,21	6,04	2,04	3,01	4,14	14,43	3,52	6,29
REGIONAL BALI NUSRA	4,75	3,87	3,04	5,78	3,43	4,24	4,80	21,10	4,00	8,86

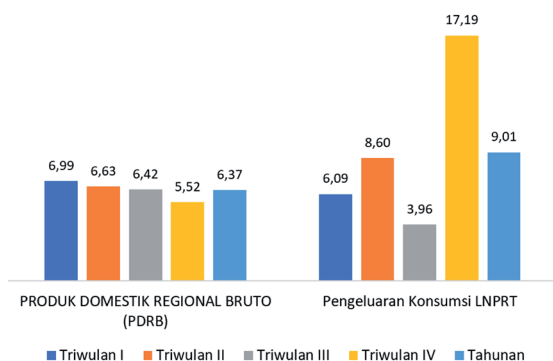
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Bali-Nusra mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 3,87 persen; 5,78 persen; 4,24 persen; dan 21,10 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Bali-Nusa Tenggara tumbuh sebesar 8,86 persen (*y-o-y*). Provinsi Bali menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 13,77 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 6,12 persen (*y-o-y*). Adapun Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada regional Bali-Nusra telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 2,02 persen pada tahun 2023.

II.3.D.6. Regional Sulawesi

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi

Grifik 2. 44. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Sulawesi



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada

Tabel 2. 32. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sulawesi

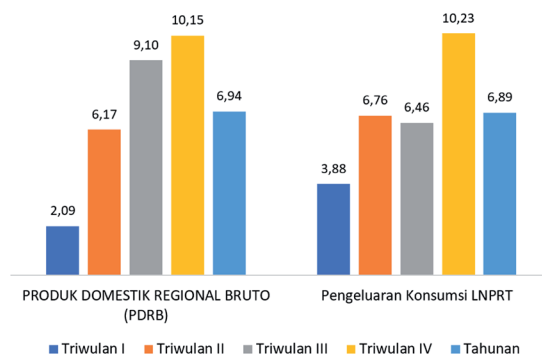
Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT
SULAWESI UTARA	5,25	8,13	6,28	8,91	5,40	12,48	5,01	24,61	5,48	13,77
SULAWESI TENGAH	13,2	2,31	11,88	3,02	13,07	1,11	9,73	17,67	11,91	6,22
SULAWESI SELATAN	5,29	7,18	5,00	11,25	4,05	2,15	3,79	15,06	4,51	8,83
SULAWESI TENGGARA	6,48	5,32	4,85	8,96	4,92	2,89	5,25	13,18	5,35	7,64
GORONTALO	4,23	3,51	4,24	6,29	4,60	3,48	4,92	6,74	4,50	5,02
SULAWESI BARAT	3,43	5,41	6,12	4,09	6,91	5,47	4,44	18,16	5,25	8,21
REGIONAL SULAWESI	6,99	6,09	6,63	8,60	6,42	3,96	5,52	17,19	6,37	9,01

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Regional Sulawesi mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 6,09 persen; 8,60 persen; 3,96 persen; dan 17,19 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Sulawesi tumbuh sebesar 9,01 persen (*y-o-y*). Provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 13,77 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Gorontalo menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 5,02 persen (*y-o-y*). Adapun Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada regional Sulawesi telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 1,48 persen pada tahun 2023.

II.3.D.7. Regional Papua-Maluku

Grifik 2. 45. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Pada Regional Papua-Maluku



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 33. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Papua-Maluku

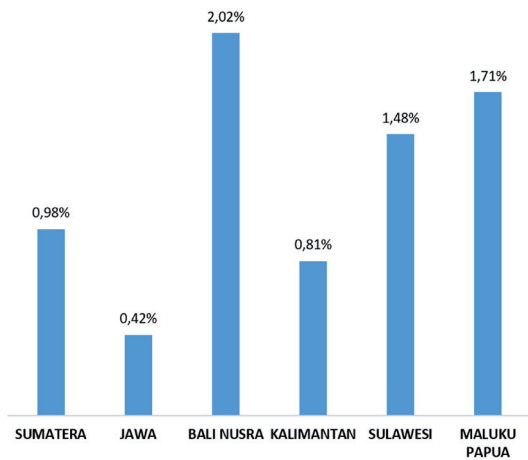
Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT
MALUKU	5,75	6,27	5,81	5,62	4,53	5,91	4,77	8,20	5,21	6,52
MALUKU UTARA	17,01	2,54	21,91	6,53	25,13	5,02	17,99	14,20	20,49	7,18
PAPUA	3,13	7,41	2,91	4,22	3,69	12,01	5,89	13,74	3,91	9,38
PAPUA BARAT	-2,39	2,82	3,81	7,55	8,27	5,8	10,79	9,64	5,22	6,51
REGIONAL MALUKU PAPUA	2,09	3,88	6,17	6,76	9,10	6,46	10,15	10,23	6,94	6,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Maluku-Papua mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 3,88 persen; 6,76 persen; 6,46 persen; dan 10,23 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Maluku-Papua tumbuh sebesar 6,89 persen (*y-o-y*). Provinsi Papua Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 9,38 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Papua menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 6,51 persen (*y-o-y*). Adapun Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada regional Maluku-Papua telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 1,71 persen pada tahun 2023.

II.3.D.8. Kesimpulan

Grafik 2. 46. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Tiap Regional Terhadap PDRB 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) terhadap PDRB tahun 2023 di tiap regional berkisar antara 0,42 persen – 2,02 persen. Dengan gap sebesar 1,60 persen, Regional Bali-Nusra menjadi kawasan yang memiliki kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga terhadap PDRB terbesar dan Regional Kalimantan menjadi kawasan dengan nilai kontribusi terendah.

II.3.E. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Terhadap PDRB

II.3.E.1. Gambaran Umum

Menurut Badan Pusat Statistik Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau sekelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal, mengumpulkan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaannya, serta mengonsumsi barang dan jasa secara kolektif, utamanya makanan dan perumahan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir.

Konsumsi akhir yang dimaksud adalah konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga mencakup:

- Nilai barang dan jasa yang berasal dari pembelian;

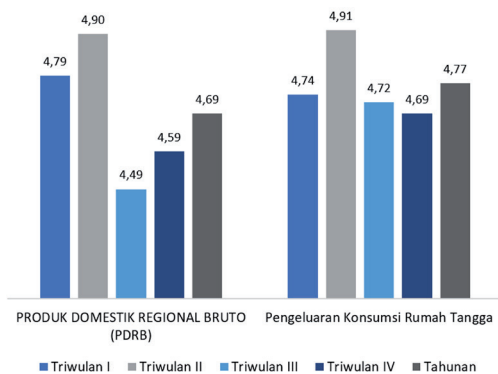
- Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari transaksi barter;
- Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari pemberi kerja sebagai bagian dari kompensasi tenaga kerja;
- Perkiraan nilai barang dan jasa yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk mengonsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga. Dalam keadaan ini rumah tangga berperan selaku konsumen akhir dari bermacam-macam jenis barang dan jasa yang sudah ada di dalam perekonomian (Badan Pusat Statistik, 2020). Konsumsi rumah tangga butuh mendapatkan perhatian secara lebih mendalam karena beberapa alasan. Alasan pertama, pendapatan nasional menerima sumbangan yang amat besar dari konsumsi rumah tangga. Di sebagian besar negara, pengeluaran konsumsi mencakup sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Alasan kedua, konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh yang sangat fundamental dalam menentukan perubahan kegiatan ekonomi dari suatu masa ke masa yang lain (Sukirno, 2016).

II.3.E.2. Regional Sumatera

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Sumatera mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,74 persen; 4,91 persen; 4,72 persen; dan 4,69 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Sumatera tumbuh sebesar 4,77 persen (*y-o-y*). Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 5,59 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 3,22 persen (*y-o-y*). Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada regional Sumatera telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 49,03 persen

Grifik 2. 47. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Sumatera



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 34. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Sumatera

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT
ACEH	4,64	3,14	4,37	3,31	3,78	4,06	4,15	5,80	4,23	4,08
SUMATERA UTARA	4,87	5,49	5,19	5,65	4,94	5,83	5,02	5,41	5,01	5,59
SUMATERA BARAT	4,80	3,44	5,13	3,40	4,28	2,70	4,30	3,36	4,62	3,22
RIAU	3,90	3,95	4,92	4,66	4,01	4,47	4,02	4,13	4,21	4,30
JAMBI	4,94	3,30	4,86	5,80	4,84	4,90	4,03	2,79	4,66	4,19
SUMATERA SELATAN	5,09	5,92	5,22	5,34	5,08	4,99	4,94	4,84	5,08	5,27
BENGKULU	4,10	5,15	4,18	4,98	3,97	4,75	4,76	5,72	4,26	5,15
LAMPUNG	4,94	4,88	4,00	5,87	3,93	5,21	5,40	4,64	4,55	5,15
KEP. BANGKA BELITUNG	4,40	3,01	5,13	1,87	4,01	3,75	4,00	4,35	4,38	3,25
KEP. RIAU	6,51	5,52	5,04	3,46	4,88	2,77	4,45	4,98	5,20	4,17
REGIONAL SUMATERA	4,79	4,74	4,90	4,91	4,49	4,72	4,59	4,69	4,69	4,77

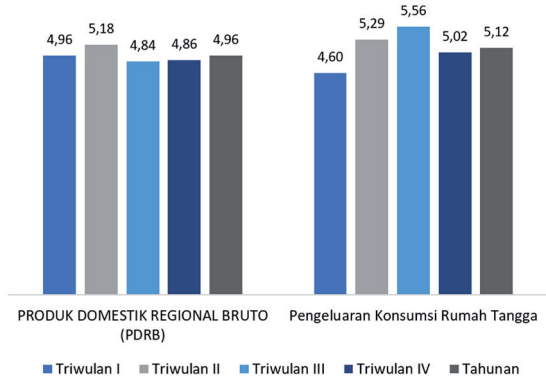
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

pada tahun 2023.

II.3.E.3. Regional Jawa

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Jawa mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,60 persen; 5,29 persen; 5,56 persen; dan 5,02 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Jawa tumbuh sebesar 5,12 persen (*y-o-y*). Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 5,68 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Banten menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 3,96 persen (*y-o-y*). Adapun Pengeluaran Konsumsi

Grifik 2. 48. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Jawa



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 35. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Jawa

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT
DKI JAKARTA	4,93	4,18	5,14	5,26	4,94	5,49	4,85	5,23	4,96	5,05
JAWA BARAT	5,01	4,6	5,25	5,53	4,58	5,83	5,15	5,39	5,00	5,34
JAWA TENGAH	5,04	5,31	5,23	5,79	4,93	5,97	4,73	5,65	4,98	5,68
DI										
YOGYAKARTA	5,31	4,77	5,17	5,19	4,96	5,16	4,86	4,57	5,07	4,92
JAWA TIMUR	4,96	5,36	5,26	5,10	4,87	5,49	4,69	4,02	4,95	4,98
BANTEN	4,66	1,83	4,76	4,10	4,97	4,42	4,85	5,43	4,81	3,96
REGIONAL JAWA	4,96	4,60	5,18	5,29	4,84	5,56	4,86	5,02	4,96	5,12

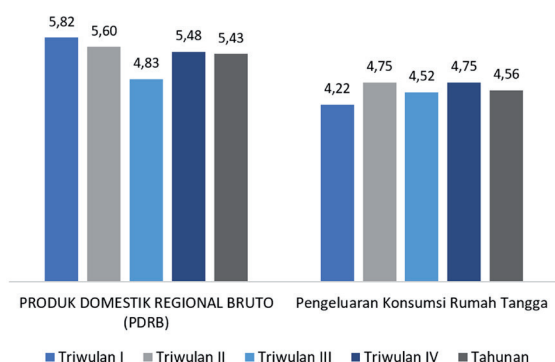
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Rumah Tangga pada regional Jawa telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 52,47 persen pada tahun 2023.

II.3.E.4. Regional Kalimantan

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Kalimantan mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,22 persen; 4,75 persen; 4,52 persen; dan 4,75 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Kalimantan tumbuh sebesar 4,56 persen (*y-o-y*). Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 5,74 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 3,01 persen (*y-o-y*). Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada regional Kalimantan telah memberikan

Grafik 2. 49. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Kalimantan



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 36. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Kalimantan

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT
KALIMANTAN BARAT	4,65	2,79	4,00	4,58	4,27	4,43	4,90	5,23	4,46	4,26
KALIMANTAN TENGAH	3,22	3,24	2,96	2,76	3,74	2,82	6,49	3,23	4,14	3,01
KALIMANTAN SELATAN	5,15	5,45	4,98	5,51	4,58	5,42	4,69	4,41	4,84	5,19
KALIMANTAN TIMUR	6,99	5,08	6,89	5,13	5,30	4,52	5,76	5,22	6,22	4,99
KALIMANTAN UTARA	5,30	4,75	5,12	6,16	4,78	6,04	4,61	5,96	4,94	5,74
REGIONAL KALIMANTAN	5,82	4,22	5,60	4,75	4,83	4,52	5,48	4,75	5,43	4,56

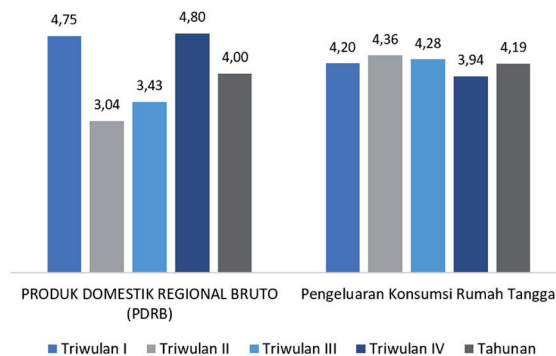
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

kontribusi pada PDRB sebesar 27,71 persen pada tahun 2023.

II.3.E.5. Regional Bali-Nusa Tenggara

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Bali-Nusra mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,20 persen; 4,36 persen; 4,28 persen; dan 3,94 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Bali-Nusra tumbuh sebesar 4,19 persen (*y-o-y*). Provinsi Bali menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 5,57 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 2,25 persen (*y-o-y*). Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada regional Bali-Nusra telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar

Grafik 2. 50. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Bali-Nusa Tenggara



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 37. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Bali-Nusa Tenggara

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT
BALI	6,07	6,92	5,58	5,39	5,36	6,08	5,86	3,98	5,71	5,57
NUSA TENGGARA BARAT	3,55	2,21	-1,54	4,29	1,58	4,36	3,66	5,16	1,80	4,01
NUSA TENGGARA TIMUR	3,71	2,13	4,21	2,85	2,04	1,46	4,14	2,54	3,52	2,25
REGIONAL BALI NUSRA	4,75	4,20	3,04	4,36	3,43	4,28	4,80	3,94	4,00	4,19

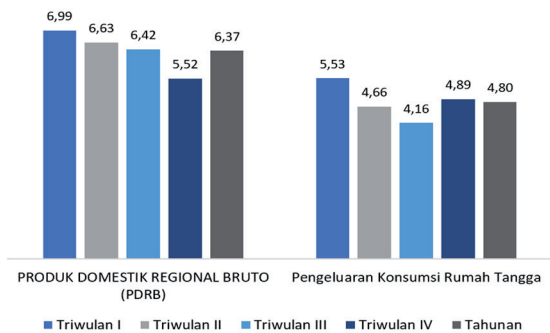
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

58,09 persen pada tahun 2023.

II.3.E.6. Regional Sulawesi

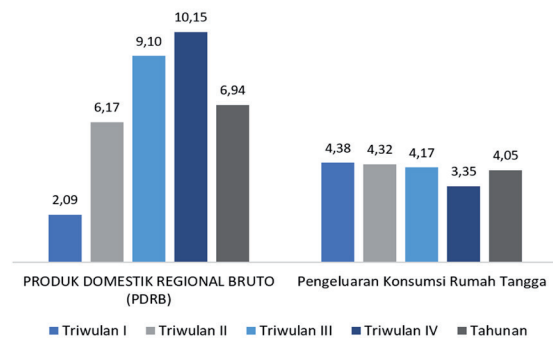
Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Sulawesi mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 5,53 persen; 4,66 persen; 4,16 persen; dan 4,89 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Sulawesi tumbuh sebesar 4,80 persen (*y-o-y*). Provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 6,65 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 2,88 persen (*y-o-y*). Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada regional Sulawesi telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 45,77 persen pada tahun 2023.

Grifik 2. 51. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Sulawesi



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Grifik 2. 52. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Pada Regional Papua-Maluku



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2. 38. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Sulawesi

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT
SULAWESI UTARA	5,25	8,66	6,28	7,23	5,40	5,82	5,01	5,15	5,48	6,65
SULAWESI TENGAH	13,20	5,23	11,88	5,62	13,07	5,69	9,73	5,16	11,91	5,42
SULAWESI SELATAN	5,29	5,64	5,00	3,53	4,05	3,36	3,79	4,76	4,51	4,30
SULAWESI TENGGARA	6,48	4,31	4,85	5,91	4,92	4,94	5,25	5,69	5,35	5,22
GORONTALO	4,23	3,48	4,24	3,80	4,60	4,33	4,92	5,49	4,50	4,28
SULAWESI BARAT	3,43	3,22	6,12	4,83	6,91	1,57	4,44	1,93	5,25	2,88
REGIONAL SULAWESI	6,99	5,53	6,63	4,66	6,42	4,16	5,52	4,89	6,37	4,80

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

II.3.E.7. Regional Papua-Maluku

Pada tahun 2023, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Maluku-Papua mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,38 persen; 4,32 persen; 4,17 persen; dan 3,35 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Maluku-Papua tumbuh sebesar 4,05 persen (*y-o-y*). Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 4,80 persen (*y-o-y*), sedangkan Provinsi Papua Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 2,72 persen (*y-o-y*). Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada regional Maluku-Papua telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 41,54 persen pada tahun 2023.

Tabel 2. 39. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Papua-Maluku

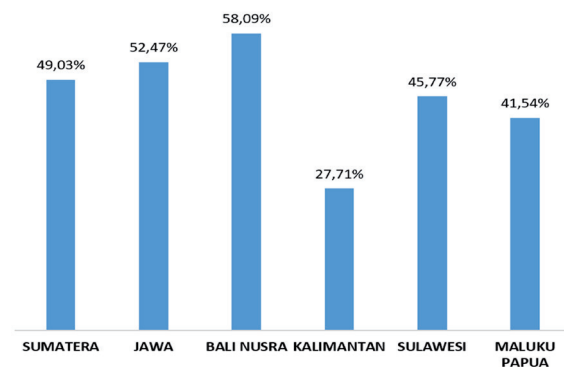
Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT
MALUKU	5,75	4,73	5,81	3,35	4,53	2,63	4,77	3,62	5,21	3,57
MALUKU UTARA	17,01	5,24	21,91	5,57	25,13	4,34	17,99	4,10	20,49	4,80
PAPUA BARAT	3,13	2,69	2,91	2,31	3,69	3,23	5,89	2,65	3,91	2,72
PAPUA	-2,39	4,52	3,81	4,89	8,27	4,89	10,79	3,27	5,22	4,38
REGIONAL MALUKU PAPUA	2,09	4,38	6,17	4,32	9,10	4,17	10,15	3,35	6,94	4,05

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

II.3.E.8. Kesimpulan

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) terhadap PDRB tahun 2023 di tiap regional berkisar antara 27,71 persen – 58,09 persen. Dengan gap sebesar 30,38 persen, Regional Bali-Nusra menjadi kawasan yang memiliki kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB terbesar dan Regional Kalimantan menjadi kawasan dengan nilai kontribusi terendah.

Grifik 2. 53. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Tiap Regional terhadap PDRB 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

II.4. DUKUNGAN PERKEMBANGAN CAPAIAN OUTPUT BELANJA STRATEGIS (K/L & TKDD)

II.4.A. Gambaran Umum Capaian Output Nasional

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa anggaran menjadi alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Peran anggaran sebagai alat akuntabilitas bermakna pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil (*outcome*) atau setidaknya keluaran (*output*) belanja negara. Anggaran sebagai alat manajemen berarti sistem penganggaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi program Pemerintah. Peran lainnya, yaitu anggaran sebagai alat kebijakan ekonomi, yaitu anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pendekatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah.

Pendekatan penyusunan rencana kerja dan anggaran terdiri dari pendekatan Unified Budgeting, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut di atas fokus pada ABK. Kedua pendekatan lainnya (unified budgeting dan KPJM) menjadi pendekatan

yang ditetapkan dalam rangka mendukung penerapan ABK. ABK merupakan penyusunan anggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran serta hasil yang diharapkan. ABK menitikberatkan pada perumusan keluaran kegiatan dan indikatornya yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi organisasi serta efektivitas dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- D Dalam rangka mendukung implementasi penganggaran berbasis kinerja melalui Monev Pelaksanaan Anggaran, sejak tahun 2019, seluruh Satker K/L telah melaporkan data capaian output dengan tingkat partisipasi pada tahun 2023 mencapai 99,80 persen setiap periode (bulan). Tingginya tingkat partisipasi pelaporan data capaian output menjadi satu peluang untuk menghasilkan big data kinerja anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan identifikasi kendala/permasalahan, analisis kinerja, serta rekomendasi kebijakan sebagai bagian dari upaya perbaikan yang berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mendorong kualitas dan pemanfaatan data capaian output Satker K/L, telah dilakukan identifikasi dan pengelompokan output-output yang bersifat strategis berdasarkan sektor prioritas sebagaimana tercantum dalam publikasi Informasi APBN 2023. Pengelompokan output tersebut ditujukan untuk mempermudah proses identifikasi dan pemaknaan data capaian output secara lebih makro dengan melihat suatu capaian dari sisi agregasi atau konsolidasi data.

Pada Laporan Khatulistiwa ini, akan disajikan 5 (lima) bidang/sektor prioritas belanja K/L antara lain:

- 1) Sektor Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pasca pandemi, serta peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah);
- 2) Sektor Kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, antara lain berupa penguatan layanan kesehatan primer terutama dalam upaya promotif dan preventif, percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan, serta peningkatan ketahanan kesehatan, terutama melalui peningkatan ketersediaan, kemandirian dan mutu farmasi dan alat kesehatan serta penguatan sistem kegawatdaruratan;
- 3) Sektor Infrastruktur, diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 di sektor pariwisata, transportasi, dan industri, yang berdampak terhadap penurunan indeks kemahalan logistik, serta mendorong
 - 4) percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru;
 - 5) Sektor Perlindungan Sosial, diarahkan untuk upaya percepatan pemulihan sosial bagi keluarga miskin dan rentan miskin serta menjamin akses kesehatan dan pendidikan;
 - 6) Sektor Ketahanan Pangan, diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan, menjamin penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh penduduk Indonesia, serta peningkatan daya saing petani dan nelayan.

Dalam rangka mendukung ketercapaian output tersebut, pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga telah merealisasikan belanja K/L pada tahun 2023 mencapai Rp1.152,23 triliun yang antara lain digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas (perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan) serta operasional penyelenggaraan pemerintah, dengan realisasi beberapa output strategis pada sektor prioritas sebagaimana Tabel 2.40 berikut:

TABEL 2.40
REALISASI OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2023

No	Sektor	Output	Jumlah
1	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	252.628
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	916.825
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	18.109.119
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	897
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	256.871
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	10.846.705
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	91.363
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	2.518.136
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK non -fisik Pendidikan)	44.017.964
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit) (DAK fisik Pendidikan)	14.328
		k. Pengadaan TIK (paket) (DAK fisik)	1.649
		l. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (ruang) (DAK Fisik Pendidikan)	680
2	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	713
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	12.267
		c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang)	7.240
		d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	54.395
		e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	520.648.576
		f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga)	41.487.055
		g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	58.822
		h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang	34.189
		i. Desa Pangan Aman (desa)	874
		j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	257
		k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	2.812
		l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	22.550
		m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	350
		n. Pembangunan Puskesmas Pembantu (paket) (DAK Fisik)	8.621
		o. Peralatan Pengendalian Penyakit Sebanyak (paket) (DAK Fisik)	2.245
3	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	32
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	426.788
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	9.035
		d. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (ha)	200
		e. Pembangunan Jembatan (m)	7.940
		f. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	557.294
		g. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	536
		h. Dukungan Jalan Daerah (km)	3.212
		i. Panjang Jalan Bebas Hambatan Yang Akan Dibangun Dengan Dukungan Pemerintah (km)	46
		j. Panjang Flyover Dan Underpass Yang Dibangun (m)	2.325
		k. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	54.395
		l. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	91.655
		m. Pembangunan Bandar Udara (paket)	82
		n. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	54
		o. BTS/lastmile (titik/lokasi)	6.670
		p. Penanganan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten (km) (DAK Fisik)	2.004
		q. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Sepanjang	1.046
		r. Penanganan Jembatan Kabupaten (km) (DAK Fisik)	222

4	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	9.888.606
		b. Kartu Sembako (keluarga)	18.721.823
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	164.358
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	16.102
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	262.585
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	5.029
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	2.899
5	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	222.120
		b. Kawasan Jagung (Ha)	185.845
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	223.904
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	3.170.143
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	1.028
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	18.930
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	123
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	146.619
		i. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas (hektar)	7.993

Realisasi belanja K/L tersebut terdistribusi pada berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah Jawa sebesar 72,7 persen diikuti dengan wilayah Sumatera sebesar 9,9 persen, wilayah Kalimantan sebesar 5,8 persen, wilayah Sulawesi sebesar 5,5 persen, wilayah Maluku-Papua sebesar 3,3 persen, serta wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,9 persen.

II.4.B. Capaian Output 2023 Per Regional

II.4.B.1 Regional Sumatera

Pada tahun 2023, Belanja K/L di Wilayah Sumatera terealisasi sebesar Rp114,198,8 miliar atau 9,9 persen dari total realisasi secara nasional. Realisasi yang cukup besar di wilayah Sumatera disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) jumlah penduduk di wilayah Sumatera adalah terbesar kedua setelah Jawa; (2) terdapat dua lembaga negara yang bertempat di wilayah Sumatera yaitu Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (PB Sabang) serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PB Batam) serta; (3) jumlah provinsi yang paling banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dari realisasi belanja K/L tersebut, terdapat realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp1.609,9 miliar. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian PUPR sebesar Rp603,3 miliar untuk pemeliharaan jalan dan infrastruktur jalan, pemeliharaan jembatan, dan pemeliharaan irigasi. Selain itu, terdapat juga dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp577,1 miliar untuk optimalisasi reproduksi, pakan hewan ternak, pelayanan kesehatan hewan, benih/lahan/sarana prasarana pertanian, insentif penyuluh pertanian, dan sebagainya. Selanjutnya realisasi sebagian output strategis pada sektor prioritas tahun 2023 untuk wilayah Sumatera dapat dilihat pada Tabel 2.41.

TABEL 2.41
REALISASI OUTPUT STRATEGIS PADA WILAYAH SUMATERA TAHUN 2023

No	Sektor	Output	Jumlah
1	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	47.139
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	250.872
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	4.184.117
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	196
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	39.272
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	2.299.170
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	20.606
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	533.713
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK non -fisik Pendidikan)	10.678.928
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit) (DAK fisik Pendidikan)	3.530
2	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	237
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	2.045
		c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang)	1.648
		d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	14.576
		e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	76.074.940
		f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga)	8.409.048
		g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	18.461
		h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	10.847
		i. Desa Pangan Aman (desa)	267
		j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	68
		k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	796
		l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	6.535
		m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	117
		n. Pembangunan Puskesmas Pembantu (paket) (DAK Fisik)	3.187
3	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	5
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	55.748
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	854
		d. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (ha)	32
		e. Pembangunan Jembatan (m)	2.339
		f. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	140.646
		g. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	107
		h. Dukungan Jalan Daerah (km)	1.127
		i. Panjang Jalan Bebas Hambatan Yang Akan Dibangun Dengan Dukungan Pemerintah (km)	18
		j. Panjang Flyover Dan Underpass Yang Dibangun (m)	1.657
		k. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	14.576
		l. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	21.644
		m. Pembangunan Bandar Udara (paket)	15
		n. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	8
		o. BTS/lastmile (titik/lokasi)	305
4	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	2.064.198
		b. Kartu Sembako (keluarga)	3.500.058
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	62.263
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	1.355
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	172.532
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	1.233
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	797
5	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	42.892
		b. Kawasan Jagung (Ha)	14.262
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	32.085
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	679.672
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	224
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	4.427
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	18
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	15.145

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sumatera dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan, dukungan fiskal dialokasikan dalam antara lain untuk tunjangan profesi guru dan dosen *non*-PNS, layanan pendidikan tinggi pada sejumlah universitas diantaranya Universitas Malikussaleh dan Universitas Teuku Umar serta rehabilitasi dan renovasi sekolah. Pada sektor kesehatan antara lain berupa operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit Umum antara lain RSUD Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang dan RS Umum Dr. M Djamil Padang, pengadaan obat-obatan dan bahan medis, serta pengadaan alat kesehatan. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan tol lintas Sumatera, bendungan Rukoh dan Keureuto di Provinsi Aceh, bendungan Tiga Dihaji di Provinsi Sumatera Selatan, bendungan Lau Simeme di Provinsi Sumatera Utara, pembangunan bandar udara baru Mandailing Natal tahap II di Provinsi Sumatera Utara, pembangunan jalan trans di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) Regional Sumatera, dan peningkatan jalur lintas kereta api lintas Kisaran-Rantauprapat tahap I di Provinsi Sumatera Utara.

II.4.B.2 Regional Jawa

Realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa pada tahun 2023 mencapai Rp835.584,4 miliar atau 72,7 persen dari total realisasi secara nasional. Tingginya porsi realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) kegiatan-kegiatan operasional 84 K/L akan tercatat di wilayah Jawa utamanya di Provinsi DKI Jakarta

yang merupakan ibu kota negara; (2) jumlah penduduk sebagian besar berada di wilayah Jawa; (3) terdapat banyak kawasan industri di wilayah Jawa sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak. Dari realisasi belanja K/L tersebut, terdapat realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencapai Rp1.703,0 miliar.

Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp932,3 miliar antara lain untuk layanan kesehatan hewan, ternak ruminansia potong dan perah serta unggas, jaringan irigasi, dan sebagainya. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp484,7 miliar untuk operasi dan pemeliharaan irigasi, serta preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan. Selanjutnya realisasi sebagian output strategis pada sektor prioritas tahun 2023 untuk wilayah Jawa dapat dilihat pada Tabel 2.42.

TABEL 2.42
REALISASI OUTPUT STRATEGIS PADA WILAYAH JAWA TAHUN 2023

No	Sektor	Output	Jumlah
1	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	174.872
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	365.010
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	9.570.174
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	262
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	180.103
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	6.801.468
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	47.328
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	1.516.318
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK non -fisik Pendidikan)	22.116.251
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan dengan Kerusakan Minimal Sedang (unit) (DAK fisik Pendidikan)	3.893
		k. Pengadaan TIK (paket) (DAK fisik)	1.649
2	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	306
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	8.492
		c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang)	2.847
		d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	8.006
		e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	328.423.437
		f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga)	24.995.195
		g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	14.288
		h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	8.251
		i. Desa Pangan Aman (desa)	193
		j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	61
		k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	597
		l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	5.748
		m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	75
		n. Peralatan Pengendalian Penyakit Sebayak (paket) (DAK Fisik)	2.245
3	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	11
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	239.594
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	2.195
		d. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (ha)	86
		e. Pembangunan Jembatan (m)	501
		f. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	115.232
		g. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	23
		h. Dukungan Jalan Daerah (km)	788
		i. Panjang Jalan Bebas Hambatan Yang Akan Dibangun Dengan Dukungan Pemerintah (km)	11
		j. Panjang Flyover Dan Underpass Yang Dibangun (m)	668
		k. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	8.006
		l. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	37.146
		m. Pembangunan Bandar Udara (paket)	6
		n. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	5
		o. BTS/ <i>lastmile</i> (titik/lokasi)	5

4	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	5.583.357
		b. Kartu Sembako (keluarga)	11.382.269
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	65.897
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	10.198
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	38.956
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	2.754
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	904
5	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	149.815
		b. Kawasan Jagung (Ha)	113.877
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	145.204
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	2.055.710
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	420
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	7.930
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	55
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	97.340

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Jawa dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan dalam untuk KIP Kuliah, program PIP, penyaluran BOS, tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, bantuan pendanaan PTN BH, dan sebagainya. Selanjutnya, pada bidang kesehatan antara lain berupa operasionalisasi dan pemeliharaan RS UPT pada 25 RS, obat-obatan dan bahan medis, pengadaan alat kesehatan, pembangunan dan pengembangan RS UPT vertikal Surabaya, pembinaan 1.000 HPK kepada keluarga baduta, dan sebagainya.

Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan bebas hambatan Semarang- Demak, dan Serang-Panimbang, pembangunan bendungan Jragung, Bener, dan Jlantah di Provinsi Jawa Tengah, bendungan Bagong di Provinsi Jawa Timur, serta bendungan Leuwikeris, Cibeet, dan Cijurey di Provinsi Jawa Barat, pengendali banjir sungai Loji Banger dan Bogowonto di

Provinsi Jawa Tengah, sungai Cijangkelok dan Cidurian Hulu di Provinsi Jawa Barat, sungai Bawah Tanah Ngobaran di Provinsi DI Yogyakarta, sungai Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta, serta sungai Ciujung di Provinsi Banten, penerangan jalan umum tenaga surya, dan sebagainya. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

II.4.B.3 Regional Bali Nusa

Realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2023 mencapai Rp33.599,2 miliar atau 2,9 persen dari total realisasi secara nasional. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp438,1 miliar. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp230,7 miliar, antara lain untuk kegiatan layanan kesehatan hewan, jaringan irigasi, lahan pertanian, dan sebagainya.

Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp70,1 miliar untuk kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi pemeliharaan jalan

dan jembatan. Selanjutnya sebagian realisasi output strategis pada sektor prioritas tahun 2023 untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dapat dilihat pada Tabel 2.43.

TABEL 2.43
REALISASI OUTPUT STRATEGIS PADA WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA TAHUN 2023

No	Sektor	Output	Jumlah
1	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	9.531
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	72.406
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	1.237.682
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	148
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	14.852
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	460.995
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	5.049
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	145.555
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK non -fisik Pendidikan)	2.868.575
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan dengan Kerusakan Minimal Sedang (unit) (DAK fisik Pendidikan)	879
2	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	28
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	331
		c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang)	447
		d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	4.075
		e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	34.446.259
		f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga)	1.725.231
		g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	5.937
		h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	2.793
		i. Desa Pangan Aman (desa)	75
		j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	29
		k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	268
		l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	2.396
		m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	25
		o. Pengembangan Puskesmas Pembantu (paket) (DAK Fisik)	3.620

No	Sektor	Output	Jumlah
3	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	6
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	35.353
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	174
		d. Pembangunan Jembatan (m)	150
		e. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	31.315
		f. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	12
		g. Dukungan Jalan Daerah (km)	639
		h. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	4.075
		i. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	7.465
		j. Pembangunan Bandar Udara (paket)	4
		k. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	9
		l. BTS/lastmile (titik/lokasi)	624
		m. Penanganan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten (km) (DAK Fisik)	971
4	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	814.783
		b. Kartu Sembako (keluarga)	1.104.318
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	8.283
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	281
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	16.384
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	364
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	201
5	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	2.000
		b. Kawasan Jagung (Ha)	9
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	18.552
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	260.300
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	119
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.632
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	17
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	3.166

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Bali-Nusa Tenggara dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor Pendidikan, dukungan fiskal dialokasikan untuk tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, penyediaan layanan pendidikan tinggi pada Universitas Udayana, Pendidikan Ganesha, dan Institut Seni Indonesia Denpasar di Provinsi Bali, Universitas Mataram di Provinsi NTB, serta Universitas Nusa Cendana dan Timor di Provinsi NTT, rehabilitasi dan renovasi sekolah, pelaksanaan program KIP Kuliah dan PIP, dan sebagainya. Selanjutnya, pada

sektor kesehatan antara lain berupa penyediaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai, penyediaan alokon, pengadaan alat kesehatan, pelatihan penurunan stunting, operasional dan pemeliharaan RS Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah di Provinsi Bali serta RS Umum Pusat Dr. Ben Mboi Kupang di Provinsi NTT dan sebagainya. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan Sidan di Provinsi Bali, bendungan Temef, Mbay, dan Manikin Meninting di Provinsi NTT, dan bendungan Tiu Suntuk di Provinsi NTB, pembangunan daerah irigasi Bintang Bano di Provinsi NTB, pembangunan dan pengembangan pelabuhan Sanur di Provinsi

Bali, penataan kawasan destinasi wisata Labuan Bajo dan sebagainya. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

Rp546,9 miliar. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp176,9 miliar antara lain untuk sarana dan prasarana pengembangan kawasan, fasilitasi dan pembinaan masyarakat, bantuan hewan, sertifikasi dan standarisasi produk, dan lainnya. Selain itu, Kementerian PUPR juga membiayai kegiatan sebesar Rp151,6 miliar untuk operasionalisasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan jaringan sumber daya air. Selanjutnya realisasi output strategis pada sektor prioritas tahun 2023 untuk wilayah Kalimantan dapat dilihat pada Tabel 2.44.

II.4.B.3 Regional Kalimantan

Pada tahun 2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan mencapai Rp66.274,4 miliar atau 5,8 persen dari total realisasi Belanja K/L secara nasional. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kalimantan mencapai

TABEL 2.44
REALISASI OUTPUT STRATEGIS PADA WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA TAHUN 2023

No	Sektor	Output	Jumlah
1	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	9.115
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	56.997
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	949.719
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	149
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	7.591
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	564.165
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	5.225
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	109.526
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	2.949.975
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	1.601
		k. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (ruang) (DAK Fisik Pendidikan)	680

No	Sektor	Output	Jumlah
2	Kesehatan	a. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang)	803
		b. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	9.532
		c. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	14.496.176
		d. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga)	1.817.379
		e. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	7.506
		f. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	3.587
		g. Desa Pangan Aman (desa)	105
		h. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	37
		i. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	354
		j. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	2.794
		k. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	39
		l. Pengembangan Puskesmas Pembantu (paket) (DAK Fisik)	1.814
3	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	3
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	19.168
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	1.387
		d. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (ha)	24
		e. Pembangunan Jembatan (m)	2.461
		f. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	102.440
		g. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	205
		h. Dukungan Jalan Daerah (km)	217
		i. Panjang Jalan Bebas Hambatan Yang Akan Dibangun Dengan Dukungan Pemerintah (km)	17
		j. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	9.532
		k. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	8.726
		l. Pembangunan Bandar Udara (paket)	15
		m. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	6
		n. BTS/lastmile (titik/lokasi)	691
4	Perlindungan Sosial	o. Penanganan Jalan Kabupaten (km) (DAK Fisik)	459
		a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	416.935
		b. Kartu Sembako (keluarga)	706.147
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	6.384
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	225
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	1.499
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	187
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	244
5	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	9.209
		b. Kawasan Jagung (Ha)	1.100
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	1.000
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	52.570
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	62
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.545
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	6
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	10.308

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan dalam untuk layanan pendidikan tinggi pada Universitas Lambung Mangkurat, Tanjungpura, Mulawarman, Palangkaraya, Borneo Tarakan, dan Institut Teknologi Kalimantan, rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan gedung pada UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, tunjangan profesi guru dan dosen *Non* PNS, dan sebagainya. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan sarana dan prasarana Poltekkes Kalimantan Timur, Pontianak, Banjarmasin, dan Palangkaraya, penyediaan alat laboratorium sesuai standar, pelatihan penurunan stunting, hingga Komunikasi Informasi Edukasi terhadap obat dan pangan aman. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan infrastruktur IKN, pembangunan jalan strategis di wilayah Malinau dan perbatasan (Nanga Badau-Entikong-Aruk-Temajok) akses Pelabuhan Long Nawang.

Adapun realisasi dukungan infrastruktur IKN pada tahun 2023 sebesar Rp27.131,9 miliar untuk bangunan gedung dan penataan kawasan, jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku, RS IKN, pengembangan Bandar Udara APT Pranoto tahap III, rehabilitasi pelabuhan Tana Paser, penyediaan bibit berkualitas dan produktif, serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan

hutan. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

II.4.B.3 Regional Sulawesi

Realisasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi pada tahun 2023 mencapai Rp62.896,4 miliar atau 5,5 persen dari total realisasi secara nasional. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sulawesi mencapai Rp1.035,5 miliar. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp403,0 miliar untuk kegiatan jaringan irigasi tersier, penyaluran benih padi, dan sebagainya. Selain itu, Kementerian PUPR juga turut membiayai kegiatan sebesar Rp344,0 miliar untuk operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi pemeliharaan jalan. Selanjutnya realisasi sebagian output strategis pada sektor prioritas tahun 2023 untuk wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 2.45.

TABEL 2.45
REALISASI OUTPUT STRATEGIS PADA WILAYAH SULAWESI TAHUN 2023

No	Sektor	Output	Jumlah
1	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	10.878
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	123.967
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	1.727.735
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	99
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	13.099
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	588.553
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	8.944
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	172.362
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK non -fisik Pendidikan)	3.893.348
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit) (DAK fisik Pendidikan)	3.138
2	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	121
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	1.073
		c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang)	1.047
		d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	9.815
		e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	57.419.801
		f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga)	3.769.936
		g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	8.272
		h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	5.052
		i. Desa Pangan Aman (desa)	150
		j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	46
		k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	473
		l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	3.466
		m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	53
3	Infrastruktur	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	10.878
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	123.967
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	1.727.735
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	99
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	13.099
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	588.553
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	8.944
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	172.362
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK non -fisik Pendidikan)	3.893.348
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit) (DAK fisik Pendidikan)	3.138
4	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	839.015
		b. Kartu Sembako (keluarga)	1.391.450
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	18.542
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	589
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	23.838
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	425
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	301
5	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	17.404
		b. Kawasan Jagung (Ha)	54.610
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	24.558
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	117.231
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	151
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.753
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	26
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	20.660
		i. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas (hektar)	7.993

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sulawesi dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan pada sembilan perguruan tinggi di seluruh provinsi, rehabilitasi dan renovasi sekolah, tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, pembangunan gedung pendidikan tinggi di IAIN Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, program KIP kuliah dan PIP, serta lain sebagainya. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan obat-obatan dan medis habis pakai, pengadaan alat kesehatan, serta operasional dan pemeliharaan RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, RS Umum Pusat Dr. Tadjudin Chalid Makassar, RS Mata Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, RS Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dan RS Umum Pusat Ratatotok Buyat di Provinsi Sulawesi Utara, pembangunan gedung layanan kesehatan ibu dan anak di RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, dan sebagainya.

Adapun pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan Pemukkulu dan Karalloe di Provinsi Sulawesi Selatan, bendungan Ameroro dan Ladongi di Provinsi Sulawesi Tenggara, bendungan Bulanglo Ulu di Provinsi Gorontalo, bendungan Lolak di Provinsi Sulawesi Utara, serta bendungan Budong-Budong di Provinsi Sulawesi Barat, pembangunan hunian tetap pascabencana tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, penataan kawasan destinasi wisata Wakatobi serta Manado

Likupang, dan sebagainya. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

II.4.B.3 Regional Papua Maluku

Pada tahun 2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku–Papua mencapai Rp38.002,9 miliar atau 3,3 persen dari realisasi Belanja K/L secara nasional. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp358,3 miliar. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp129,42 miliar, antara lain untuk membiayai sarana dan prasarana pengembangan kawasan, bantuan hewan, sarana dan prasarana di bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup, serta lainnya. Selain itu, terdapat juga kegiatan Kementerian PUPR sebesar Rp59,13 miliar, untuk membiayai operasionalisasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta sumber daya air. Selanjutnya sebagian realisasi output strategis pada sektor prioritas tahun 2023 untuk wilayah Maluku–Papua dapat dilihat pada Tabel 2.46

TABEL 2.46
REALISASI OUTPUT STRATEGIS PADA WILAYAH MALUKU DAN PAPUA TAHUN 2023

No	Sektor	Output	Jumlah
1	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	1.093
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	47.573
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	439.692
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	43
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	1.954
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	132.354
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	4.211
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	40.662
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK non -fisik Pendidikan)	1.510.887
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit) (DAK fisik Pendidikan)	1.287
2	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	21
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	326
		c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang)	448
		d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	8.391
		e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	9.787.963
		f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga)	770.266
		g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	4.358
		h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	3.659
		i. Desa Pangan Aman (desa)	84
		j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	16
		k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	324
		l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	1.611
		m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	41
3	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	1
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	1.246
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	203
		d. Pembangunan Jembatan (m)	1.822
		e. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	80.467
		f. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	133
		g. Dukungan Jalan Daerah (km)	144
		h. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	8.391
		i. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	4.121
		j. Pembangunan Bandar Udara (paket)	24
		k. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	13
		l. BTS/lastmile (titik/lokasi)	4.061
		m. Penanganan Jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi (km) (DAK Fisik)	574
		n. Penanganan Jembatan Kabupaten (km) (DAK Fisik)	222
4	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	170.318
		b. Kartu Sembako (keluarga)	637.581
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	2.989
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	3.454
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	9.376
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	66
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	451
5	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	800
		b. Kawasan Jagung (Ha)	1.987
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	2.505
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	4.660
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	52
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.643
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	1

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Maluku-Papua dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan dalam untuk layanan pendidikan perguruan tinggi Universitas Pattimura di Provinsi Maluku, Universitas Khairun di Provinsi Maluku Utara, Universitas Papua di Provinsi Papua Barat, serta Universitas Cendrawasih, Musamus, dan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua di Provinsi Papua, pembangunan gedung pendidikan tinggi IAIN Fattahul Muluk Papua, rehabilitasi dan renovasi sekolah, tunjangan profesi guru dan dosen Non PNS, dan sebagainya. Bidang kesehatan antara lain berupa peningkatan sarana dan prasarana Poltekkes Sorong di Provinsi Papua Barat, Poltekkes Ternate di Provinsi Maluku Utara, dan Poltekkes Jayapura di Provinsi Papua, penyediaan obat-obatan dan bahan medis, pelatihan penurunan stunting, operasional dan pemeliharaan RS Umum Pusat Dr. J. Leimina Ambon di Provinsi Maluku, dan sebagainya.

Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan trans Papua Merauke- Sorong serta jalan di wilayah 3T Maluku- Papua, pembangunan bendungan Way Apu di Provinsi Maluku, pengembangan bandar udara Rendani Manokwari, Mozes-Kilangin Timika, DEO Sorong, Sultan Babullah Ternate, Utarom Kaimana, Namrole Buru Selatan, Babo, Buli Maba, Kuabong Kao Halmahera Utara, Morotai, serta pembangunan bandar udara Siboru Fak-Fak, dan sebagainya. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah untuk membangun daerah dalam rangka pemerataan

kesejahteraan seluruh wilayah.

Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.



III. ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

HARMONISASI BELANJA
K/L DAN DAK FISIK



Photo by Humas DJPb



Harmonisasi belanja pusat dan daerah terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Dalam UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu pilarnya adalah harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah merupakan hal yang penting di tengah naiknya belanja negara setiap tahunnya. Kenaikan alokasi tersebut perlu diiringi dengan peningkatan akuntabilitas, perbaikan tata kelola serta harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip *value for money*.

III. ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH:

HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK

III.1. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI KANWIL DJPB

Pada tahun 2023, Menteri Keuangan telah menetapkan SOP Link 70 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Menteri Keuangan memberikan amanah kepada Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) sebagai *Unit in Charge* (UIC) dalam proses monev tersebut. DJA dan DJPK melakukan monev dari sisi perencanaan dan penganggaran pada Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) sedangkan DJPb melakukan monev pada sisi pelaksanaan anggaran. Sinergi ketiga unit di Kementerian Keuangan ini menjadi sangat penting dalam mengawal harmonisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Secara khusus, peran DJPb dhi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia dalam mengawal pelaksanaan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik melalui aktivitas sebagai berikut.

1. Reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian output harmonis.
2. Analisis permasalahan harmonisasi belanja pemerintah pusat yang mendukung DAK Fisik di masing-masing wilayah.
3. Identifikasi Upaya Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan utama aktivitas di atas dalam rangka memperoleh gambaran kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan, sekaligus memotret upaya yang dilakukan oleh Pemda maupun Satker dalam sinkronisasi Belanja K/L dan DAK Fisik. Selain itu, diharapkan adanya rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja K/L yang mendukung DAK Fisik.

Ruang lingkup monev belanja K/L yang mendukung DAK Fisik yang dilakukan Kanwil DJPb berfokus pada spasial/kewilayahan. Pada masa transisi (khusus tahun 2023) fokus pada pendekatan monitoring kinerja belanja K/L yang mendukung

DAK Fisik dengan cut off data di tahun berjalan (30 September 2023) ditambah dengan analisis kinerja pelaksanaan anggaran di masing-masing wilayah. Monev sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan DAK Fisik dilakukan terhadap 5 (lima) bidang yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran, yaitu:

- Bidang Kesehatan dan KB (Kementerian Kesehatan dan BKKBN);
- Bidang Pertanian (Kementerian Pertanian);
- Bidang Pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Perpustakaan Nasional);
- Bidang Jalan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
- Bidang Transportasi Pedesaan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi).

Dalam rangka penyusunan laporan monev perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, Kanwil DJPb membentuk Tim Monev Perencanaan dan Penganggaran Belanja K/L dan DAK Fisik. Susunan anggota tim merupakan pejabat/pegawai Kanwil DJPb setempat yang terdiri dari lintas bidang atau bagian sesuai dengan penugasan dari pimpinan unit masing-masing. Selanjutnya, Kanwil DJPb melakukan Identifikasi terhadap RO harmonis yang telah ditentukan Kantor

Pusat DJPb pada aplikasi SINTESA dengan alamat <http://sintesa.kemenkeu.go.id/>. Kanwil akan melakukan reu RO Harmonis dengan pagu tertinggi dan realisasi terendah pada masing-masing bidang DAK Fisik sekurang-kurangnya 5 RO Harmonis. Dalam hal satu Bidang memiliki RO Harmonis kurang dari 5, maka Kanwil melakukan reu atas RO Harmonis yang tersedia.

Monev ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Satker terkait melalui Forum EPA untuk menggali informasi terkait permasalahan pelaksanaan anggaran pada RO Harmonis sekaligus upaya sinkronisasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik. Output laporan Monev Sinkronisasi Belanja K/L dan DAK Fisik juga dituangkan dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan IV dan Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2023.

III.2. PAGU DAN REALISASI BELANJA K/L SECARA NASIONAL

III.2.A. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Secara nasional, anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik tahun 2023 teridentifikasi sebesar Rp146.364,96 miliar atau 37,84 persen khususnya dari total anggaran belanja 7 (tujuh) K/L pengampu DAK Fisik. Perpusnas RI merupakan K/L yang memiliki alokasi porsi terbesar dengan pagu yang mendukung DAK Fisik mencapai Rp362,33 miliar atau 50,73persen dari

Tabel 3. 1.Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar (miliar rupiah)

KD BA	NAMA K/L	PAGU MENDEKUNG DAK FISIK	TOTAL PAGU	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
018	KEMENTAN	4.165,11	14.808,87	28,13%	408	1.343
023	KEMENDIKBUDRISTEK	23.385,31	84.527,63	27,67%	123	334
024	KEMENKES	46.724,57	97.443,04	47,95%	68	565
033	KEMEN PUPR	70.243,83	182.020,76	38,59%	188	1.420
057	PERPUSNAS RI	362,33	714,27	50,73%	36	64
067	KEMENDES PDPT	63,04	3.174,54	1,99%	54	95
068	BKKBN	1.420,77	4.089,87	34,74%	38	612
TOTAL		146.364,96	386.778,99	37,84%	915	4.433

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

seluruh anggaran Perpustakaan RI tahun 2023. Besarnya alokasi pada Perpustakaan RI tersebut dialokasikan untuk dukungan perpustakaan pada bidang pendidikan. Sedangkan dari sisi nominal, Kementerian PUPR merupakan K/L yang memiliki alokasi paling besar dalam mendukung belanja DAK Fisik yaitu sebesar Rp70.243,83 miliar atau mencapai 38,59 persen dari seluruh anggaran K/L pengampu. Alokasi anggaran tersebut Sebagian besar digunakan untuk mendukung DAK Fisik bidang jalan.

Berdasarkan provinsi, alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik secara nominal terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp70.591,83 miliar yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran iuran PBI/ JKN yang dilakukan secara terpusat dengan target 96,8 juta orang penduduk Indonesia. Selanjutnya, alokasi digunakan untuk membayar bantuan PIP jenjang SD/Paket A sebesar Rp4.223,76 miliar dengan target 10,36 juta siswa di seluruh Indonesia. Alokasi untuk bantuan PIP jenjang SMP/Paket B mencapai

Tabel 3. 2. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi (miliar rupiah)

KODE PROVINSI	NAMA PROVINSI	TOTAL PAGU K/L	PAGU Mendukung DAK Fisik	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
01	DKI JAKARTA	169.874,40	70.591,83	41,56%	65	303
02	JAWA BARAT	20.216,78	4.699,81	23,25%	65	239
03	JAWA TENGAH	20.838,46	7.012,10	33,65%	33	155
04	DI YOGYAKARTA	7.653,98	1.043,16	13,63%	19	105
05	JAWA TIMUR	14.444,32	4.719,98	32,68%	38	181
06	ACEH	6.723,61	1.917,55	28,52%	27	146
07	SUMATERA UTARA	7.985,99	2.841,70	35,58%	27	145
08	SUMATERA BARAT	4.809,27	1.315,16	27,35%	24	126
09	RIAU	3.382,82	1.111,02	32,84%	19	97
10	JAMBI	4.686,14	2.669,88	56,97%	21	106
11	SUMATERA SELATAN	8.238,59	3.428,42	41,61%	28	128
12	LAMPUNG	4.168,34	1.629,01	39,08%	22	124
13	KALIMANTAN BARAT	4.978,80	2.521,14	50,64%	25	123
14	KALIMANTAN TENGAH	2.349,00	1.172,67	49,92%	22	110
15	KALIMANTAN SELATAN	3.057,12	984,94	32,22%	28	131
16	KALIMANTAN TIMUR	30.181,13	13.890,35	46,02%	27	116
17	SULAWESI UTARA	4.356,36	1.017,30	23,35%	23	125
18	SULAWESI TENGAH	5.874,92	1.796,31	30,58%	26	124
19	SULAWESI SELATAN	10.911,33	2.359,47	21,62%	37	156
20	SULAWESI TENGGARA	4.237,76	1.448,95	34,19%	26	123
21	MALUKU	3.353,01	1.223,93	36,50%	21	113
22	BALI	5.357,00	557,76	10,41%	21	114
23	NUSA TENGGARA BARAT	5.002,40	878,61	17,56%	21	114
24	NUSA TENGGARA TIMUR	6.319,46	1.976,19	31,27%	29	155
25	PAPUA	5.212,55	3.029,03	58,11%	33	193
26	BENGKULU	2.245,70	1.045,69	46,56%	22	97
28	MALUKU UTARA	1.986,00	971,52	48,92%	25	118
29	BANTEN	5.546,61	2.403,87	43,34%	22	110
30	KEPULAUAN BANGKA BELITU	1.277,58	529,94	41,48%	19	95
31	GORONTALO	2.286,29	715,73	31,31%	22	102
32	KEPULAUAN RIAU	2.348,77	1.088,60	46,35%	18	76
33	PAPUA BARAT	3.172,79	1.806,73	56,94%	23	122
34	SULAWESI BARAT	1.716,81	751,57	43,78%	19	95
35	KALIMANTAN UTARA	1.984,89	1.215,01	61,21%	18	66
TOTAL		386.778,99	146.364,96	37,84%	915	4.433

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 3. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang (miliar rupiah)

BIDANG DAK FISI	SUBBIDANG DAK FISIK	NAMA K/L	PAGU	REALISASI	% REAL	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
Jalan	Jalan	KEMEN PUPR	66.786,79	64.741,31	96,94%	150	1.343
	Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	KEMEN PUPR	1.306,69	1.191,94	91,22%		
	TOTAL		68.093,48	65.933,26	96,83%	150	1.381
Kesehatan dan KB	Keluarga Berencana	BKKBN	1.420,77	1.351,98	95,16%	38	612
	Pengendalian Penyakit	KEMENKES	53,03	45,47	85,74%	35	85
	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	KEMENKES	77,66	61,82	79,60%		
	Penguatan Sistem Kesehatan	KEMENKES	46.593,88	46.373,59	99,53%	35	206
	TOTAL		48.145,34	47.832,86	99,35%	68	274
Pendidikan	PAUD	KEMENDIKBUDRISTEK	591,26	587,43	99,35%	106	1.177
	Perpustakaan	PERPUSNAS RI	362,33	358,97	99,07%	37	48
	SD	KEMENDIKBUDRISTEK	7.301,60	7.283,83	99,76%	36	64
	SD dan SMP	KEMEN PUPR	2.150,36	2.130,00	99,05%	3	14
	SD, SMP, SMA, SMK	KEMENDIKBUDRISTEK	6.261,50	6.065,51	96,87%	38	39
	SMA	KEMENDIKBUDRISTEK	1.254,85	1.254,12	99,94%	108	219
	SMK	KEMENDIKBUDRISTEK	3.077,31	3.057,18	99,35%	2	5
	SMP	KEMENDIKBUDRISTEK	2.932,60	2.929,55	99,90%	10	34
	SMP, SMA, SMK	KEMENDIKBUDRISTEK	1.966,20	1.933,18	98,32%	2	6
Pertanian	TOTAL		25.897,99	25.599,78	98,85%	2	8
	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	KEMANTAN	4.165,11	3.361,26	80,70%		
	TOTAL		4.165,11	3.361,26	80,70%	408	1.343
Transportasi Perdesaan	Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afiriasi	KEMENDES PDIT	63,04	62,29	98,82%	408	1.343
	TOTAL		63,04	62,29	98,82%	54	95
	GRAND TOTAL		146.364,96	142.789,45	97,56%	915	4.433

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Rp2.726,50 miliar ditujukan pada 4,37 juta siswa di seluruh Indonesia.

Berdasarkan bidang, secara porsi sebagian besar anggaran belanja K/L terkonsentrasi pada Bidang Kesehatan dan KB yakni sebesar Rp48.145,34 miliar dengan realisasi sebesar Rp47.832,86 miliar (99,35 persen). Alokasi pada Bidang Kesehatan dan KB terbesar untuk penguatan sistem kesehatan mencapai Rp46.702,9 miliar. Alokasi anggaran tertinggi dari sisi nominal Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Jalan mencapai Rp68.093,48 miliar dan terealisasi sebesar Rp64.741,31 miliar (96,94 persen). Alokasi terendah Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik pada Bidang Transportasi Perdesaan mencapai Rp63,04 miliar dan terealisasi sebesar Rp98,82 persen.

III.2.B. Pagu dan Realisasi Belanja K/L Per Bidang

A. Bidang Jalan

Bidang Jalan memiliki alokasi belanja paling besar mencapai Rp68.093,48 miliar dan terealisasi Rp65.933,26 miliar (96,83 persen). Realisasi anggaran pada Bidang Jalan dapat dikategorikan terserap secara optimal sampai akhir tahun 2023. Secara umum, alokasi terbesar pada Rincian Output (RO) Dukungan Penanganan Jalan dengan pagu Rp14.369,54 miliar dan terealisasi Rp14.141,03 miliar (98,41 persen). Selanjutnya, alokasi tertinggi kedua pada RO Dukungan Infrastruktur IKN mencapai Rp11.313,56 miliar dan terealisasi sebesar Rp11.301,53 miliar (99,89 persen). Pembangunan jalan tol dengan pagu tertinggi ketiga mencapai Rp7.378,03 miliar dan realisasi sebesar Rp6.763,06 miliar (91,66 persen).

Tabel 3. 4. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Tahun 2023 (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	14.369,54	14.141,03	98,41%	2.942,38	km
2	Dukungan Infrastruktur IKN	10.852,25	10.840,22	99,89%	64,93	km
3	Jalan Strategis (ProPN)	461,30	461,30	100,00%	425,85	m
		8.688,55	8.123,18	93,49%	1.688,36	km
		388,77	372,39	95,79%	20.229,85	m
4	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	7.378,03	6.763,06	91,66%	31,03	km
5	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	6.394,08	6.365,37	99,55%	1.493,89	km
6	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	2.663,31	2.623,90	98,52%	33.790,05	km
7	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	1.655,28	1.635,19	98,79%	220,90	km
8	Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)	350,18	347,72	99,30%	8.600,11	m
		1.545,36	1.377,14	89,11%	4.807,55	m
		1.068,45	1.045,19	97,82%	9.671,21	m
10	Lainnya	12.278,37	11.837,55	96,41%		
TOTAL		68.093,48	65.933,26	96,83%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

B. Bidang Kesehatan dan KB

Alokasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB mencapai Rp 48.145,34 miliar dan terealisasi sebesar Rp47.832,86 miliar (99,35 persen). Alokasi tertinggi pada RO cakupan penduduk yang menjadi penerima PBI dalam JKN/KIS sebesar Rp46.331,59 miliar dan terealisasi Rp46.300,93 miliar (99,93 persen) dengan realisasi output mencapai 96,78 juta orang (99,98 persen).

Alokasi tertinggi kedua pada output alokasi alokon untuk faskes dengan total pagu Rp507,08 miliar dan terealisasi Rp 484,59 miliar (95,57 persen). Pada Bidang Kesehatan dan KB, terdapat RO yang memiliki satuan berbeda yaitu RO Akreditasi Laboratorium yaitu Paket dan Kelompok Masyarakat. Hal tersebut perlu menjadi perhatian Kementerian Keuangan dengan K/L terkait untuk penyeragaman satuan RO tersebut.

Tabel 3. 5. Pagu Realisasi K/L Bidang Kesehatan (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK)	46.331,59	46.300,93	99,93%	96.800.000,00	Orang
2	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	507,08	484,59	95,57%	18.816,00	Lembaga
3	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	226,70	217,93	96,13%	602.005,00	Orang
4	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	84,71	83,56	98,64%	73,00	layanan
5	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	76,68	71,41	93,13%	540,00	kegiatan
6	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	64,00	52,24	81,63%	24,00	layanan
7	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat nasional	47,09	46,98	99,75%	3,00	layanan
8	Workshop Pengelola Program dalam Penggunaan Aplikasi SIHA 2.0 (LP)	46,18	0,00	0,00%	1,00	Paket
		59,36	0,00	0,00%	170,00	Orang
9	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	43,50	39,96	91,87%	32.289,00	Kelompok Masyarakat
10	Lainnya	658,45	535,25	81,29%		
TOTAL		48.145,34	47.832,86	99,35%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 6. Pagu Realisasi K/L Bidang Pendidikan (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	4.223,76	4.222,62	99,97%	10.360.614,00	Orang
2	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	2.726,50	2.725,63	99,97%	4.369.968,00	Orang
3	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	2.150,11	2.129,77	99,05%	746,10	Unit
4	Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	2.081,37	2.069,91	99,45%	83.205,00	Orang
5	Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	1.775,76	1.743,15	98,16%	66.378,00	Orang
6	Guru TK/TKLB Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	1.561,60	1.538,19	98,50%	53.367,00	Orang
7	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.538,46	1.537,97	99,97%	1.829.167,00	Orang
8	Kepala Sekolah Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	1.440,59	1.440,58	100,00%	43.120,00	Orang
9	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.183,71	1.183,34	99,97%	1.368.243,00	Orang
10	Lainnya	7.216,13	7.008,62	97,12%		
TOTAL		25.897,99	25.599,78	98,85%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

C. Bidang Pendidikan

Kinerja realisasi anggaran Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan menunjukkan nilai yang optimal dengan total alokasi mencapai Rp25.897,99 miliar dan terealisasi Rp25.599,78 miliar (98,85 persen). Alokasi tertinggi pada RO Siswa SD/Paket A yang mendapatkan program PIP mencapai Rp4.223,76 miliar dan terealisasi sebesar Rp4.222,62 miliar (99,97 persen) dengan target siswa mencapai 10,36 juta. RO Siswa SMP/Paket B yang mendapatkan program PIP mencapai Rp2.726,50 miliar dan terealisasi sebesar Rp2.725,63 miliar (99,97 persen),

sedangkan realisasi RO mencapai 4,37 juta siswa.

D. Bidang Pertanian

Kinerja realisasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian belum menunjukkan capaian positif. Pagu total sebesar Rp4.165,11 miliar dan realisasi sebesar Rp3.361,26 miliar (80,70 persen). Alokasi tertinggi belanja K/L sebesar Rp655,59 miliar dan terealisasi Rp645,92 miliar (98,53 persen), target volume RO sebesar 23,21 juta layanan. RO sarana Pascapanen Tanaman Pangan dengan pagu Rp569,79 miliar dan terealisasi

Tabel 3. 7. Pagu Realisasi K/L Bidang Pertanian (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	655,59	645,92	98,53%	2.716,00	Unit
2	Pelayanan Kesehatan Hewan	569,79	516,20	90,60%	23.210.339	layanan
3	Area penyaluran benih padi	424,05	148,79	35,09%	1.255.121,00	Hektar
4	Area penyaluran benih jagung	403,83	59,58	14,75%	347.313,00	Hektar
5	Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura	134,87	133,18	98,75%	5.062,52	Unit
6	Ternak Ruminansia Potong	132,00	125,80	95,30%	13.265,00	Ekor
7	Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi	131,14	126,92	96,78%	13,00	Kelompok Masyarakat
8	Ternak Ruminansia Potong	114,78	106,58	92,86%	13.944,00	Ekor
9	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	109,14	53,69	49,20%	29.835,00	Hektar
10	Lainnya	1.489,93	1.444,58	96,96%		
TOTAL		4.165,11	3.361,26	80,70%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 8. Pagu Realisasi K/L Bidang Transportasi Perdesaan (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	12,81	12,82	100,06%	31,34	km
2	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	7,66	7,30	95,36%	20,90	km
3	Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	7,27	7,27	99,93%	6,41	km
4	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	5,31	5,29	99,62%	5,08	km
5	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	5,29	5,19	98,11%	13,19	km
6	Jalan untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun	4,95	4,94	99,81%	6,00	km2
7	Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	4,94	4,92	99,65%	16,80	km
8	Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	3,79	3,73	98,53%	95,25	m
9	Jembatan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	2,95	2,90	98,31%	64,00	m
10	Lainnya	8,08	7,94	98,27%		
TOTAL		63,04	62,29	98,82%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Rp516,20 miliar (90,60 persen), target volume RO sebesar 23,21 juta layanan.

E. Bidang Transportasi Perdesaaan

Kinerja realisasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan juga belum menunjukkan capaian positif. Pagu total sebesar Rp63,04 miliar dan realisasi sebesar Rp62,29 miliar (98,82 persen). Alokasi tertinggi belanja K/L pada RO Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi sebesar Rp12,81 miliar dan terealisasi Rp12,82 miliar (100,06 persen), target volume RO sebesar 31,34 km. RO Jalan Non-Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi sebesar Rp7,66 miliar dan terealisasi Rp7,30 miliar (95,36 persen), dengan volume RO 20,90 km.

III.3. UPAYA SINKRONISASI DI DAERAH OLEH SATKER DAN PEMDA

Sinkronisasi belanja K/L dengan DAK Fisik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.62 tahun 2023. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa sinkronisasi belanja K/L dengan DAK Fisik dilakukan dengan memprioritaskan alokasi belanja K/L untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah di lokasi

yang didanai oleh DAK Fisik. Dengan demikian, secara tidak langsung peran Pemda dan Satker level daerah sangat penting untuk melihat di daerah tersebut apakah terdapat tumpang tindih atau duplikasi kegiatan yang dibiayai dari Belanja K/L dengan DAK Fisik. Hasil monitoring yang dilakukan Kanwil DJPb terkait upaya sinkronisasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik dilakukan di beberapa daerah sebagaimana berikut.

1. Sumatera Utara, Sinkronisasi dilakukan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan yang berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait pelayanan klinik tanaman di wilayah binaan di Kabupaten dan Provinsi serta pengembangan kerjasama laboratorium dalam provinsi Sumatera Utara.
2. Sulawesi Utara, beberapa Satker telah melakukan koordinasi dengan Pemda. Sebagai contoh koordinasi yang dilakukan oleh Satker Bidang Jalan dengan Pemda setempat setempat.
3. Maluku, harmonisasi Satker dan Pemda dijalin melalui kegiatan-kegiatan rutin, berkala yang dilakukan oleh Balai PPW

Maluku, dalam bentuk kegiatan workshop, coaching clinic, pembinaan teknis. Selain itu, dilakukan koordinasi-koordinasi kegiatan yang akan diusulkan dan direncanakan pembangunannya melalui pendanaan APBN dan kontribusi APBD secara simultan atau saling menunjang dalam area pembangunan kawasan secara bersamaan. Telah dilaksanakan forum yang membahas terkait sinkronisasi alokasi anggaran DAK Fisik dan Belanja KL yang dilakukan sejak berdirinya Balai PPW Maluku dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun sekali pada interval bulan Oktober sampai dengan Desember. Agenda pembahasan terkait dengan sinkronisasi kegiatan yang akan diusulkan pada perencanaan pembangunan untuk 2 tahun ke depan (misalnya kegiatan sinkronisasi tahun 2023 untuk usulan kegiatan tahun anggaran 2025. Sedangkan, kegiatan yang diusulkan pada saat ini hanya menyinkronkan Pendanaan APBN Reguler dengan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota reguler, tidak termasuk pendanaan DAK.

Di sisi lain, terdapat daerah yang belum melakukan sinkronisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik, Berikut beberapa daerah yang belum melakukan sinkronisasi tersebut.

1. Aceh, tidak ada forum bersama yang membahas/mengkoordinasikan hal tersebut. Satker belum pernah berkoordinasi secara langsung dengan OPD setempat baik dari perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Namun, sebagian perencanaan proyek satker tertentu, diusulkan oleh Pemda melalui aplikasi tertentu sehingga kecil kemungkinan ada terjadinya disharmonisasi.
2. Kalimantan Barat, belum terdapat upaya harmonisasi dengan Satker di daerah dengan Pemda terkait proyek DAK misalnya pelaksanaan Bidang Jalan belum ada koordinasi Pemda dengan Satker

vertikal Kementerian PUPR di daerah.

3. Sulawesi Utara, banyak juga satker K/L yang enggan melakukan koordinasi dengan Pemda, khususnya terkait sinkronisasi alokasi anggaran karena menganggap sudah di luar wewenang Satker untuk mencampuri apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Pemda.
4. Gorontalo, belum ada koordinasi yang dilakukan secara rutin dalam upaya harmonisasi tersebut Belanja K/L dengan TKD. Beberapa kendala diantaranya adalah ketidaktahuan dari pelaksana RO Harmonis di satker terkait dengan kegiatan DAK Fisik yang ada di daerah, termasuk tidak adanya pedoman atau petunjuk teknis terkait dengan upaya harmonisasi tersebut.
5. Papua, belum pernah dilakukan oleh pemda tingkat kabupaten dan K/L. Terdapat kecenderungan bahwa harmonisasi anggaran lebih sering terjadi antara pemda tingkat provinsi dengan pemda tingkat kabupaten/kota.

Hasil monitoring Kanwil DJPb di atas masih bersifat sementara, karena keterbatasan waktu dan pemahaman konsep sinkronisasi sehingga tidak semua Kanwil DJPb menyampaikan bahasan terkait sinkronisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik. Namun secara garis besar, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa beberapa wilayah telah melakukan kegiatan sinkronisasi belanja K/L dengan DAK Fisik dengan melakukan pertemuan rutin dan berbagai forum lainnya. Namun harus diakui bahwa belum ada payung hukum yang mengikat Satker yang memiliki RO Harmonis untuk melakukan sinkronisasi dengan Pemda yang memiliki DAK Fisik. Kondisi tersebut menyebabkan Satker dan Pemda enggan melakukan sinkronisasi. Ke depan, dengan ditetapkan UU HKPD No.1 tahun 2022, perlu dibuat regulasi khusus yang dapat menjadi acuan bagi Satker dan Pemda untuk melakukan sinkronisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik, sehingga potensi duplikasi anggaran dapat diminimalisir sekaligus dapat mendorong

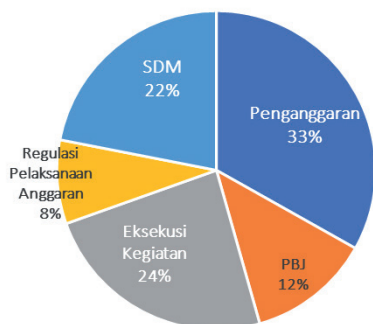
peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBN/D.

III.4. KENDALA DAN TANTANGAN SECARA NASIONAL

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, pada Pasal 14 diatur mengenai implementasi dari aktivitas Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran K/L yang dilaksanakan melalui kegiatan *One on One Meeting* Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) K/L. Selain itu, untuk melaksanakan amanah dalam SOP Link 70, Kanwil DJPb di seluruh Indonesia telah melakukan Evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan III, identifikasi permasalahan anggaran sampai dengan triwulan III. Selain itu, dalam forum EPA triwulan IV, Kanwil DJPb juga melakukan identifikasi upaya sinkronisasi yang dilakukan oleh Satker/Pemda atas Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik khususnya pada 5 Bidang.

Secara nasional, terdapat 5 *cluster* permasalahan atau tantangan yang dihadapi Saker dan telah diidentifikasi sampai dengan triwulan III tahun 2023. Permasalahan atau tantangan tersebut meliputi (1) tantangan penganggaran, (2) tantangan pengadaan barang dan jasa (PBJ), (3) tantangan eksekusi kegiatan, (4) tantangan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan dan (5) tantangan SDM. Hasil identifikasi Kanwil DJPb yang telah

Grafik 3.1. Permasalahan/Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik s.d Triwulan III 2023



Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

dikompilasi dalam aplikasi SINTESA diperoleh hasil sebagai berikut.

Tantangan penganggaran menempati peringkat pertama atas permasalahan yang terjadi di lapangan. Permasalahan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran di pertengahan tahun anggaran sehingga juga berdampak pada deviasi halaman III DIPA. Sebagai salah satu contoh adalah adanya revisi anggaran di Sumatera Utara perihal penambahan anggaran instruksi presiden untuk paket preservasi di bulan Juli, pembangunan jalan dan jembatan bulan Agustus 2023. Satker di Provinsi Sumsel mendapatkan DIPA di bulan Juni untuk pembangunan jalan bebas hambatan sehingga waktu pelaksanaan terbatas hanya 5 bulan. Pembukaan blokir anggaran dan *automatic adjustment* (AA) juga menjadi tantangan tersendiri bagi Satker. Penyelesaian pembukaan blokir sampai dengan akhir

Tabel 3. 9. Cluster Tantangan Penganggaran

Cluster	Sub Cluster	%
Tantangan Penganggaran	Revisi Anggaran	36%
	Halaman III DIPA	35%
	Blokir Anggaran	17%
	Automatic Adjustment	11%
	Sumber Dana SBSN	1%

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

semester I menjadi salah satu penyebab mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan.

Tantangan kedua adalah tantangan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Secara nasional tantangan ini mencapai 12 persen dari total cluster tantangan sampai dengan triwulan III. Permasalahan lelang masih menjadi kendala utama Satker. Lemahnya perencanaan PBJ oleh pejabat pengadaan sehingga beberapa pekerjaan yang diajukan lelang belum mendapatkan pemenang untuk ditetapkan, termasuk keterlambatan pembuatan perjanjian SPK. Selain itu, terbatasnya penyedia barang/jasa yang mampu menyediakan kebutuhan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di beberapa daerah masih terbatas sehingga menjadi tantangan dalam pengadaan. Pemenuhan TKDN dalam pengadaan juga

masih terjadi di lapangan karena tidak semua material telah memiliki sertifikasi TKDN. Pengadaan melalui *e-katalog* terkendala dari fluktuasi harga sedangkan harga yang disusun oleh Satker khususnya Satker Dekonsentrasi mengacu pada Satuan Harga Standar (SHS) yang ditetapkan oleh Gubernur. Selain hal di atas, ketergantungan impor masih cukup tinggi karena pengadaan barang elektronik seperti laptop, printer, personal computer, switch, access point serta server dilakukan melalui impor karena spesifikasi yang dibutuhkan tidak ada di Indonesia. Permasalahan lain terkait PBJ misalnya tantangan pembebasan lahan untuk

Tabel 3. 10. Cluster Tantangan Pengadaan Barang dan Jasa

Cluster	Sub Cluster	%
Tantangan Pengadaan Barang Dan Jasa	Proses Lelang	28%
	Keterbatasan Penyedia	27%
	TKDN	18%
	Ecatalog	17%
	Lelang Dini	6%
	Kegagalan Lelang	4%

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

project Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di DI Yogyakarta.

Tantangan ketiga adalah tantangan eksekusi kegiatan. Secara nasional tantangan ini mencapai 24 persen dari total cluster tantangan sampai dengan triwulan III. Permasalahan eksekusi kegiatan masih menjadi kendala utama Satker. Faktor eksternal berupa cuaca, lokasi project yang relatif jauh, faktor keamanan masih mendominasi permasalahan di eksekusi kegiatan. Dari sisi internal K/L atau Satker, kesiapan Pedoman Umum (Pedum) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) dari K/L sebagian masih belum terbit di awal tahun anggaran. Tantangan lain berupa kekurangan prasyarat pekerjaan berupa AMDAL maupun dokumen lain yang diperlukan masih belum tersedia oleh Satker.

Tantangan keempat adalah tantangan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan. Secara nasional tantangan ini mencapai 8 persen dari total cluster tantangan sampai dengan triwulan III.

Tabel 3. 11. Cluster Tantangan Eksekusi Kegiatan

Cluster	Sub Cluster	%
Tantangan Eksekusi Kegiatan	Faktor Luar (Cuaca, Lokasi, Keamanan, Dll)	39%
	Kesiapan Pedum, Juknis, Dokumen Pelaksanaan Lain	27%
	Kekurangan Prasyarat (Ijin, AMDAL, Dokumen Lain, Prasyarat Lain)	10%
	Proses Penetapan Penerima Bantuan	9%
	Kenaikan harga bahan	7%
	Proses Pembagian Bantuan	4%
	Prasyarat Ketersediaan Lahan	4%

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Permasalahan regulasi dalam pelaksanaan anggaran tertinggi pada regulasi K/L. Misalnya, terdapat diklat yang memerlukan Juknis dari Eselon I K/L, kebijakan terkait pelaksanaan pekerjaan dukungan penanganan jalan daerah yang baru ditetapkan di bulan Juli/Agustus menyebabkan pelaksanaan pekerjaan baru dapat dieksekusi di Triwulan II dan yang lainnya. Selain itu, untuk kegiatan pendidikan yang menjadi Prioritas Nasional (PN), maka setiap perubahan anggaran harus mendapatkan persetujuan eselon I yang bersangkutan. Petunjuk teknis Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka, Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional, Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah, Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak dan lain lain baru terbit pada akhir September 2023, sehingga kegiatan baru dilaksanakan diakhir TW III. Di sisi lain, Satker menganggap regulasi yang diterbitkan Kemenkeu menjadi salah satu permasalahan diantaranya aturan at cost belanja perjalanan dinas memberatkan Satker.

Tantangan kelima adalah tantangan sumber daya manusia. Secara nasional tantangan ini mencapai 22 persen dari total cluster tantangan sampai dengan triwulan III.

Tabel 3. 12. Cluster Tantangan Regulasi Dalam Pelaksanaan Anggaran

Cluster	Sub Cluster	%
Tantangan Regulasi Dalam Pelaksanaan Anggaran.	Regulasi K/L	69%
	Regulasi Kementerian Keuangan	17%
	Regulasi Pemda	14%

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 13. Cluster Tantangan SDM

Cluster	Sub Cluster	%
Tantangan SDM	Kekurangan SDM	54%
	Pergantian pejabat perbendaharaan	33%
	Pemahaman terhadap aplikasi	12%

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Permasalahan/tantangan SDM tertinggi pada kurangnya SDM pengelola keuangan di daerah. Pergantian pejabat perbendaharaan juga memberikan kontribusi tinggi pada permasalahan SDM ini karena pergantian pejabat perbendaharaan memerlukan waktu cukup lama di Pemda. Terakhir adalah pemahaman aplikasi oleh Satker yang masih memerlukan edukasi dari Kanwil dan KPPN secara berkelanjutan.

III.5 REGIONAL SUMATERA

III.5.A. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Jumlah alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik sebesar Rp17.576,97 miliar atau 38,32 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Kementerian PUPR memiliki porsi terbesar diantara pengampu belanja K/L yang mendukung DAK Fisik. Jumlah alokasi anggaran Kementerian PUPR untuk mendukung DAK Fisik sebesar Rp16.244,70 miliar atau 92,42 persen dari total alokasi yang sebagian besar digunakan untuk mendukung DAK Fisik Bidang Jalan. Adapun porsi alokasi terendah terdapat pada Perpustakaan RI sebesar Rp4,07 miliar atau 0,02 persen yang digunakan untuk pembangunan perpustakaan di daerah.

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa

Tabel 3. 14. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Sumatera (dalam miliar)

KD BA	NAMA KL	PAGU TOTAL	PAGU MENDUKUNG DAK FISIK	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
018	KEMENTAN	1.363,99	480,86	35,25%	105	369
023	KEMENDIKBUDRISTEK	9.557,84	517,94	5,42%	31	74
024	KEMENKES	4.474,76	51,56	1,15%	12	143
033	KEMEN PUPR	29.463,15	16.244,70	55,14%	47	360
057	PERPUSNAS RI	13,71	4,07	29,65%	11	11
067	KEMENDES PDTT	40,05	8,65	21,59%	11	15
068	BKKBN	953,31	269,20	28,24%	10	168
TOTAL		45.866,81	17.576,97	38,32%	227	1.140

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 15. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Sumatera (dalam miliar)

No.	PROVINSI	PAGU MENDUKUNG DAK FISIK	PAGU TOTAL	PORSI (%)	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
01	ACEH	1.917,55	6.723,61	28,52%	27	146
02	SUMATERA UTARA	2.841,70	7.985,99	35,58%	27	145
03	SUMATERA BARAT	1.315,16	4.809,27	27,35%	24	126
04	RIAU	1.111,02	3.382,82	32,84%	19	97
05	JAMBI	2.669,88	4.686,14	56,97%	21	106
06	SUMATERA SELATAN	3.428,42	8.238,59	41,61%	28	128
07	LAMPUNG	1.629,01	4.168,34	39,08%	22	124
08	BENGKULU	1.045,69	2.245,70	46,56%	22	97
09	BANGKA BELITUNG	529,94	1.277,58	41,48%	19	95
31	KEPULAUAN RIAU	1.088,60	2.348,77	46,35%	18	76
TOTAL		17.576,97	45.866,81	38,32%	227	1.140

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 16. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Sumatera (dalam miliar)

BIDANG DAK FISIK	SUBBIDANG DAK FISIK	NAMA K/L	PAGU	REALISASI	% REAL	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
Jalan	Jalan	KEMEN PUPR	15.635,22	15.197,14	97,20%	36	335
	Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	KEMEN PUPR	355,19	317,41	89,36%	8	13
	TOTAL		15.990,41	15.514,55	97,02%	36	348
Kesehatan dan KB	Keluarga Berencana	BKKBN	269,20	239,74	89,05%	10	168
	Pengendalian Penyakit	KEMENKES	15,38	13,82	89,83%	10	25
	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	KEMENKES	15,19	13,11	86,26%	10	54
	Penguatan Sistem Kesehatan	KEMENKES	20,98	17,98	85,67%	12	64
	TOTAL		320,76	284,64	88,74%	22	311
Pendidikan	PAUD	KEMENDIKBUDRISTEK	12,38	12,09	97,70%	10	10
	Perpustakaan	PERPUSNAS RI	4,07	3,86	94,84%	11	11
	SD dan SMP	KEMEN PUPR	254,30	242,82	95,49%	11	12
	SD, SMP, SMA, SMK	KEMENDIKBUDRISTEK	478,11	424,54	88,80%	30	60
	SMK	KEMENDIKBUDRISTEK	27,45	27,12	98,80%	1	4
	TOTAL		776,30	710,43	91,51%	53	97
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	KEMENTAN	480,86	458,59	95,37%	105	369
	TOTAL		480,86	458,59	95,37%	105	369
Transportasi Perdesaan	Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	KEMENDES PDTT	8,65	8,59	99,34%	11	15
	TOTAL		8,65	8,59	99,34%	11	15
	GRAND TOTAL		17.576,97	16.976,80	96,59%	227	1.140

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

distribusi alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.428,42 miliar atau 19,51 persen. Namun, secara porsi terhadap pagu total belanja K/L, Provinsi Jambi dengan alokasi Rp2.669,88 miliar (56,97 persen), Provinsi Bengkulu dengan alokasi Rp1.045,69 miliar (46,56 persen), dan Provinsi Kepulauan Riau dengan alokasi Rp1.088,60 miliar (46,35 persen) melampaui Sumatera Selatan. Adapun alokasi terendah terdapat di Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp529,94 miliar atau 2,18 persen.

Berdasarkan bidang, sebagian besar anggaran belanja K/L terkonsentrasi pada Bidang Jalan yakni sebesar Rp15.990,41 miliar atau 90,97 persen dari total anggaran belanja K/L pendukung DAK Fisik. Sementara itu, alokasi bidang lainnya terdistribusi pada Bidang Kesehatan sebesar 1,82 persen, Bidang Pendidikan sebesar 4,42 persen, Bidang Pertanian sebesar 2,74 persen, dan Bidang

Transportasi Perdesaan sebesar 0,05 persen. Sampai dengan tahun 2023 berakhir, realisasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik baru mencapai 96,59 persen.

III.5.B. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Per Bidang

A. Bidang Jalan

Bidang Jalan memiliki porsi alokasi belanja paling besar (Rp15.990,41) dengan kinerja realisasi anggaran pada bidang ini cukup optimal mencapai 97,02 persen atau sebesar Rp15.514,55 miliar.

Alokasi RO Dukungan Penanganan Jalan Daerah cukup merata di seluruh provinsi, terbesar Rp689,57 miliar berada di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.111,77 miliar (23,22 persen) dan terendah di Provinsi Sumatera Barat Rp141,20 miliar (2,95 persen). Meskipun realisasi belanja K/L mendukung DAK Fisik bidang jalan terlihat tinggi di akhir

Tabel 3. 17. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Jalan (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	4.787,82	4.757,13	99,36%	1.000,24	km
2	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	3.255,58	3.116,93	95,74%	19,86	km
3	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	1.967,54	1.966,68	99,96%	404,76	km
4	Jalan Strategis (ProPN)	1.628,53	1.541,32	94,65%	472,32	km
		151,35	146,10	96,53%	12.773,17	m
5	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	785,77	768,06	97,75%	10.691,46	km
6	Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)	532,40	456,41	85,73%	2.158,61	m
	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal,	514,86	449,98		87,82	
7	Terluar, dan Terdepan (MP)			87,40%		km
8	Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	265,77	265,77	100,00%	2.935,00	m
9	Preservasi Jembatan	227,39	225,63	99,22%	14.015,45	m
10	Lainnya	1.873,39	1.820,54	97,18%		
TOTAL		15.990,41	15.514,55	97,02%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

tahun, tetapi persentase realisasi baru meningkat tajam di triwulan IV. Rendahnya serapan dukungan penanganan jalan daerah pada pertengahan tahun anggaran berjalan disebabkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait jalan daerah baru terbit pada tahun anggaran berjalan. Untuk mengakomodasi instruksi dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian pada dokumen penganggaran masing-masing satker melalui proses revisi yang terbit pada awal semester II tahun 2023. Akibatnya, satker tidak memiliki kesempatan untuk mengakselerasi pelaksanaan pekerjaan karena lelang baru dimulai pada bulan Mei dan penandatanganan kontrak pada bulan Juli-Agustus. Pelaksanaan pekerjaan memerlukan waktu kurang lebih lima bulan, sehingga pekerjaan baru dapat selesai pada periode Desember.

Pemerintah melaksanakan penanganan jalan daerah melalui belanja K/L seiring dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Output tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemantapan jalan di daerah karena objek penanganan jalan daerah adalah ruas jalan yang masih berupa tanah atau kerikil menuju wilayah-wilayah yang tidak memperoleh akses terhadap jalan utama. Pembangunan jalan ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar distribusi hasil pertanian, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar pemerintah, sehingga

tidak hanya menasar aspek ekonomi, tetapi juga menasar aspek sosial masyarakat. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan penanganan jalan daerah, setidaknya telah menyebabkan penundaan manfaat yang diperoleh masyarakat atas pembangunan jalan tersebut.

Secara agregat, permasalahan pelaksanaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Jalan di Regional Sumatera disebabkan oleh masalah penganggaran yakni revisi dalam rangka mengakomodasi kebijakan Inpres penanganan jalan. Selain itu faktor non teknis, yaitu cuaca yang tidak mendukung dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan menyebabkan progres pelaksanaan yang tidak optimal dan terbatas. Selain itu, lokasi pelaksanaan kegiatan turut menjadi kontributor utama. Akses ke lokasi yang sulit menyebabkan keterlambatan barang modal dan pendukung untuk pelaksanaan kegiatan. Hal ini diperparah dengan lokasi supplier barang modal dan pendukung yang berasal dari luar regional sejalan dengan keterbatasan penyedia dan supplier di Regional Sumatera. Dari sisi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan lelang secara terpusat turut menjadi tantangan bagi Satker dalam pelaksanaan kegiatan karena berpengaruh pada fleksibilitas pelaksanaan lelang (harus menunggu pelaksanaan secara serentak). Tantangan terakhir berasal dari tantangan

SDM yakni dinamika mutasi pegawai. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan satuan kerja terhadap satu atau sejumlah kecil SDM, sehingga mutasi atas pegawai bersangkutan menyebabkan pegawai pengganti pada Satker melakukan adaptasi yang memerlukan rentang waktu tertentu.

B. Bidang Kesehatan dan KB

Kinerja Pelaksanaan anggaran Bidang Kesehatan dan KB sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir mencapai Rp284,64 miliar atau 88,74 persen dari total alokasi anggaran. Porsi terbesar dikontribusi oleh Penyediaan alokon pada faskes dengan alokasi sebesar Rp76,28 miliar atau 23,78 persen dari total alokasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB di Regional Sumatera. Realisasi anggaran atas output dengan kontribusi terbesar tergolong optimal mencapai Rp72,82 miliar atau 95,47 persen. Namun, masih terdapat output dengan realisasi yang masih belum akseleratif/optimal, yaitu Kampanye Penurunan Stunting (3,94 persen) serta masih terdapat realisasi dengan serapan di bawah 90 persen di beberapa output.

Rendahnya kinerja output penurunan stunting disebabkan oleh rekomendasi pendukung yang dikeluarkan oleh Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kementerian Kesehatan, dan konfirmasi kesediaan balai pelatihan kesehatan yang baru terbit menjelang akhir tahun anggaran. Kedua output berstatus blokir dan blokir tersebut baru dibuka pasca terbitnya rekomendasi dari Ditjen KIA dan konfirmasi dari balai pelatihan kesehatan. Umumnya kedua kegiatan akan dilaksanakan pada periode November-Desember 2023.

Secara garis besar, kendala utama dalam pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) di Regional Sumatera terletak pada tantangan penganggaran. Blokir anggaran yang disebabkan oleh ketiadaan rekomendasi resmi dari pusat terkait pelaksanaan kegiatan menjadi hambatan utama dalam upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan. Meskipun output dari kampanye penurunan stunting dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan non-kesehatan secara prinsip lebih baik jika dilakukan dengan cepat, keterlambatan

Tabel 3. 18. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Kesehatan dan KB Regional Sumatera (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	76,28	72,82	95,47%	4.839	Lembaga
2	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	49,33	44,90	91,02%	130.896	Orang
3	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	39,54	38,56	97,52%	24	layanan
4	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	22,09	19,51	88,34%	164	kegiatan
5	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	12,99	10,96	84,39%	8.651	Kelompok Masyarakat
6	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	9,51	0,37	3,94%	6	layanan
7	Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	8,59	7,24	84,31%	1.535.208	Keluarga
8	Dukungan peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dekonsentrasi) (LR)	8,39	7,22	86,14%	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)
9	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	8,15	7,21	88,37%	1.582	Orang
10	Lainnya	85,90	75,85	88,29%		
TOTAL		320,76	284,64	88,74%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

dalam penerbitan rekomendasi dan konfirmasi dari fasilitator pelatihan mengakibatkan potensi mitigasi lebih awal menjadi tertunda di Regional Sumatera.

C. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan dengan alokasi Rp776,30 miliar memiliki proporsi terbesar kedua (4,42 persen) pada belanja K/L yang mendukung DAK Fisik di Regional Sumatera. Kinerja realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir belum optimal, baru mencapai Rp710,43 miliar atau 91,51 persen dari total alokasi anggaran. Distribusi terbesar terdapat pada output Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah untuk 215 unit sekolah sebesar Rp254,05 miliar atau 32,73 persen dari total alokasi anggaran. Selain itu, output dengan alokasi terbesar kedua diampu oleh Kemendikbud Ristek untuk pengikutsertaan guru dalam program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru sebesar Rp239,75 miliar atau 30,88 persen dari belanja K/L mendukung DAK Fisik bidang pendidikan.

Dari sudut pandang agregat, kendala dalam pelaksanaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan di Regional Sumatera berasal dari tantangan dalam penganggaran.

Keterlambatan dalam memberikan petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan menyebabkan revisi anggaran pada paruh kedua tahun 2023. Beberapa kegiatan memiliki jadwal yang sejalan dengan kalender akademik, sehingga percepatan pelaksanaan dianggap tidak tepat karena berpotensi mengurangi dampak optimal yang dihasilkan. Selain itu, terdapat tantangan dalam jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola kegiatan di daerah, yang masih belum sebanding dengan banyaknya sekolah. Terkait dengan output penjaminan mutu, teridentifikasi tantangan yang berasal dari kualitas SDM yang masih belum memahami sistem pendukung pelaksanaan kegiatan.

D. Bidang Pertanian

Total alokasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp480,86 miliar dengan realisasi Rp458,59 miliar (95,37 persen). Alokasi RO Bidang Pertanian tertinggi yakni Pelayanan Kesehatan Hewan sebesar Rp106,82 miliar dengan target 5,27 juta layanan. RO ini dilaksanakan oleh satker lingkup Kementerian Pertanian di seluruh provinsi pada Regional Sumatera.

Kinerja Pelaksanaan anggaran Bidang

Tabel 3. 19. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Pendidikan Regional Sumatera (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	254,05	242,59	95,49%	215	Unit
2	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	239,75	203,09	84,71%	13.872	Orang
3	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	113,26	111,02	98,02%	51.791	Lembaga
4	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	108,94	95,44	87,61%	15.560	Orang
5	Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	23,55	23,23	98,65%	953	Orang
6	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	12,38	12,09	97,70%	43.183	Lembaga
7	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan	7,88	6,77	85,98%	3.500	Orang
8	Penutur bahasa terbina	6,15	6,10	99,27%	2.843	Orang
9	Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi	3,67	3,46	94,29%	10	Lembaga
10	Lainnya	6,67	6,64	99,47%		
TOTAL		776,30	710,43	91,51%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 20. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Pertanian Regional Sumatera (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Pelayanan Kesehatan Hewan	106,82	97,44	91,22%	5.269.330	layanan
2	Sarana Laboratorium Uji DNA Komoditas Perkebunan	72,37	72,31	99,92%	1	Unit
3	Ternak Ruminansia Potong	55,60	49,47	88,97%	5.530	Ekor
4	Area penyaluran benih padi	33,44	32,94	98,51%	117.466	Hektar
5	Laboratorium Uji DNA Komoditas Perkebunan	24,63	22,59	91,70%	1	Unit
6	Pakan Olahan dan bahan pakan	20,81	20,80	99,98%	1.390	Unit
7	Bibit Ternak Unggul	20,17	19,77	97,98%	502.799	produk
8	Area penyaluran benih jagung	15,92	15,77	99,02%	25.500	Hektar
9	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	15,67	15,65	99,83%	525	Hektar
10	Lainnya	115,42	111,85	96,91%		
TOTAL		480,86	458,59	95,37%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Pertanian di Regional Sumatera sampai akhir tahun anggaran 2023 berakhir tergolong sudah optimal. Dari 10 RO dengan alokasi terbesar, persentase realisasi tertinggi terdapat pada RO pakan olahan dan bahan pakan dengan alokasi Rp20,81 miliar dan realisasi Rp20,80 miliar (99,98 persen). RO ini tersebar di empat provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara dengan persentase realisasi tertinggi di Provinsi Aceh yang mencapai 100 persen, sedangkan terendah di Provinsi Sumatera Utara sebesar 99,83 persen.

Secara agregat, permasalahan pelaksanaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian di Regional Sumatera disebabkan oleh faktor cuaca/iklim, khususnya

berkaitan dengan Badai El-Nino. Adapun dari sisi penganggaran dukungan alokasi anggaran untuk merespon Badai El-Nino masih belum memadai. Sementara itu, dari sisi SDM keterlambatan penetapan pejabat perbendaharaan menyebabkan keterlambatan dalam mengeksekusi kegiatan.

E. Bidang Transportasi Pedesaan

Bidang Transportasi Perdesaan merupakan bidang pada belanja K/L mendukung DAK Fisik di Regional Sumatera dengan proporsi terendah dibandingkan dengan bidang lain. Kinerja realisasi anggaran bidang transportasi perdesaan tergolong optimal, meskipun baru terakselerasi di triwulan IV. Sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir, dari pagu Rp8,65 miliar capaian realisasi anggaran

Tabel 3. 21. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Transportasi Pedesaan Regional Sumatera (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Jembatan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	2,90	2,87	98,81%	25	m
2	Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	1,68	1,68	99,97%	1,58	km
3	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	1,45	1,45	99,90%	1,65	km
4	Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	1,20	1,18	98,47%	5,8	km
5	Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	0,65	0,64	99,87%	2	km
6	Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	0,55	0,55	99,89%	13,25	m
7	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	0,22	0,22	99,46%	0,4	km
TOTAL		489,51	467,18	95,44%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

mencapai Rp8,59 miliar atau 99,34 persen dari alokasi anggaran. Alokasi terbesar terdapat pada RO pengembangan jembatan di kawasan transmigrasi dengan pagu Rp2,90 miliar dan target 25 meter di Provinsi Banda Aceh dengan realisasi Rp2,87 miliar atau 98,81 persen.

Rendahnya kinerja realisasi anggaran pada tengah tahun anggaran Bidang Transportasi Perdesaan disebabkan oleh blokir anggaran. Output pendukung mengalami blokir automatic adjustment dan baru mulai dilakukan buka blokir pada bulan Agustus 2023, sehingga sampai dengan akhir triwulan III kinerja terlihat masih rendah. Sementara itu, tantangan lain berasal dari eksekusi kegiatan dan SDM. Eksekusi kegiatan terdampak oleh cuaca hujan yang mengakibatkan distribusi material terhambat dan pelaksanaan yang masih menunggu pedum dan juknis serta hasil AMDAL. Adapun dari sisi SDM, tantangan berasal dari keterlambatan pelantikan KPA, sehingga kegiatan tidak dapat segera dieksekusi.

III.6. REGIONAL JAWA

III.6.A. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Jumlah alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik sebesar Rp90.470,76 miliar atau 37,92 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Kementerian Kesehatan memiliki porsi terbesar diantara K/L pengampu belanja K/L yang mendukung DAK

Fisik. Jumlah alokasi anggaran Kementerian Kesehatan untuk mendukung DAK Fisik sebesar Rp46.571,53 miliar atau 51,48 persen dari total alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik. Sebagian besar digunakan untuk mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB. Adapun porsi terendah terdapat pada Kementerian Desa PDTT sebesar Rp6,05 miliar atau 0,01 persen.

Belanja K/L pendukung DAK Fisik di Regional Jawa relatif lebih besar dibandingkan regional lainnya, tetapi pelaksanaan dan manfaatnya dirasakan sampai ke daerah. Alokasi Belanja K/L terkait hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, pelaksanaan kegiatannya dilakukan di daerah dalam rangka mendanai program-program Pemerintah di daerah. Kedua, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan wewenang atau penugasan dari pemerintah kepada gubernur/daerah yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh gubernur/daerah. Ketiga, Belanja K/L yang alokasi anggarannya tercatat di pusat namun kegiatannya ada di daerah.

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa distribusi alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terbesar terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp70.591,83 miliar atau 78,03 persen. Besarnya alokasi belanja tersebut karena besarnya pagu di level provinsi sejalan dengan lokasi DIPA kantor pusat yang pelaksanaan dan penerima manfaatnya tersebar di seluruh daerah.

Tabel 3. 22. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Jawa (miliar rupiah)

KD BA	NAMA K/L	PAGU Mendukung DAK FISIK	TOTAL PAGU	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
018	KEMENTAN	3.101,10	11.397,80	27,21%	107	339
023	KEMENDIKBUDRISTEK	22.146,51	61.453,80	36,04%	40	136
024	KEMENKES	46.571,53	86.473,94	53,86%	32	148
033	KEMEN PUPR	17.509,99	73.744,36	23,74%	41	273
057	PERPUSNAS RI	352,10	694,40	50,71%	8	36
067	KEMENDES PDTT	6,05	2.976,53	0,20%	3	13
068	BKKBN	783,49	1.833,74	42,73%	11	148
TOTAL		90.470,76	238.574,56	37,92%	242	1.093

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 23. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Jawa (miliar rupiah)

KODE PROVINSI	NAMA PROVINSI	PAGU MENDUKUNG DAK FISIK	PAGU TOTAL	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
10	BANTEN	2.403,87	5.546,61	43,34%	22	110
11	DI YOGYAKARTA	1.043,16	7.653,98	13,63%	65	303
12	DKI JAKARTA	70.591,83	169.874,40	41,56%	65	239
13	JAWA BARAT	4.699,81	20.216,78	23,25%	33	155
14	JAWA TENGAH	7.012,10	20.838,46	33,65%	19	105
15	JAWA TIMUR	4.719,98	14.444,32	32,68%	38	181
TOTAL		90.470,76	238.574,56	37,92%	242	1.093

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 24. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Jawa (miliar rupiah)

BIDANG DAK FISIK	SUBBIDANG DAK FISIK	NAMA K/L	PAGU	REALISASI	% REAL	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
Jalan	Jalan	KEMEN PUPR	16.130,94	15.305,44	94,88%	34	263
	Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	KEMEN PUPR	161,64	128,72	79,64%	2	3
	TOTAL		16.292,58	15.434,16	94,73%	34	266
Kesehatan dan KB	Keluarga Berencana	BKKBN	783,49	780,16	99,58%	11	148
	Pengendalian Penyakit	KEMENKES	9,04	8,16	90,34%	7	17
	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	KEMENKES	29,35	23,59	80,36%	7	41
	Penguatan Sistem Kesehatan	KEMENKES	46.533,14	46.321,57	99,55%	32	90
	TOTAL		47.355,01	47.133,48	99,53%	43	296
Pendidikan	PAUD	KEMENDIKBUDRISTEK	557,32	555,08	99,60%	9	20
	Perpustakaan	PERPUSNAS RI	352,10	349,17	99,17%	8	36
	SD	KEMENDIKBUDRISTEK	7.301,60	7.283,83	99,76%	3	14
	SD dan SMP	KEMEN PUPR	1.217,41	1.209,10	99,32%	7	7
	SD, SMP, SMA, SMK	KEMENDIKBUDRISTEK	5.110,55	4.990,13	97,64%	27	57
	SMA	KEMENDIKBUDRISTEK	1.254,85	1.254,12	99,94%	2	5
	SMK	KEMENDIKBUDRISTEK	3.023,39	3.004,07	99,36%	8	26
	SMP	KEMENDIKBUDRISTEK	2.932,60	2.929,55	99,90%	2	6
	SMP, SMA, SMK	KEMENDIKBUDRISTEK	1.966,20	1.933,18	98,32%	2	8
	TOTAL		23.716,02	23.508,24	99,12%	55	179
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	KEMENTAN	3.101,10	1.754,11	56,56%	107	339
	TOTAL		3.101,10	2.384,54	76,89%	107	339
Transportasi Perdesaan	Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	KEMENDES PDTT	6,05	5,69	94,04%	3	13
	TOTAL		6,05	5,69	94,04%	3	13
GRAND TOTAL			90.470,76	88.466,11	97,78%	242	1.093

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Adapun alokasi terendah terdapat di Provinsi Yogyakarta sebesar Rp1.043,16 miliar atau 1,15 persen. Selain distribusi yang rendah, proporsi anggaran belanja K/L mendukung DAK Fisik dari Provinsi Yogyakarta juga paling rendah.

Berdasarkan bidang, proporsi alokasi anggaran belanja K/L terkonsentrasi pada Bidang

Kesehatan dan KB yakni sebesar Rp47.461,65 miliar atau 52,67 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Sementara itu, distribusi pada Bidang Jalan sebesar 18,10 persen, Pendidikan sebesar 25,57 persen, Pertanian sebesar 3,63 persen, dan Transportasi Perdesaan sebesar 0,01 persen.

III.6.B. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Per Bidang

A. Bidang Jalan

Bidang Jalan memiliki alokasi belanja terbesar ketiga dengan kinerja realisasi anggaran pada bidang ini relatif cukup optimal karena sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir dapat mencapai 94,73 persen atau sebesar Rp15.434,16 miliar. Pada sembilan besar RO dengan pagu tertinggi di bidang jalan, terdapat dua RO dengan persentase serapan belum optimal yaitu pembangunan jalan bebas hambatan yang hanya terealisasi sebesar 88,45 persen dan jalan akses simpul transportasi berupa jembatan yang hanya terealisasi 76,44

penyedia yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan sangat terbatas.

Berdasarkan provinsi, sebagian besar dukungan belanja K/L untuk DAK Fisik Bidang Jalan terdapat di Jawa Tengah sebesar Rp6.267,11 miliar atau 38,47 persen. Selanjutnya, pada provinsi lain proporsi besaran dukungan DAK Fisik Bidang Jalan, yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar 24,01 persen, Provinsi Jawa Barat sebesar 17,18 persen, dan Provinsi Banten sebesar 13,89 persen, sedangkan Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta memiliki porsi sebesar 6,46 persen.

Realisasi belanja baru terakselerasi pada triwulan IV karena memiliki permasalahan yang serupa. Instruksi Presiden (Inpres) terkait jalan daerah baru terbit pada tahun anggaran berjalan. Akibatnya untuk mengakomodasi

Tabel 3. 25. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Jalan (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	4.122,45	3.646,13	88,45%	11,17	km
2	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	3.932,58	3.819,71	97,13%	637,38	km
3	Jalan Strategis (ProPN)	2.011,56	1.913,07	95,10%	227,25	km
		84,44	81,08	96,02%	1.620,02	m
4	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	1.263,17	1.243,76	98,46%	200,50	km
5	Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan	555,36	539,51	97,15%	142,66	m
6	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	503,59	502,19	99,72%	4.815,76	km
7	Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	472,38	467,50	98,97%	3.454,30	m
8	Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)	470,36	456,57	97,07%	639,86	m
9	Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	324,82	324,72	100,00%	71,30	km
		78,01	59,63	76,44%	294,40	m
10	Lainnya	2.473,86	2.380,29	96,22%		
	TOTAL	16.292,58	15.434,16	94,73%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

persen.

Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batang merupakan pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan secara *multiyears*. Proses pelaksanaannya memerlukan perizinan dari Menteri Keuangan, sehingga membutuhkan rentang waktu tertentu untuk penyelesaian administrasi perizinan. Selain itu, proses pengadaan dilakukan dengan persetujuan dan keterlibatan panitia pengadaan pusat karena nilai kontrak yang lebih besar daripada Rp100 miliar. Isu lainnya berasal dari proses pengadaan barang dan jasa berupa jumlah

instruksi dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian pada dokumen penganggaran masing-masing Satker. Revisi DIPA baru terbit pada awal semester II tahun 2023. Satker tidak memiliki kesempatan untuk mengakselerasi pelaksanaan pekerjaan karena baru melaksanakan lelang pada kisaran bulan Mei dan penandatanganan kontrak pada kisaran bulan Juli-Agustus. Pelaksanaan pekerjaan memerlukan waktu kurang lebih lima bulan, sehingga pekerjaan baru dapat selesai pada periode Desember.

B. Bidang Kesehatan dan KB

Kinerja Pelaksanaan anggaran Bidang Kesehatan dan KB sampai tahun anggaran 2023 berakhir tergolong optimal. Realisasi anggaran pada Bidang Kesehatan dan KB mencapai Rp47.133,48 miliar atau 99,53 persen dari total alokasi anggaran. Porsi terbesar berkontribusi oleh Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan alokasi sebesar Rp46.331,59 miliar atau 97,84 persen dari total alokasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB di Regional Jawa. Realisasi anggaran atas output dengan kontribusi terbesar tergolong

dalam penggunaan aplikasi SIHA 2.0 (LP) dan akreditasi laboratorium.

Upaya penurunan stunting di Regional Jawa menjadi salah satu isu yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada level nasional dengan pelaksanaan yang akseleratif di triwulan IV. Kinerja dua output yang mendukung intervensi penurunan stunting tergolong tinggi yang terindikasi dari realisasi anggaran yang hampir 100 persen. Kegiatan kampanye penurunan stunting terealisasi sebesar 99,75 persen, sedangkan tingkat provinsi dan kabupaten/kota baru mencapai 96,72 persen.

Pada pelaksanaan kampanye penurunan stunting, pembuatan KAK, HPS dan spesifikasi

Tabel 3. 26. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Kesehatan dan KB Regional Jawa (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK)	46.331,59	46.300,93	99,93%	96.800.000,00	Orang
2	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	314,09	313,99	99,97%	7.529,00	Lembaga
3	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	104,31	104,03	99,73%	320.268,00	Orang
4	Workshop Pengelola Program dalam Penggunaan Aplikasi SIHA 2.0 (LP)	59,36	0,00	0,00%	170,00	Orang
5	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat nasional	47,09	46,98	99,75%	3,00	layanan
6	Akreditasi Laboratorium	46,18	0,00	0,00%	1,00	Paket
7	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	46,01	44,50	96,72%	9,00	layanan
8	KIE/promosi Program Bangga Kencana melalui berbagai media	27,81	27,80	99,97%	13,00	promosi
9	Sistem Induk Informasi Komunikasi Bangga Kencana	24,79	24,75	99,83%	1,00	Unit
10	Lainnya	353,77	270,51	76,46%		
TOTAL		47.355,01	47.133,48	99,53%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

optimal mencapai Rp46.300,93 miliar atau 99,93 persen. Output PBI JKN/KIS tergolong pada belanja K/L yang alokasi anggarannya tercatat di pusat namun kegiatannya ada di daerah, sehingga penerima manfaat dari kegiatan ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun, masih terdapat output dengan realisasi yang masih belum terserap sampai tahun anggaran 2023 berakhir, diantaranya workshop pengelola program

kegiatan memang ditetapkan dan tertera dalam juknis di awal tahun anggaran. Namun kegiatan kampanye percepatan penurunan stunting tingkat provinsi dan kabupaten/kota ini merupakan kegiatan yang bekerjasama dengan Anggota Komisi IX DPR RI, sehingga dalam perjalanannya perlu penyesuaian seperti jumlah peserta, bentuk sosialisasi, media yang digunakan. Sementara itu, pada output Pembinaan Keluarga pada 1.000 HPK tantangan lebih bersifat teknis berasal dari

pengadaan barang dan jasa. Diharapkan terdapat perbaikan proses bisnis untuk pengadaan goodie bag dan jasa event organizer melalui pembuatan etalase katalog/*e-purchasing*.

Secara agregat, permasalahan pelaksanaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB di Regional Jawa berasal dari tantangan penganggaran. Isu yang muncul dari tantangan SDM adalah kegiatan yang terkena blokir, termasuk blokir *automatic adjustment*, dan baru dibuka pada triwulan IV sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda, terdapat ada kesalahan dalam penentuan satuan target output sehingga satker sedikit kesulitan dalam mencapai target tersebut. Masih terdapat kegiatan yang agendanya ditetapkan terpusat sehingga belum dapat dieksekusi, hal ini dikarenakan terdapat kegiatan yang agenda ditetapkan terpusat, dan pelaksanaan pada kegiatan yang terjadwal di bulan November seperti kegiatan Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Generasi Berencana (ADUJAK GENRE).

Tantangan lain yang berkontribusi besar dalam pelaksanaan belanja K/L pendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB di Regional Jawa adalah tantangan SDM. Dinamika mutasi pegawai masih menjadi isu utama dari tantangan SDM, terutama mutasi yang dialami oleh PPK Satker yang menyebabkan satker memerlukan waktu untuk pengganti PPK dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu, kuantitas SDM dinilai kurang terutama apabila kegiatan dilaksanakan secara bersamaan.

C. Bidang Pendidikan

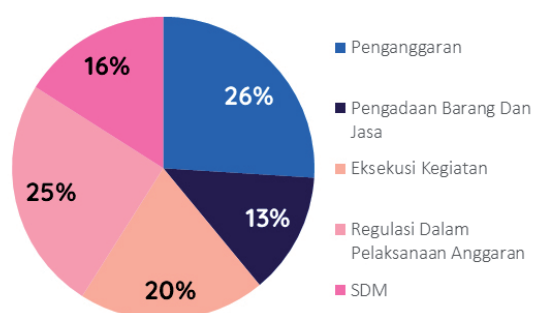
Bidang Pendidikan sebagai bidang dengan proporsi terbesar kedua pada belanja K/L mendukung DAK Fisik di Regional Jawa memiliki kinerja realisasi cukup optimal. Realisasi anggaran Bidang Pendidikan mencapai Rp23.508,24 miliar atau 99,12 persen dari total alokasi anggaran. Distribusi terbesar terdapat pada output Program Indonesia Pintar yang diampu oleh Kemendikbud Ristek sebesar Rp9.672,43 miliar atau 40,78 persen

dari total alokasi anggaran untuk 10,36 juta siswa SD/Paket A, 4,37 juta siswa SMP/Paket B, 1,37 juta siswa SMA/Paket C, dan 1,83 juta siswa SMK. Capaian kinerja output dengan distribusi terbesar masih tergolong optimal yang tercermin dari persentase realisasi yang mencapai 99,97 persen. Selain output penyaluran PIP, terdapat output penyaluran tunjangan profesi guru non PNS dengan kontribusi sebesar 28,92 persen.

Capaian kinerja tunjangan profesi guru non-PNS akseleratif pada triwulan IV sebesar 99,02 persen atau Rp6.791,83 miliar. Terlepas dari tingginya realisasi pada output PIP dan tunjangan profesi guru, terdapat isu yang menjadi perhatian pada tahun anggaran berjalan. Isu dalam penyaluran PIP dan tunjangan profesi guru non-PNS disebabkan oleh blokir *automatic adjustment* sejak awal tahun anggaran untuk penyaluran tunjangan profesi guru non-PNS, dokumen pengadaan barang/jasa yang harus disusun di akhir tahun disaat tim PPK sedang padat dengan pekerjaan akhir tahun sehingga dokumen pengadaan barang/jasa terkadang belum sempurna, dan kekurangan SDM.

Berdasarkan perspektif agregat, permasalahan pelaksanaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan di Regional Jawa dapat dilihat pada Grafik 3.2. Kendala relatif merata pada tiga aspek, sebanyak 26 persen berasal dari tantangan penganggaran, 25 persen berasal dari tantangan regulasi dalam

Grafik 3. 2. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan Regional Jawa



Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

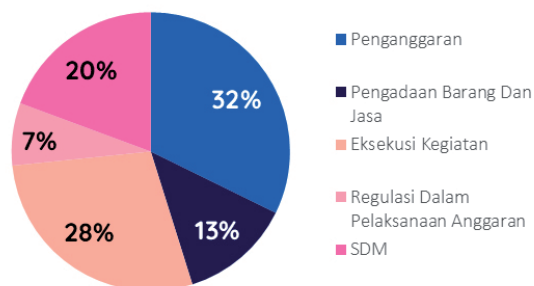
pelaksanaan anggaran, 20 persen berasal dari eksekusi kegiatan, dan 29 persen selebihnya berasal dari tantangan pengadaan barang dan jasa serta SDM. Blokir anggaran *automatic adjustment* dan *refocusing* menjadi faktor utama tantangan dari aspek penganggaran. Isu pada aspek regulasi pelaksanaan anggaran dan eksekusi kegiatan berupa keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan terdapat perubahan petunjuk teknis yang telah diterbitkan.

D. Bidang Pertanian

Kinerja Pelaksanaan anggaran Bidang Pertanian di Regional Jawa masih belum optimal. Sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir, realisasi anggaran baru mencapai Rp2.384,54 miliar atau 76,89 persen dari total alokasi anggaran. Realisasi tersebar pada 339 output dan menjadi bidang dengan sebaran output terbanyak dibandingkan bidang lain. Rendahnya realisasi anggaran terindikasi dari output dengan alokasi anggaran besar yang masih di bawah capaian realisasi secara agregat di Bidang Pertanian, yaitu output penyaluran benih jagung dan area penyaluran benih padi. Serapan kedua output adalah sebesar 5,57 persen dan 20,26 persen.

Masih adanya kinerja realisasi anggaran pada output bidang pertanian yang rendah, timbul dari beberapa aspek tantangan. Tantangan utama muncul dari sisi non-teknis, yaitu cuaca. Cuaca hujan menghambat pelaksanaan

Grafik 3.3. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian Regional Jawa



Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

vaksin karena menyebabkan kondisi yang sulit apabila terjadi hujan besar. Pemeliharaan ternak dilakukan dengan sistem ekstensif di beberapa Kabupaten (dilepas di kebun sawit) yang menyulitkan petugas dalam hal *restrain* sebelum vaksinasi dilakukan. Adapun dari sisi penganggaran, target yang ditetapkan dinilai terlalu tinggi karena populasi hewan untuk vaksin tidak sesuai dengan target.

Secara agregat, permasalahan pelaksanaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian di Regional Jawa dapat dilihat pada Grafik 2.3. Tantangan pada Bidang Pertanian terbesar disebabkan oleh tantangan penganggaran (32 persen). Selanjutnya tantangan secara berurutan berasal dari aspek SDM penganggaran (28 persen), SDM (20 persen), sedangkan tantangan regulasi dalam pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama sebesar

Tabel 3. 27. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Pertanian Regional Jawa (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	642,00	633,45	98,67%	2.442,00	Unit
2	Area penyaluran benih jagung	364,09	20,29	5,57%	284.000,00	Hektar
3	Pelayanan Kesehatan Hewan	346,00	335,12	96,86%	11.242.186,36	layanan
4	Area penyaluran benih padi	335,56	68,00	20,26%	932.788,00	Hektar
5	Fasilitas Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi	115,99	112,44	96,95%	10,00	Kelompok Masyarakat
6	Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura	104,55	104,15	99,62%	4.301,12	Unit
7	Jalan Usaha Tani	98,17	98,15	99,98%	1.145,00	Unit
8	Jaringan Irigasi Tersier	76,20	76,50	100,39%	1.095,00	Unit
9	Ternak Ruminansia Potong	71,66	69,13	96,46%	9.089,00	Ekor
10	Lainnya	946,90	867,31	91,60%		
TOTAL		3.101,10	2.384,54	76,89%		

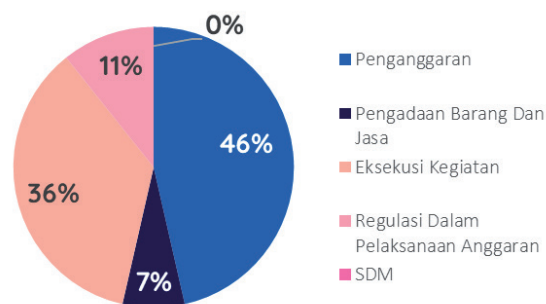
Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

20 persen. Faktor utama dalam tantangan bidang pertanian adalah intensitas revisi cukup tinggi, baik revisi pergeseran antar Satker, Jenis Anggaran, maupun optimalisasi sisa kontrak karena sebagian besar anggaran berupa bantuan pemerintah. Selain itu, proses penganggaran belum berjalan optimal karena terdapat alokasi anggaran yang melebihi kebutuhan karena terdapat satker yang mengidentifikasi potensi anggaran yang tidak terserap sampai akhir tahun 2023. Sementara itu, isu utama pada tantangan eksekusi kegiatan adalah keterlambatan penerbitan pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah.

E. Bidang Transportasi Perdesaaan

Bidang Transportasi Perdesaan merupakan bidang pada belanja K/L mendukung DAK Fisik dengan proporsi terendah dibandingkan dengan bidang lain. Kinerja realisasi anggaran bidang transportasi perdesaan cukup optimal. Sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir, capaian realisasi anggaran mencapai Rp5,69 miliar atau 94,04 persen dari alokasi anggaran. Akan tetapi, masih terdapat output yang belum berprogres sama sekali, yaitu pengembangan

Grafik 3.4. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Transportasi Pedesaan Regional Jawa



Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

jembatan di kawasan transmigrasi untuk mendukung ketahanan pangan. Adapun belanja K/L mendukung transportasi perdesaan hanya terdapat di Provinsi Jakarta yang dilaksanakan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan.

Rendahnya kinerja realisasi anggaran Bidang Transportasi Perdesaan disebabkan oleh blokir anggaran. Output pendukung mengalami blokir automatic adjustment dan baru mulai dilakukan buka blokir pada semester II tahun 2023, sehingga sampai dengan akhir triwulan III

Tabel 3. 28. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Bidang Transportasi Pedesaan Regional Jawa (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Jalan untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun	4,95	4,94	99,81%	6,00	km2
2	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	0,38	0,23	60,50%	13,77	km
3	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	0,35	0,26	76,51%	8,80	km
4	Koordinasi Penyerasian Sarana dan Prasarana Bidang Energi di Daerah Tertinggal	0,18	0,18	99,99%	1,00	kegiatan
5	Jembatan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	0,07	0,03	38,18%	21,00	m
6	Jembatan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	0,05	0,03	66,23%	39,00	m
7	Jembatan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi	0,03	0,00	0,00%	1,00	m
8	Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan	0,02	0,01	67,42%	0,88	km
9	Jembatan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan	0,02	0,00	0,00%	30,00	m
TOTAL		6,05	5,69	94,04%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

kinerja terlihat masih rendah. Blokir *automatic adjustment* merata dan menjadi isu utama dalam pelaksanaan belanja K/L di Bidang Transportasi Perdesaan sebagaimana Grafik 2.4. Sebanyak 46 persen berasal dari tantangan penganggaran yang terjadi karena terdapat blokir automatic adjustment. Sementara itu, tantangan lain berasal dari eksekusi kegiatan. Eksekusi kegiatan terdampak karena aksesibilitas terhadap lokasi kegiatan yang sulit.

III.7. REGIONAL SULAWESI

III.7.A. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Jumlah alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik sebesar Rp8.089,33 miliar atau 27,53 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Kementerian PUPR memiliki porsi terbesar diantara K/L pengampu belanja K/L yang mendukung DAK Fisik. Jumlah alokasi anggaran Kementerian

PUPR untuk mendukung DAK Fisik sebesar Rp7.419,17 miliar atau 91,72 persen dari total alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik. Sebagian besar digunakan untuk mendukung DAK Fisik bidang jalan. Adapun porsi terendah terdapat pada Perpustakaan RI sebesar Rp2,11 miliar atau 0,03 persen. Alokasi tersebut berasal dari seluruh pagu belanja K/L Perpustakaan RI yang digunakan untuk pembangunan perpustakaan di daerah.

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa distribusi alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terbesar terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp2.359,47 miliar atau 29,17 persen. Besarnya alokasi belanja tersebut sejalan dengan besarnya pagu di level provinsi. Adapun alokasi terendah terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar Rp715,73 miliar atau 8,85 persen. Namun, meskipun distribusi dari Provinsi Gorontalo paling rendah, secara porsi terhadap pagu total belanja K/L pengampu merupakan terbesar

Tabel 3. 29. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Sulawesi (miliar rupiah)

KD BA	NAMA KL	PAGU TOTAL	PAGU MENDUKUNG DAK FISIK	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
018	KEMENTAN	763,14	213,32	27,95%	69	223
023	KEMENDIKBUDRISTEK	4.740,71	265,72	5,60%	18	44
024	KEMENKES	3.336,89	32,28	0,97%	9	94
033	KEMEN PUPR	19.920,57	7.419,17	37,24%	28	225
057	PERPUSNAS RI	2,11	2,11	100,00%	6	6
067	KEMENDES PDTT	61,00	14,02	22,99%	17	29
068	BKKBN	559,05	142,72	25,53%	6	104
TOTAL		29.383,46	8.089,33	27,53%	227	1.140

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 30. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Sulawesi (miliar rupiah)

KODE PROVINSI	NAMA PROVINSI	PAGU MENDUKUNG DAK FISIK	PAGU TOTAL	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
23	SULAWESI SELATAN	2.359,47	10.911,33	21,62%	37	156
24	SULAWESI TENGAH	1.796,31	5.874,92	30,58%	26	124
25	SULAWESI TENGGARA	1.448,95	4.237,76	34,19%	26	123
26	GORONTALO	715,73	2.286,29	31,31%	22	102
27	SULAWESI UTARA	1.017,30	4.356,36	23,35%	23	125
32	SULAWESI BARAT	751,57	1.716,81	43,78%	19	95
TOTAL		8.089,33	29.383,46	27,53%	153	725

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 31. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Sulawesi (miliar rupiah)

BIDANG DAK FISIK	SUBBIDANG DAK FISIK	NAMA K/L	PAGU	REALISASI	% REAL	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
Jalan	Jalan	KEMEN PUPR	7.066,79	6.789,47	96,08%	21	212
	Jalan - Tematik Penguatan Destinasi	KEMEN PUPR	138,18	129,28	93,56%	2	6
	TOTAL		7.204,97	6.918,76	96,03%	34	218
Kesehatan dan Keluarga Berencana		BKKBN	142,72	113,23	79,34%	6	104
	Pengendalian Penyakit	KEMENKES	8,08	6,73	83,24%	6	15
	Penguatan Penurunan Angka Kem	KEMENKES	11,13	8,41	75,59%	6	38
	Penguatan Sistem Kesehatan	KEMENKES	13,07	12,00	91,77%	9	41
	TOTAL		175,00	140,37	80,21%	43	198
Pendidikan	PAUD	KEMENDIKBUDRISTEK	7,25	7,23	99,71%	6	6
	Perpustakaan	PERPUSNAS RI	2,11	2,07	97,86%	6	6
	SD dan SMP	KEMEN PUPR	214,20	214,12	99,96%	7	7
	SD, SMP, SMA, SMK	KEMENDIKBUDRISTEK	232,00	230,05	99,16%	17	34
	SMK	KEMENDIKBUDRISTEK	26,47	25,99	98,20%	1	4
	TOTAL		482,02	479,46	99,47%	31	57
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Ka	KEMENTAN	213,32	206,27	96,70%	69	223
	TOTAL		213,32	206,27	96,70%	69	223
Transportasi	Transportasi Perdesaan - Tematik	KEMENDES PDTT	14,02	13,84	98,69%	17	29
	TOTAL		14,02	13,84	98,69%	17	29
GRAND TOTAL			8.089,33	7.758,69	95,91%	153	725

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

ketiga (31,31 persen) setelah Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan bidang, sebagian besar anggaran belanja K/L terkonsentrasi pada Bidang Jalan yakni sebesar Rp7.204,97 miliar atau 89,07 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Sementara itu, distribusi pada Bidang Kesehatan sebesar 2,16 persen, Pendidikan sebesar 5,96 persen, Pertanian sebesar 2,64 persen, dan Transportasi Perdesaan sebesar 0,17 persen. Sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir, realisasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik mencapai Rp7.758,69 miliar atau 95,91 persen.

III.7.B. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Per Bidang

A. Bidang Jalan

Bidang Jalan memiliki alokasi belanja paling besar dengan kinerja realisasi anggaran pada bidang ini akseleratif di triwulan IV. Realisasi bidang jalan sebesar Rp6.918,76 miliar atau 96,03 persen dari alokasi Rp7.204,97 miliar. Pada sepuluh besar RO dengan pagu tertinggi di bidang jalan, terdapat tiga RO dengan persentase serapan lebih rendah daripada

persentase serapan di level bidang, yaitu jalan strategis (91,91 persen dan 94,01 persen), jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdepan (95,40 persen) dan pembangunan jembatan strategis (90,51 persen).

Meskipun realisasi anggaran di tahun anggaran 2023 berakhir terlihat tinggi, tetapi realisasi tersebut baru meningkat tinggi pada triwulan IV. Rendahnya serapan pada tahun anggaran berjalan umumnya disebabkan permasalahan yang serupa. Instruksi Presiden (Inpres) terkait jalan daerah baru terbit pada tahun anggaran berjalan. Akibatnya untuk mengakomodasi instruksi dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian pada dokumen penganggaran masing-masing Satker. Revisi DIPA baru terbit pada awal semester II tahun 2023. Satker tidak memiliki kesempatan untuk mengakselerasi pelaksanaan pekerjaan karena baru melaksanakan lelang pada kisaran bulan Mei dan penandatanganan kontrak pada kisaran bulan Juli-Agustus. Pelaksanaan pekerjaan memerlukan waktu kurang lebih lima bulan, sehingga pekerjaan baru dapat selesai pada periode Desember.

Pemerintah melaksanakan penanganan jalan daerah melalui belanja K/L seiring dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki

Tabel 3. 32. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Regional Sulawesi (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Jalan Strategis (ProPN)	2.433,60	2.236,82	91,91%	525,49	km
		118,91	111,78	94,01%	4.190,27	m
2	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	1.919,32	1.897,20	98,85%	547,94	km
3	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	800,67	797,00	99,54%	258,82	km
4	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	508,07	496,81	97,78%	7.069,52	km
5	Pelebaran Jalan Menuju Standar	196,57	196,57	100,00%	41,62	km
6	Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)	187,35	169,58	90,51%	752,53	m
7	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	135,57	129,34	95,40%	25,06	km
		74,56	73,48	98,56%	159,10	m
8	Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	100,26	100,26	100,00%	44,17	km
		7,46	7,46	100,00%	707,70	m
9	Pembangunan Jalan	102,09	101,54	99,46%	19,95	km
10	Lainnya	620,54	600,91	96,84%		
TOTAL		7.204,97	6.918,76	96,03%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

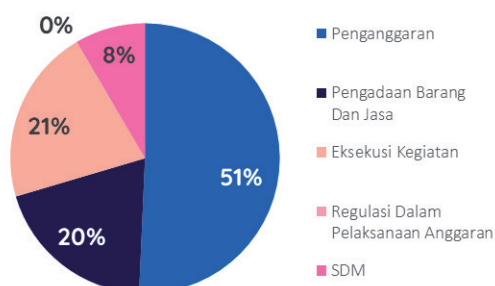
oleh pemerintah daerah. Output tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemantapan jalan di daerah karena objek penanganan jalan daerah adalah ruas jalan yang masih berupa tanah atau kerikil menuju wilayah-wilayah yang tidak memperoleh akses terhadap jalan utama. Pembangunan jalan ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar distribusi hasil pertanian, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar pemerintah, sehingga tidak hanya menyasar aspek ekonomi, tetapi juga menyasar aspek sosial masyarakat. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan penanganan jalan daerah, setidaknya telah

menyebabkan penundaan manfaat yang diperoleh masyarakat atas pembangunan jalan tersebut.

Secara agregat, permasalahan pelaksanaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Jalan di Regional Sulawesi dapat dilihat pada Grafik 2.5. Kendala terbesar, sebanyak 51 persen, berasal dari tantangan penganggaran. Penambahan alokasi anggaran pada tahun anggaran menjadi kontributor utama dalam tantangan di bidang penganggaran. Hal tersebut terjadi seiring dengan keterlambatan Inpres sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yang juga menjadi latar belakang kontributor kedua dalam tantangan penganggaran, yaitu pelaksanaan revisi secara terpusat.

Selanjutnya, kontributor tantangan terbesar dalam penyelesaian kegiatan berasal dari tantangan eksekusi kegiatan. Sebagian besar tantangan disebabkan oleh faktor non teknis, yaitu cuaca. Cuaca yang tidak mendukung dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan, karena progres pelaksanaan yang tidak optimal dan terbatas. Selain itu, lokasi pelaksanaan kegiatan turut menjadi kontributor utama. Aksesibilitas yang sulit menyebabkan keterlambatan barang modal dan pendukung untuk pelaksanaan kegiatan, terlebih lagi supplier barang modal dan

Grafik 3.5. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Jalan Regional Sulawesi



Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

pendukung yang berasal dari luar regional sejalan dengan keterbatasan penyedia dan supplier di Regional Sulawesi. Keterbatasan tersebut melatarbelakangi tantangan yang muncul di bidang pengadaan barang dan jasa, yaitu keterbatasan penyedia. Selain itu, dari sisi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan lelang secara terpusat turut menjadi tantangan bagi Satker dalam pelaksanaan kegiatan karena berpengaruh pada fleksibilitas pelaksanaan lelang (harus menunggu pelaksanaan secara serentak).

Tantangan terakhir berasal dari tantangan SDM. Dinamika mutasi pegawai masih menjadi isu utama dalam tantangan SDM. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan satuan kerja terhadap satu atau sejumlah kecil SDM, sehingga mutasi atas pegawai bersangkutan menyebabkan pegawai pengganti pada Satker melakukan adaptasi yang memerlukan rentang waktu tertentu.

B. Bidang Kesehatan dan KB

Kinerja Pelaksanaan anggaran Bidang

Kesehatan dan KB sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir menjadi bidang yang tidak optimal dibandingkan bidang lain. Realisasi anggaran pada Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp140,37 miliar atau 80,21 persen dari total alokasi anggaran. Porsi terbesar dikontribusi oleh penyediaan alokon pada faskes dengan alokasi sebesar Rp57,55 miliar atau 32,89 persen dari total alokasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB di Regional Sulawesi. Realisasi anggaran atas output dengan kontribusi terbesar tergolong belum optimal sebesar Rp39,06 miliar atau 67,87 persen. Pada sembilan RO dengan pagu terbesar hanya dua RO dengan serapan di atas 90 persen di akhir tahun anggaran, yaitu kampanye percepatan penurunan stunting tingkat provinsi dan kab/kota (99,68) serta dukungan peningkatan mutu, akreditasi, keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan (92,57 persen).

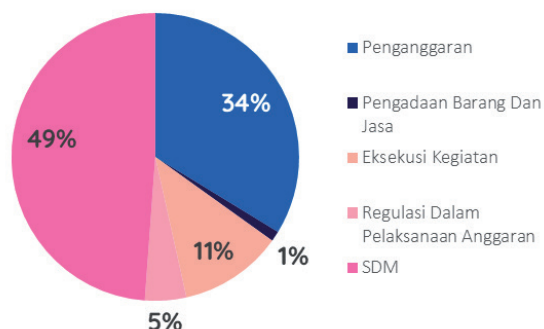
Upaya penurunan stunting di Regional Sulawesi sebagai salah satu isu yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada level nasional, masih

Tabel 3. 33. Pagu Realisasi K/L Bidang Kesehatan dan KB Regional Sulawesi (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	57,55	39,06	67,87%	2.218,00	Lembaga
2	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	21,77	18,31	84,13%	48.330,00	Orang
3	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	14,64	14,59	99,68%	15,00	layanan
4	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	11,61	9,66	83,19%	87,00	kegiatan
5	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	7,03	5,96	84,84%	3.838,00	Kelompok Masyarakat
6	Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	5,00	3,76	75,09%	1.522,00	Orang
7	Dukungan peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dekonsentrasi) (LR)	4,45	4,12	92,57%	22,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)
8	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	4,08	3,51	86,04%	879,00	Orang
9	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	3,98	3,19	80,30%	1.320,00	Orang
10	Lainnya	44,91	38,21	85,10%		
TOTAL		175,00	140,37	80,21%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 3.6. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Regional Sulawesi



Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

belum optimal. Salah satu kinerja output yang mendukung intervensi penurunan stunting pada belanja K/L yang mendukung DAK Fisik di Bidang Kesehatan dan KB masih belum optimal yang terindikasi dari realisasi anggaran dan progres capaian yang masih rendah. Pelatihan dan refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting dan penyelenggaraan koordinasi satgas percepatan penurunan stunting provinsi dan kab/kota tergolong tidak optimal masing-masing sebesar 84,13 persen dan 83,19 persen.

Tidak optimalnya serapan belanja dukungan bidang Kesehatan dan KB disebabkan oleh rekomendasi pendukung yang dikeluarkan oleh Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kementerian Kesehatan, dan konfirmasi kesediaan balai pelatihan kesehatan yang baru terbit menjelang akhir tahun anggaran. Terdapat output berstatus blokir dan blokir tersebut baru dibuka pasca terbitnya rekomendasi dari Ditjen KIA dan konfirmasi dari balai pelatihan kesehatan. Umumnya beberapa kegiatan akan dilaksanakan pada periode November-Desember 2023.

Tantangan lain yang berkontribusi besar dalam pelaksanaan belanja K/L pendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB di Regional Sulawesi adalah tantangan penganggaran. Blokir anggaran yang disebabkan belum ada penerbitan rekomendasi dari pusat atas pelaksanaan kegiatan menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan secara akseleratif.

Karakteristik output kampanye penurunan stunting dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan non-kesehatan merupakan output yang secara prinsip lebih baik apabila dilaksanakan lebih cepat, karena dapat menjadi mitigasi kejadian stunting di Regional Sulawesi. Akan tetapi, sejalan dengan keterlambatan rekomendasi dan konfirmasi fasilitator pelatihan, potensi mitigasi lebih dini menjadi tertunda.

C. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan sebagai bidang dengan proporsi terbesar kedua pada belanja K/L mendukung DAK Fisik di Regional Sulawesi memiliki kinerja realisasi yang masih terlihat optimal dengan pola yang akseleratif di triwulan IV. Realisasi anggaran Bidang Pendidikan mencapai Rp479,46 miliar atau 99,47 persen dari total alokasi anggaran. Distribusi terbesar terdapat pada output rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah yang diampu oleh Kementerian PUPR sebesar Rp214,20 miliar atau 44,44 persen dari total alokasi anggaran untuk 142 unit sekolah. Capaian kinerja output dengan distribusi terbesar relatif optimal yang tercermin dari persentase realisasi yang sudah mencapai 99,96 persen. Akan tetapi, masih terdapat output dengan kinerja rendah pada tahun anggaran berjalan, tetapi akseleratif di triwulan IV diantaranya peningkatan kapasitas guru dan penjaminan mutu sekolah.

Capaian kinerja peningkatan kapasitas guru dan penjaminan mutu sekolah dengan proksi kinerja realisasi anggaran sampai akhir triwulan III baru sebesar 55,05 persen. Realisasi tersebut meningkat drastis di triwulan IV, sehingga dapat mencapai di atas 95 persen. Rendahnya capaian pada tahun anggaran berjalan disebabkan oleh petunjuk teknis yang diterbitkan oleh kantor pusat dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah terjadwal. Kegiatan peningkatan kapasitas guru baru dapat dilakukan menyesuaikan dengan kalender akademik dengan rencana pelaksanaan pada bulan November.

Tabel 3. 34. Pagu Realisasi K/L Bidang Pendidikan Regional Sulawesi (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	214,20	214,12	99,96%	142	Unit
2	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	99,65	99,00	99,35%	6.267	Orang
3	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	69,41	68,61	98,85%	22.790	Lembaga
4	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	54,37	53,98	99,30%	6.923	Orang
5	Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	22,63	22,16	97,91%	880	Orang
6	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	7,25	7,23	99,71%	18.837	Lembaga
7	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	4,30	4,25	98,73%	1.880	Orang
8	Penutur bahasa terbina	3,47	3,42	98,63%	1.435	Orang
9	Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi	2,11	2,07	97,86%	6	Lembaga
10	Lainnya	4,63	4,62	99,61%		
TOTAL		482,02	479,46	99,47%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Berdasarkan perspektif agregat, permasalahan pelaksanaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan di Regional Sulawesi dapat dilihat pada Grafik 3.7. Kendala terbesar, sebanyak 35 persen, berasal dari tantangan penganggaran. Keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan menyebabkan revisi anggaran pada periode semester II tahun 2023. Hal ini sejalan dengan karakteristik pelaksanaan kegiatan yang memiliki polarisasi stabilized dari sisi waktu, sehingga memunculkan tantangan pada saat eksekusi kegiatan yang berkontribusi sebesar 28 persen dari seluruh tantangan penyelesaian kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan yang memang sudah memiliki jadwal pelaksanaan

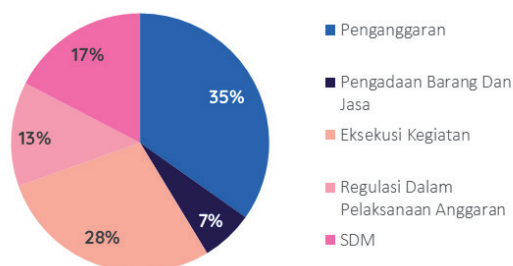
sesuai dengan kalender akademik, sehingga dipandang tidak tepat apabila dilakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan karena dampak yang dihasilkan tidak akan optimal.

Tantangan selanjutnya berasal dari tantangan SDM. Kuantitas SDM yang mengelola kegiatan di daerah masih belum sesuai. Jumlah sekolah yang banyak, tidak sebanding dengan jumlah SDM yang masih terbatas. Adapun untuk output penjaminan mutu, teridentifikasi tantangan berasal dari kualitas SDM yang masih belum memahami sistem pendukung pelaksanaan kegiatan

D. Bidang Pertanian

Kinerja Pelaksanaan anggaran Bidang Pertanian di Regional Sulawesi tergolong optimal. Sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir, realisasi anggaran mencapai Rp206,27 miliar atau 96,70 persen dari total alokasi anggaran. Realisasi tersebar pada 223 output dan menjadi bidang dengan sebaran output terbanyak dibandingkan bidang lain. Namun, tingginya realisasi di akhir tahun terjadi dengan pola tidak ideal karena serapan sampai dengan triwulan III masih rendah. Rendahnya realisasi anggaran pada periode

Grafik 3.7. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan Regional Sulawesi



Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 35. Pagu Realisasi K/L Bidang Pertanian Regional Sulawesi (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Pelayanan Kesehatan Hewan	49,17	47,31	96,22%	3.396.942	layanan
2	Area penyaluran benih padi	23,57	20,52	87,04%	90.367	Hektar
3	Ternak Ruminansia Potong	18,75	18,62	99,30%	1.980	Ekor
4	Area penyaluran benih jagung	12,60	12,36	98,12%	20.000	Hektar
5	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	10,92	10,92	99,93%	215	Hektar
6	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	9,92	9,92	100,00%	7.820	Orang
7	Ternak Ruminansia Potong	8,00	7,91	98,85%	500	Ekor
8	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	7,23	7,17	99,16%	7	Unit
9	Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura	6,77	6,74	99,52%	165	Unit
10	Lainnya	66,38	64,80	97,63%		
TOTAL		213,32	206,27	96,70%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

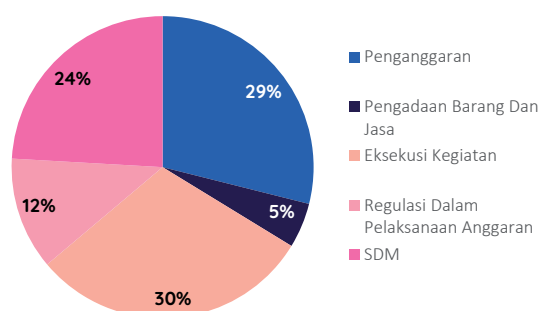
dimaksud terindikasi dari tiga output dengan alokasi anggaran terbesar yang masih di bawah capaian realisasi secara agregat di Bidang Pertanian, yaitu output pelayanan kesehatan hewan, area penyaluran benih padi, dan ternak ruminansia potong. Serapan ketiga output pada periode tersebut berkisar antara 14,14-36,47 persen. Proporsi terbesar ketiga output dengan kinerja realisasi anggaran yang masih rendah terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan (44,89 persen) sejalan dengan status sebagai salah satu wilayah penghasil padi terbesar di luar Pulau Jawa. Sementara itu, proporsi terbesar kedua terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 21,26 persen dan Sulawesi Tenggara sebesar 13,55 persen, sedangkan gabungan tiga provinsi lainnya memiliki proporsi sebesar 20,30 persen.

Perubahan iklim dan kemunculan badai El-Nino telah mendisrupsi rantai pasokan

pangan. Iklim kemarau dengan panas tinggi telah menyebabkan penangkaran benih padi mengalami gagal panen, sehingga pasokan benih berkurang. Tantangan ekologis dari badai El-Nino turut berdampak pada pelaksanaan output pelayanan kesehatan hewan. Terdapat isu berupa kesulitan untuk pengumpulan hewan ternak karena hewan ditenak secara liar. Selain itu, terdapat penolakan dari pemilik hewan ternak untuk melaksanakan vaksin untuk hewan ternak dan wabah penyakit mulut dan kuku hewan tahun ini lebih terkendali, sehingga alokasi anggaran dinilai terlalu besar.

Secara agregat, permasalahan pelaksanaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian di Regional Sulawesi dapat dilihat pada Grafik 2.8. Tantangan pada Bidang Pertanian relatif merata disebabkan oleh tantangan eksekusi kegiatan (30 persen), penganggaran (29 persen), dan SDM (24 persen), sedangkan tantangan regulasi dalam pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama sebesar 17 persen. Faktor utama dalam tantangan kesehatan adalah faktor cuaca/iklim, khususnya berkaitan dengan Badai El-Nino. Adapun dari sisi penganggaran dukungan alokasi anggaran untuk merespon Badai El-Nino masih belum memadai. Sementara itu, dari sisi SDM keterlambatan penetapan pejabat perbendaharaan menyebabkan keterlambatan dalam mengeksekusi kegiatan.

Grafik 3.8. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian Regional Sulawesi



Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 36. Pagu Realisasi K/L Bidang Transportasi Pedesaan Regional Sulawesi (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	2,22	2,07	93,51%	7,23	km
2	Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	2,98	2,96	99,59%	10,75	km
3	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	3,15	3,15	99,87%	3	km
4	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	0,50	0,50	99,93%	0,675	km
5	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	1,10	1,09	99,04%	0,63	km
6	Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	1,13	1,13	99,90%	28	m
7	Jembatan yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	1,30	1,30	99,51%	20	m
8	Jembatan yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	0,52	0,52	99,77%	6	m
9	Jembatan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	1,12	1,12	99,64%	21	m
TOTAL		14,02	13,84	98,69%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

E. Bidang Transportasi Pedesaan

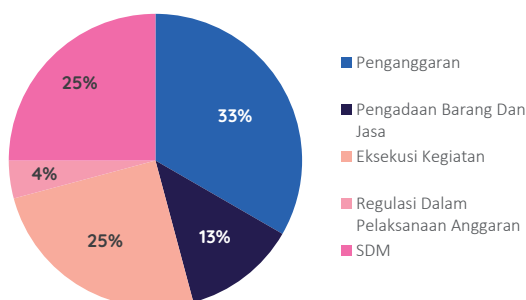
Bidang Transportasi Pedesaan merupakan bidang pada belanja K/L mendukung DAK Fisik dengan proporsi terendah dibandingkan dengan bidang lain. Kinerja realisasi anggaran bidang transportasi pedesaan tergolong optimal. Sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir, capaian realisasi anggaran mencapai Rp13,84 miliar atau 98,69 persen dari alokasi anggaran. Namun, tingginya realisasi anggaran di akhir tahun terjadi dengan pola yang tidak ideal. Pada periode triwulan III, masih terdapat output yang belum berprogres sama sekali seperti pengembangan

jalan di satuan permukiman dan pusat SKP dan pengembangan jembatan di kawasan transmigrasi. Adapun provinsi dengan distribusi terbesar belanja K/L pendukung Bidang Transportasi Pedesaan terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan share sebesar 36,04 persen, sedangkan lima provinsi lainnya relatif merata pada kisaran 15,00-20,60 persen.

Rendahnya kinerja realisasi anggaran Bidang Transportasi Pedesaan pada triwulan III disebabkan oleh blokir anggaran. Output pendukung mengalami blokir automatic adjustment dan baru mulai dilakukan buka blokir pada bulan Agustus 2023, sehingga sampai dengan akhir triwulan III kinerja terlihat masih rendah. Blokir automatic adjustment merata dan menjadi isu utama dalam pelaksanaan belanja K/L di Bidang Transportasi Pedesaan sebagaimana Grafik 2.9.

Sebanyak 33 persen berasal dari tantangan penganggaran yang terjadi karena terdapat blokir automatic adjustment. Sementara itu, tantangan lain berasal dari eksekusi kegiatan dan SDM. Eksekusi kegiatan terdampak oleh cuaca hujan yang mengakibatkan distribusi material terhambat dan pelaksanaan yang masih menunggu pedum dan juknis serta hasil AMDAL. Adapun dari sisi SDM, tantangan

Grafik 3.9. Tantangan Atas Belanja K/L Yang Mendukung DAK Fisik Bidang Transportasi Pedesaan Regional Sulawesi



Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

berasal dari keterlambatan pelantikan KPA, sehingga kegiatan tidak dapat segera dieksekusi.

III.8. REGIONAL KALIMANTAN

III.8.A. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Di Regional Kalimantan, anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik adalah sebesar Rp19.784,12 miliar atau 46,50 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Anggaran tersebut berada di 7 (tujuh) K/L dan dilaksanakan oleh 120 Satker dengan total jumlah output 546 RO. Kementerian PUPR merupakan K/L yang memiliki alokasi paling besar dalam mendukung belanja DAK Fisik yaitu sebesar Rp19.355,56 miliar atau mencapai 97,83 persen dari seluruh anggaran K/L pengampu. Alokasi anggaran tersebut Sebagian besar digunakan untuk mendukung DAK Fisik Bidang Jalan. Jika dilihat porsi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK

Fisik, terdapat K/L yang porsinya mencapai 100 persen yaitu Perpunas RI. Di sisi lain, anggaran pada Kemenkes hanya 4,32 persen dan Kemendikbud Ristek hanya 4,43 persen yang mendukung DAK Fisik.

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik 70,21 persen terkonsentrasi di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp13.890,35 miliar yang sebagian besar digunakan untuk dukungan infrastruktur IKN. Jika dilihat porsi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terhadap total pagu, Kalimantan Utara memiliki porsi paling tinggi (61,21 persen) sedangkan di Kalimantan Selatan porsinya hanya sebesar 32,22 persen.

Berdasarkan bidang, sebagian besar anggaran belanja K/L terkonsentrasi pada Bidang Jalan yakni sebesar Rp19.069,51 miliar atau 96,39 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Sedangkan sisanya, untuk mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan (2,29 persen), Pertanian (0,74

Tabel 3. 37. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Kalimantan (miliar rupiah)

KD BA	NAMA KL	PAGU TOTAL	PAGU MENDUKUNG DAK FISIK	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
018	KEMENTAN	488,62	146,26	29,93%	56	171
023	KEMENDIKBUDRISTEK	3.751,49	166,26	4,43%	14	33
024	KEMENKES	570,70	24,63	4,32%	6	74
033	KEMEN PUPR	37.431,70	19.355,56	51,71%	27	180
057	PERPUSNAS RI	1,64	1,64	100,00%	5	5
067	KEMENDES PDPT	36,05	15,91	44,14%	8	11
068	BKKBN	270,74	73,85	27,28%	4	72
TOTAL		42.550,94	19.784,12	46,50%	120	546

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 38. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Kalimantan (miliar rupiah)

KODE PROVINSI	NAMA PROVINSI	PAGU MENDUKUNG DAK FISIK	PAGU TOTAL	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
16	KALIMANTAN BARAT	2.521,14	4.978,80	50,64%	25	123
17	KALIMANTAN TENGAH	1.172,67	2.349,00	49,92%	22	110
18	KALIMANTAN SELATAN	984,94	3.057,12	32,22%	28	131
19	KALIMANTAN TIMUR	13.890,35	30.181,13	46,02%	27	116
34	KALIMANTAN UTARA	1.215,01	1.984,89	61,21%	18	66
TOTAL		19.784,12	42.550,94	46,50%	120	546

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 39. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Kalimantan (miliar rupiah)

BIDANG DAK FISIK	SUBBIDANG DAK FISIK	NAMA K/L	PAGU	REALISASI	% REAL	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
Jalan	Jalan	KEMEN PUPR	18.635,59	18.388,10	98,67%	22	167
	Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	KEMEN PUPR	433,92	425,85	98,14%	5	8
	TOTAL		19.069,51	18.813,96	98,66%	22	175
Kesehatan dan KB	Keluarga Berencana	BKKBN	73,85	73,20	99,12%	4	72
	Pengendalian Penyakit	KEMENKES	6,70	5,15	76,77%	5	13
	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	KEMENKES	7,07	5,93	83,85%	5	29
	Penguatan Sistem Kesehatan	KEMENKES	10,86	8,68	79,95%	6	32
	TOTAL		98,48	92,95	94,39%	10	146
Pendidikan	PAUD	KEMENDIKBUDRISTEK	5,06	3,91	77,41%	5	5
	Perpustakaan	PERPUSNAS RI	1,64	1,59	96,54%	5	5
	SD dan SMP	KEMEN PUPR	286,05	285,80	99,91%	5	5
	SD, SMP, SMA, SMK	KEMENDIKBUDRISTEK	161,20	142,35	88,30%	14	28
	TOTAL		453,95	433,65	95,53%	24	43
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	KEMENTAN	146,26	135,78	92,84%	56	171
	TOTAL		146,26	135,78	92,84%	56	171
Transportasi Perdesaan	Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	KEMENDES PDTT	15,91	15,89	99,87%	8	11
	TOTAL		15,91	15,89	99,87%	8	11
	GRAND TOTAL		19.784,12	19.492,23	98,52%	120	546

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

persen), Kesehatan dan KB (0,50 persen), dan Transportasi Perdesaan (0,08 persen). Pada Bidang Jalan, sebagian besar dukungan belanja K/L untuk mendanai Subbidang Jalan dengan porsi mencapai 97,72 persen. pada Bidang Kesehatan dan KB, dukungan belanja K/L lebih banyak digunakan untuk Subbidang Keluarga Berencana dengan porsi mencapai sebesar 74,99 persen. Sedangkan pada Bidang Pendidikan, belanja K/L lebih difokuskan pada dukungan pada Subbidang SD dan SMP dengan porsi 63,01 persen. Sedangkan pada Bidang Pertanian dan Bidang Transportasi Perdesaan masing-masing difokuskan hanya pada satu Subbidang.

Kinerja penyerapan anggaran pada seluruh bidang di Regional Kalimantan secara tercapai 98,52 persen. Tingginya serapan disumbang hampir secara merata oleh seluruh bidang, hanya bidang pendidikan dan pertanian yang memiliki serapan di bawah 95 persen.

III.8.B. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Per Bidang

A. Bidang Jalan

Bidang Jalan terdiri atas dua Subbidang yakni Subbidang Jalan dan Subbidang Jalan – Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas. Subbidang Jalan, belanja K/L difokuskan pada dukungan infrastruktur IKN di Kalimantan Timur serta pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan di seluruh Wilayah Kalimantan. Sedangkan Subbidang Jalan – Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas difokuskan pada pembangunan jalan dan jembatan kawasan prioritas di Kabupaten Penajam Paser Utara dan pembangunan jalan kawasan prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Belanja K/L yang mendukung Bidang Jalan memiliki alokasi belanja paling besar dengan kinerja realisasi anggaran pada bidang relatif optimal mencapai 98,66 persen atau sebesar Rp18.813,96 miliar dari total alokasi

Tabel 3. 40. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Regional Kalimantan (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Dukungan Infrastruktur IKN	10.852,25	10.840,22	99,89%	64,93	km
		461,30	461,30	100,00%	425,85	m
2	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	1.613,56	1.609,32	99,74%	420,514	km
3	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	1.512,01	1.504,31	99,49%	302,23	km
4	Jalan Strategis (ProPN)	2.143,56	2.005,28	91,81%	261,928	km
		2,22	2,21	99,60%	849,5	m
5	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	303,35	295,82	97,52%	3853,89	km
5	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	246,11	244,98	99,54%	3550,81	km
6	Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)	284,82	224,15	78,70%	1119,55	m
7	Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)	213,46	210,81	98,76%	1686,85	m
		188,28	182,86	97,12%	48,25	km
8	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (Padat Kar	212,38	212,20	99,92%	35,7	km
9	Pembangunan Jembatan	196,68	182,00	92,54%	360,5401	m
10	Lainnya	839,51	838,48	99,88%		
TOTAL		19.069,51	18.813,96	98,66%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Rp19.069,51 miliar. Berdasarkan 9 RO pagu terbesar, dukungan infrastruktur jalan IKN dengan target 425,85 meter memiliki realisasi anggaran paling tinggi mencapai 100 persen. Sedangkan RO pembangunan jembatan strategis adalah RO dengan tingkat penyerapan anggaran terendah dan tidak optimal karena hanya tercapai 78,70 persen.

RO Dukungan Infrastruktur IKN yang terpusat di Kalimantan Timur memiliki alokasi anggaran paling besar mencapai Rp11.313,56 miliar atau 59,33 persen dari total belanja K/L yang mendukung Bidang Jalan. Kinerja realisasi anggaran pada RO tersebut terserap 99,39 persen atau Rp11.301,53 miliar. Namun, sampai triwulan III RO tersebut baru terserap 33,40 persen disebabkan beberapa hal yaitu: 1) beberapa paket pekerjaan memerlukan revisi Eselon I yang memerlukan waktu lama, sedangkan kondisi dilapangan mengharuskan agar kegiatan/proyek segera dilaksanakan; 2) terjadi perubahan desain atau kebijakan yang menyebabkan eksekusi kegiatan tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun; 3) sumber dana SBSN kurang fleksibel dalam pelaksanaannya; 4) proses lelang memerlukan waktu relatif lama, belum lagi jika ada yang melakukan sanggah dan terjadi gagal lelang karena tidak ada penawaran; dan 5) kelangkaan ketersediaan bahan baku sehingga memerlukan pengiriman dari luar pulau serta

lokasi yang sulit dijangkau.

Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Jalan pada pertengahan tahun anggaran di Regional Kalimantan secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) blokir anggaran yang baru dibuka pada pertengahan tahun serta keterlambatan juknis dari pusat, sehingga kontrak terlambat didaftarkan; 2) beberapa paket pekerjaan memerlukan revisi Eselon I yang memerlukan waktu lama; 3) terjadi perubahan desain atau kebijakan yang menyebabkan eksekusi kegiatan tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun; 4) sumber dana SBSN kurang fleksibel dalam pelaksanaannya, revisi untuk PN tidak bisa dilakukan di Kanwil DJPb dan sulit untuk mengikuti rencana kegiatan yg telah disusun karena kegiatan yang sangat fluid; dan 5) kurang akuratnya perencanaan serapan dana oleh pejabat perbendaharaan menyebabkan deviasi pada hal III DIPA.
2. Pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari: 1) proses lelang memerlukan waktu relatif lama, belum lagi jika ada yang melakukan sanggah dan terjadi gagal lelang karena tidak ada penawaran; 4) banyak

- proyek yang baru selesai proses tender dan kontraknya pada pertengahan tahun.
3. Eksekusi Kegiatan yang terdiri atas: 1) pelaksanaan kegiatan terkendala masalah pembebasan lahan; 2) kurang optimalnya pekerjaan fisik disebabkan keterlambatan mobilisasi peralatan dan material ke lokasi, peralatan yang mengalami kerusakan, serta curah hujan yang tinggi di akhir tahun anggaran; 3) kelangkaan ketersediaan bahan baku sehingga memerlukan pengiriman dari luar pulau serta lokasi yang sulit dijangkau; 4) e-katalog/Digipay dan Marketplace kurang terjangkau di daerah pelosok; 5) layanan perbankan terbatas; 6) satker kesulitan mendapatkan penyedia lokal yang mampu memenuhi spek yang diinginkan untuk barang tertentu; 7) fluktuasi harga barang yang dinamis; 8) pekerjaan lapangan sangat dipengaruhi kondisi cuaca, sering terjadi banjir; dan 9) keterlambatan/kekurangan syarat pencairan oleh penyedia barang.
 4. Tantangan SDM yaitu: 1) adanya mutasi

pegawai tanpa ada penerus; dan 2) kurangnya SDM/rangkap jabatan sehingga pelaksanaan anggaran kurang maksimal.

B. Bidang Kesehatan dan KB

Alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB per provinsi di Regional Kalimantan secara umum cukup merata di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yakni berkisar pada rentang 19,66-26,12 persen. Namun di Kalimantan Utara, dukungan belanja K/L masih sangat rendah hanya di kisaran 5,01 persen. Sedangkan jika dilihat per Subbidang, alokasi anggaran terbesar pada Subbidang Keluarga Berencana yaitu sebesar Rp73,85 miliar atau 74,99 persen dari total alokasi belanja K/L di Bidang Kesehatan dan KB. Kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB di Regional Kalimantan cukup tinggi dibandingkan bidang lainnya yakni mencapai 99,12 persen.

Secara parsial, kinerja belanja pada beberapa RO di bidang ini juga menunjukkan kinerja

Tabel 3. 41. Pagu Realisasi K/L Bidang Kesehatan dan KB Regional Kalimantan (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	16,57	16,39	98,92%	36.214	Orang
2	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	14,52	14,50	99,82%	1.570	Lembaga
3	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	8,20	8,18	99,81%	9	layanan
4	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	7,58	7,54	99,36%	60	kegiatan
5	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	4,87	4,86	99,84%	2.078	Kelompok Masyarakat
6	Dukungan peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dekonsentrasi) (LR)	4,40	3,46	78,48%	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)
7	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	3,85	3,11	80,73%	735	Orang
8	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	2,83	2,02	71,39%	744	Orang
9	Kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam pendukung percepatan penurunan stunting	2,66	2,64	99,39%	2.162	Kelompok Masyarakat
10	Lainnya	33,00	30,27	91,71%		
TOTAL		98,48	92,95	94,39%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

yang lebih baik. Kinerja terbaik ditunjukkan oleh RO Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Pelatihan dan *Refreshing* dalam rangka percepatan penurunan *stunting* yang memiliki tingkat penyerapan anggaran masing-masing sebesar 99,82 persen dan 98,92 persen.

Salah satu RO yang kinerjanya masih rendah adalah RO pelatihan pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang terserap 71,39 persen dan dukungan peningkatan mutu, akreditasi, keselamatan pasien di faskes yang terserap 78,48 persen. Ketidaktercapaian anggaran tersebut disebabkan beberapa hal yaitu: 1) pergantian pejabat perbendaharaan yang cukup memakan waktu, pergantian pejabat perbendaharaan baru dapat dilakukan ketika seluruh transaksi yang melibatkan pejabat lama telah diselesaikan; 2) terdapat 4 kontrak yang baru ditandatangani di Triwulan IV; dan 3) keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di bagian teknis

Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Kesehatan dan KB di Regional Kalimantan secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) alokasi anggaran bersifat top down tanpa memperhatikan kondisi di daerah sehingga sering tidak sinkron antara rencana kegiatan dengan eksekusi belanja karena adanya arahan atau kebijakan tertentu; 2) dan beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan tidak didukung oleh anggaran, sehingga harus mengajukan revisi eselon I yang memerlukan waktu lama; dan 3) pelaksanaan kegiatan karena anggaran berasal dari DIPA Dekon/TP yang mana pelaksanaannya harus menunggu Juknis dari Kementerian Pusat; 4) blokir anggaran pada Satker Dekon/TP.
2. Pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari: 1) beberapa barang tidak tersedia di e-katalog; dan 2) pengadaan barang TKDN/P3DN yang memakan waktu karena pemesanan indent serta lokasi toko di luar

pulau dan kesulitan mendapatkan info nilai TKDN, terkait keharusan pembelian barang dengan nilai TKDN diatas 40 persen.

3. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) Penggunaan aplikasi SAKTI untuk Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagian besar terpusat pada Bendahara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, karena mayoritas menggunakan UP dan TUP, penentuan unit teknis di awal tahun tidak dilakukan, sehingga transaksi dari seluruh BPP terpusat di satu kode unit teknis hal ini cukup menyulitkan proses monitoring; 2) terdapat sisa anggaran, namun tidak dapat dilakukan optimalisasi; 3) adanya kenaikan BBM yang mempengaruhi kenaikan harga; 4) data penerima bantuan belum sama antar instansi; 5) keterlambatan/kekurangan syarat pencairan oleh penyedia Barang; dan 6) sebagian besar RO Bidang Kesehatan untuk pelaksanaan pelatihan dan perjalanan dinas yang kegiatannya dilaksanakan di Triwulan IV.
4. Tantangan regulasi yaitu ditemukan terkadang tidak sinkron regulasi antara K/L dengan Pemerintah Daerah.
5. Tantangan SDM yaitu: 1) keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di bagian teknis; dan 2) perangkapan jabatan pengelola keuangan sangat tidak efektif dalam pelaksanaan proses bisnis keuangan.

C. Bidang Pendidikan

Kinerja Pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan di Regional Kalimantan relatif optimal dengan serapan mencapai mencapai 95,53 persen. Secara parsial, kinerja belanja pada beberapa RO di bidang ini juga menunjukkan kinerja yang sudah baik meskipun belum mencapai target realisasi yang ditetapkan. Beberapa RO memiliki capaian kinerja serapan yang sudah optimal, Penutur bahasa terbina dengan serapan mencapai 100,70 persen, penutur bahasa teruji dengan target 159 orang

Tabel 3. 42. Pagu Realisasi K/L Bidang Pendidikan Regional Kalimantan (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	36,20	32,00	88,39%	4.459	Orang
2	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	3,38	2,80	82,79%	1.320	Orang
3	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	72,23	67,07	92,85%	5.933	Orang
4	Penutur bahasa terbina	2,25	2,27	100,70%	1.148	Orang
5	Penutur bahasa teruji	0,10	0,08	85,89%	52	Orang
6	Penutur bahasa teruji	0,29	0,29	99,94%	159	Orang
7	Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi	1,64	1,59	96,54%	5	Lembaga
8	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	286,05	285,80	99,91%	125	Unit
9	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	46,74	37,84	80,95%	17.464	Lembaga
10	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	5,06	3,91	77,41%	13.654	Lembaga
TOTAL		453,95	433,65	95,53%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

terserap 99,94 persen, serta pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang terserap 96,54 persen.

Salah satu RO yang kinerjanya masih rendah adalah RO Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi yang hanya terserap 82,79 persen. Ketidakterapan anggaran tersebut disebabkan beberapa hal yaitu: 1) blokir anggaran baru dibuka pada pertengahan tahun bahkan ada yang baru dibuka pada triwulan IV; 2) keterlambatan juknis dari kantor pusat; 3) Satker masih belum memiliki kesadaran dalam melakukan pemutakhiran halaman III DIPA; 4) pengadaan barang elektronik seperti laptop, printer, personal computer, switch, access point serta server yang dilakukan dengan impor karena spesifikasi yang dibutuhkan tidak ada di Indonesia; 5) belum ada database penerima bantuan yang benar-benar valid; 6) kegiatan baru dilaksanakan di triwulan IV karena menyesuaikan kebutuhan, yang sebagian besar berupa proyek akhir tahun; dan 7) keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di bagian teknis karena mayoritas SDM di bagian teknis merupakan pegawai honor, minim PNS sesuai kompetensinya.

Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Pendidikan di Regional Kalimantan secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) blokir anggaran baru dibuka pada pertengahan tahun; 2) adanya perubahan jadwal kegiatan dan penambahan kegiatan di pertengahan tahun yang berakibat pada pergeseran rencana penarikan dana dan revisi anggaran; 3) revisi anggaran terkait revisi Eselon I yang membutuhkan waktu relatif lama.
2. Pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari: 1) peralatan dan mesin yang dibutuhkan mayoritas berasal dari luar negeri, namun adanya kebijakan terkait TKDN yang membatasi penggunaan barang impor, menyebabkan Satker belum bisa melaksanakan pengadaan peralatan tersebut.
3. Eksekusi Kegiatan yaitu beberapa kegiatan dilakukan di triwulan IV.
4. Tantangan regulasi yaitu regulasi dalam pelaksanaan anggaran terkait arahan pelaksanaan kegiatan menunggu arahan Eselon I dan pelaksanaan kegiatan baru

dimulai pada Triwulan III.

5. Tantangan SDM yaitu keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di bagian teknis.

D. Bidang Pertanian

Kinerja Pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian di Regional Kalimantan menjadi yang terendah dibandingkan bidang lainnya dengan serapan sebesar 92,84 persen. Secara parsial, kinerja belanja pada beberapa RO di bidang ini sudah menunjukkan kinerja yang baik, tetapi di sisi lain terdapat beberapa RO yang kinerjanya masih rendah. Beberapa RO yang memiliki yang rendah adalah area penyaluran benih padi dengan realisasi 88,68 persen dan area pengendalian OPT tanaman pangan dengan kinerja serapan sebesar 73,62 persen.

Pada RO dengan kinerja realisasi yang rendah, ketidakserapan anggaran tersebut disebabkan beberapa hal yaitu: 1) masih dalam proses revisi di DJA yang mana sesuai arahan K/L diminta untuk pengalihan pembebanan dari 526 ke persediaan; 2) blokir anggaran yang dibuka setelah Semester I; 3) proses lelang baru dimulai triwulan III sehingga pembangunan fisik diperkirakan mundur; 4) ketidaksesuaian data target vaksinasi yang diberikan dengan kondisi riil di lapangan dan ; dan 5) data kelompok penerima bantuan baru diterima di bulan September; 6) permasalahan kurangnya jumlah dan kompetensi SDM sehingga output diproyeksikan hanya akan tercapai 45 persen hingga akhir tahun karena

SDM mengurus kegiatan lapangan lain yang menumpuk.

Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Pertanian di Regional Kalimantan secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) adanya blokir automatic adjustment pada DIPA yang baru dibuka bulan Februari; 2) deviasi halaman III cukup tinggi karena jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan di hal III DIPA; dan 3) pada RO benih jagung, kegiatan belum dapat dilaksanakan karena adanya revisi lokasi penyaluran yang difokuskan pada kabupaten sentra saja tidak disebar ke 13 Kab/kota.
2. Pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari: 1) lelang baru dilakukan di Triwulan II atau III; 2) beberapa peralatan pertanian tidak tersedia dan harus didatangkan dari luar pulau, beberapa peralatan yang memerlukan import dan tidak memenuhi unsur TKDN harus ijin level kementerian.
3. Eksekusi Kegiatan yang terdiri atas: 1) terbatasnya akses ke lokasi di daerah menyebabkan penyaluran benih terhambat, sedangkan benih banyak diperoleh dari luar daerah maupun dari jawa karena pengadaan bibit di daerah terdekat; 2) harga yang ditetapkan oleh penyedia melebihi standar biaya yang diberikan, karena perawatan benih di

Tabel 3. 43. Pagu Realisasi K/L Bidang Pertanian Regional Kalimantan (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Area penyaluran benih padi	20,62	18,28	88,68%	77.000	Hektar
2	Ternak Ruminansia Potong	17,30	17,30	99,99%	1.670	Ekor
3	Pelayanan Kesehatan Hewan	13,37	12,72	95,13%	880.224	layanan
4	Pakan Olahan dan bahan pakan	11,72	11,71	99,99%	1	Unit
5	Prasarana Balai Perbibitan Ternak	9,22	9,20	99,70%	14	Unit
6	Ternak Unggas dan Aneka Ternak	9,18	9,01	98,12%	78.000	Ekor
7	Ternak Ruminansia Potong	7,25	7,25	99,89%	915	Ekor
8	Area penyaluran benih jagung	6,50	6,49	99,92%	10.313	Hektar
9	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	5,94	4,37	73,62%	110	Hektar
10	Lainnya	45,15	39,45	87,36%		
TOTAL		146,26	135,78	92,84%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

wilayah Kalimantan biaya operasionalnya tergolong lebih mahal dibandingkan di pulau Jawa; 3) lambatnya proses penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sehingga pekerjaan yang sudah selesai belum dapat dilakukan pembayaran;

4. Tantangan regulasi yaitu terdapat refocusing oleh Kementerian Pertanian, kegiatan fisik dihentikan oleh Kantor Pusat dan anggarannya akan ditarik namun sudah dilakukan pembayaran kegiatan pendukung.
5. Tantangan SDM yaitu adanya SDM yang terbatas dengan beban kerja cukup berat dan mutasi pegawai tanpa ada pengganti/pegawai baru.

E. Bidang Transportasi Perdesaaan

Kinerja Pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaaan di Regional Kalimantan mencapai 99,87. Dari tujuh RO pada bidang ini, seluruhnya tergolong memiliki kinerja anggaran yang sudah tinggi. Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa isu yaitu: 1) beberapa paket pekerjaan memerlukan revisi Eselon I yang memerlukan waktu lama; 2) terjadi perubahan desain atau kebijakan yang menyebabkan eksekusi kegiatan sehingga tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun; 3)

proses lelang memerlukan waktu relatif lama; 3) penyedia barang dan jasa di kabupaten terbatas sehingga kesulitan mencari rekanan di area lokal; 4) kelangkaan ketersediaan bahan baku sehingga memerlukan pengiriman dari luar pulau; 5) lokasi terpencil dan transportasi sulit; dan 6) kurangnya SDM yang menguasai keuangan.

Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Transportasi Perdesaaan di Regional Kalimantan secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) revisi DIPA di Eselon I yang memerlukan waktu yang lama; dan 2) jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan di hal III DIPA.
2. Pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari: 1) proses lelang yang memerlukan waktu relatif lama; 2) penyedia barang dan jasa di kabupaten terbatas sehingga kesulitan mencari rekanan lokal.
3. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) pekerjaan baru selesai di akhir tahun anggaran dan masih berupa pembayaran uang muka kontrak; 2) adanya kelangkaan ketersediaan bahan baku sehingga memerlukan pengiriman dari luar pulau; 3) lokasi yang sulit dijangkau dan kesulitan mengakses internet secara cepat; dan

Tabel 3. 44. Pagu Realisasi K/L Bidang Transportasi Pedesaan Regional Kalimantan (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	5,28	5,26	99,73%	10,05	km
2	Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	0,53	0,53	99,63%	1,55	km
3	Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	3,31	3,31	99,99%	3,00	km
4	Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan	1,91	1,91	99,91%	0,88	km
5	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	2,13	2,13	99,93%	1,50	km
6	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	1,12	1,11	99,95%	1,50	km
7	Jembatan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan	1,63	1,63	99,99%	30,00	m
TOTAL		15,91	15,89	99,87%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

- 4) keterlambatan/kekurangan syarat pencairan oleh penyedia barang.
4. Tantangan SDM yaitu keterbatasan kompetensi SDM di bidang keuangan.

III.9. REGIONAL BALI NUSRA

III.9.A. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Jumlah alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung sebesar Rp3.412,56 miliar atau 20,46 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Kementerian PUPR memiliki porsi terbesar diantara K/L pengampu

bahwa distribusi alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terbesar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp1.976,19 miliar atau 57,91 persen. Adapun alokasi terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar Rp557,76 miliar atau 16,34 persen. Selain distribusi yang rendah, proporsi anggaran belanja K/L mendukung DAK Fisik dari Provinsi Bali juga paling rendah sebesar 10,41 persen.

Berdasarkan bidang, proporsi alokasi anggaran belanja K/L terkonsentrasi pada Bidang Pendidikan yakni sebesar Rp224,83 miliar atau 61,91 persen dari total anggaran belanja K/L

Tabel 3. 45. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Bali Nusra (miliar rupiah)

KD BA	NAMA KL	PAGU TOTAL	PAGU Mendukung DAK Fisik	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
018	KEMENTAN	442,74	159,20	35,96%	34	126
023	KEMENDIKBUDRISTEK	3.163,00	149,62	4,73%	9	21
024	KEMENKES	1.953,63	16,67	0,85%	4	42
033	KEMEN PUPR	10.792,43	2.991,44	27,72%	15	132
057	PERPUSNAS RI	0,77	0,77	100,00%	2	2
067	KEMENDES PDTT	19,16	2,51	13,09%	4	4
068	BKKBN	307,13	92,37	30,07%	3	56
TOTAL		16.678,86	3.412,56	20,46%	71	383

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 46. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Bali Nusra (miliar rupiah)

KODE PROVINSI	NAMA PROVINSI	PAGU Mendukung DAK Fisik	PAGU TOTAL	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
20	BALI	557,76	5.357,00	10,41%	21	114
21	NUSA TENGGARA BARAT	878,61	5.002,40	17,56%	21	114
22	NUSA TENGGARA TIMUR	1.976,19	6.319,46	31,27%	29	155
TOTAL		3.412,56	16.678,86	20,46%	71	383

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

belanja yang mendukung DAK Fisik dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp2.991,44 miliar atau 87,66 persen dari total belanja K/L yang mendukung DAK Fisik. Sebagian besar digunakan untuk mendukung DAK Fisik Bidang Jalan. Adapun porsi terendah terdapat pada Perpustakaan RI sebesar Rp0,77 miliar atau 0,02 persen.

Belanja K/L pendukung DAK Fisik di Regional Bali Nusra relatif lebih kecil dibandingkan regional lainnya karena hanya terdiri dari tiga provinsi. Berdasarkan provinsi, dapat dilihat

pengampu DAK Fisik. Sementara itu, distribusi pada Bidang Kesehatan dan KB sebesar 61,71 persen, Pendidikan sebesar 25,57 persen, Transportasi Perdesaan sebesar 57,5 persen, Pertanian sebesar 44,8 persen, dan Jalan sebesar 39,8 persen. Sampai dengan triwulan III, realisasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik mencapai 40,59 persen.

III.9.B. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Per Bidang

Tabel 3. 47. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Bali Nusra (miliar rupiah)

BIDANG DAK FISIK	SUBBIDANG DAK FISIK	NAMA K/L	PAGU	REALISASI	% REAL	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
Jalan	Jalan	KEMEN PUPR	2.844,67	2.737,01	96,22%	13	127
	Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	KEMEN PUPR	86,74	75,61	87,17%	1	3
	TOTAL		2.931,41	2.812,62	95,95%	13	130
Kesehatan dan KB	Keluarga Berencana	BKKBN	92,37	86,68	93,84%	3	56
	Pengendalian Penyakit	KEMENKES	4,98	4,62	92,88%	3	6
	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	KEMENKES	5,44	4,95	90,93%	3	18
	Penguatan Sistem Kesehatan	KEMENKES	6,25	5,70	91,12%	4	18
	TOTAL		109,04	101,95	93,50%	7	98
Pendidikan	PAUD	KEMENDIKBUDRISTEK	3,88	3,86	99,33%	3	3
	Perpustakaan	PERPUSNAS RI	0,77	0,75	97,39%	2	2
	SD dan SMP	KEMEN PUPR	60,03	59,95	99,88%	2	2
	SD, SMP, SMA, SMK	KEMENDIKBUDRISTEK	145,73	145,03	99,52%	9	18
	TOTAL		210,41	209,59	99,61%	13	25
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	KEMENTAN	159,20	116,38	73,11%	34	126
	TOTAL		159,20	116,38	73,11%	34	126
Transportasi Perdesaan	Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	KEMENDES PDTT	2,51	2,48	99,00%	4	4
	TOTAL		2,51	2,48	99,00%	4	4
	GRAND TOTAL		3.412,56	3.243,02	95,03%	71	383

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

A. Bidang Jalan

Bidang Jalan memiliki alokasi belanja terbesar dan memiliki kinerja realisasi anggaran relatif optimal dengan kinerja serapan sebesar 95,95 persen atau sebesar Rp2.812,62 miliar dari pagu Rp 2.931,41. Alokasi pagu tertinggi terdapat pada subbidang Jalan sebesar Rp2.844,67 miliar dengan capaian kinerja realisasi sebesar Rp2.737,01 atau 96,22 persen.

Pada sembilan besar RO dengan pagu tertinggi di bidang jalan, terdapat empat RO dengan persentase serapan lebih rendah daripada 90 persen. RO tersebut diantaranya jalan strategis (85,90 persen), pembangunan jalan akses simpul transportasi (89,38 persen), dukungan KSPN super prioritas (87,34 persen dan 76,04 persen), dan dukungan penanganan jembatan daerah (77,43 persen).

Instruksi Presiden (Inpres) terkait jalan daerah baru terbit pada tahun anggaran berjalan. Akibatnya untuk mengakomodasi instruksi dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian pada

dokumen penganggaran masing-masing Satker. Revisi DIPA baru terbit pada awal semester II tahun 2023. Satker tidak memiliki kesempatan untuk mengakselerasi pelaksanaan pekerjaan karena baru melaksanakan lelang pada kisaran bulan Mei dan penandatanganan kontrak pada kisaran bulan Juli-Agustus. Pelaksanaan pekerjaan memerlukan waktu kurang lebih lima bulan, sehingga pekerjaan baru dapat selesai pada periode Desember.

Selanjutnya, kontributor tantangan terbesar dalam penyelesaian kegiatan berasal dari tantangan eksekusi kegiatan. Beberapa isu yang muncul pada saat eksekusi kegiatan, diantaranya :

- Faktor cuaca hujan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, pada saat kondisi hujan tidak dapat dilaksanakan pekerjaan aspal.
- Ketersediaan lahan menjadi salah satu kendala, hal ini disebabkan belum tercapainya kesepakatan harga appraisal dengan pemilik lahan, sehingga belum

Tabel 3. 48. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Regional Bali Nusra (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	1.125,90	1.093,80	97,15%	277,83	km
2	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	333,08	333,06	99,99%	103,45	km
3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	219,71	213,86	97,34%	45,00	km
4	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	205,71	204,64	99,48%	2.403,18	km
5	Jalan Strategis (ProPN)	230,16	197,72	85,90%	124,43	km
		13,66	13,02	95,30%	262,00	m
6	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	162,87	145,57	89,38%	24,91	km
7	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (Padat Karya)	82,63	82,63	100,00%	39,19	km
8	Dukungan KSPN Super Prioritas	85,48	74,66	87,34%	16,98	km
		1,26	0,96	76,04%	112,00	m
9	Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	78,98	61,15	77,43%	514,71	m
10	Lainnya	391,96	391,57	99,90%		
TOTAL		2.931,41	2.812,62	95,95%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

bisa dilakukan pembebasan saat sebelum musim penghujan.

- c. Kenaikan BBM dan aspal menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Dalam pengelolaan anggaran, jumlah personil pengawas lapangan kurang dari jumlah ideal dibanding dengan jumlah paket kegiatan.

B. Bidang Kesehatan dan KB

Realisasi anggaran pada Bidang Kesehatan dan KB mencapai Rp101,95 miliar atau 93,50 persen dari total alokasi anggaran. Porsi terbesar dikontribusi oleh Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) dengan alokasi sebesar Rp34,84 miliar atau 31,95 persen dari total alokasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan

Tabel 3. 49. Pagu Realisasi K/L Bidang Kesehatan dan KB Regional Bali Nusra (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	34,84	34,45	98,88%	1.496	Lembaga
2	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	15,65	15,24	97,37%	35.226	Orang
3	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	7,60	6,87	90,33%	3	layanan
4	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	5,70	5,15	90,25%	44	kegiatan
5	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	4,35	4,34	99,79%	6	layanan
6	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	3,73	3,33	89,29%	1.879	Kelompok Masyarakat
7	Kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam pendukung percepatan penurunan stunting	3,13	2,62	83,69%	2.802	Kelompok Masyarakat
8	Dukungan peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dekonsentrasi) (LR)	2,94	2,73	92,85%	25	Daerah (Prov/Kab/Kota)
9	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	2,76	2,66	96,36%	278	Orang
10	Lainnya	28,34	24,57	86,70%		
TOTAL		109,04	101,95	93,50%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

dan KB di Regional Bali Nusra. Realisasi anggaran atas output dengan kontribusi terbesar tergolong optimal mencapai Rp34,45 miliar atau 98,88 persen. Sebaliknya, masih terdapat output dengan kinerja belum optimal seperti kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam pendukung percepatan penurunan stunting dan PIK remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu.

Upaya penurunan stunting di Regional Bali Nusra menjadi salah satu isu yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada level nasional dengan pelaksanaannya masih belum optimal. Kegiatan kampanye penurunan stunting terealisasi sebesar 90,33 persen dan 99,79 persen. Akan tetapi, Kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam pendukung percepatan penurunan stunting terlihat masih belum optimal karena baru terealisasi sebesar 83,69 persen.

Pada pelaksanaan kampanye penurunan stunting, pembuatan KAK, HPS dan spesifikasi kegiatan memang ditetapkan dan tertera dalam juknis di awal tahun anggaran. Namun kegiatan kampanye percepatan penurunan stunting tingkat provinsi dan kabupaten/kota

ini merupakan kegiatan yang bekerjasama dengan Anggota Komisi IX DPR RI, sehingga dalam perjalanannya perlu penyesuaian seperti jumlah peserta, bentuk sosialisasi, media yang digunakan. Sementara itu, pada output Pembinaan Keluarga pada 1.000 HPK tantangan lebih bersifat teknis berasal dari pengadaan barang dan jasa. Diharapkan terdapat perbaikan proses bisnis untuk pengadaan goodie bag dan jasa event organizer melalui pembuatan etalase katalog/ e-purchasing.

Secara agregat, permasalahan pelaksanaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB di Regional Bali Nusra tantangan SDM. Dinamika mutasi pegawai masih menjadi isu utama dari tantangan SDM, terutama mutasi yang dialami oleh PPK Satker yang menyebabkan satker memerlukan waktu untuk pengganti PPK dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu, kuantitas SDM dinilai kurang terutama apabila kegiatan dilaksanakan secara bersamaan.

C. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan sebagai bidang dengan proporsi terbesar kedua pada belanja K/L mendukung DAK Fisik di Regional Bali Nusra

Tabel 3. 50. Pagu Realisasi K/L Bidang Pendidikan Regional Bali Nusra (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	75,22	75,06	99,78%	5.059	Orang
2	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	60,03	59,95	99,88%	55	Unit
3	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	33,49	33,15	99,00%	15.373	Lembaga
4	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	32,58	32,48	99,69%	4.570	Orang
5	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	3,88	3,86	99,33%	12.980	Lembaga
6	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	2,49	2,41	96,76%	940	Orang
7	Penutur bahasa terbina	1,64	1,62	98,88%	861	Orang
8	Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui dekonstruksi	0,77	0,75	97,39%	2	Lembaga
9	Penutur bahasa teruji	0,24	0,23	98,65%	152	Orang
10	Penutur bahasa teruji	0,07	0,07	98,56%	25	Orang
TOTAL		210,41	209,59	99,61%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

memiliki kinerja realisasi yang tergolong optimal. Realisasi anggaran Bidang Pendidikan mencapai Rp209,59 miliar atau 99,61 persen dari total alokasi anggaran. Distribusi terbesar terdapat pada output guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru yang diampu oleh Kemendikbud Ristek sebesar Rp75,22 miliar atau 35,75 persen dari total alokasi anggaran untuk 5.059 guru. Sepuluh RO belanja K/L yang mendukung pendidikan seluruhnya sudah terserap secara optimal dengan tingkat serapan di atas 95 persen.

Berdasarkan perspektif agregat, permasalahan pelaksanaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan di Regional Bali Nusra berasal dari tantangan blokir anggaran *automatic adjustment* dan *refocusing* menjadi faktor utama tantangan dari aspek penganggaran. Isu pada aspek regulasi pelaksanaan anggaran dan eksekusi kegiatan berupa keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan terdapat perubahan petunjuk teknis yang telah diterbitkan.

D. Bidang Pertanian

Kinerja Pelaksanaan anggaran Bidang Pertanian di Regional Bali Nusra masih belum optimal. Sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir, dari pagu Rp159,20 miliar realisasi anggaran baru mencapai Rp116,38 miliar atau 73,11 persen dari total alokasi anggaran. Rendahnya realisasi anggaran terindikasi

dari empat output diantara sembilan alokasi anggaran terbesar, yaitu output (1) Pelayanan Kesehatan Hewan (41,28 persen), (2) Ternak Unggas dan Aneka Ternak (88,75 persen), (3) Area penyaluran benih padi (74,80 persen), dan (4) Ternak ruminansia potong (0 persen).

Rendahnya kinerja realisasi anggaran keempat RO timbul dari beberapa aspek tantangan. Tantangan utama muncul dari sisi non-teknis, yaitu cuaca. Cuaca hujan menghambat pelaksanaan vaksin karena menyebabkan kondisi yang sulit apabila terjadi hujan besar. Pemeliharaan ternak dilakukan dengan sistem ekstensif di beberapa Kabupaten (dilepas di kebun sawit) yang menyulitkan petugas dalam hal restrain sebelum vaksinasi dilakukan. Adapun dari sisi penganggaran, target yang ditetapkan dinilai terlalu tinggi karena populasi hewan untuk vaksin tidak sesuai dengan target.

Secara agregat, permasalahan pelaksanaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian di Regional Bali-Nusra adalah intensitas revisi cukup tinggi, baik revisi pergeseran antar Satker, Jenis Alsintan, maupun optimalisasi sisa kontrak karena sebagian besar berupa anggaran bantuan pemerintah. Selain itu, proses penganggaran belum berjalan optimal karena terdapat alokasi anggaran yang melebihi kebutuhan karena terdapat satker yang mengidentifikasi potensi anggaran yang tidak terserap sampai akhir tahun 2023. Sementara itu, isu utama pada tantangan eksekusi kegiatan adalah

Tabel 3. 51. Pagu Realisasi K/L Bidang Pertanian Regional Bali Nusra (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Pelayanan Kesehatan Hewan	52,45	21,65	41,28%	2.389.656	layanan
2	Ternak Ruminansia Potong	18,25	18,32	100,36%	2.150	Ekor
3	Ternak Unggas dan Aneka Ternak	11,14	9,89	88,75%	24.000	Ekor
4	Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi	8,88	8,24	92,84%	1	Kelompok Masyarakat
5	Bibit Ternak Unggul	8,17	7,91	96,90%	558	produk
6	Pakan Olahan dan bahan pakan	7,24	7,23	99,97%	1	Unit
7	Area penyaluran benih padi	6,84	5,11	74,80%	24.000	Hektar
8	Ternak Ruminansia Potong	5,50	0,00	0,00%	700	Ekor
9	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	3,51	3,50	99,79%	565	Hektar
10	Lainnya	37,23	34,52	92,73%		
TOTAL		159,20	116,38	73,11%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

keterlambatan penerbitan pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah.

E. Bidang Transportasi Perdesaaan

Bidang Transportasi Perdesaaan merupakan bidang pada belanja K/L mendukung DAK Fisik dengan proporsi terendah di Regional Bali Nusra dibandingkan dengan bidang lain (0,07 persen) dan seluruhnya berada di Provinsi NTT. Sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir, capaian realisasi anggaran mencapai Rp2,48 miliar atau 99,00 persen dari alokasi anggaran Rp2,51 miliar. Kinerja realisasi sudah optimal pada tiga RO yang mendukung bidang transportasi perdesaaan dengan kinerja serapan di atas 95 persen.

Namun, pada pelaksanaannya tetap terdapat isu yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan

Rp7.031,22 miliar atau 51,23 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Anggaran tersebut berada di 7 (tujuh) K/L dan dilaksanakan oleh 102 Satker dengan total jumlah output 546 RO. Kementerian PUPR merupakan K/L yang memiliki alokasi paling besar dalam mendukung belanja DAK Fisik yaitu sebesar Rp6.742,9 miliar atau mencapai 95,62 persen dari seluruh anggaran K/L pengampu. Alokasi anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk mendukung DAK Fisik bidang jalan. Jika dilihat porsi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik, terdapat K/L yang porsinya mencapai 100 persen yaitu Perpustakaan RI. Di sisi lain, anggaran yang mendukung DAK Fisik pada Kemenkes memiliki porsi paling kecil yakni hanya 4,41 persen.

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung

Tabel 3. 52. Pagu Realisasi K/L Bidang Transportasi Pedesaan Regional Bali Nusra (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	1,49	1,48	99,66%	1	km
2	Jembatan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	0,57	0,55	96,51%	16	m
3	Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	0,45	0,45	99,95%	2,25	km
TOTAL		2,51	2,48	99,00%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

anggaran Bidang Transportasi Perdesaaan yang disebabkan oleh blokir anggaran. Output pendukung mengalami blokir *automatic adjustment* dan baru mulai dilakukan buka blokir pada semester II tahun 2023, sehingga sampai dengan akhir triwulan III kinerja terlihat masih rendah. Sementara itu, tantangan lain berasal dari eksekusi kegiatan. Eksekusi kegiatan terdampak karena aksesibilitas terhadap lokasi kegiatan yang sulit.

III.10. REGIONAL MALUKU PAPUA

III.10.A. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Di Regional Maluku Papua, anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik adalah sebesar

DAK Fisik 43,08 persen terkonsentrasi di Provinsi Papua yaitu sebesar Rp3.029,03 miliar yang sebagian besar digunakan untuk Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong. Jika dilihat porsi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terhadap total pagu, Papua dan Papua Barat memiliki porsi paling tinggi yakni masing-masing 58,11 persen dan 56,94 persen. Sedangkan di Maluku Utara dan Maluku, porsi anggaran K/L yang mendukung DAK Fisik masing-masing 48,92 persen dan 36,50 persen.

Berdasarkan bidang, sebagian besar anggaran belanja K/L terkonsentrasi pada Bidang Jalan yakni sebesar Rp6.604,61 miliar atau 93,93 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Sedangkan sisanya, untuk

Tabel 3. 53. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Maluku Papua (miliar rupiah)

KD BA	NAMA KL	PAGU TOTAL	PAGU MENDUKUNG DAK FISIK	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
018	KEMENTAN	352,59	64,38	18,26%	37	115
023	KEMENDIKBUDRISTEK	1.860,79	139,28	7,48%	11	26
024	KEMENKES	633,12	27,90	4,41%	5	64
033	KEMEN PUPR	10.668,56	6.722,98	63,02%	30	250
057	PERPUSNAS RI	1,64	1,64	100,00%	4	4
067	KEMENDES PD TT	41,75	15,90	38,09%	11	23
068	BKKBN	165,90	59,14	35,65%	4	64
TOTAL		13.724,35	7.031,22	51,23%	102	546

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 54. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Maluku Papua (miliar rupiah)

KODE PROVINSI	NAMA PROVINSI	PAGU MENDUKUNG DAK FISIK	PAGU TOTAL	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
28	MALUKU UTARA	971,52	1.986,00	48,92%	25	118
29	MALUKU	1.223,93	3.353,01	36,50%	21	113
30	PAPUA	3.029,03	5.212,55	58,11%	33	193
33	PAPUA BARAT	1.806,73	3.172,79	56,94%	23	122
TOTAL		7.031,22	13.724,35	51,23%	102	546

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 55. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Maluku Papua (miliar rupiah)

BIDANG DAK FISIK	SUBBIDANG DAK FISIK	NAMA K/L	PAGU	REALISASI	% REAL	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
Jalan	Jalan	KEMEN PUPR	6.473,59	6.324,15	97,69%	24	239
	Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	KEMEN PUPR	131,02	115,06	87,82%	2	5
	TOTAL		6.604,61	6.439,21	97,50%	24	244
Kesehatan dan KB	Keluarga Berencana	BKKBN	59,14	58,98	99,72%	4	64
	Pengendalian Penyakit	KEMENKES	8,85	6,99	79,02%	4	9
	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	KEMENKES	9,48	5,83	61,55%	4	26
	Penguatan Sistem Kesehatan	KEMENKES	9,58	7,67	80,10%	5	29
	TOTAL		87,04	79,47	91,30%	9	128
Pendidikan	PAUD	KEMENDIKBUDRISTEK	5,37	5,26	97,90%	4	4
	Perpustakaan	PERPUSNAS RI	1,64	1,54	94,04%	4	4
	SD dan SMP	KEMEN PUPR	118,38	118,21	99,86%	6	6
	SD, SMP, SMA, SMK	KEMENDIKBUDRISTEK	133,90	133,41	99,63%	11	22
TOTAL			259,29	258,42	99,67%	21	36
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	KEMENTAN	64,38	59,69	92,71%	37	115
	TOTAL		64,38	59,69	92,71%	37	115
Transportasi Perdesaan	Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	KEMENDES PD TT	15,90	15,80	99,38%	11	23
	TOTAL		15,90	15,80	99,38%	11	23
GRAND TOTAL			7.031,22	6.852,59	97,46%	102	546

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan (3,69 persen), Pertanian (0,92 persen), Kesehatan dan KB (1,24 persen), dan Transportasi Perdesaan (0,23 persen). Pada Bidang Jalan, sebagian besar dukungan belanja K/L untuk mendanai Subbidang Jalan. pada Bidang Kesehatan dan KB, dukungan belanja K/L lebih banyak digunakan untuk Subbidang Keluarga Berencana dengan porsi mencapai sebesar 67,95 persen. Sedangkan pada Bidang Pendidikan, belanja K/L lebih difokuskan pada dukungan pada Subbidang SD dan SMP dan Subbidang SD, SMP, SMA, SMK dengan porsi masing-masing 45,65 persen dan 51,64 persen. Sedangkan pada Bidang Pertanian dan Bidang Transportasi Perdesaan masing-masing difokuskan hanya pada satu Subbidang.

Kinerja penyerapan anggaran belanja K/L pada seluruh bidang secara umum tercapai 97,46 persen atau Rp6.852,59 miliar. Semua bidang memiliki serapan di atas 90 persen. Adapun bidang dengan serapan tertinggi adalah bidang pendidikan dengan kinerja serapan 99,67 persen, sedangkan terendah adalah sistem kesehatan dan KB dengan kinerja serapan sebesar 91,30 persen.

III.10.B. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Per Bidang

A. Bidang Jalan

Belanja K/L yang mendukung Bidang Jalan

memiliki alokasi belanja paling besar dengan kinerja realisasi anggaran pada bidang ini mencapai 97,50 persen atau sebesar Rp6.439,21 miliar dari total alokasi Rp6.604,61 miliar. Bidang Jalan terdiri atas dua Subbidang yakni Subbidang Jalan dan Subbidang Jalan – Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas. Subbidang Jalan, belanja K/L difokuskan untuk mendanai Major Project yaitu Pembangunan Jalan dan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong di Papua dan Papua Barat serta Pembangunan Jalan dan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan di Maluku dan Maluku Utara. Selain itu, belanja K/L tersebut juga digunakan untuk Dukungan Penanganan Jalan Daerah dan preservasi jalan di empat provinsi. Sedangkan Subbidang Jalan – Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, belanja K/L difokuskan pada pembangunan Jalan Kawasan Prioritas di Maluku Utara dan Pembangunan Jembatan Kawasan Prioritas di Kabupaten Puncak Jaya.

Secara parsial, kinerja penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung Bidang Jalan tergolong optimal. RO Jalan Trans Papua Merauke-Sorong memiliki alokasi anggaran terbesar yaitu Rp1.655,28 miliar untuk jalan dan Rp350,18 miliar untuk jembatan memiliki kinerja realisasi anggaran di atas 98 persen. Akan tetapi, pada pelaksanaannya terdapat beberapa isu yaitu: 1) proses penganggaran paket pekerjaan muncul tengah tahun;

Tabel 3. 56. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Regional Maluku Papua (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	1.655,28	1.635,19	98,79%	220,90	km
		350,18	347,72	99,30%	8.600,11	m
2	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	1.091,91	1.068,89	97,89%	176,77	km
3	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	416,06	415,54	99,87%	105,84	km
4	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	414,05	407,23	98,35%	5.259,33	km
5	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan T	573,39	550,31	95,97%	104,99	km
		42,89	42,89	100,00%	2.311,30	m
6	Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sor	355,91	349,32	98,15%	1.047,03	m
7	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertii	231,46	213,58	92,28%	507,40	m
8	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	201,98	200,73	99,39%	1.508,10	km
9	Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	283,24	258,86	91,39%	36,36	km
		10,15	10,15	100,00%	577,10	m
10	Lainnya	978,09	938,79	95,98%		
	TOTAL	6.604,61	6.439,21	97,50%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

2) keterbatasan waktu pelaksanaan dan penyedia sehingga kesulitan menemukan penyedia dan tidak semua item tersedia dalam e-catalog; 3) miskomunikasi terkait panjang penanganan dengan usulan awal Pemda; dan 4) untuk tahapan tender sudah selesai pada pertengahan Juli 2023 namun karena belum tersedianya anggaran dalam DIPA, 2 paket berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah baru bisa berkontrak pada 18 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023.

Isu lainnya atas penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Jalan di Regional Maluku Papua secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) proses revisi di Eselon I yang lama; dan 2) terdapat penambahan paket pekerjaan yang menambah jumlah pagu pada Semester II.
2. Pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari: 1) untuk RO terkait Dukungan

Penanganan Jalan Daerah, Satker memiliki kesulitan atau kendala yang disebabkan oleh item pekerjaan tidak ada di e-catalog;

3. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) faktor kondisi eksternal, yaitu kondisi keamanan, sosial, dan cuaca, yang tidak dapat diprediksi yang sering menghambat pelaksanaan kegiatan dengan jangka waktu yang sangat lama dan dapat mengakibatkan biaya yang sangat tinggi; 2) terdapat keterbatasan waktu penyelesaian yang disebabkan oleh paket pekerjaan terkadang diterima di Semester II atau bahkan Triwulan IV, sehingga Satker tidak dapat melaksanakan kegiatan lebih awal; dan 3) kesulitan dalam mendapatkan hak ulayat atau biaya adat yang seringkali sulit ditemukan jalan keluar.
4. Tantangan regulasi yaitu belum didapatkan pemahaman regulasi pemda mengenai pengerjaan atau penanganan aset berupa jalan daerah.
5. Tantangan SDM yaitu Pergantian pejabat

Tabel 3. 57. Pagu Realisasi K/L Bidang Kesehatan dan KB Regional Maluku Papua (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	19,07	19,06	99,95%	31.071,00	Orang
2	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	10,12	10,07	99,54%	67,00	kegiatan
3	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	9,80	9,79	99,89%	1.164,00	Lembaga
4	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	5,27	4,10	77,75%	517,00	Orang
5	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	4,79	4,78	99,94%	1.402,00	Kelompok Masyarakat
6	Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	3,83	1,85	48,20%	66,00	Orang
7	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	3,51	2,83	80,56%	667,00	Orang
8	Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting	2,71	2,70	99,55%	63,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)
9	Dukungan peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dekonsentrasi) (LR)	2,48	2,21	89,25%	4,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)
10	Lainnya	25,45	22,07	86,72%		
TOTAL		87,04	79,47	91,30%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

perbendaharaan.

B. Bidang Kesehatan dan KB

Kinerja Pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB di Regional Maluku Papua paling rendah dibandingkan bidang lainnya yakni sebesar 91,30 persen. Secara parsial, kinerja belanja pada beberapa RO di bidang ini juga menunjukkan kinerja yang relatif baik, tetapi terdapat beberapa RO yang tidak optimal. RO yang kinerjanya masih rendah adalah RO Tenaga Kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yang masing-masing baru terserap 48,20 persen dan 77,75 persen. RO tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di keempat provinsi di Regional Maluku Papua.

Rendahnya serapan anggaran pada RO tersebut disebabkan karena belum terserapnya anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Ketidakterserapan anggaran pada dua Satker tersebut disebabkan beberapa hal yaitu: 1) revisi anggaran di Eselon I membutuhkan waktu penyelesaian yang lama; 2) perencanaan halaman III DIPA sulit dilakukan karena DIPA sudah disimplifikasi menjadi 1 DIPA; dan 3) sebagian besar kegiatan berupa pelatihan, namun belum ada trainers bersertifikat yang dapat memberikan pelatihan dimaksud.

Isu terkait penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Kesehatan dan KB di Regional Maluku Papua secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) revisi anggaran terpusat dari K/L dan memerlukan waktu yang lama; 2) perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk pelatihan atau peningkatan mutu tenaga kesehatan; dan 3) PPSDM Pusat tidak mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan 91 kegiatan yang menghambat kegiatan karena Satker tidak yakin dalam mengeksekusi kegiatan.

2. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) adanya satuan biaya yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah yang menyebabkan Satker harus menyesuaikan anggarannya dengan kebutuhan pelaksanaan diklat atau peningkatan mutu tenaga kesehatan; dan 2) terdapat beberapa RO yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan di Triwulan IV yaitu RO Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
3. Tantangan regulasi yaitu penetapan juknis kegiatan dari Gubernur yang terlambat.
4. Tantangan SDM yaitu adanya pergantian pejabat perbendaharaan dan SK Pejabat Perbendaharaan yang terlambat terbit sehingga menyebabkan tertundanya kegiatan.

C. Bidang Pendidikan

Kinerja Pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan di Regional Maluku Papua adalah 99,67 persen atau Rp258,42 miliar dari alokasi Rp259,29 miliar. Secara parsial, kinerja belanja pada sembilan RO dengan alokasi terbesar di bidang ini juga menunjukkan kinerja penyerapan anggaran di atas 95 persen. Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat isu yang perlu menjadi perhatian untuk pertimbangan perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran di periode berikutnya. Isu tersebut secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) revisi anggaran di Eselon I yang memakan waktu lama; dan 2) terdapat blokir anggaran.
2. Pengadaan barang dan jasa khususnya pada RO berupa aktivitas renovasi dan rehabilitasi bangunan terdiri dari: 1) penyedia yang memenuhi spesifikasi dan lokasi kegiatan terbatas; 2) tidak semua item yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersedia pada e-catalog; dan 3) terdapat kebutuhan sertifikasi TKDN yang

Tabel 3. 58. Pagu Realisasi K/L Bidang Pendidikan Regional Maluku Papua (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	29,70	29,71	100,04%	2.654,00	Orang
2	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	6,71	6,71	99,95%	1.420,00	Orang
3	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	47,14	47,13	99,97%	5.191,00	Orang
4	Penutur bahasa terbina	2,10	2,09	99,90%	861,00	Orang
5	Penutur bahasa teruji	0,35	0,35	100,00%	330,00	Orang
6	Penutur bahasa teruji	0,19	0,19	99,26%	104,00	Orang
7	Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi	1,64	1,54	94,04%	4,00	Lembaga
8	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	118,38	118,21	99,86%	55,00	Unit
9	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	47,71	47,23	98,99%	10.066,00	Lembaga
10	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	5,37	5,26	97,90%	6.087,00	Lembaga
TOTAL		259,29	258,42	99,67%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

tidak semua materialnya mempunyai sertifikat TKDN,

- Tantangan SDM yaitu: 1) kurangnya trainers bersertifikat di Papua Barat; 2) konflik internal pemangku kepentingan serta SDM yang kurang maksimal; dan 3) banyak Satker baru yang membuat kegiatan pembinaan pendidikan namun belum dilaksanakan.

D. Bidang Pertanian

Kinerja Pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian di Regional Maluku Papua menjadi terendah kedua setelah bidang Kesehatan dan KB, yaitu sebesar 92,71 persen. Secara parsial, Terdapat satu RO pada sembilan RO dengan alokasi

terbesar, tetapi tidak memiliki progres sampai akhir tahun yaitu RO teknologi pengendalian OPT perkebunan. Delapan RO lain dengan alokasi terbesar memiliki serapan optimal di atas 95 persen.

Namun, pada implementasinya terdapat isu yang perlu menjadi perhatian dalam penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Pertanian di Regional Maluku Papua. Secara umum isu tersebut diklaster sebagai berikut:

- Penganggaran yang terdiri dari: 1) blokir anggaran; dan 2) revisi anggaran yang memperlambat pelaksanaan anggaran.
- Pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari: 1) kontrak pengadaan pupuk pada

Tabel 3. 59. Pagu Realisasi K/L Bidang Pertanian Regional Maluku Papua (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Ternak Ruminansia Potong	9,13	9,13	100,00%	1.140,00	Ekor
2	Ternak Unggas dan Aneka Ternak	7,93	7,82	98,63%	8.650,00	Ekor
3	Ternak Ruminansia Potong	5,55	5,55	99,97%	560,00	Ekor
4	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	4,50	4,48	99,54%	5,00	Hektar
5	Area penyaluran benih padi	4,03	3,94	97,74%	13.500,00	Hektar
6	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	3,86	3,85	99,69%	8,00	Unit
7	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	3,05	0,00	0,00%	5,00	Unit
8	Sarana Bidang Kesehatan Hewan	3,00	3,00	99,87%	1,00	Unit
9	Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	2,62	2,57	98,15%	244,00	Hektar
10	Lainnya	20,70	19,34	93,43%		
TOTAL		64,38	59,69	92,71%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

RO Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan ditandatangani pada bulan Oktober 2023 sehingga pelaksanaan kegiatan baru bisa dilaksanakan di akhir tahun; dan 2) kesulitan dalam penyesuaian spesifikasi kebutuhan dengan pilihan barang/jasa yang tersedia karena keterbatasan penyedia atau spesifikasi kebutuhan yang tinggi karena kondisi lokasi.

3. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) faktor cuaca dan iklim turut berpengaruh dalam perkembangan pelaksanaan anggaran; dan 2) lokasi pelaksanaan yang jauh dari kantor dan berada di daerah terpencil yang jauh dari pemukiman menyebabkan terdapatnya kendala dalam monitoring pelaksanaan kegiatan.
4. Tantangan SDM yaitu terdapat Satker yang belum memiliki SDM operator BMN atau pejabat pengadaan barang dan jasa.

E. Bidang Transportasi Perdesaaan

Kinerja Pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan di Regional Maluku Papua adalah 99,38 persen. Realisasi sebesar Rp15,80 miliar dari total alokasi Rp15,90 miliar. Kinerja tersebut menjadi kinerja terbesar kedua setelah bidang pendidikan. Apabila

dilihat secara parsial, terdapat sembilan RO yang mendukung bidang ini. Serapan pada seluruh RO sudah optimal dengan serapan terendah terdapat pada RO Jalan Non-Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi sebesar 92,47 persen.

Berdasarkan identifikasi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Transportasi Perdesaan di Regional Maluku Papua, secara umum terdapat isu-isu yang dapat diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yaitu terdapat pembukaan blokir anggaran yang dilakukan setelah tengah tahun anggaran.
2. Pengadaan barang dan jasa, yaitu keterbatasan penyedia yang memenuhi kriteria sehingga memperlambat proses lelang.
3. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) faktor cuaca dan curah hujan tinggi yang susah diprediksi yang menghambat pengerjaan proyek; dan 2) keterlambatan pelaksanaan kegiatan dikarenakan keterlambatan penyelesaian tagihan.

Tabel 3. 60. Pagu Realisasi K/L Bidang Transportasi Pedesaan Regional Maluku Papua (miliar rupiah)

No.	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REAL	VOLUME	SATUAN
1	Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	3,66	3,84	105,02%	6,01	km
2	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	2,68	2,48	92,47%	2,48	km
3	Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	2,29	2,28	99,82%	1,83	km
4	Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	2,10	2,05	97,44%	54,00	m
5	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	2,10	2,08	99,25%	1,82	km
6	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	1,60	1,60	99,76%	1,95	km
7	Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	0,79	0,78	99,66%	2,50	km
8	Jembatan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi	0,68	0,68	99,99%	49,00	m
9	Jembatan yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	0,01	0,01	99,89%	1,00	m
TOTAL		15,90	15,80	99,38%		

Sumber: Aplikasi SINTESA Kementerian Keuangan, diolah

IV.

ANALISIS TEMATIK

SINERGI PUSAT-DAERAH DALAM UPAYA
PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA YANG BERDAYA SAING





Photo by Tim Media KPPN Pekanbaru



Pengurangan tingkat pengangguran merupakan salah satu sasaran pembangunan pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024. Pemerintah menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,6–4,3 persen pada tahun 2024. Menurut rilis Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen dibandingkan dengan Agustus 2022.

IV. ANALISIS TEMATIK:

SINERGI PUSAT-DAERAH DALAM UPAYA PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dinilai melalui berbagai indikator. Salah satu indikator utama adalah pertumbuhan ekonomi serta tingkat pengangguran. Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada interaksi dan partisipasi sumber daya manusia (SDM), yang berperan sebagai input pembangunan, tenaga kerja, dan konsumen hasil pembangunan. Namun, meskipun jumlah penduduk terus meningkat dan tenaga kerja tersedia melimpah, hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Akibatnya, rendahnya penyerapan tenaga kerja tersebut memicu tingginya tingkat pengangguran di Indonesia.

Saat ini, tingkat pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase angkatan kerja yang belum bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana tenaga kerja yang tersedia tidak terserap di pasar kerja suatu negara atau wilayah. Menurut rilis Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen dibandingkan dengan Agustus 2022. Pada tahun 2023, tiga provinsi dengan TPT tertinggi adalah Banten 7,52 persen, Jawa Barat 7,44 persen dan Kepulauan Riau 6,80 persen. Sedangkan provinsi dengan TPT terendah adalah Sulawesi Barat 2,27 persen, Papua 2,67 persen dan Bali 2,69 persen.

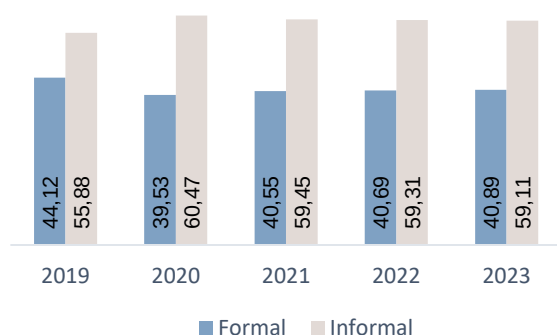
Grafik 4.1. Tingkat Pengangguran Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, diolah

Selaras dengan kondisi di atas, pengurangan tingkat **pengangguran** juga merupakan salah satu sasaran pembangunan pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pemerintah menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,6–4,3 persen pada tahun 2024.

Grafik 4.2. Penduduk Bekerja di Kegiatan Formal/Informal (%)



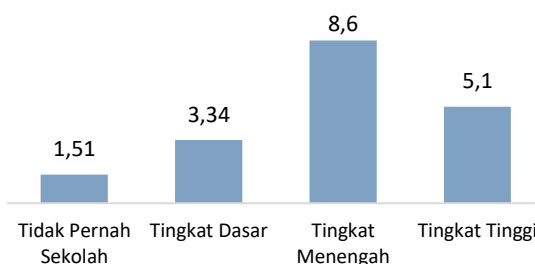
Sumber: BPS 2023, diolah

Secara struktur ketenagakerjaan, komposisi penduduk bekerja di kegiatan informal lebih tinggi dibandingkan kegiatan formal. BPS merilis bahwa mayoritas pekerja informal adalah laki-laki dan tinggal di pedesaan. Pada tahun 2023, tiga provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di kegiatan formal adalah Kepulauan Riau, 66,33 persen, DKI Jakarta 63,77 persen dan Kalimantan Timur 55,33 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di kegiatan informal adalah Papua 84,33 persen, NTT 74,51 persen dan Sulawesi Barat 73,35 persen (BPS, 2023).

Pengangguran adalah salah satu masalah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah agar tidak menimbulkan dampak

ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial, di masa mendatang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, akses terhadap pendidikan, serta keahlian dan keterampilan tenaga kerja merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah atau negara. Oleh karena itu, intervensi pemerintah di sektor pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya diharapkan dapat menekan angka pengangguran.

Grafik 4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan (%)



Sumber: BPS 2023, diolah

Menurut data BPS tahun 2023, pengangguran menurut pendidikan tertinggi pada tingkat menengah (SMA/ sederajat) sebesar 8,6 persen, selanjutnya tingkat tinggi (diploma ke atas) 5,10 persen, tingkat dasar (tidak/belum tamat SD dan SMP sederajat). Provinsi dengan distribusi tertinggi pengangguran yang berpendidikan tinggi di NTT 34,08 persen, Maluku 25,86 persen dan Bengkulu 24,88 persen. Sedangkan provinsi dengan distribusi terendah pengangguran yang berpendidikan tinggi di Jawa Barat 7,67 persen, Kepulauan Riau 8,06 persen dan Lampung 8,24 persen.

Pada tahun 2023, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi

sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar mencapai 28,21 persen.

Tabel 4.1. Laju Tenaga Kerja dan PDRB Tahun 2019-2023



Sumber: BPS 2023, diolah

Namun demikian, sektor utama ini mengalami penurunan secara perlahan meskipun selama ini menjadi *backbone* di struktur perekonomian nasional. Sektor tertinggi selanjutnya adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,99 persen. Hal yang sama juga terjadi penurunan pada sektor tersebut. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah agar sektor utama tersebut tidak mengalami penurunan yang semakin dalam.

Untuk menurunkan tingkat pengangguran, diperlukan dukungan dari APBN dan APBD melalui berbagai program pemerintah, seperti pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM. Dukungan APBN diwujudkan melalui alokasi belanja pemerintah, baik melalui Kementerian/Lembaga terkait maupun penyaluran dana ke daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah, termasuk belanja Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun Non Fisik di bidang Pendidikan. Selain itu,

Pemerintah Daerah melalui APBD juga berperan dalam menurunkan tingkat pengangguran sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Pada Belanja K/L, hasil tagging belanja yang mendukung ketenagakerjaan pada tahun 2023 sebesar Rp14.596,5 miliar dan realisasi mencapai Rp14.125,8 miliar (96,8 persen). Dari data tersebut, belanja padat karya untuk lapangan usaha ter-tagging mencapai Rp4.548,4 miliar dan terealisasi Rp4.480,5 miliar (98,5 persen). Output kegiatan tersebut antara lain Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya), Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya), Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) dan proyek infrastruktur jalan lainnya.

Tabel 4.2. Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja

Sektor LU	2019	2020	2021	2022	2023	Tren
A Pertanian ..	27,3%	29,76%	28,33%	28,61%	28,21%	
B Pertambangan ..	1,1%	1,05%	1,10%	1,13%	1,19%	
C Industri Pengolahan ..	15,0%	13,61%	14,27%	14,17%	13,83%	
D Pengadaan Listrik ..	0,3%	0,24%	0,22%	0,23%	0,23%	
E Pengadaan Air ..	0,4%	0,38%	0,43%	0,38%	0,35%	
F Konstruksi ..	6,7%	6,28%	6,33%	6,27%	6,62%	
G Perdagangan ..	18,8%	19,23%	19,64%	19,36%	18,99%	
H Transportasi ..	4,4%	4,35%	4,15%	4,29%	4,40%	
I Penyediaan Akumulator	6,7%	6,65%	7,01%	7,10%	7,71%	
J Informasi ..	0,7%	0,73%	0,76%	0,75%	0,71%	
K Jasa Keuangan ..	1,4%	1,21%	1,22%	1,20%	1,17%	
L Real Estat	0,3%	0,31%	0,27%	0,33%	0,36%	
M,N Jasa Perusahaan	1,5%	1,40%	1,54%	1,65%	1,77%	
O Administrasi Pemerin	3,8%	3,56%	3,70%	3,60%	3,37%	
P Jasa Pendidikan	5,0%	4,69%	4,95%	4,81%	4,95%	
Q Jasa Kesehatan ..	1,5%	1,56%	1,68%	1,65%	1,58%	
R,S,T,U Jasa Lainnya	5,0%	4,99%	4,41%	4,46%	4,57%	

Sumber: BPS 2023, diolah

Selain hal di atas, untuk penyiapan tenaga kerja dari lulusan non vokasi dan perguruan tinggi, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp638,1 miliar dan realisasi mencapai Rp624,1 miliar (97,8 persen). Output kegiatan tersebut antara lain

Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha, Tenaga Kerja Mandiri Pemula termasuk output yang menyasar pada Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja. Selanjutnya, belanja K/L untuk ketenagakerjaan khususnya pada penyiapan tenaga kerja lulusan vokasi. Alokasi untuk kegiatan tersebut mencapai Rp879,9 miliar dan realisasi sebesar Rp849,8 miliar (96,6 persen).

Pada Belanja DAK Fisik telah di cluster kelompok DAK Fisik untuk food estate dan pariwisata. Pada cluster food estate, telah dialokasikan sebesar Rp2.700,8 miliar dan terealisasi Rp2.568,9 miliar (95,1 persen). Alokasi di atas terdistribusi pada Bidang Irigasi, jalan, kehutanan dan pertanian yang mendukung pengembangan *food estate* nasional. Selanjutnya cluster pariwisata, cluster ini mendapatkan alokasi sebesar Rp1.304,96 miliar dan terealisasi Rp1.138,6 miliar (87,2 persen). Nilai tersebut terdistribusi pada Bidang Industri Kecil dan Menengah, Lingkungan Hidup, pariwisata, perdagangan UMKM dalam rangka penguatan destinasi pariwisata prioritas. Pada DAK Fisik Bidang Pendidikan, khususnya Sub bidang SMK telah dialokasikan tahun 2023 sebesar Rp3.179,7 miliar dan terealisasi Rp3.055,4 miliar (96,1 persen).

Pada belanja DAK Non Fisik tahun 2023, dalam rangka mendukung sektor ketenagakerjaan nasional, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp833,3 miliar dan terealisasi Rp756,8 miliar (90,8 persen). Secara lebih rinci, alokasi DAK Non Fisik di

atas khususnya dialokasikan pada Fasilitas Penanaman Modal, Pelayanan Kepariwisata; Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah serta Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil. Berdasarkan data di atas, pemerintah telah berusaha secara optimal memberikan berbagai alokasi dana Belanja K/L dan TKD untuk mendukung sektor ketenagakerjaan agar lebih berkualitas sekaligus dapat mengurangi pengangguran di Indonesia.

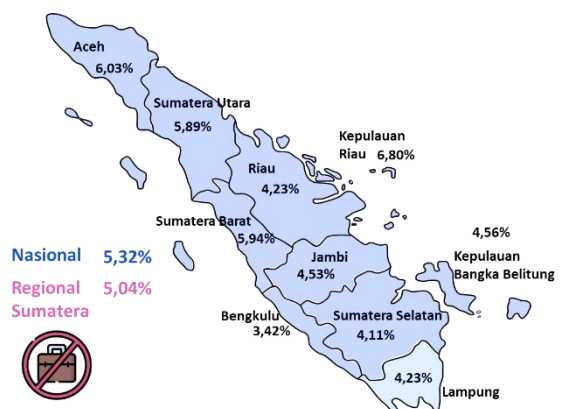
IV.1. REGIONAL SUMATERA

IV.1.A. Kondisi Umum Ketenagakerjaan TPT Regional Sumatera pada tahun 2023 sebesar 5,04 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 1.570.467 orang.

Capaian tersebut lebih rendah daripada capaian nasional sebesar 5,32 persen. Berdasarkan provinsi TPT tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,80 persen, sedangkan terendah terdapat di Provinsi Bengkulu sebesar 3,42 persen.

Sejalan dengan tren ketenagakerjaan nasional, tingkat ketenagakerjaan di Regional

Gambar 4.1 : TPT Regional Sumatera Agustus Tahun 2023



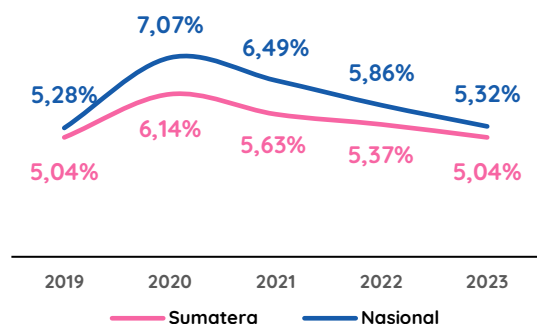
Sumber: BPS 2023, diolah

Sumatera pasca Pandemi Covid-19 terus menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari penurunan angka pengangguran dalam empat tahun terakhir. Tingkat pengangguran Regional Sumatera pada Agustus tahun 2023 turun 0,33 persen poin dibandingkan periode sebelumnya dan turun 1,1 persen poin sejak tahun 2020.

Penurunan tersebut dikontribusi oleh proses pemulihan ekonomi yang semakin membaik pasca pandemi. Meskipun kondisi perekonomian menghadapi tantangan faktor global seperti penurunan harga komoditas ekspor dan perlambatan ekonomi global.

TPT Regional Sumatera cukup tinggi mendekati rata-rata Nasional dan struktur ketenagakerjaan masih didominasi oleh kelompok informal. Distribusi tenaga kerja

Grafik 4.4. Laju Tingkat Pengangguran Regional Sumatera Tahun 2019-2023



Sumber: BPS 2023

formal hanya sebesar 39,52 persen yang mengindikasikan sebagian besar pekerjaan tidak menambah nilai yang signifikan pada suatu produk dan berhubungan dengan penghasilan/upah pekerja yang rendah. Pada beberapa tahun terakhir pasca pandemi, struktur ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan yang positif meskipun 60,48 persen tenaga kerja merupakan tenaga kerja informal.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar, 37,67 persen, diikuti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,58 persen.

Tabel 4.3. Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja Regional Sumatera

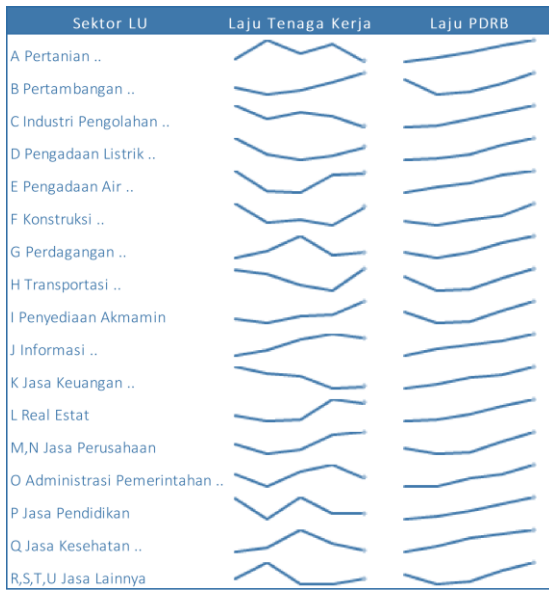
Sektor LU	2019	2020	2021	2022	2023	Tren
A Pertanian ..	37,8%	39,14%	38,18%	38,86%	37,67%	
B Pertambangan ..	1,4%	1,35%	1,40%	1,51%	1,66%	
C Industri Pengolahan ..	9,1%	8,64%	8,88%	8,77%	8,37%	
D Pengadaan Listrik ..	0,3%	0,23%	0,21%	0,22%	0,25%	
E Pengadaan Air ..	0,3%	0,25%	0,24%	0,29%	0,30%	
F Konstruksi ..	5,7%	5,38%	5,43%	5,35%	5,62%	
G Perdagangan ..	17,5%	17,63%	18,04%	17,52%	17,58%	
H Transportasi ..	4,1%	3,98%	3,71%	3,59%	4,13%	
I Penyediaan Akumulator ..	5,8%	5,61%	5,91%	5,93%	6,56%	
J Informasi ..	0,5%	0,51%	0,54%	0,55%	0,54%	
K Jasa Keuangan ..	0,9%	0,86%	0,84%	0,78%	0,79%	
L Real Estat ..	0,1%	0,10%	0,10%	0,18%	0,16%	
M,N Jasa Perusahaan ..	1,1%	1,02%	1,08%	1,29%	1,32%	
O Administrasi Pemerintahan ..	4,3%	4,21%	4,37%	4,44%	4,30%	
P Jasa Pendidikan ..	5,5%	5,20%	5,51%	5,28%	5,27%	
Q Jasa Kesehatan ..	1,6%	1,66%	1,78%	1,68%	1,63%	
R,S,T,U Jasa Lainnya ..	3,9%	4,23%	3,76%	3,75%	3,86%	

Sumber: BPS 2023, diolah

Secara umum, sektor lapangan usaha tidak banyak terjadi perubahan yang signifikan. Sektor pertanian yang mengandalkan komoditas seperti kelapa sawit, kopi, karet dan komoditas lainnya menghadapi tantangan ketika terjadi perlambatan ekonomi yang berdampak pada penurunan nilai ekspor komoditas. Selain itu, perubahan iklim juga mengakibatkan terganggunya produktivitas petani. Kondisi tersebut perlu diantisipasi oleh pemerintah dan masyarakat sehingga produk yang dihasilkan masih memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran lokal dan internasional.

Capaian positif kondisi ketenagakerjaan diikuti dengan laju PDRB di semua sektor lapangan usaha. Seluruh lapangan usaha menghasilkan pertumbuhan dari sisi PDRB, termasuk untuk sektor-sektor yang mengalami penurunan serapan tenaga kerja seperti Sektor Pertanian, Kehutanan, dan

Tabel 4.4. Laju Tenaga Kerja dan PDRB Regional Sumatera Tahun 2019-2023



Sumber: BPS 2023, diolah

Perikanan. Penurunan jumlah tenaga kerja diiringi dengan peningkatan PDRB dapat mengindikasikan efisiensi dalam proses produksi. Hal ini juga dapat menjadi indikasi adanya inovasi dalam proses produksi barang/jasa yang berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung terlihat menginvestasikan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari rata-rata peningkatan IPM dalam empat tahun terakhir yang sama dengan nasional, bahkan Sumatera Selatan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Namun demikian, pada tahun 2023 capaian IPM pada Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau di atas Nasional 73,55. Sedangkan 7 provinsi lainnya di Regional Sumatera capaian IPM masih di bawah rata-rata

nasional. Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga masyarakat di regional Sumatera.

IV.1.B Dukungan APBN untuk Ketenagakerjaan

Pemerintah melalui APBN secara konsisten mendukung sektor tenaga kerja dengan berbagai program dan kebijakan.

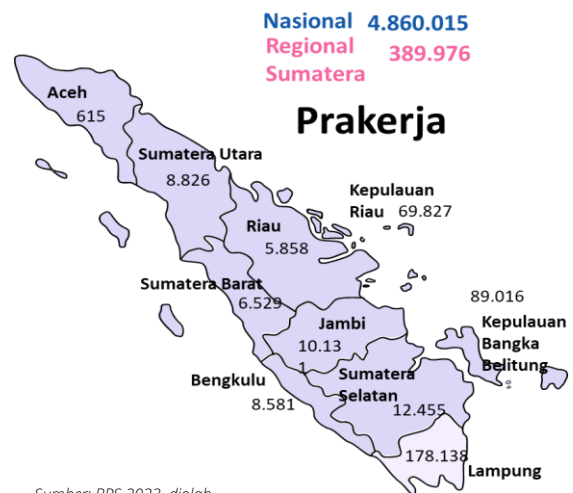
Dukungan ini diberikan untuk mencapai tujuan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu program unggulan pemerintah adalah Kartu Prakerja, yang bertujuan meningkatkan kseterampilan dan pengetahuan masyarakat agar siap bersaing di dunia kerja. Berdasarkan survei

Sakernas periode Agustus 2024, terdapat 389.976 orang penerima manfaat Program Kartu Pra Kerja, 9.322 diantaranya menerima manfaat pada tahun 2023. Adapun sebaran penerima Program Pra Kerja untuk setiap Provinsi dapat di lihat pada gambar 4.2.

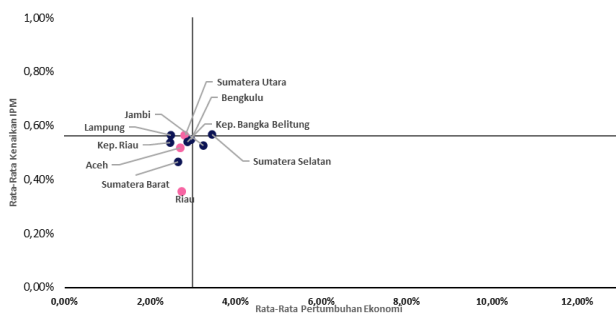
Penerima Program Kartu Pra Kerja terbanyak

Gambar 4.2. Sebaran Penerima Kartu Pra Kerja Regional Sumatera Tahun 2020-2023



Sumber: BPS 2023, diolah

Grafik 4.5. Scatter Plot Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Regional Sumatera Tahun 2020-2023



Sumber: BPS 2023, diolah

terdapat di Provinsi Lampung Sebanyak 301.787 atau 77,39 persen telah menyelesaikan Program Kartu Pra Kerja. Program Kartu Pra Kerja telah memberikan manfaat meningkatkan pengetahuan/keahlian para penerima manfaat. Berdasarkan hasil survei sebanyak 258.779 orang atau 66,36 persen peserta merasa keahlian/pengetahuan pasca mengikuti program tersebut mengalami peningkatan.

Pemerintah mengalokasikan belanja Pemerintah Pusat/KL dan Transfer ke Daerah (TKD) untuk peningkatan ketenagakerjaan di Regional Sumatera. Alokasi untuk belanja KL mencapai Rp1.872,7 miliar dan terealisasi Rp1.803,4 miliar (96,3 persen). Alokasi tertinggi pada padat karya untuk lapangan usaha sebesar Rp1.213,6 miliar dan terealisasi Rp1.189,2 miliar (98 persen). Padat karya tersebut berupa output untuk pemeliharaan, rehabilitasi jalan, jembatan, dan trotoar.

Selain itu, alokasi yang cukup besar digunakan untuk penyiapan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi yang tersebar di beberapa provinsi di Sumatera mencapai Rp125,8 miliar dan terealisasi

Rp119,4 miliar (95 persen). Alokasi tertinggi yang lain adalah Pengembangan Kawasan Pertanian Untuk Lapangan Usaha dengan alokasi Rp113,8 miliar dan terealisasi Rp111,8 miliar (98,2 persen). Pengembangan kawasan pertanian di antaranya untuk kawasan kopi, kakao, karet, kelapa, sagu, cabai, padi dan produk pertanian lainnya. Alokasi belanja KL untuk sektor ketenagakerjaan khususnya pariwisata mencapai Rp25,08 miliar dengan tingkat penyerapan sebesar Rp24,4 miliar (97,2 persen).

Dari sisi belanja TKD, DAK Fisik yang di cluster untuk Pariwisata dialokasikan sebesar Rp334,1 miliar dan disalurkan Rp272,9 miliar (81,7 persen). Alokasi tersebut untuk penguatan industri kecil dan menengah, lingkungan hidup, pariwisata dan UMKM.

Pada *cluster food estate* dialokasikan sebesar Rp955,9 miliar dan disalurkan Rp913,7 miliar (95,6 persen). Alokasi *food estate* tersebut khususnya pada pengembangan irigasi, jalan, kehutanan dan pertanian. Sedangkan DAK Fisik bidang pendidikan, khususnya sub bidang SMK dialokasikan sebesar Rp881,4 miliar dan disalurkan Rp863,7 miliar (98 persen).

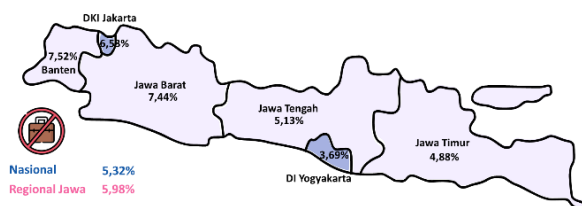
Selain DAK Fisik, Pemerintah juga mengalokasikan DAK Non Fisik untuk mendukung ketenagakerjaan di Regional Sumatera. Alokasi untuk fasilitasi penanaman modal sebesar Rp77,1 miliar dan disalurkan sebesar Rp64 miliar (83,1 persen), pelayanan kepariwisataan sebesar Rp36,9 miliar dan disalurkan Rp34,3 miliar (92,8 persen). Selanjutnya, alokasi untuk Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra

Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp53,3 miliar dan disalurkan Rp45 miliar (84,2 persen) serta Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebesar Rp79,2 miliar dan disalurkan Rp75,3 miliar (95,1 persen). Jadi secara umum, realisasi belanja baik dari Belanja K/L termasuk DAK Fisik/Non fisik relatif tinggi di Regional Sumatera.

IV.2 REGIONAL JAWA

IV.2.A Kondisi Umum Ketenagakerjaan TPT Regional Jawa pada tahun 2023 sebesar 5,98 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 5.019.046 orang.

Gambar 4.3. TPT Regional Jawa Agustus Tahun 2023

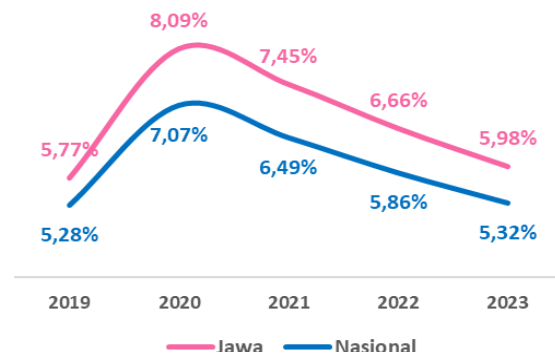


Sumber: BPS 2023, diolah

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan data nasional sebesar 5,32 persen. Berdasarkan persentase TPT, provinsi Banten merupakan provinsi dengan persentase tertinggi yakni 7,52 persen dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan persentase terendah yakni 3,69 persen. Sedangkan berdasarkan jumlah pengangguran, provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi adalah provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 1.888.287 atau sebesar 37,63 persen dari jumlah pengangguran yang ada di regional Jawa.

Selaras dengan laju ketenagakerjaan nasional, laju ketenagakerjaan di Regional Jawa pasca Pandemi Covid-19 terus menunjukkan perbaikan kondisi yang

Grafik 4.6. Laju Tingkat Pengangguran Regional Jawa Tahun 2019-2023



Sumber: BPS 2023, diolah

tergambar dari penurunan angka tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir. Namun demikian, tingkat pengangguran di regional Jawa lebih tinggi dibandingkan nasional. Tingkat pengangguran Regional Jawa pada Agustus tahun 2023 turun 0,68 persen poin dibandingkan periode sebelumnya dan turun 2,11 persen poin sejak tahun 2020. Penurunan tersebut dikontribusi oleh proses pemulihan ekonomi yang semakin membaik meskipun TPAK pada Agustus 2023 cenderung stagnan di angka 69,35 persen, sama seperti periode sebelumnya.

Tabel 4.5. Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja Regional Jawa

Sektor LU	2019	2020	2021	2022	2023	Tren
A Pertanian ..	19,89%	22,53%	20,95%	20,92%	21,21%	
B Pertambangan ..	0,59%	0,52%	0,54%	0,53%	0,53%	
C Industri Pengolahan ..	19,42%	17,53%	18,39%	18,33%	17,85%	
D Pengadaan Listrik ..	0,26%	0,22%	0,19%	0,22%	0,21%	
E Pengadaan Air ..	0,46%	0,49%	0,55%	0,47%	0,41%	
F Konstruksi ..	7,34%	6,89%	6,93%	6,95%	7,35%	
G Perdagangan ..	20,28%	20,80%	21,23%	21,18%	20,48%	
H Transportasi ..	4,58%	4,65%	4,46%	4,64%	4,52%	
I Penyediaan Akmamin	7,65%	7,90%	8,32%	8,37%	8,99%	
J Informasi ..	0,90%	0,91%	0,94%	0,93%	0,87%	
K Jasa Keuangan ..	1,63%	1,43%	1,45%	1,45%	1,38%	
L Real Estat	0,46%	0,46%	0,40%	0,47%	0,49%	
M,N Jasa Perusahaan	1,82%	1,70%	1,91%	1,97%	1,94%	
O Administrasi Pemerintahan	2,71%	2,35%	2,43%	2,35%	2,27%	
P Jasa Pendidikan	4,60%	4,29%	4,56%	4,45%	4,65%	
Q Jasa Kesehatan ..	1,43%	1,42%	1,54%	1,52%	1,45%	
R,S,T,U Jasa Lainnya	5,98%	5,92%	5,20%	5,25%	5,41%	

Sumber: BPS 2023, diolah

selaras dengan TPT yang tergolong tinggi, struktur ketenagakerjaan masih

didominasi oleh kelompok informal. Tahun 2023, tenaga kerja formal hanya memiliki distribusi sebesar 43,10 persen yang mengindikasikan bahwa mayoritas pekerjaan bukan pekerjaan yang memberikan nilai tambah pada suatu produk dan berkorelasi dengan upah yang rendah. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan daerah dengan tingkat pekerja formal paling rendah yakni hanya 36,89 persen dan 39,61 persen.

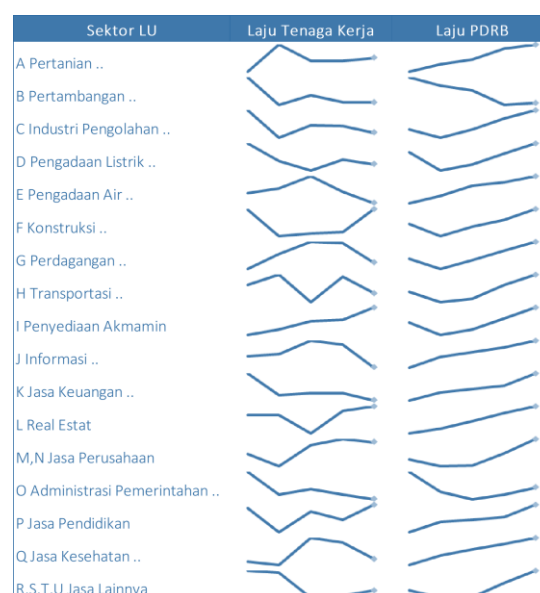
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar, yakni masing-masing 21,21 persen dan 20,48 persen, diikuti Sektor Industri Pengolahan sebesar 17,85 persen pada tahun 2023. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sempat menjadi *buffer sector* pada saat pandemi Covid-19 namun distribusi tenaga kerja pada sektor ini cenderung menurun setelah pandemi dan kembali naik pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perpindahan tenaga kerja dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke Sektor lain pasca pandemi Covid-19 mulai kembali ke sektor ini. Sebaliknya, tenaga kerja di Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terus tumbuh dari tahun 2019 sampai dengan 2022, namun tahun menurun pada 2023.

Jika sebagian besar distribusi tenaga kerja di beberapa sektor cenderung turun atau fluktuatif pasca pandemi Covid-19, Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum justru menunjukkan tren yang terus tumbuh bahkan tidak terganggu dengan Covid-19.

Meski terjadi shifting tenaga kerja pada beberapa sektor, namun hampir seluruh lapangan usaha menghasilkan pertumbuhan dari sisi PDRB, kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sejak Covid-19 sampai dengan 2023 seiring dengan penurunan distribusi tenaga kerja pada sektor ini.

Beberapa sektor mengalami penurunan serapan tenaga kerja seperti Sektor Jasa

Tabel 4.6. Laju Tenaga Kerja dan PDRB Regional Jawa Tahun 2019-2023



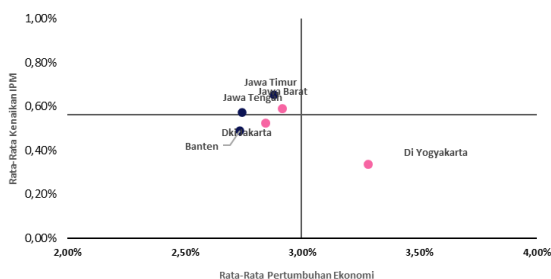
Sumber: BPS 2023, diolah

Keuangan dan Asuransi dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, namun tetap mencatatkan pertumbuhan PDRB yang positif. Hal ini mengindikasikan efisiensi dalam proses produksi seiring dengan implementasi inovasi dalam proses produksi yang berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tidak seluruh provinsi menggunakan

peningkatan produktivitas untuk investasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat terlihat menginvestasikan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari rata-rata peningkatan IPM dalam empat tahun terakhir yang lebih tinggi daripada nasional, meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi pada ketiga provinsi tersebut di bawah rata-rata nasional. Pada periode yang sama, peningkatan kualitas hidup DKI Jakarta dan Banten terlihat mengalami perlambatan seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi tersebut. Sebaliknya, kondisi berbeda terjadi pada DI

Grafik 4.7. Scatter Plot Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Regional Jawa Tahun 2020-2023



Sumber: BPS 2023, diolah

Yogyakarta yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, namun terlihat tidak linear dengan pertumbuhan IPM yang cenderung rendah yakni 0,34 persen dalam empat tahun terakhir. Perlambatan tersebut, salah satunya dipicu oleh menurunnya IPM DI Yogyakarta pada saat pandemi Covid-19 dari 79,99 pada tahun 2019 menjadi 79,97 pada tahun 2020.

IV.2.B Dukungan APBN untuk Ketenagakerjaan

Sejalan dengan amanah konstitusi sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sumber daya bangsa ini harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mewujudkan tujuan mulia tersebut, APBN berusaha hadir di semua lini yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat termasuk ketenagakerjaan. **Dukungan pemerintah melalui APBN tersebut disalurkan baik melalui belanja pemerintah pusat dalam hal ini belanja K/L dan BUN maupun melalui TKD pada DAK Fisik dan DAK Nonfisik.** Regional Jawa termasuk regional yang mendapatkan alokasi paling tinggi dibandingkan dengan regional lainnya baik dari belanja pemerintah pusat maupun TKD.

Belanja K/L untuk mendukung tenaga kerja di regional Jawa terdapat di beberapa K/L dengan total anggaran mencapai Rp9.212,1 miliar dengan tingkat realisasi mencapai Rp8.907,5 miliar (96,7 persen). Alokasi belanja K/L di regional Jawa terhitung tinggi dibandingkan dengan regional lainnya. Hal ini karena ada beberapa alokasi yang anggarannya terpusat di Jakarta namun peruntukannya tersebar ke seluruh Indonesia. Salah satunya adalah belanja pengembangan kawasan pertanian untuk lapangan usaha yang mencapai 1.652,7 miliar dengan tingkat realisasi sebesar Rp1.598,2 miliar (96,7 persen).

Anggaran belanja K/L terbesar di regional Jawa yang mendukung tenaga kerja berupa proyek padat karya untuk

lapangan usaha dengan alokasi Rp1.113,9 miliar dengan realisasi Rp1.098,5 (98,6 persen). Proyek padat karya tersebut sebagian besar terdapat pada kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional khususnya pada pengerjaan jalan dan jembatan. Selain itu, padat karya juga terdapat pada kegiatan perluasan kesempatan kerja berupa bantuan kegiatan padat karya pada beberapa lembaga kerja dan fasilitasi pembinaan masyarakat.

Beberapa kegiatan/output lainnya yang dibiayai dari belanja K/L berupa infrastruktur dan pengembangan di bidang pariwisata, industri, UMKM, kewirausahaan dan pertanian. Selain itu, juga terdapat dukungan untuk ekonomi kreatif di regional Jawa mendapatkan alokasi sebesar Rp349,6 miliar dengan realisasi Rp335,2 miliar (95,9 persen). Selain dianggarkan dalam beberapa proyek tersebut di atas, belanja K/L juga digunakan untuk membiayai peningkatan kualitas SDM tenaga kerja di antaranya untuk: (1) penyiapan tenaga kerja ahli, lulusan perguruan tinggi, vokasi, pelatihan, non vokasi; (2) penyiapan SDM pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif; (3) pendamping tenaga kerja dan UMKM; (4) pengembangan kapasitas tenaga kerja dan (5) dan sertifikasi tenaga kerja. Anggaran untuk peningkatan kualitas SDM tersebut dialokasikan sebesar Rp2.718,7 miliar dengan realisasi Rp2.617,0 miliar (96,3 persen).

Salah satu program unggulan pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berdaya saing adalah program Kartu Pra Kerja yang dibiayai dari BUN. Berdasarkan

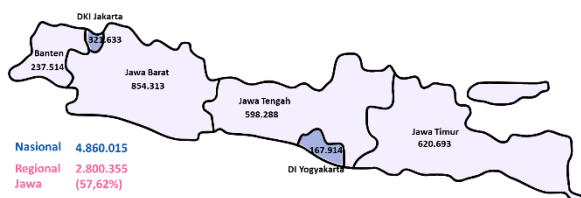
survei Sakernas periode Agustus 2024, di regional Jawa terdapat 2.800.355 orang penerima manfaat Program Kartu Pra Kerja, 218.151 di antaranya menerima manfaat pada tahun 2023. Penerima Program Kartu Pra Kerja terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat sejalan dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan Provinsi yang lain. Jumlah peserta telah menyelesaikan Program Kartu Pra Kerja adalah sebanyak 2.354.573 atau 84,08 persen. Program Kartu Pra Kerja telah memberikan manfaat meningkatkan pengetahuan atau keahlian para penerima manfaat. Berdasarkan hasil survei sebanyak 2.195.065 orang atau 78,38 persen peserta merasa keahlian/pengetahuan meningkat pasca mengikuti program tersebut.

Dukungan pemerintah untuk ketenagakerjaan melalui TKD di antaranya disalurkan melalui DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Alokasi anggaran DAK fisik yang mendukung ketenagakerjaan di regional Jawa adalah sebesar Rp1.078,5 miliar dengan realisasi sebesar Rp999,9 miliar (92,7 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan pariwisata, *food estate* dan SMK vokasi. Pengembangan pariwisata di regional Jawa difokuskan untuk pengembangan daerah destinasi pariwisata, pengembangan industri kecil menengah serta untuk UMKM yang dialokasikan sebesar Rp301,8 miliar dengan realisasi Rp253,9 miliar (84,1 persen). Anggaran pada *food estate* berupa jalan dialokasikan sebesar Rp139,7 miliar (94,2 persen). Sedangkan untuk SMK Vokasi dianggarkan sebesar Rp637,0 miliar dengan realisasi Rp614,4 miliar (96,4 persen).

Dukungan DAK Non Fisik untuk ketenagakerjaan di Regional Jawa dialokasi sebesar Rp210,3 miliar dengan realisasi Rp195,0 miliar (92,7 persen).

Anggaran tersebut digunakan untuk fasilitasi penanaman modal, pelayanan kepariwisataan, penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah dan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil. Alokasi untuk fasilitasi penanaman modal sebesar

Gambar 4.4. Sebaran Penerima Kartu Pra Kerja Regional Jawa Tahun 2020-2023



Sumber: BPS 2023, diolah

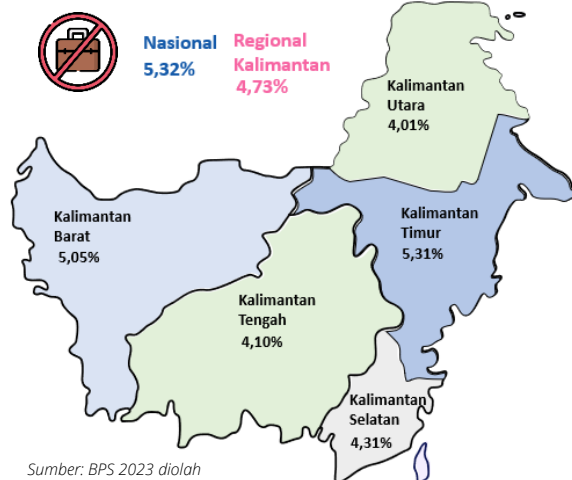
Rp44,8 miliar dengan realisasi penyaluran sebesar Rp38,7 miliar (86,5 persen), pelayanan kepariwisataan sebesar Rp36,7 miliar dengan realisasi penyaluran Rp34,9 miliar (95,3 persen). Selanjutnya, alokasi untuk penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah sebesar Rp58,2 miliar dengan realisasi penyaluran Rp53,5 miliar (91,9 persen) serta peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil sebesar Rp70,5 miliar yang tersalur sebesar Rp67,7 miliar (96,0 persen).

IV.3 REGIONAL KALIMANTAN

IV.3.A Kondisi Umum Ketenagakerjaan

TPT Regional Kalimantan pada tahun 2023 sebesar 4,73 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 418.030 orang.

Gambar 4.5. TPT Regional Kalimantan Agustus Tahun 2023

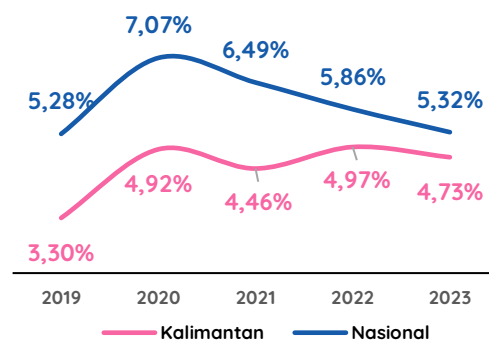


Sumber: BPS 2023 diolah

Capaian tersebut lebih rendah daripada capaian nasional sebesar 5,32 persen. Berdasarkan provinsi TPT tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,31 persen, sedangkan terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 4,01 persen. Tingkat pengangguran di seluruh provinsi di regional Kalimantan lebih rendah dibandingkan dengan nasional.

Laju ketenagakerjaan di Regional Kalimantan pasca Pandemi Covid-19 menunjukkan kondisi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum terjadinya covid-19, rata-rata tingkat pengangguran

Grafik 4.8. Laju Tingkat Pengangguran Regional Kalimantan Tahun 2019-2023



Sumber: BPS 2023, diolah

sejak 2020 s.d. 2023 sebesar 4,77 persen. Tingkat pengangguran Regional Kalimantan pada tahun 2023 turun 0,19 persen poin dibandingkan periode sebelumnya tahun 2020. Penurunan tersebut dikontribusi oleh proses pemulihan ekonomi yang semakin membaik, meskipun TPAK menunjukkan kenaikan setelah covid-19.

Terlepas dari TPT yang masih dibawah TPT nasional, struktur ketenagakerjaan masih didominasi oleh kelompok informal.

Tenaga kerja formal hanya memiliki distribusi sebesar 33,15 persen yang mengindikasikan mayoritas pekerjaan bukan pekerjaan yang

Motor sebesar 17,22 persen. Setelah Covid-19 distribusi tenaga kerja mengalami kenaikan pada sektor konstruksi, penyediaan akomodasi, dan aktivitas usaha fisik yang sejalan dengan kondisi geliat ekonomi yang mulai bergerak tumbuh. Pertumbuhan distribusi tenaga kerja juga terlihat pada sektor pertambangan mengingat Kalimantan merupakan salah satu lokasi perusahaan tambang tambah dan harga komoditas hasil tambang mengalami perbaikan salah satunya disebabkan karena kondisi geopolitik perang antara Rusia-Ukraina.

Tabel 4.7. Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja Regional Kalimantan

Sektor LU	Laju Tenaga Kerja	Laju PDRB	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian ..			34,66%	36,26%	35,20%	36,05%	34,36%
B Pertambangan ..			4,74%	4,68%	4,80%	5,06%	5,68%
C Industri Pengolahan ..			7,27%	6,77%	7,02%	6,24%	6,19%
D Pengadaan Listrik ..			0,44%	0,33%	0,37%	0,33%	0,28%
E Pengadaan Air ..			0,34%	0,27%	0,33%	0,25%	0,30%
F Konstruksi ..			5,87%	5,72%	5,46%	5,45%	5,76%
G Perdagangan ..			17,16%	18,06%	18,02%	16,90%	17,22%
H Transportasi ..			3,72%	3,64%	3,55%	3,94%	4,00%
I Penyediaan Akomamin			6,26%	5,75%	6,12%	6,13%	6,76%
J Informasi ..			0,53%	0,57%	0,59%	0,47%	0,48%
K Jasa Keuangan ..			1,05%	0,81%	0,77%	0,80%	0,83%
L Real Estat			0,17%	0,18%	0,15%	0,23%	0,28%
M,N Jasa Perusahaan			1,37%	1,08%	1,22%	1,60%	1,76%
O Administrasi Pemerintahan ..			5,50%	5,26%	5,58%	5,59%	5,16%
P Jasa Pendidikan			5,32%	4,89%	5,27%	5,35%	5,29%
Q Jasa Kesehatan ..			1,54%	1,71%	1,82%	1,87%	1,81%
R,S,T,U Jasa Lainnya			4,06%	4,02%	3,73%	3,72%	3,84%

Sumber: BPS 2023 diolah

memberikan nilai tambah pada suatu produk dan berkorelasi dengan upah yang rendah. Namun, meskipun sektor informal masih mendominasi, struktur ketenagakerjaan pasca pandemi Covid-19 terus menunjukkan perbaikan.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar, 34,36 persen, diikuti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Tabel 4.8. Laju Tenaga Kerja dan PDRB Regional Kalimantan Tahun 2019-2023



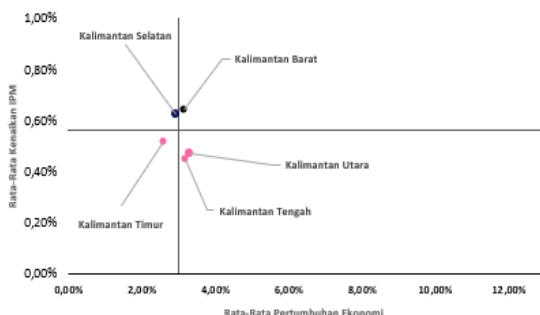
Sumber: BPS 2023 diolah

Membaiknya kondisi ketenagakerjaan diikuti dengan laju PDRB di semua sektor lapangan usaha. Seluruh lapangan usaha menghasilkan pertumbuhan dari sisi PDRB, termasuk untuk sektor-sektor yang mengalami penurunan serapan tenaga kerja seperti Sektor Pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan listrik. Penurunan tenaga kerja disertai peningkatan

PDRB dapat mengindikasikan efisiensi dalam proses produksi seiring dengan implementasi inovasi dalam proses produksi yang berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tidak seluruh provinsi menggunakan peningkatan produktivitas untuk investasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Provinsi Kalimantan Barat terlihat menginvestasikan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari rata-rata peningkatan IPM dalam empat tahun terakhir yang lebih tinggi daripada nasional. Sementara itu Provinsi Kalimantan

Grafik 4.9. Scatter Plot Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Regional Kalimantan Tahun 2020-2023



Sumber: BPS 2023 diolah

Selatan pertumbuhan rata-rata IPM berada di atas rata-rata nasional. Upaya peningkatan kualitas hidup pada tiga provinsi lain yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara masih berada di bawah nasional. Provinsi Kalimantan Barat selain memiliki rata-rata IPM tertinggi di tingkat regional Kalimantan juga memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam empat tahun terakhir dibandingkan empat provinsi lain.

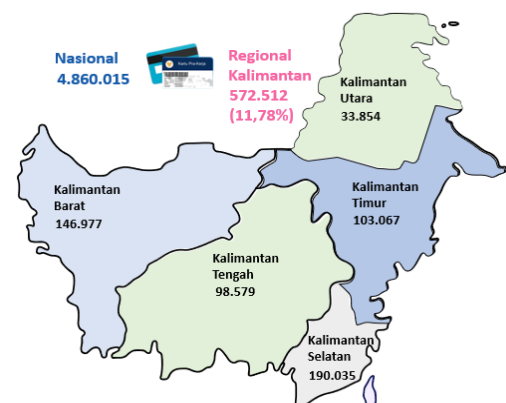
IV.3.B Dukungan APBN untuk Ketenagakerjaan

Pemerintah melalui APBN senantiasa memberikan dukungan pada sektor tenaga kerja melalui berbagai bauran program maupun kebijakan. Dukungan tersebut diberikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu program unggulan pemerintah adalah upaya peningkatan keahlian/pengetahuan masyarakat melalui Kartu Pra Kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berdaya saing.

Berdasarkan survei Sakernas periode Agustus 2024, terdapat 572.512 ribu orang penerima manfaat Program Kartu Pra Kerja, 11.668 diantaranya menerima manfaat pada tahun 2023. Adapun sebaran penerima Program Pra Kerja untuk setiap Provinsi dapat di lihat pada gambar 4.6. berikut.

Gambar 4.6. Sebaran Penerima Kartu Prakerja Regional Kalimantan Tahun 2020-2023



Sumber: BPS 2023 diolah

Penerima Program Kartu Pra Kerja terbanyak terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 190.035 atau 33,20 persen telah

menyelesaikan Program Kartu Pra Kerja. Program Kartu Pra Kerja telah memberikan manfaat meningkatkan pengetahuan/keahlian para penerima manfaat. Berdasarkan hasil survei sebanyak 463.271 orang atau 71,26 persen peserta merasa keahlian/pengetahuan pasca mengikuti program tersebut mengalami peningkatan.

Pemerintah mengalokasikan belanja Pemerintah Pusat/KL dan Transfer ke Daerah (TKD) untuk peningkatan ketenagakerjaan di Regional Kalimantan. Alokasi untuk belanja KL mencapai Rp704,46 miliar dan terealisasi Rp697,13 miliar (98,96 persen). Alokasi tertinggi pada padat karya untuk lapangan usaha sebesar Rp495,86 miliar dan terealisasi Rp494,55 miliar (99,54 persen). Padat karya tersebut berupa output untuk pemeliharaan, rehabilitasi jalan, jembatan, dan trotoar. Selain itu, alokasi yang cukup besar digunakan untuk Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani di Kalimantan mencapai Rp22,92 miliar dan terealisasi Rp22,69 miliar (95 persen). Alokasi tertinggi yang lain adalah Pengembangan Destinasi Wisata Mendukung Lapangan Usaha dengan alokasi Rp22,027 miliar dan terealisasi Rp22,015 miliar (99,95 persen).

Dari sisi belanja TKD, DAK Fisik yang dikluster untuk Pariwisata dialokasikan sebesar Rp12,65 miliar dan disalurkan Rp11,98 miliar (94,73 persen). Alokasi tersebut untuk penguatan industri kecil dan menengah, lingkungan hidup, pariwisata dan UMKM.

Pada kluster food estate dialokasikan sebesar Rp478,47 miliar dan disalurkan

Rp424,20 miliar (94,93 persen). Alokasi *food estate* tersebut khususnya pada pengembangan irigasi, jalan, kehutanan dan pertanian. Sedangkan DAK Fisik bidang pendidikan, khususnya sub bidang SMK dialokasikan sebesar Rp380,59 miliar dan disalurkan Rp363,97 miliar (95,63 persen).

Selain DAK Fisik, Pemerintah juga mengalokasikan DAK Non Fisik untuk mendukung ketenagakerjaan di Regional Kalimantan. Alokasi untuk fasilitas penanaman modal sebesar Rp29,39 miliar dan disalurkan sebesar Rp23,04 miliar (78,40 persen), pelayanan kepariwisataan sebesar Rp4,5 miliar dan disalurkan Rp4,24 miliar (93,80 persen). Selanjutnya, alokasi untuk Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp2 miliar dan disalurkan Rp1 miliar (50 persen) serta Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebesar Rp25,42 miliar dan disalurkan Rp22,59 miliar (88,88 persen). Jadi secara umum, kinerja realisasi belanja baik dari Belanja K/L termasuk DAK Fisik/Non fisik relatif tinggi di Regional Kalimantan.

IV. 4 REGIONAL SULAWESI

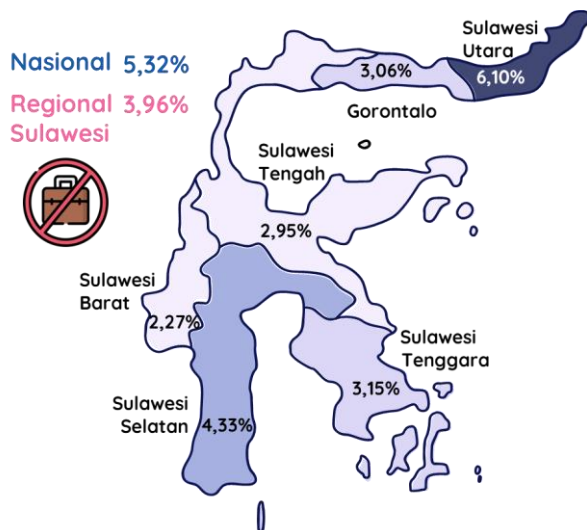
IV.4.A Kondisi Umum Ketenagakerjaan

TPT Regional Sulawesi pada tahun 2023 sebesar 3,96 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 412.848 orang.

Capaian tersebut lebih rendah daripada capaian nasional sebesar 5,32 persen. Berdasarkan provinsi TPT tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 6,10 persen, sedangkan terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,27 persen

yang juga menjadi TPT terendah untuk seluruh provinsi.

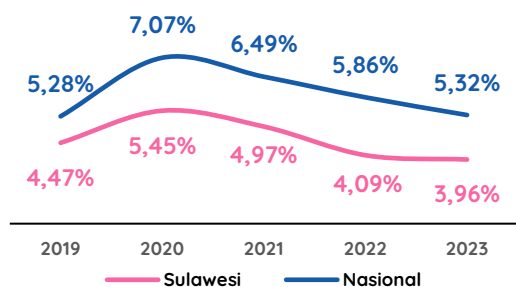
Gambar 4.7. TPT Regional Sulawesi Agustus Tahun 2023



Sumber: BPS 2023, diolah

Selaras dengan laju ketenagakerjaan nasional, laju ketenagakerjaan di Regional Sulawesi pasca Pandemi Covid-19 terus menunjukkan perbaikan kondisi yang tergambar dari penurunan angka tingkat pengangguran dalam empat tahun terakhir. Tingkat pengangguran Regional Sulawesi pada Agustus tahun 2023 turun 0,13 persen poin dibandingkan periode sebelumnya dan turun 1,49 persen poin sejak tahun 2020. Penurunan tersebut dikontibusi oleh proses pemulihan ekonomi yang semakin membaik, meskipun TPAK

Grafik 4.10. Laju Tingkat Pengangguran Regional Sulawesi Tahun 2019-2023



Sumber: BPS 2023

pada Agustus 2023 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,03 persen dari periode sebelumnya menjadi 67,31 persen.

Terlepas dari TPT yang tergolong rendah, struktur ketenagakerjaan masih didominasi oleh kelompok informal.

Tenaga kerja formal hanya memiliki distribusi sebesar 46,32 persen yang mengindikasikan mayoritas pekerjaan bukan pekerjaan yang memberikan nilai tambah pada suatu produk dan berkorelasi dengan upah yang rendah. Namun, meskipun sektor informal masih mendominasi, struktur ketenagakerjaan pasca pandemi Covid-19 terus menunjukkan perbaikan.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar, 34,81 persen, diikuti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Tabel 4.9. Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja Regional Sulawesi

Sektor LU	2019	2020	2021	2022	2023	Tren
A Pertanian ..	36.16%	38.94%	37.41%	37.41%	34.81%	↘
B Pertambangan ..	1.45%	1.38%	1.52%	1.52%	1.61%	↗
C Industri Pengolahan ..	8.64%	8.06%	8.65%	8.65%	9.21%	↗
D Pengadaan Listrik ..	0.39%	0.38%	0.31%	0.31%	0.32%	↗
E Pengadaan Air ..	0.29%	0.25%	0.23%	0.23%	0.21%	↘
F Konstruksi ..	6.42%	5.95%	5.85%	5.85%	6.73%	↗
G Perdagangan ..	17.09%	17.17%	17.46%	17.46%	17.12%	↗
H Transportasi ..	4.61%	4.35%	4.31%	4.31%	4.69%	↗
I Penyediaan Akmamin	3.93%	3.73%	4.28%	4.28%	5.05%	↗
J Informasi ..	0.54%	0.50%	0.59%	0.59%	0.56%	↗
K Jasa Keuangan ..	1.13%	0.94%	0.94%	0.94%	1.01%	↗
L Real Estat	0.14%	0.11%	0.10%	0.10%	0.22%	↗
M,N Jasa Perusahaan	0.91%	1.04%	1.02%	1.02%	2.03%	↗
O Administrasi Pemerintahan ..	7.26%	6.80%	6.67%	6.67%	5.67%	↘
P Jasa Pendidikan	6.00%	5.55%	5.63%	5.63%	5.71%	↗
Q Jasa Kesehatan ..	1.98%	1.95%	2.20%	2.20%	2.19%	↗
R,S,T,U Jasa Lainnya	3.07%	2.90%	2.83%	2.83%	2.85%	↗

Sumber: BPS 2023, diolah

Motor sebesar 17,12 persen. Sejak menjadi *buffer sector* pada saat pandemi Covid-19 melanda. Distribusi pada tahun 2023 menurun lebih rendah dibandingkan dengan distribusi pra Pandemi Covid-19. Tenaga

kerja mulai beralih ke Sektor lainnya terutama Sektor Industri Pengolahan, Jasa Perusahaan, dan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melakukan hilirisasi

Tabel 4.10. Laju Tenaga Kerja dan PDRB Regional Sulawesi Tahun 2019-2023

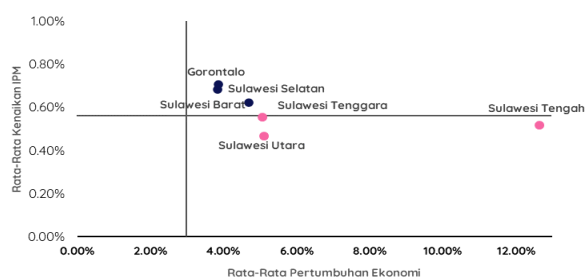
Sektor LU	Laju Tenaga Kerja	Laju PDRB
A Pertanian ..		
B Pertambangan ..		
C Industri Pengolahan ..		
D Pengadaan Listrik ..		
E Pengadaan Air ..		
F Konstruksi ..		
G Perdagangan ..		
H Transportasi ..		
I Penyediaan Akomamin		
J Informasi ..		
K Jasa Keuangan ..		
L Real Estat		
M,N Jasa Perusahaan		
O Administrasi Pemerintahan ..		
P Jasa Pendidikan		
Q Jasa Kesehatan ..		
R,S,T,U Jasa Lainnya		

Sumber: BPS 2023, diolah

industri pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pembangunan smelter.

Membaiknya kondisi ketenagakerjaan diikuti dengan laju PDRB di semua sektor lapangan usaha. Seluruh lapangan usaha menghasilkan pertumbuhan dari sisi PDRB,

Grafik 4.11. Scatter Plot Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Regional Sulawesi Tahun 2020-2023



Sumber: BPS 2023, diolah

termasuk untuk sektor-sektor yang mengalami penurunan serapan tenaga kerja seperti Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Penurunan tenaga kerja disertai peningkatan PDRB dapat mengindikasikan efisiensi dalam proses produksi seiring dengan implementasi inovasi dalam proses produksi yang berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tidak seluruh provinsi menggunakan peningkatan produktivitas untuk investasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Provinsi Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat terlihat menginvestasikan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari rata-rata peningkatan IPM dalam empat tahun terakhir yang lebih tinggi daripada nasional. Adapun

upaya peningkatan kualitas hidup pada tiga provinsi lain yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara masih berada di bawah nasional. Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam empat tahun terakhir perlu menjadi pusat perhatian sejalan dengan perbaikan kualitas hidup yang lebih lambat dibandingkan empat provinsi lain.

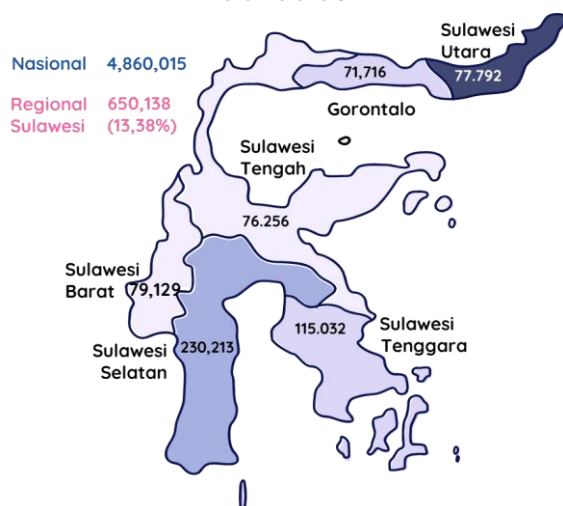
IV.4.B Dukungan APBN untuk Ketenagakerjaan

Pemerintah melalui APBN senantiasa memberikan dukungan pada sektor tenaga kerja melalui berbagai bauran program maupun kebijakan. Dukungan tersebut diberikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara yaitu memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu program unggulan pemerintah adalah upaya peningkatan keahlian/pengetahuan masyarakat melalui Kartu Pra Kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berdaya saing. Berdasarkan survei Sakernas periode Agustus 2024, terdapat 650.318 ribu orang penerima manfaat Program Kartu Pra Kerja, 14.235 diantaranya menerima manfaat pada tahun 2023. Adapun sebaran penerima Program Pra Kerja untuk setiap

Gambar 4.8. Sebaran Penerima Kartu Pra Kerja Regional Sulawesi Tahun 2020-2023



Sumber: BPS 2023, diolah

Provinsi dapat dilihat pada gambar 4.8.

Penerima Program Kartu Pra Kerja terbanyak terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan sejalan dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan Provinsi yang lain. Sebanyak 526.435 atau 80,97 persen telah menyelesaikan Program Kartu Pra Kerja. Program Kartu Pra Kerja telah memberikan manfaat meningkatkan pengetahuan/keahlian para penerima manfaat. Berdasarkan hasil survei sebanyak

463.271 orang atau 71,26 persen peserta merasa keahlian/pengetahuan pasca mengikuti program tersebut mengalami peningkatan.

Pemerintah turut mendukung peningkatan kondisi ketenagakerjaan melalui belanja PN. Melalui RKP tahun 2023, setidaknya terdapat dua belanja PN yang bertujuan langsung mendukung ketenagakerjaan, yaitu PN 1 dan PN 3.

Pada belanja PN 1 terdapat realisasi mendukung ketenagakerjaan sebesar Rp219,73 miliar dari alokasi sebesar Rp224,88 miliar atau 97,71 persen.

Realisasi terbesar terdapat pada sektor pariwisata sebesar Rp104,06 miliar dan pengembangan kawasan pertanian sebesar Rp63,52 miliar. Besarnya realisasi untuk sektor pariwisata sejalan dengan pengembangan kawasan destinasi wisata di Manado Likupang dengan realisasi sebesar Rp21,51 miliar untuk pengembangan kawasan 3,5 Hektar dan Wakatobi dengan realisasi sebesar Rp86,56 miliar untuk pengembangan kawasan 2,72 Hektar. Selebihnya realisasi sebesar Rp21,94 miliar untuk pengembangan destinasi wisata alam dan bangunan cagar budaya. Adapun pengembangan kawasan pertanian utamanya digunakan untuk pengembangan kawasan kedelai seluas 15.242 Hektar dengan realisasi sebesar Rp27,13 miliar, kawasan kakao seluas 1.399,70 Hektar dengan realisasi sebesar Rp11,15 miliar, dan kawasan padi kaya gizi (biofertilisasi) sebesar seluas 8.700 Hektar dengan realisasi Rp12,66 miliar serta kawasan padi non biofertilisasi seluas 1.950 Hektar dengan realisasi sebesar Rp2,90

miliar. Pengembangan kawasan wisata dan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja di sektor tersebut.

Selain penyediaan lapangan kerja, pemerintah turut menyiapkan SDM berdaya saing melalui pendidikan vokasi, perguruan tinggi, non vokasi dan perguruan tinggi, serta pelatihan untuk kelompok masyarakat. Total realisasi sebesar Rp3,86 miliar dari alokasi sebesar Rp4,01 miliar atau 96,14 persen. Realisasi terbesar ditujukan untuk mendukung sektor pariwisata dengan menyiapkan lima kelompok masyarakat untuk mendukung ekowisata (wisata alam, SAVE, dan bahari) sebesar Rp2,13 miliar. Pelatihan vokasi dan tenaga teknis sebesar Rp719,89 juta untuk mendukung sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Dukungan lain diberikan kepada PMI purna dan layanan penempatan PMI sebesar Rp410,36 miliar. Realisasi untuk pemberdayaan PMI purna dan keluarganya sebesar Rp370,27 juta untuk 120 orang, sedangkan layanan penempatan PMI terealisasi sebesar Rp40,09 juta untuk 1.016 orang. Adapun untuk tenaga kerja dalam negeri, pemerintah telah memberikan fasilitasi dan pembinaan untuk 999 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp598,40 juta.

UMKM dan sektor industri turut menjadi sasaran pemerintah dalam mendukung peningkatan kondisi ketenagakerjaan di Regional Sulawesi. Realisasi belanja pemerintah untuk mendukung ketenagakerjaan melalui pengembangan UMKM sebesar Rp1,61 miliar. Belanja tersebut digunakan untuk fasilitasi dan

pembinaan UMKM di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dan pendampingan untuk pemenuhan standar yang dilakukan oleh UPT. Adapun untuk sektor industri, belanja pemerintah digunakan untuk 460 industri atas pendampingan, penerapan sertifikasi, dan pengembangan produk serta pelatihan dan teknis produksi untuk 380 industri.

Dalam rangka mencapai iklim usaha yang sehat, pemerintah telah merealisasikan sebesar Rp416,52 miliar untuk pengawasan iklim usaha dan infrastruktur ketenagakerjaan sebesar Rp6,08 miliar. Pengawasan iklim usaha dilakukan melalui pengawasan kegiatan perdagangan untuk 50 lembaga, pengawasan 40 BDKT, dan 1.760 UTP.

Belanja pemerintah melalui PN 3 terealisasi sebesar Rp281,38 miliar dari alokasi sebesar Rp296,29 miliar atau 94,97 persen untuk menyiapkan SDM yang berdaya saing. Realisasi terbesar digunakan untuk penyiapan tenaga kerja lulusan vokasi sebesar Rp136,76 miliar untuk 20.121 orang siswa SMK dan mahasiswa. Penyiapan tenaga kerja lulusan SDM diarahkan untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan industri. Penyiapan tenaga kerja vokasi tersebut turut didukung belanja pemerintah untuk kesepakatan *linkmatch* dengan perusahaan dengan belanja sebesar Rp667,20 juta untuk 41 kesepakatan. Selain itu, terdapat penyiapan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dengan realisasi sebesar Rp86,33 miliar dari alokasi Rp93,65 miliar atau 92,18 persen untuk 16.312 orang.

Pemerintah turut merealisasikan belanja untuk pelatihan, pengembangan, serta sertifikasi tenaga kerja sebesar Rp50,44 miliar. Pengembangan kapasitas tenaga kerja ditujukan untuk peningkatan produktivitas dengan realisasi sebesar Rp1,77 miliar untuk 1.150 orang disertai pengukuran peningkatan produktivitas untuk 349 orang yang terealisasi sebesar Rp1,41 miliar. Pada sektor pertanian, terdapat penyiapan SDM yang menasar kelompok usia muda melalui program kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian (YESS) untuk 10.990 orang dan wirausahaan muda pertanian untuk 10 kelompok masyarakat. Sertifikasi tenaga kerja diberikan untuk sertifikasi yang mendukung pariwisata sejumlah 3.000 orang di Poltekpar Makassar, sertifikasi pertanian untuk 130 orang, dan sertifikasi bidang lainnya untuk 10.562 orang. Selain itu, terdapat empat kelompok masyarakat yang memperoleh dukungan penerapan ilmu pengetahuan atau teknologi pendidikan tinggi.

Pada belanja PN 3 juga terdapat dukungan infrastruktur ketenagakerjaan dengan realisasi sebesar Rp6,93 miliar dari alokasi Rp7,73 miliar atau 89,76 persen. Pemerintah telah menyiapkan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri untuk sepuluh *startup*, mencapai 205 kesepakatan untuk bimbingan peningkatan produktivitas, empat kegiatan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan bersama industri, dan peningkatan mutu lima lembaga pendidikan tinggi vokasi yang berstandar industri.

Program padat karya atas pelaksanaan kegiatan pemerintah turut mendukung penyediaan lapangan kerja di Regional Sulawesi. Terdapat pembangunan 3,93 km jalan dan pemeliharaan 6.160 km jalan, pembangunan 5.752,06 meter jembatan, dan pemeliharaan jembatan sepanjang 59.155,66 meter dilaksanakan dengan skema padat karya. Atas program tersebut telah terealisasi belanja sebesar Rp793,69 miliar dari alokasi Rp808,58 miliar atau 98,16 persen.

Selain melalui belanja pemerintah, dukungan ketenagakerjaan direalisasikan melalui TKD yaitu melalui instrumen DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik telah disalurkan sebesar Rp244,65 miliar dari alokasi Rp258,21 miliar atau 94,75 persen. Penyaluran DAK Fisik yang mendukung ketenagakerjaan ditujukan untuk kelompok *foodstate* dan pariwisata. Pada kelompok *foodstate* diberikan melalui bidang jalan dengan realisasi sebesar Rp102,60 miliar, sedangkan untuk kelompok pariwisata diberikan dukungan melalui bidang IKM, lingkungan hidup, pariwisata, dan UMKM dengan realisasi sebesar Rp142,05 miliar. Secara lebih spesifik penyaluran tersebut digunakan untuk mendukung belanja pemerintah PN 1. Dukungan melalui DAK Fisik turut diberikan untuk memperkuat penyiapan tenaga kerja vokasi SMK dengan realisasi sebesar Rp595,98 miliar. Adapun untuk penyaluran DAK Non Fisik ditujukan untuk mendukung belanja pemerintah PN 3. Penyaluran DAK Non Fisik mendukung ketenagakerjaan sebesar Rp113,72 miliar dari alokasi sebesar Rp121,12 miliar atau 93,89 persen. Penyaluran tersebut digunakan untuk dana fasilitasi penanaman

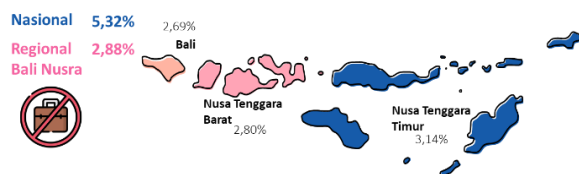
modal sebesar Rp39,81 miliar, layanan kepariwisataan sebesar Rp18,18 miliar, penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM sebesar Rp24,93 miliar, dan peningkatan kapasitas K-UMK sebesar Rp30,80 miliar.

IV.5 REGIONAL BALI NUSA TENGGARA

IV.5.A Kondisi Umum Ketenagakerjaan

TPT Regional Bali Nusra pada tahun 2023 sebesar 2,88 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 249.479 orang.

Gambar 4.9. TPT Regional Bali Nusra Tahun 2023

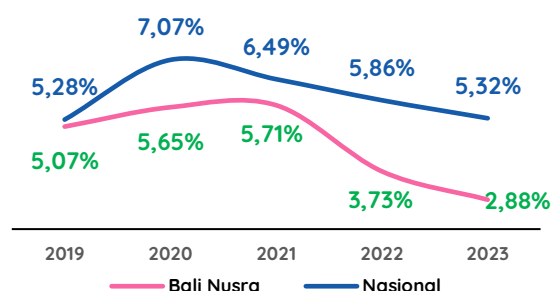


Sumber: BPS 2023, diolah

Capaian tersebut lebih rendah daripada capaian nasional sebesar 5,32 persen. Berdasarkan provinsi, TPT tertinggi terdapat di Provinsi NTT sebesar 3,14 persen, sedangkan terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar 2,69 persen yang juga menjadi TPT terendah untuk regional Bali Nusra. Capaian positif TPT Provinsi Bali didukung dengan membaiknya kondisi perekonomian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja terutama di wilayah perkotaan.

Pasca Pandemi Covid-19, laju ketenagakerjaan secara nasional menunjukkan capaian yang semakin membaik. Hal tersebut tergambar dari menurunnya tingkat pengangguran dalam dua tahun terakhir. Wilayah Bali yang bergantung pada sektor jasa pariwisata mulai bangkit dari kontraksi ekonomi yang cukup dalam pada masa pandemi. Tingkat

Grafik 4.12. Laju Tingkat Pengangguran Regional Bali Nusra Tahun 2019-2023



Sumber: BPS 2023

pengangguran Regional Bali Nusra pada Agustus tahun 2023 turun 0,85 persen poin dibandingkan periode sebelumnya dan turun 2,19 persen poin sejak tahun 2019. Penurunan tersebut dikontibusi oleh proses pemulihan ekonomi yang semakin membaik, meskipun dengan TPAK yang cukup stabil di angka 75,28 pada tahun 2022 dan 2023.

TPT pada Regional Bali Nusra dapat dikategorikan pada level rendah, namun dari struktur ketenagakerjaan masih didominasi oleh kelompok informal.

Tabel 4.11. Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja Regional Bali Nusra

Sektor LU	2019	2020	2021	2022	2023	Tren
A Pertanian ..	32,6%	36,77%	35,61%	35,16%	34,34%	
B Pertambangan ..	1,0%	0,81%	0,89%	0,89%	0,71%	
C Industri Pengolahan ..	12,8%	12,01%	12,80%	12,28%	12,09%	
D Pengadaan Listrik ..	0,2%	0,19%	0,15%	0,18%	0,22%	
E Pengadaan Air ..	0,3%	0,31%	0,29%	0,26%	0,41%	
F Konstruksi ..	6,9%	5,86%	5,89%	5,67%	5,66%	
G Perdagangan ..	16,8%	17,30%	17,70%	17,89%	17,00%	
H Transportasi ..	3,9%	3,45%	3,23%	3,52%	3,96%	
I Penyediaan Akomamin	6,3%	4,97%	5,23%	5,83%	6,72%	
J Informasi ..	0,3%	0,43%	0,46%	0,43%	0,41%	
K Jasa Keuangan ..	1,6%	1,40%	1,42%	1,41%	1,42%	
L Real Estat	0,1%	0,07%	0,08%	0,08%	0,12%	
M,N Jasa Perusahaan	1,2%	1,02%	0,89%	1,22%	1,29%	
O Administrasi Pemerin	4,9%	4,57%	4,84%	4,69%	4,64%	
P Jasa Pendidikan	5,5%	5,24%	5,38%	5,19%	5,83%	
Q Jasa Kesehatan ..	1,8%	1,87%	1,85%	1,86%	1,74%	
R,S,T,U Jasa Lainnya	3,7%	3,72%	3,30%	3,44%	3,43%	

Sumber: BPS 2023, diolah

Tenaga kerja formal hanya memiliki distribusi sebesar 31,9 persen yang mengindikasikan mayoritas pekerjaan bukan pekerjaan yang memberikan nilai tambah pada suatu

produk dan berkorelasi dengan upah yang rendah. Dengan upah yang rendah, maka kelompok informal termasuk bagian dari kelompok yang layak untuk dibantu karena sebagai kelompok pekerja yang rentan. Di sisi lain, sektor informal menunjukkan dominasi dalam struktur ketenagakerjaan namun pasca pandemi Covid-19, struktur ketenagakerjaan terus menuju perbaikan yang semakin baik.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar mencapai 34,34 persen. Sektor ini menjadi backbone di struktur perekonomian Regional Bali Nusra. Sektor tertinggi selanjutnya adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,99 persen. Secara perlahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan penurunan pasca Pandemi Covid-19. Distribusi pada tahun 2023 menurun lebih rendah dibandingkan dengan distribusi pra Pandemi Covid-19. Tenaga kerja mulai beralih ke Sektor lainnya terutama Sektor Industri Pengolahan, Jasa Perusahaan, dan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum. Hal ini sejalan dengan lapangan usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Data BPS menunjukkan 45,16 persen wisatawan mancanegara ke Indonesia masuk melalui pintu di Provinsi Bali pada Januari-Desember 2024. Kondisi tersebut merupakan peluang bagi Provinsi NTB dan NTT agar dapat memanfaatkan wisatawan melanjutkan perjalanan ke wilayahnya. Dengan demikian, kunjungan wisatawan dapat meningkatkan pendapatan masing-masing Pemda.

Capaian positif kondisi ketenagakerjaan diikuti dengan laju PDRB di semua sektor lapangan usaha pada Regional Bali Nusra. Seluruh lapangan usaha menghasilkan pertumbuhan dari sisi PDRB, termasuk untuk sektor-sektor yang mengalami penurunan serapan tenaga kerja seperti Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang diiringi oleh peningkatan PDRB dapat menunjukkan

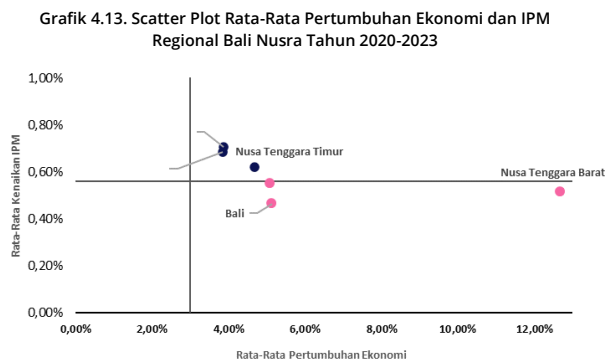
Tabel 4.12. Laju Tenaga Kerja dan PDRB Regional Bali Nusra Tahun 2019-2023

Sektor LU	Laju Tenaga Kerja	Laju PDRB
A Pertanian ..		
B Pertambangan ..		
C Industri Pengolahan ..		
D Pengadaan Listrik ..		
E Pengadaan Air ..		
F Konstruksi ..		
G Perdagangan ..		
H Transportasi ..		
I Penyediaan Akomamin		
J Informasi ..		
K Jasa Keuangan ..		
L Real Estat		
M,N Jasa Perusahaan		
O Administrasi Pemerintahan ..		
P Jasa Pendidikan		
Q Jasa Kesehatan ..		
R,S,T,U Jasa Lainnya		

Sumber: BPS 2023, diolah

adanya efisiensi dalam proses produksi barang dan jasa serta berbagai inovasi dalam proses tersebut. Efisiensi ini berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, tidak semua Pemerintah Daerah sepenuhnya memanfaatkan peningkatan produktivitas ini untuk investasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Provinsi Bali terlihat menginvestasikan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari rata-rata peningkatan IPM dalam empat tahun terakhir yang lebih tinggi daripada nasional.



Sumber: BPS 2023, diolah

Adapun upaya peningkatan kualitas hidup pada dua provinsi lain yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah nasional. Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat masuk dalam kategori tinggi. Meskipun mengalami kenaikan secara perlahan, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam kategori sedang. Kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menjadi perhatian baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bersama dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan melalui alokasi belanja KL maupun belanja TKD.

IV.5.B Dukungan APBN untuk Ketenagakerjaan

Pemerintah secara konsisten mendukung sektor tenaga kerja melalui berbagai program dan kebijakan yang didanai oleh APBN. Dukungan ini bertujuan untuk mencapai tujuan nasional yaitu

meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja dilakukan melalui program Kartu Pra Kerja. Program ini memberikan keleluasaan bagi peserta untuk mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring. Berdasarkan survei Sakernas periode Agustus 2024, terdapat 360.840 orang penerima manfaat Program Kartu Pra Kerja, 11.114 diantaranya menerima manfaat pada tahun 2023. Adapun sebaran penerima Program Pra Kerja untuk setiap Provinsi dapat dilihat pada gambar 4.10.



Sumber: BPS 2023, diolah

Penerima Program Kartu Pra Kerja terbanyak terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejalan dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan Provinsi yang lain. Sebanyak 293.897 atau 81,45 persen telah menyelesaikan Program Kartu Pra Kerja. Program Kartu Pra Kerja telah memberikan manfaat meningkatkan pengetahuan/keahlian para penerima manfaat. Berdasarkan hasil survei sebanyak 255.659 orang atau 70,85 persen peserta merasa keahlian/pengetahuan pasca mengikuti program tersebut mengalami peningkatan.

Pemerintah mengalokasikan belanja Pemerintah Pusat/KL dan Transfer ke Daerah (TKD) untuk peningkatan ketenagakerjaan di Regional Bali Nusra. Alokasi pada padat karya untuk lapangan usaha mencapai Rp356,9 miliar dan penyerapan 99,6 persen. Alokasi untuk padat karya khususnya digunakan pada preservasi pemeliharaan rutin jalan, rekonstruksi jalan, jembatan, drainase dan infrastruktur jalan lainnya.

Alokasi belanja untuk sektor ketenagakerjaan khususnya pariwisata mencapai Rp112,9 miliar dengan tingkat penyerapan sebesar 99,5 persen. Alokasi terbesar untuk penataan bangunan kawasan destinasi wisata sebesar Rp103,2 miliar. Selain itu, belanja KL terbesar kedua untuk mendukung pariwisata pada output publikasi produk wisata dan kegiatan di Kawasan Badan Otorita Labuan Bajo Flores sebesar Rp3,7 miliar.

Dari sisi belanja TKD, DAK Fisik yang di cluster untuk Pariwisata dialokasikan sebesar Rp337,7 miliar dan disalurkan Rp312,2 miliar (92,4 persen). Alokasi tersebut untuk industri kecil dan menengah, lingkungan hidup, pariwisata dan perdagangan dan UMKM.

Pada cluster food estate dialokasikan sebesar Rp609,3 miliar dan disalurkan Rp585,4 miliar (96,1 persen). Alokasi food estate tersebut khususnya pada pengembangan irigasi, jalan, kehutanan dan pertanian. Sedangkan DAK Fisik bidang pendidikan, khususnya sub bidang SMK dialokasikan sebesar Rp239,5 miliar dan disalurkan Rp237,2 miliar (99 persen).

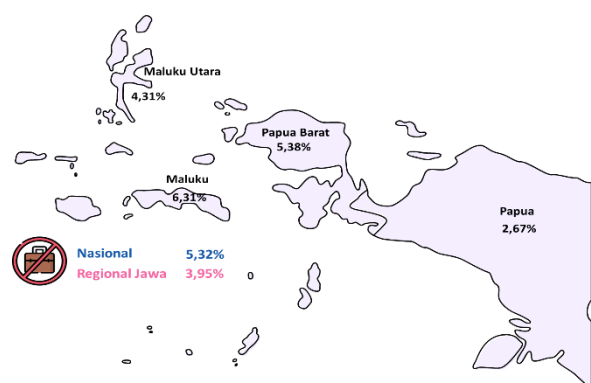
Selain DAK Fisik, Pemerintah juga mengalokasikan DAK Non Fisik untuk mendukung ketenagakerjaan di Regional Bali Nusra. Alokasi untuk fasilitasi penanaman modal sebesar Rp21,6 miliar dan disalurkan sebesar Rp18,8 miliar (87 persen), pelayanan kepariwisataan sebesar Rp15,7 miliar dan disalurkan Rp14,6 miliar (92,9 persen). Selanjutnya, alokasi untuk Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp31,3 miliar dan disalurkan Rp30,7 miliar (98,2 persen) serta Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebesar Rp26 miliar dan disalurkan Rp24,9 miliar (95,7 persen). Jadi secara umum, realisasi belanja baik dari Belanja K/L termasuk DAK Fisik/Non fisik relatif tinggi di Regional Bali Nusra.

IV. REGIONAL MALUKU PAPUA

IV.6.A Kondisi Umum Ketenagakerjaan

TPT Regional Maluku Papua pada tahun 2023 sebesar 3,95 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 1.124.150 orang.

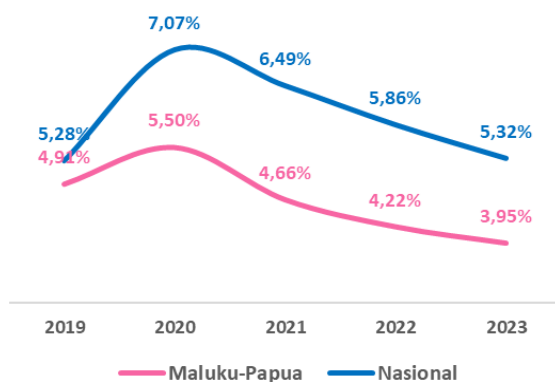
Gambar 4.11. TPT Regional Maluku-Papua Tahun 2023



Sumber: BPS 2023, diolah

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan data nasional sebesar 5,32 persen. Berdasarkan persentase TPT, Maluku merupakan provinsi dengan persentase

Grafik 4.14. Laju Tingkat Pengangguran Regional Maluku-Papua Tahun 2019-2023



Sumber: BPS 2023, diolah

tertinggi yakni 6,31 persen dan Papua menjadi provinsi dengan persentase terendah yakni 2,67 persen. Meskipun TPT di Papua termasuk paling rendah secara persentase, namun jumlah pengangguran paling tinggi dibandingkan empat provinsi lainnya yakni sebanyak 381.313 orang.

Selaras dengan laju ketenagakerjaan nasional, laju ketenagakerjaan di Regional Maluku Papua pasca Pandemi Covid-19 terus menunjukkan perbaikan kondisi yang tergambar dari penurunan angka tingkat pengangguran pasca pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan nasional, tingkat pengangguran di regional Maluku Papua menunjukkan tren yang jauh lebih rendah. Tingkat pengangguran Regional Maluku Papua pada Agustus tahun 2023 turun 0,27 persen poin dibandingkan periode sebelumnya dan turun 1,55 persen poin sejak tahun 2020. Penurunan tersebut dikontribusi oleh proses pemulihan ekonomi yang semakin membaik meskipun TPAK pada Agustus 2023 cenderung stagnan di angka 71,48 persen, sama seperti periode sebelumnya, bahkan menurun dibandingkan tahun 2021.

Namun, TPT yang tergolong rendah tersebut belum mencerminkan kualitas ketenagakerjaan yang lebih baik.

Struktur ketenagakerjaan di regional Maluku Papua 75,01 persen didominasi oleh kelompok informal. Tahun 2023, tenaga

Tabel 4.13. Perkembangan Distribusi Tenaga Kerja Regional Maluku-Papua

Sektor LU	2019	2020	2021	2022	2023	Tren
A Pertanian ..	52,30%	51,16%	50,01%	52,66%	51,06%	
B Pertambangan ..	1,31%	1,24%	1,29%	1,52%	1,27%	
C Industri Pengolahan ..	4,30%	5,08%	6,29%	6,66%	7,08%	
D Pengadaan Listrik ..	0,26%	0,24%	0,23%	0,19%	0,22%	
E Pengadaan Air ..	0,14%	0,09%	0,18%	0,13%	0,10%	
F Konstruksi ..	4,10%	3,81%	3,81%	3,58%	3,39%	
G Perdagangan ..	10,95%	11,74%	11,88%	10,01%	13,11%	
H Transportasi ..	4,99%	4,73%	4,74%	5,04%	4,89%	
I Penyediaan Akomodasi dan Makan ..	1,98%	2,36%	2,23%	2,59%	2,47%	
J Informasi dan Komunikasi ..	0,36%	0,33%	0,30%	0,25%	0,26%	
K Jasa Keuangan ..	0,90%	0,72%	0,68%	0,53%	0,55%	
L Real Estat	0,05%	0,08%	0,07%	0,09%	0,16%	
M, N Jasa Perusahaan	0,66%	0,66%	0,89%	0,72%	2,13%	
O Administrasi Pemerintahan	9,17%	8,86%	8,85%	8,03%	5,79%	
P Jasa Pendidikan	4,89%	5,07%	4,88%	4,53%	4,14%	
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,66%	1,70%	1,71%	1,66%	1,55%	
R, S, T, U Jasa Lainnya	1,97%	2,13%	1,96%	1,81%	1,84%	

Sumber: BPS 2023, diolah

kerja formal hanya memiliki proporsi sebesar 24,99 persen yang mengindikasikan bahwa mayoritas pekerjaan bukan pekerjaan yang memberikan nilai tambah pada suatu produk dan memiliki korelasi dengan upah yang rendah. Provinsi Papua merupakan daerah dengan tingkat pekerja formal paling rendah dibandingkan tiga daerah lainnya yakni hanya 15,57 persen.

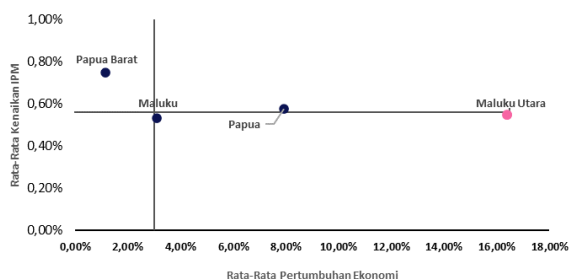
Jumlah pekerja informal tersebut terkonsentrasi di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang ditunjukkan dengan serapan tenaga kerja yang sangat tinggi di sektor tersebut yakni mencapai 51,06 persen pada tahun 2023. Berikutnya, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar kedua, yakni 13,11 persen, diikuti Sektor Industri

Pengolahan sebesar 7,08 persen pada tahun yang sama.

Setelah pandemi Covid-19, terjadi *shifting* tenaga kerja terutama pada sektor Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Real Estate dan Jasa Perusahaan yang mengalami kenaikan proporsi jumlah tenaga kerja. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melakukan hilirisasi industri pertambangan nikel di Provinsi Maluku Utara dengan pembangunan *smelter*.

Membaiknya kondisi ketenagakerjaan diikuti dengan laju PDRB di semua sektor lapangan usaha. Seluruh lapangan usaha menghasilkan pertumbuhan dari sisi PDRB, termasuk untuk sektor-sektor yang mengalami penurunan serapan tenaga kerja seperti Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Penurunan tenaga kerja disertai peningkatan PDRB dapat mengindikasikan efisiensi dalam proses produksi seiring dengan implementasi inovasi dalam proses produksi yang berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tidak seluruh provinsi menggunakan peningkatan produktivitas untuk investasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Grafik 4.15. Scatter Plot Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Regional Maluku-Papua Tahun 2020-2023



Sumber: BPS 2023, diolah

Provinsi Papua Barat lebih banyak memfokuskan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kualitas hidup

Tabel 4.14. Laju Tenaga Kerja dan PDRB Regional Maluku-Papua Tahun 2019-2023

Sektor LU	Laju Tenaga Kerja	Laju PDRB
A Pertanian ..		
B Pertambangan ..		
C Industri Pengolahan ..		
D Pengadaan Listrik ..		
E Pengadaan Air ..		
F Konstruksi ..		
G Perdagangan ..		
H Transportasi ..		
I Penyediaan Akomamin		
J Informasi ..		
K Jasa Keuangan ..		
L Real Estat		
M,N Jasa Perusahaan		
O Administrasi Pemerintahan ..		
P Jasa Pendidikan		
Q Jasa Kesehatan ..		
R,S,T,U Jasa Lainnya		

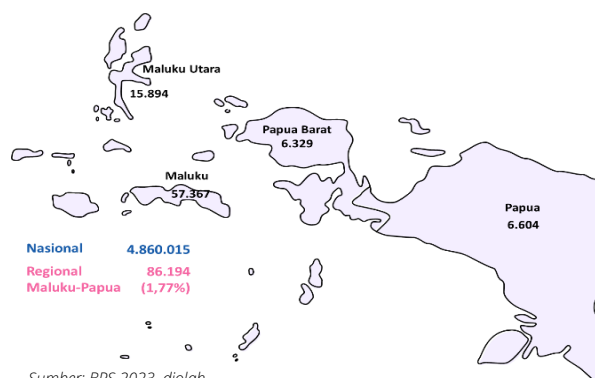
Sumber: BPS 2023, diolah

masyarakat yang tercermin dari rata-rata peningkatan IPM dalam empat tahun terakhir yang lebih tinggi daripada nasional, meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional. Sebaliknya, Provinsi Papua dan Maluku Utara dengan pertumbuhan ekonomi jauh di atas rata-rata nasional, memiliki pertumbuhan IPM yang cenderung mendekati angka nasional. Kurang linearnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut terhadap pertumbuhan IPM perlu menjadi perhatian pemerintah di masing-masing daerah.

IV.6.B Dukungan APBN untuk Ketenagakerjaan

Mengacu pada amanat konstitusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seluruh potensi sumber daya negara wajib

Gambar 4.12. Sebaran Penerima Kartu Pra Kerja Regional Maluku-Papua Tahun 2020-2023



Sumber: BPS 2023, diolah

dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam upaya mewujudkan tujuan mulia tersebut, APBN diarahkan untuk mendukung berbagai aspek kesejahteraan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja. **Dukungan pemerintah untuk ketenagakerjaan melalui APBN disalurkan baik melalui belanja pemerintah pusat dalam hal ini belanja K/L dan BUN maupun melalui TKD pada DAK Fisik dan DAK Nonfisik.**

Belanja K/L untuk mendukung tenaga kerja di regional Maluku Papua terdapat di beberapa K/L dengan total anggaran mencapai Rp747,3 miliar dengan tingkat realisasi mencapai 94,2 persen atau terserap sebesar Rp 704,2 miliar. Alokasi belanja K/L di regional Maluku Papua ini lebih tinggi dibandingkan regional Kalimantan dan Bali Nusa Tenggara. Anggaran terbesar belanja K/L yang mendukung tenaga kerja di regional Maluku Papua berupa proyek padat karya untuk lapangan usaha dengan alokasi Rp524,7 miliar dengan realisasi Rp514,5 miliar (98,0 persen). Proyek padat karya tersebut sebagian besar terdapat pada kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional khususnya pada pengerjaan jalan dan jembatan seperti

pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penanganan drainase trotoar, dan fasilitas keselamatan jalan.

alokasi terbesar kedua digunakan untuk penyiapan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja di antaranya untuk: (1) penyiapan tenaga kerja lulusan vokasi, lulusan pelatihan berbasis teknologi, lulusan non vokasi dan perguruan tinggi; (2) penyiapan SDM pertanian dan pariwisata; (3) pendamping tenaga kerja dan UMKM; (4) pengembangan kapasitas tenaga kerja; dan (5) sertifikasi tenaga kerja. Anggaran untuk peningkatan kualitas SDM tersebut dialokasikan sebesar Rp102,1 miliar dengan realisasi hanya tercapai Rp72,8 miliar (71,3 persen).

Berikutnya, alokasi terbesar ketiga digunakan untuk pengembangan kawasan pertanian sebesar Rp65,2 miliar dengan realisasi Rp62,6 miliar (96,0 persen). Sebagian besar anggaran tersebut (85,4 persen) difokuskan pada pengembangan kawasan tanaman rempah dan tanaman tahunan seperti pala, vanili, kopi, kakao, kelapa, sagu, jambu mete. Sisanya untuk pengembangan kawasan padi, durian, kelengkeng, cabai, bawang, jahe dan ubi jalar.

Selanjutnya, anggaran belanja K/L digunakan juga untuk pengembangan destinasi wisata sebesar Rp 43,4 miliar dengan tingkat realisasi mencapai 100 persen dan untuk infrastruktur ketenagakerjaan, pariwisata, industri, dan wirausaha sebesar Rp10,4 miliar dengan realisasi sebesar Rp9,6 miliar (91,9 persen).

Belanja selanjutnya yang mendukung tenaga kerja adalah belanja BUN untuk program Kartu Pra Kerja. Program Kartu

Pra Kerja merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keahlian atau pengetahuan agar tenaga kerja Indonesia mampu berdaya saing. Survei Sakernas periode Agustus 2024 mencatatkan bahwa terdapat 86.194 ribu orang penerima manfaat Program Kartu Pra Kerja di regional Maluku Papua dalam kurun waktu 2020-2023. Tahun 2023, penerima Kartu Pra kerja mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya 37.939 orang pada tahun 2020 menjadi 1.150 orang, bahkan Papua tidak lagi tercatat menerima Kartu Pra Kerja. Penerima Program Kartu Pra Kerja terbanyak terdapat di Provinsi Maluku dengan proporsi 66,55 persen dibandingkan tiga provinsi lainnya. Sedangkan Papua dengan jumlah penduduk 2,3 kali lebih banyak dari Maluku hanya menerima 7,66 persen Kartu Pra Kerja.

Dari 86.194 penerima Kartu Pra Kerja, 80,02 persen telah menyelesaikan Program Kartu Pra Kerja. Program Kartu Pra Kerja telah memberikan manfaat meningkatkan pengetahuan/keahlian para penerima manfaat. Berdasarkan hasil survei sebanyak 56.266 orang atau 65,28 persen peserta merasa keahlian/pengetahuan pasca mengikuti program tersebut mengalami peningkatan.

Dukungan pemerintah untuk ketenagakerjaan melalui TKD di antaranya disalurkan melalui DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Alokasi anggaran DAK fisik yang mendukung ketenagakerjaan di regional Maluku Papua adalah sebesar Rp966,5 miliar dengan realisasi penyaluran sebesar Rp907,2 miliar (93,9 persen).

Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan pariwisata, *food estate* dan SMK vokasi. Anggaran *food estate* melingkupi bidang jalan, irigasi, kehutanan dan pertanian yang dialokasikan sebesar Rp410,5 miliar dan tersalur sebesar Rp381,4 miliar (92,9 persen). Pengembangan pariwisata di regional Maluku Papua difokuskan untuk pengembangan daerah destinasi pariwisata, pengembangan industri kecil menengah serta untuk UMKM dan lingkungan hidup yang dialokasikan sebesar Rp167 miliar dengan realisasi penyaluran Rp145,6 miliar (87,0 persen). Sedangkan untuk SMK Vokasi dianggarkan sebesar Rp388,6 miliar dengan realisasi penyaluran mencapai Rp380,1 miliar (97,8 persen).

Dukungan DAK Non Fisik untuk ketenagakerjaan di Regional Jawa dialokasi sebesar Rp99,3 miliar dengan realisasi Rp89,6 miliar (90,3 persen).

Anggaran tersebut digunakan untuk fasilitasi penanaman modal, pelayanan kepariwisataan, penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah dan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil. Alokasi untuk fasilitasi penanaman modal sebesar Rp33,7 miliar dengan penyaluran sebesar Rp30,6 miliar (90,7 persen). Alokasi untuk pelayanan kepariwisataan sebesar Rp19,9 miliar dan tersalur sebesar Rp18,3 miliar (92,0 persen). Selanjutnya, alokasi untuk penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah sebesar Rp29,0 miliar dengan realisasi penyaluran Rp26,3 miliar (26,3 persen) serta peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil sebesar Rp16,6 miliar dengan penyaluran sebesar Rp14,4 miliar (86,3 persen).



V. SIMPULAN DAN SARAN

IV. Simpulan dan Rekomendasi

IV.1 SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan umum dan analisis yang telah diulas pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2023 mampu menunjukkan pemulihan dan tumbuh secara positif di tengah kondisi pelemahan global. Pada tahun 2023, Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,05 persen (*c-to-c*), namun capaian pertumbuhan tersebut lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen (*c-to-c*). Capaian tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan pada tahun 2022 hingga 2023 sebesar 5,18 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung dengan capaian positif perekonomian yang hamper terjadi di seluruh daerah. Pertumbuhan tertinggi terjadi di provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur yang mencatatkan pertumbuhan tahun 2023 (*c-to-c*) berturut-turut sebesar 20,49 persen, 11,91 persen, dan 6,22 persen. Sementara itu, terdapat provinsi dengan pertumbuhan paling rendah yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat dengan capaian sebesar 1,80 persen 2023 (*c-to-c*).
2. Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2023, menghasilkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2023 mencapai Rp20.892,4 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar Rp19.146,7 triliun. PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta, sehingga Indonesia masih masuk kedalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (*upper midle income country*). Perekonomian nasional terus pulih sejalan dengan terkendalnya pandemi Covid-19, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan pemulihan perekonomian global. Kinerja ekonomi tahun 2024 diperkirakan tetap meningkat dengan melanjutkan tren positif yang terjadi di 2023. Keberhasilan penanganan dan pengendalian pandemi serta peredaman tekanan ekonomi global menjadi kunci untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi atas pandemi Covid19 di Indonesia

semakin terkendali seiring kasus harian yang mendekati nihil dan hasil survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 99 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19 serta dengan adanya kebijakan peralihan dari masa pandemi menjadi endemi.

Momentum perbaikan pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga meski di tengah gejolak tantangan global saat ini melalui perbaikan indikator pada berbagai sektor. Salah satu sektor yang menunjukkan perbaikan signifikan yakni konsumsi dan investasi yang ditandai dengan menguatnya daya beli masyarakat.

Capaian positif juga turut ditunjukkan sektor eksternal yang ditandai dengan surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan meski mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, serta terjaganya cadangan devisa dan rasio utang pada level aman.

3. Sejalan dengan perekonomian yang mengalami peningkatan, indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan, diantaranya:
 - a. Angka IPM menunjukkan peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan dari 72,91 menjadi 73,55.
 - b. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,57 persen menjadi sebesar 9,36 persen.
 - c. Tingkat ketimpangan berada dalam posisi 0,381.
 - d. Tingkat pengangguran turut mengalami penurunan dari periode

yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,86 persen menjadi sebesar 5,32 persen.

4. Perbaikan kondisi perekonomian juga turut meningkatkan capaian pendapatan negara. Pendapatan Negara tumbuh sebesar 5,62 persen dari sebesar Rp2.635,84 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp2.783,93 triliun pada tahun 2023. Realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2023 yang ditetapkan pada Perpres Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp2.634,15 triliun (105,69 persen) dan pada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 (APBN 2023) sebesar 2.462,61 triliun (113,05 persen).

Kontribusi komponen penerimaan perpajakan terhadap Pendapatan Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 lebih besar dibandingkan kontribusi komponen Hibah meskipun kontribusi komponen Hibah mengalami tren peningkatan.

Realisasi Penerimaan Perpajakan pada tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,88 persen dari sebesar Rp2.034,55 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp2.154,21 triliun pada tahun 2023. Sedangkan, komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat tumbuh sebesar 2,84 persen dari sebesar Rp595,59 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp612,54 triliun pada tahun 2023.

Belanja Negara pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan. Realisasi Belanja Negara pada tahun 2023 tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,81 persen dari sebesar

Rp3.096,26 triliun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp3.121,22 triliun pada tahun 2023.

Peningkatan realisasi belanja sebagian besar berasal dari kenaikan belanja pemerintah pusat yaitu dari sebesar Rp2.239,79 triliun atau 71,76 persen dari realisasi Belanja Negara tahun 2023. Realisasi Belanja Pemerintah terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp1.152,23 triliun dan Belanja Non K/L sebesar Rp1.087,56 triliun. Realisasi belanja K/L antara lain digunakan untuk penebalan bansos, percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN, dan persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Sementara belanja non K/L antara lain untuk subsidi dan kompensasi energi. Belanja APBN telah menjalankan peran sebagai instrumen *countercyclical* yang dikelola secara pruden, sehingga dapat menjaga perekonomian dari potensi pelemahan yang dalam dengan risiko yang tetap terkendali.

Realisasi defisit APBN tahun 2023 sebesar Rp337,29 triliun atau mencapai 1,61 persen dari PDB. Capaian tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu defisit APBN tahun 2022 sebesar Rp460,42 triliun atau mencapai 2,35 persen dari PDB. Realisasi defisit tahun 2023 lebih rendah dari target defisit pada Perpres Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp479,9 triliun (2,27 persen dari PDB) dan pada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 (APBN 2023) sebesar Rp598,2 triliun (2,84 persen dari PDB) seiring dengan realisasi penerimaan

perpajakan dan PNPB yang melampaui target.

Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023 menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan realisasi defisit di bawah 3 persen sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2020. Selama tahun 2023, APBN berhasil menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat, mendukung gerak dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN telah berperan sebagai *shock absorber* dalam upaya meredam dampak gejolak perekonomian global. Peran APBN sebagai *shock absorber* akan terus dioptimalkan dalam menghadapi tantangan di masa depan dan mendukung transformasi ekonomi, serta instrumen mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat defisit, pada tahun 2023 terdapat surplus keseimbangan primer sebesar Rp102,59 triliun. Surplus keseimbangan primer pada tahun 2023 ini adalah surplus keseimbangan primer pertama kalinya sejak tahun 2012.

5. Kinerja APBD tahun 2023 masih mengalami peningkatan dari sisi pendapatan daerah, target pendapatan APBD 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp69,73 triliun (6,00 persen). Selaras dengan kenaikan target pendapatan, realisasi pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp97,25 triliun (8,39 persen, *yoy*). Dalam kurun waktu 2021 - 2023, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi

terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Target pendapatan mengalami peningkatan, baik di komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,10 persen dari Rp334,35 triliun menjadi Rp358,09 triliun, maupun pada komponen Pendapatan Transfer sebesar 6,46 persen dari Rp803,57 triliun menjadi Rp855,45 triliun. Sebaliknya, Lain-lain Pendapatan yang Sah (LLPD) mengalami penurunan sebesar 27,80 persen dari Rp24,04 triliun menjadi Rp17,36 triliun.

Sementara itu, dari sisi belanja, alokasi pagu belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp66,51 triliun (5,41 persen), serta peningkatan realisasi belanja daerah sebesar Rp71,69 triliun (6,01 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tercatat sebesar Rp1.263,87 triliun atau 97,44 persen dari target belanja yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran. Persentase capaian belanja ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun lalu (96,88 persen). Peningkatan realisasi belanja tersebut seiring dengan program pemulihan ekonomi daerah, penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan komposisi, belanja operasi merupakan jenis belanja APBD 2023 terbesar dengan realisasi mencapai

Rp854 triliun atau 67,57 persen dari seluruh belanja. Belanja operasi didominasi oleh pembayaran belanja pegawai pada hampir seluruh regional, kecuali Regional Kalimantan dan Regional Maluku-Papua yang didominasi oleh belanja barang dan jasa. Realisasi belanja pegawai menunjukkan peningkatan sebesar 0,59 persen, yaitu sebesar Rp387,16 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp389,46 triliun pada tahun 2023. Regional Jawa menempati peringkat teratas dengan besaran belanja pegawai sebesar Rp158,01 triliun atau 40,57 persen secara nasional.

Realisasi defisit APBD Tahun 2023 sebesar Rp7,44 triliun. Nilai defisit tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp33,00 triliun di Tahun 2022. Defisit anggaran tahun 2023 dibiayai terutama melalui penggunaan SiLPA. Adapun pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp98,35 triliun, difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terutama digunakan untuk membiayai keberlanjutan penanganan pandemi Covid-19, seperti pemulihan ekonomi daerah, penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persentase SiLPA mengalami pertumbuhan sebesar 23,14 persen, dari semula Rp73,82 triliun di 2022 menjadi Rp90,91 triliun di tahun 2023.

6. Harmonisasi belanja pusat dan daerah terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Dalam UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu pilarnya adalah harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah merupakan hal yang penting di tengah naiknya belanja negara setiap tahunnya. Kenaikan alokasi tersebut perlu diiringi dengan peningkatan akuntabilitas, perbaikan tata kelola serta harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip value for money.

Aktivitas money sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan DAK Fisik dilakukan terhadap 5 (lima) bidang yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran, yaitu bidang Kesehatan dan KB, bidang Pertanian, bidang Pendidikan, Bidang Jalan, dan Bidang Transportasi Pedesaan.

Secara nasional, anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik tahun 2023 teridentifikasi sebesar Rp146.364,96 miliar atau 37,84 persen khususnya dari total anggaran belanja 7 (tujuh) K/L pengampu DAK Fisik. Perpusnas RI merupakan K/L yang memiliki alokasi porsi terbesar dengan pagu yang mendukung DAK Fisik mencapai Rp362,33 miliar atau 50,73 persen dari seluruh anggaran Perpusnas RI tahun 2023. Besarnya alokasi pada Perpusnas RI tersebut dialokasikan untuk dukungan

perpustakaan pada bidang pendidikan. Sedangkan dari sisi nominal, Kementerian PUPR merupakan K/L yang memiliki alokasi paling besar dalam mendukung belanja DAK Fisik yaitu sebesar Rp70.243,83 miliar atau mencapai 38,59 persen dari seluruh anggaran K/L pengampu. Alokasi anggaran tersebut Sebagian besar digunakan untuk mendukung DAK Fisik bidang jalan.

Berdasarkan provinsi, alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik secara nominal terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp70.591,83 miliar yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran iuran PBI/JKN yang dilakukan secara terpusat dengan target 96,8 juta orang penduduk Indonesia. Sedangkan berdasarkan bidang, secara porsi sebagian besar anggaran belanja K/L terkonsentrasi pada Bidang Kesehatan dan KB yakni sebesar Rp48.145,34 miliar dengan realisasi sebesar Rp47.832,86 miliar (99,35 persen).

Secara nasional, terdapat 5 cluster permasalahan atau tantangan yang dihadapi Saker dan telah diidentifikasi sampai dengan triwulan III tahun 2023. Permasalahan atau tantangan tersebut meliputi:

- a. Tantangan Penganggaran, secara nasional tantangan ini mencapai 33 persen dari total cluster tantangan sampai dengan triwulan III. Permasalahan utama yang terjadi adalah penambahan maupun pengurangan pagu anggaran di

- pertengahan tahun anggaran sehingga juga berdampak pada deviasi halaman III DIPA;
- b. Tantangan Pengadaan Barang dan Jasa, Secara nasional tantangan ini mencapai 12 persen dari total cluster tantangan sampai dengan triwulan III. Permasalahan lelang masih menjadi kendala utama Satker. Lemahnya perencanaan PBJ oleh pejabat pengadaan sehingga beberapa pekerjaan yang diajukan lelang belum mendapatkan pemenang untuk ditetapkan, termasuk keterlambatan pembuatan perjanjian SPK.;
 - c. Tantangan Eksekusi Kegiatan, secara nasional tantangan ini mencapai 24 persen dari total cluster tantangan sampai dengan triwulan III. Permasalahan eksekusi kegiatan masih menjadi kendala utama Satker. Faktor eksternal berupa cuaca, lokasi project yang relatif jauh, faktor keamanan masih mendominasi permasalahan di eksekusi kegiatan;
 - d. Tantangan Regulasi Pelaksanaan Kegiatan, secara nasional tantangan ini mencapai 8 persen dari total cluster tantangan sampai dengan triwulan III. Permasalahan regulasi dalam pelaksanaan anggaran masih menjadi isu utama, khususnya regulasi pada level K/L;
 - e. Tantangan SDM, secara nasional tantangan ini mencapai 22 persen dari total cluster tantangan sampai dengan triwulan III. Permasalahan/tantangan SDM tertinggi pada kurangnya SDM pengelola keuangan di daerah.

Pergantian pejabat perbendaharaan juga memberikan kontribusi tinggi pada permasalahan SDM ini karena pergantian pejabat perbendaharaan memerlukan waktu cukup lama khususnya di level Pemerintahan Daerah.

Upaya sinkronisasi atas belanja haromis di daerah oleh satker di level daerah dan pemerintah daerah terus dilakukan. Sinkronisasi belanja K/L dengan DAK Fisik dilakukan dengan memprioritaskan alokasi belanja K/L untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah di lokasi yang didanai oleh DAK Fisik. Dengan demikian, secara tidak langsung peran Pemerintah Daerah dan Satker level daerah sangat penting untuk melihat di daerah tersebut apakah terdapat tumpang tindih atau duplikasi kegiatan yang dibiayai dari Belanja K/L dengan DAK Fisik.

7. Pengangguran adalah salah satu masalah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah agar tidak menimbulkan dampak ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial, di masa mendatang. Tingkat pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase angkatan kerja yang belum bekerja dan aktif mencari pekerjaan.

Pada Agustus 2023 mencapai 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen dibandingkan dengan Agustus 2022.

Pada tahun 2023, tiga provinsi dengan TPT tertinggi adalah Banten 7,52 persen, Jawa Barat 7,44 persen dan Kepulauan Riau 6,80 persen. Sedangkan provinsi dengan TPT terendah adalah Sulawesi Barat 2,27 persen, Papua 2,67 persen dan Bali 2,69 persen.

Pengangguran menurut pendidikan tertinggi pada tingkat menengah (SMA/ sederajat) sebesar 8,6 persen, selanjutnya tingkat tinggi (diploma ke atas) 5,10 persen, tingkat dasar (tidak/belum tamat SD dan SMP sederajat).

Selaras dengan kondisi di atas, pengurangan tingkat pengangguran juga merupakan salah satu sasaran pembangunan pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pemerintah menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,6–4,3 persen pada tahun 2024.

Secara struktur ketenagakerjaan, komposisi penduduk bekerja di kegiatan informal lebih tinggi dibandingkan kegiatan formal. BPS merilis bahwa mayoritas pekerja informal adalah laki-laki dan tinggal di perdesaan. Pada tahun 2023, tiga provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di kegiatan formal adalah Kepulauan Riau, 66,33 persen, DKI Jakarta 63,77 persen dan Kalimantan Timur 55,33 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja

di kegiatan informal adalah Papua 84,33 persen, NTT 74,51 persen dan Sulawesi Barat 73,35 persen (BPS, 2023).

Pada tahun 2023, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar mencapai 28,21 persen. Sektor tertinggi selanjutnya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,99 persen.

Pada Belanja K/L, hasil tagging belanja yang mendukung ketenagakerjaan pada tahun 2023 sebesar Rp14.596,5 miliar dan realisasi mencapai Rp14.125,8 miliar (96,8 persen). Pada Belanja DAK Fisik telah di *cluster* kelompok DAK Fisik untuk food estate dan pariwisata. Pada cluster food estate, telah dialokasikan sebesar Rp2.700,8 miliar dan terealisasi Rp2.568,9 miliar (95,1 persen). Dan pada belanja DAK Non Fisik tahun 2023, dalam rangka mendukung sektor ketenagakerjaan nasional, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp833,3 miliar dan terealisasi Rp756,8 miliar (90,8 persen).

8. APBN sebagai instrumen fiskal berperan penting dalam upaya pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh regional, salah satunya adalah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan diantaranya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. APBN dirancang untuk mendukung pembangunan tersebut agar tercipta

lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, serta agar terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, APBN melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) mendukung penguatan sektor ketenagakerjaan melalui berbagai program, diantaranya yaitu program prioritas padat karya dan kartu prakerja. Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga terus melakukan kebijakan struktural untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Kebijakan struktural tersebut, diantaranya yaitu di bidang investasi, perdagangan, dan produktivitas tenaga kerja.

IV.2 REKOMENDASI

Pada tahun 2023, kondisi perekonomian mulai membaik yang diawali dengan keberhasilan domestik dan global dalam mengendalikan penularan pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari peran APBN dan APBD yang berhasil menjadi bantalan selama masa awal pandemi sekaligus memberikan stimulus fiskal yang mampu menggerakkan roda perekonomian.

APBN dan APBD tahun 2023 menjadi fondasi dalam menyeimbangkan berbagai tujuan pemerintah. APBN dan APBD menjadi instrumen utama dalam mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi, serta melanjutkan berbagai pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. APBN terus berupaya untuk menjadi instrumen yang dapat melindungi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian. Oleh karena itu,

pelaksanaan APBN dan APBD harus dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkualitas, sehingga peran APBN dan APBD dapat berjalan secara optimal dan terjaga.

Berdasarkan capaian kinerja perekonomian, kesejahteraan, dan fiskal tahun 2023 di masing-masing regional sebagaimana telah diulas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan respon fiskal pemerintah sebagai berikut:

a. Regional Sumatera

Pengembangan Regional Sumatera dapat dilakukan melalui dukungan pengembangan sektor industri baik dari segi sarana dan prasarana seperti dukungan infrastruktur baik fisik maupun non fisik sehingga berdampak pada nilai tambah produk industri. Dukungan dapat berjalan optimal dengan harmonisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berjalan dengan baik. Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat tergolong sangat melimpah. Namun, kondisi geografis dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan SDA tergolong rendah menyebabkan produktivitas ekonomi masih rendah. Selain itu diperlukannya pengoptimalan iklim investasi serta birokrasi dan perizinan. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Pusat

- i. Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU HKPD untuk pelaksanaan perluasan skema pembiayaan daerah, belum ditetapkan. Pemerintah pusat perlu melakukan percepatan penetapan

- PP tersebut agar pemda dapat melaksanakan perluasan skema pembiayaan daerah.
- ii. Untuk mengatasi ketimpangan vertikal di daerah, pemerintah pusat perlu memerhatikan akurasi pemberian dana transfer pada tiap-tiap daerah, melalui analisis kebutuhan daerah. Sebab, terdapat daerah yang membutuhkan dana transfer pada program tertentu namun tidak mendapatkan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
 - iii. Mendorong diversifikasi sektor ekonomi di terutama dengan meningkatkan investasi di sektor non-primordial seperti pariwisata, teknologi, dan industri kreatif. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - iv. Mendorong kemitraan publik-swasta untuk meningkatkan investasi sektor swasta. Pemerintah dapat menyediakan insentif fiskal, perizinan yang memudahkan, dan lingkungan bisnis yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta.
 - v. Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan khusus untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas. Investasi ini akan membuka peluang baru, meningkatkan konektivitas, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.
- i. Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran, identifikasi kendala, dan peningkatan sistem untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas realisasi belanja. Terutama di daerah-daerah yang memiliki capaian realisasi rendah.
 - ii. Fokus pada pemberdayaan ekonomi pedesaan dan/atau UMKM dengan meningkatkan aksesibilitas, sumber daya, dan peluang di daerah. Program insentif untuk pertanian, agribisnis, dan industri lokal di pedesaan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
 - iii. Mendorong koordinasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan. Melalui forum sinkronisasi, proyek-proyek dapat diidentifikasi secara bersamaan, menghindari tumpang tindih, dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
 - iv. Menawarkan insentif pajak dan investasi kepada daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Hal ini dapat mencakup pembebasan pajak untuk investor yang berinvestasi di daerah tertentu atau insentif fiskal lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
 - v. Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu melakukan Pemantauan terhadap indikator kesejahteraan, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, rasio Gini, NTP, dan NTN, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah

b. Regional Jawa

Dalam rangka mendukung pengembangan dan pembangunan di Regional Jawa, dukungan pemerintah pusat dan daerah dapat berfokus pada peningkatan belanja di sektor potensial regional. Di samping itu, dalam pengelolaan SDA memiliki tantangan dalam penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air bersih, pemanfaatan kawasan hutan yang kurang, pencurian dan kebakaran hutan, peningkatan jumlah timbunan sampah, kegiatan tambang tanpa izin yang merusak lingkungan, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi permasalahan kualitas dan daya saing SDM yang berkaitan. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Pusat

- i. Pemerintah pusat agar semakin meningkatkan penyaluran DAK Fisik pada daerah-daerah dengan PDRB per kapita yang masih di bawah rata-rata nasional.
- ii. Perlunya kehadiran Pemerintah Pusat seperti Kanwil DJPb dan *local expert* dalam pembahasan penyusunan RKPD untuk memaksimalkan kualitas kebijakan fiskal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
- iii. Perlunya peningkatan belanja berskala nasional, yang berfokus pada sektor unggulan dan potensial serta perlu memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan manusia.

Bagi Pemerintah Daerah

- i. Digitalisasi pelaksanaan anggaran daerah melalui belanja pada marketplace, peningkatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, dan penyediaan satu portal untuk Belanja Daerah khusus UMKM.
- ii. Pemerintah Daerah perlu memperbaiki perencanaan untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menyelesaikan paket pekerjaan yang berdampak pada penyerapan pinjaman daerah;
- iii. Selain upaya optimalisasi PDRD untuk meningkatkan penerimaan PAD nya, pemanfaatan pembiayaan daerah yang tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dapat menjadi alternatif sumber pendanaan APBD dalam menutup defisit APBD. Instrumen kebijakan dalam skema pembiayaan daerah dapat melalui pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Penggunaan pembiayaan utang daerah diutamakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.
- iv. Dana abadi daerah dapat menjadi opsi bagi kebermanfaatan lintas generasi dengan manfaat yang lebih luas. Pengelolaan dana abadi daerah ini dapat dikelola oleh BUD atau BLUD karena kerangka penerapan yang cukup mudah namun dengan tetap menjaga prudence.
- v. Pemerintah daerah agar lebih memperkuat hilirisasi dari sektor primer, khususnya dari sektor pertanian, misalnya dengan memperkuat sektor industri pengolahan dan penyediaan akomodasi makan minum, antar lain dengan

- menambah subsidi KUR untuk UMKM yang bergerak di kedua sektor tersebut.
- vi. Untuk mempercepat pengurangan ketimpangan yang terjadi, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan prioritas kebijakan pembangunan pada daerah yang relatif tertinggal dibandingkan daerah lainnya.

c. Regional Kalimantan

Sampai dengan tahun 2022, komoditas unggulan Regional Kalimantan didominasi hasil sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable resources*). Kekayaan alam yang melimpah, disertai dengan kenaikan harga komoditas yang mengalami kenaikan di satu sisi menjadi keuntungan bagi Regional Kalimantan. Namun, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, belum terdiversifikasinya sektor ekonomi serta hilirisasi potensi unggulan berbasis sumber daya alam hal ini menyebabkan struktur perekonomian daerah berbeda-beda. Selain itu, Ketergantungan ekonomi daerah pada sektor pertambangan dan penggalian menjadi permasalahan di Pulau Kalimantan dikarenakan penggalian sanga rentan volatile terhadap kondisi pasar global. Tingkat kemiskinan tinggi di daerah penghasil tambang. Penyerapan tenaga kerja yang rendah. Selain itu, konektivitas darat sebagai penghubung perekonomian perlu pengelolaan dan perawatan yang baik akibat mobilitas kendaraan berat pengangkut hasil alam. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Pusat

- i. Pemerintah perlu meningkatkan konektivitas darat antar wilayah dan laut

- berupa pelabuhan ekspor skala besar dan diharapkan dapat meratakan kualitas komunikasi di seluruh wilayah.
- ii. Peningkatan alokasi belanja pemerintah dalam APBN yang diarahkan ke sektor pertanian dan perikanan. Alokasi belanja ini tidak hanya sekedar infrastruktur, akan tetapi belanja-belanja yang langsung kepada petani maupun nelayan, misalnya bantuan benih, alat-alat pertanian, kapal, alat penangkap ikan, dan lainnya.
- iii. Kebijakan desentralisasi fiskal harus diarahkan agar daerah otonom mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga setiap daerah otonom perlu diberi kewenangan agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan sumber- sumber keuangan daerah yang dimiliki secara efektif dan efisien.
- iv. Pemerintah Pusat perlu memberikan pemahaman ke Pemda baik eksekutif maupun legislatif mengenai manfaat creative and sustainable financing sekaligus kebijakan akuntansinya.

Bagi Pemerintah Daerah

- i. Pemerintah Daerah agar mempersiapkan infrastruktur pengolahan/hilirisasi komoditas unggulan, seperti tambang, kelapa sawit, atau padi, yang berlokasi di wilayahnya sehingga akan diperoleh nilai output tambahan dari proses hilirisasi tersebut. Dalam hal ini, dapat dilakukan peninjauan alternatif skema pembiayaan atau investasi yang tepat. Pemda perlu melakukan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan meningkatkan kesempatan kerja, serta mendorong sektor lainnya.

- ii. Pemerintah Daerah perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan peningkatan kapasitas pelabuhan sebagai hubungan konektivitas laut dengan Pulau Jawa untuk mengurangi ketergantungan logistik dengan daerah lain.
- iii. Pemerintah Daerah perlu menjaga *supply* harga komoditas bahan makanan pokok melalui dan kerjasama antar daerah untuk penguatan *supply* komoditas bahan pokok untuk menjaga tingkat inflasi tetap terkendali.
- iv. Meningkatkan pemberdayaan SDM lokal dalam pembangunan IKN dengan memberikan pelatihan dan reskilling/ upskilling sehingga tidak kalah dengan keahlian tenaga kerja dari luar Kaltim.

d. Regional Sulawesi

Sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan harus ditingkatkan dan dieksekusi dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah juga harus senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya terkait tata kelola keuangan negara dan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mewujudkan alokasi belanja saling melengkapi dan tidak tumpang tindih serta tidak terjadinya duplikasi dan anggaran berlebih. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Pusat

- i. Kebijakan pembangunan infrastruktur antar daerah, dengan daerah yang kaya

SDA melakukan investasi/pembangunan fasilitas pengolahan komoditas (hilirisasi) bahkan transfer SDM antar daerah.

- ii. Pemerintah fokus pada program ketahanan pangan dengan alokasi APBN yang terkonsentrasi pada program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas serta program ketahanan sumber daya air dan pengelolaan perikanan dan kelautan.
- iii. Pembentukan serta penguatan peran forum ekonomi regional guna penyampaian hasil analisa data dan informasi serta rekomendasi kebijakan yang cepat dan akurat.
- iv. Perlu segera dilakukan penyempurnaan/ penyesuaian terkait kebijakan penyaluran DAU berdasarkan dinamika kondisi yang terjadi di lapangan. Hal ini bertujuan agar tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik dan tidak kontra produktif.

Bagi Pemerintah Daerah

- i. Sinergi dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak diantaranya akademisi, penegak hukum dan lembaga profesi lainnya guna memperkuat penerimaan PDRD pada setiap daerah (perumusan regulasi, pembangunan sistem, monitoring pelaksanaan, dan penegakan/kepatuhan).
- ii. Memperkuat perekonomian di pedesaan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, fokus pada belanja yang meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan memperhatikan sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.
- iii. Transformasi komoditas melalui penentuan komoditas alternatif dari hortikultura, biofarmaka dan biomassa yg

terintegrasi dgn industri pengolahan (hilirisasi pertanian).

- iv. Rasionalisasi dan efisiensi belanja daerah yang lebih efektif menggerakkan sektor produktif (sektor riil) dan kelangsungan UMKM. Caranya dengan efisiensi, menghapus belanja-belanja yang kurang produktif

e. Regional Bali-Nusa Tenggara

Kondisi pariwisata di Regional Bali-Nusa Tenggara sedang dalam tahap pemulihan. Kondisi ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi Regional Bali-Nusa Tenggara untuk mengantisipasi potensi kejadian serupa di masa depan. Pengembangan aktivitas sektor selain pariwisata memiliki urgensi karena Bali masih bergantung pada sisi pariwisata. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Pusat

- i. Pemerintah Pusat perlu menerbitkan peraturan turunan yang lebih rinci atau juknis terkait, khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan penguatan fiskal pemda melalui pinjaman daerah, pembentukan dana abadi, serta sinergi antara APBD dan non-APBD.
- ii. Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan dukungan fiskal terhadap sektor potensial dan menjawab tantangan harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.
- iii. Pemerintah perlu mendorong UMKM serta mendukung pembenahan infrastruktur guna masuknya investasi.

Bagi Pemerintah Daerah

- i. Perlunya komitmen pemerintah daerah untuk membelanjakan APBD lebih cepat atau sesuai dengan target. Karena selama ini akselerasi belanja APBN selalu lebih cepat dibandingkan dengan APBD.
- ii. Pencarian alternatif sumber-sumber pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah kepada pemerintah pusat, perlu dilakukan secara selektif dan prudent.
- iii. Terkait implementasi UU HKPD dan LTR, yang perlu menjadi fokus adalah peningkatan sinergi & koordinasi antar Pemda.

f. Regional Maluku-Papua

Akselerasi pembangunan menjadi prioritas bagi Regional Maluku-Papua untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pembangunan perlu dilakukan secara merata, terutama bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah 3T. Penyediaan layanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan perlu terus digencarkan untuk membangun kultur yang kondusif bagi kondisi kesehatan dan pendidikan di wilayah tersebut. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Pusat

- i. Mereformasi sistem transfer fiskal antar pemerintah agar lebih transparan, dapat diprediksi, dan berbasis kinerja, serta mengurangi ketidakseimbangan vertikal dan horizontal antar pemerintah daerah.
- ii. Pemerintah Pusat dan Daerah harus responsif dalam menghadapi perubahan keadaan dengan menyiapkan kebijakan yang tepat dan cepat.

- iii. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dengan memperluas basis pajak, memperbaiki administrasi perpajakan, dan memberikan otonomi fiskal yang lebih besar serta keleluasaan dalam menetapkan tarif dan pengecualian pajak.
- iv. Perbaiki tata kelola keuangan daerah, melalui pendampingan dari Pemerintah Pusat serta melalui pemberian insentif fiskal bagi daerah-daerah berprestasi dengan memasukkan indikator ketimpangan sebagai salah satu unsur penilaian.
- v. Mendorong perkembangan UMKM, dengan melakukan pelatihan, pendampingan, pemberian akses permodalan (KUR, UMi, inisiatif Pemda, dan lainnya), serta pengembangan pangsa pasar untuk hasil produksi UMKM.
- vi. Akselerasi digipay dan kartu kredit pemerintah dalam rangka digitalisasi transaksi belanja APBN sebagai bentuk simplikasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta pemberdayaan UMKM;

Bagi Pemerintah Daerah

- i. Diperlukannya sinkronisasi dan evaluasi strategis pembangunan antara RPJMD, RKPD dengan RPJMN, RKP, PN. Perumusan target indikator kinerja pembangunan baik jangka menengah, maupun secara target tahunan. Selain itu, dipastikan minimum deviasi antara RKP dan APBD ditetapkan Pemda bersama DPRD.
- ii. Percepatan pelaksanaan anggaran daerah dimulai dengan pelaksanaan lelang dini. Pemerintah Daerah perlu

menguatkan peran LPSE/UPBJ Pemda antara lain dengan pemusatan pelaksanaan pengadaan melalui LPSE/UPBJ Pemda dan penggunaan *e-katalog*.

- iii. Penggalan potensi daerah yang mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapat transfer.
- iv. Memperkuat koordinasi dan kerja sama antar pemerintah, dengan membentuk mekanisme dialog, konsultasi, dan penyelesaian perselisihan antar berbagai tingkat pemerintahan. Pemerintah daerah juga harus berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai skala dan cakupan ekonomi dalam penyediaan barang dan jasa publik yang mempunyai efek limpahan antar yurisdiksi.
- v. Mendorong pendirian koperasi atau badan usaha daerah pada daerah-daerah industri pertambangan dan daerah-daerah penyangga disekitarnya untuk masuk ke dalam *supply chain* ekosistem pertambangan seperti pemasok bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya.
- vi. Pemerintah Daerah memastikan bahwa rencana penggunaan DAK Fisik selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya RPJMD dan RKPD untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berjangka panjang.



LAMPIRAN

I. Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Tahun 2021-2023 (c-to-c)

No	Nama Provinsi	Regional	Pertumbuhan Ekonomi (CtoC)		
			2021	2022	2023
1	Aceh	Sumatera	2,79%	4,21%	4,23%
2	Sumatera Utara	Sumatera	2,61%	4,73%	5,01%
3	Sumatera Barat	Sumatera	3,29%	4,36%	4,62%
4	Riau	Sumatera	3,36%	4,55%	4,21%
5	Jambi	Sumatera	3,69%	5,13%	4,66%
6	Sumatera Selatan	Sumatera	3,58%	5,23%	5,08%
7	Bengkulu	Sumatera	3,27%	4,31%	4,26%
8	Lampung	Sumatera	2,77%	4,28%	4,55%
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	5,05%	4,40%	4,38%
10	Kepulauan Riau	Sumatera	3,43%	5,09%	5,20%
11	DKI Jakarta	Jawa	3,56%	5,25%	4,96%
12	Jawa Barat	Jawa	3,74%	5,45%	5,00%
13	Jawa Tengah	Jawa	3,33%	5,31%	4,98%
14	DI Yogyakarta	Jawa	5,58%	5,15%	5,07%
15	Jawa Timur	Jawa	3,56%	5,34%	4,95%
16	Banten	Jawa	4,49%	5,03%	4,81%
17	Bali	Bali-Nusra	-2,46%	4,84%	5,71%
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	2,30%	6,95%	1,80%
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	2,52%	3,05%	3,52%
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	4,80%	5,07%	4,46%
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	3,59%	6,45%	4,14%
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	3,48%	5,11%	4,84%
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	2,55%	4,48%	6,22%
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	3,98%	5,34%	4,94%
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	4,16%	5,42%	5,48%
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	11,70%	15,17%	11,91%
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	4,64%	5,09%	4,51%
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	4,10%	5,53%	5,35%
29	Gorontalo	Sulawesi	2,41%	4,04%	4,50%
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	2,57%	2,30%	5,25%
31	Maluku	Maluku-Papua	3,05%	5,11%	5,21%
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	16,79%	22,94%	20,49%
33	Papua Barat	Maluku-Papua	-0,51%	2,01%	3,91%
34	Papua	Maluku-Papua	15,16%	8,97%	5,22%
	NASIONAL		3,70%	5,31%	5,05%
1	Regional Sumatera	Sumatera	3,18%	4,69%	4,69%
2	Regional Jawa	Jawa	3,66%	5,31%	4,96%
3	Regional Kalimantan	Kalimantan	3,18%	4,94%	5,43%
4	Regional Sulawesi	Sulawesi	5,67%	7,05%	6,37%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara	Bali-Nusra	0,07%	5,08%	4,00%
6	Regional Maluku-Papua	Maluku-Papua	10,09%	8,65%	6,94%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

II. Nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2021-2023

No	Nama Provinsi	Regional	Nominal PDRB (Juta Rupiah)					
			2021		2022		2023	
			Nominal	Kontribusi	Nominal	Kontribusi	Nominal	Kontribusi
1	Aceh	Sumatera	184.978,75	1,09%	211.750,02	1,11%	227.110,20	1,11%
2	Sumatera Utara	Sumatera	859.934,26	5,07%	955.193,09	4,99%	1.050.995,41	5,12%
3	Sumatera Barat	Sumatera	253.101,28	1,49%	285.378,64	1,49%	312.770,28	1,52%
4	Riau	Sumatera	839.010,13	4,95%	991.589,59	5,18%	1.026.472,05	5,00%
5	Jambi	Sumatera	232.064,12	1,37%	276.316,37	1,44%	293.729,31	1,43%
6	Sumatera Selatan	Sumatera	493.651,91	2,91%	591.603,48	3,09%	629.099,66	3,06%
7	Bengkulu	Sumatera	79.602,64	0,47%	90.111,95	0,47%	96.551,38	0,47%
8	Lampung	Sumatera	371.198,88	2,19%	414.131,42	2,16%	448.880,25	2,19%
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	85.961,29	0,51%	95.285,43	0,50%	102.635,65	0,50%
10	Kepulauan Riau	Sumatera	275.622,85	1,63%	308.842,68	1,61%	331.889,50	1,62%
11	DKI Jakarta	Jawa	2.912.563,13	17,18%	3.186.469,91	16,64%	3.442.980,93	16,77%
12	Jawa Barat	Jawa	2.204.660,23	13,01%	2.422.782,32	12,65%	2.625.218,58	12,79%
13	Jawa Tengah	Jawa	1.419.986,62	8,38%	1.560.899,02	8,15%	1.696.795,42	8,26%
14	DI Yogyakarta	Jawa	149.408,40	0,88%	165.690,21	0,87%	180.689,95	0,88%
15	Jawa Timur	Jawa	2.454.716,48	14,48%	2.730.907,09	14,26%	2.953.546,91	14,38%
16	Banten	Jawa	665.887,47	3,93%	747.250,29	3,90%	814.124,34	3,96%
17	Bali	Bali-Nusra	220.467,45	1,30%	245.233,24	1,28%	274.355,72	1,34%
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	140.115,97	0,83%	156.944,05	0,82%	166.394,91	0,81%
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	110.881,46	0,65%	118.718,20	0,62%	128.523,13	0,63%
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	231.321,16	1,36%	255.797,28	1,34%	274.468,58	1,34%
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	169.654,31	1,00%	199.947,90	1,04%	208.846,41	1,02%
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	197.879,00	1,17%	251.256,54	1,31%	269.296,45	1,31%
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	696.584,50	4,11%	921.332,98	4,81%	843.571,25	4,11%
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	110.668,94	0,65%	138.718,18	0,72%	147.278,62	0,72%
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	142.615,02	0,84%	157.028,36	0,82%	171.969,42	0,84%
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	247.328,39	1,46%	323.617,16	1,69%	347.139,17	1,69%
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	545.172,68	3,22%	605.144,68	3,16%	652.574,05	3,18%
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	139.463,63	0,82%	158.761,13	0,83%	176.179,90	0,86%
29	Gorontalo	Sulawesi	43.896,49	0,26%	47.574,43	0,25%	51.374,40	0,25%
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	50.565,51	0,30%	54.070,98	0,28%	58.551,82	0,29%
31	Maluku	Maluku-Papua	48.642,32	0,29%	53.692,91	0,28%	58.489,79	0,28%
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	52.481,30	0,31%	70.902,61	0,37%	85.145,36	0,41%
33	Papua Barat	Maluku-Papua	85.078,42	0,50%	91.291,75	0,48%	97.675,84	0,48%
34	Papua	Maluku-Papua	235.486,12	1,39%	262.515,82	1,37%	287.902,65	1,40%
NASIONAL			16.950.651,14	100,00%	19.146.749,71	100,00%	20.533.227,32	100,00%
1	Regional Sumatera	Sumatera	3.675.126,12	21,68%	4.220.202,67	22,04%	4.520.133,69	22,01%
2	Regional Jawa	Jawa	9.807.222,35	57,86%	10.813.998,84	56,48%	11.713.356,13	57,05%
3	Regional Kalimantan	Kalimantan	1.406.107,92	8,30%	1.767.052,88	9,23%	1.743.461,32	8,49%
4	Regional Sulawesi	Sulawesi	1.169.041,72	6,90%	1.346.196,74	7,03%	1.457.788,76	7,10%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara	Bali-Nusra	471.464,88	2,78%	520.895,49	2,72%	569.273,77	2,77%
6	Regional Maluku-Papua	Maluku-Papua	421.688,16	2,49%	478.403,09	2,50%	529.213,64	2,58%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

III. Tingkat Inflasi Tahun 2021-2023

No	Nama Provinsi	Regional	Inflasi Gabungan		
			2021	2022	2023
1	Aceh	Sumatera	2,24%	5,89%	1,53%
2	Sumatera Utara	Sumatera	1,71%	6,12%	2,25%
3	Sumatera Barat	Sumatera	1,40%	7,43%	2,47%
4	Riau	Sumatera	1,54%	6,81%	2,50%
5	Jambi	Sumatera	1,66%	6,35%	3,22%
6	Sumatera Selatan	Sumatera	1,82%	5,94%	3,17%
7	Bengkulu	Sumatera	2,42%	5,92%	3,09%
8	Lampung	Sumatera	2,19%	5,51%	3,47%
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	3,75%	5,38%	2,65%
10	Kepulauan Riau	Sumatera	2,26%	5,83%	2,76%
11	DKI Jakarta	Jawa	1,53%	4,21%	2,28%
12	Jawa Barat	Jawa	1,69%	6,04%	2,48%
13	Jawa Tengah	Jawa	1,70%	5,63%	2,89%
14	DI Yogyakarta	Jawa	2,29%	6,49%	3,17%
15	Jawa Timur	Jawa	2,45%	6,52%	2,92%
16	Banten	Jawa	1,91%	5,08%	3,06%
17	Bali	Bali-Nusra	2,01%	6,20%	2,54%
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	2,12%	6,23%	3,02%
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	1,67%	6,65%	2,42%
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	1,45%	6,30%	2,02%
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	3,32%	6,32%	2,64%
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	2,55%	6,99%	2,43%
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	2,15%	5,35%	3,46%
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	2,73%	4,74%	2,44%
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	2,65%	4,00%	2,87%
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	2,20%	5,96%	2,35%
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	2,40%	5,77%	2,81%
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	2,59%	7,39%	2,58%
29	Gorontalo	Sulawesi	2,59%	5,15%	3,88%
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	4,39%	4,85%	1,82%
31	Maluku	Maluku-Papua	0,21%	6,39%	2,81%
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	2,38%	3,37%	4,41%
33	Papua Barat	Maluku-Papua	3,47%	3,87%	2,94%
34	Papua	Maluku-Papua	1,79%	5,68%	1,65%
NASIONAL			1,87%	5,51%	2,61%

Sumber: BRS masing-masing provinsi, Badan Pusat Statistik, 2023

IV. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2023

No	Nama Provinsi	Regional	Inflasi Gabungan		
			2021	2022	2023
1	Aceh	Sumatera	72,18	72,8	74,7
2	Sumatera Utara	Sumatera	72,00	72,71	75,13
3	Sumatera Barat	Sumatera	72,65	73,26	75,64
4	Riau	Sumatera	72,94	73,52	74,95
5	Jambi	Sumatera	71,63	72,14	73,73
6	Sumatera Selatan	Sumatera	70,24	70,9	73,18
7	Bengkulu	Sumatera	71,64	72,16	74,3
8	Lampung	Sumatera	69,90	70,45	72,48
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	71,69	72,24	74,09
10	Kepulauan Riau	Sumatera	75,79	76,46	79,08
11	DKI Jakarta	Jawa	81,11	81,65	83,55
12	Jawa Barat	Jawa	72,45	73,12	74,24
13	Jawa Tengah	Jawa	72,16	72,79	73,39
14	DI Yogyakarta	Jawa	80,22	80,64	81,09
15	Jawa Timur	Jawa	72,14	72,75	74,65
16	Banten	Jawa	72,72	73,32	75,77
17	Bali	Bali-Nusra	75,69	76,44	78,01
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	68,65	69,46	72,37
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	65,28	65,9	68,4
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	67,90	68,63	70,47
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	71,25	71,63	73,73
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	71,28	71,84	74,66
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	76,88	77,44	78,2
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	71,19	71,83	72,88
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	73,30	73,81	75,04
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	69,79	70,28	71,66
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	72,24	72,82	74,6
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	71,66	72,23	72,94
29	Gorontalo	Sulawesi	69,00	69,81	71,25
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	66,36	66,92	69,8
31	Maluku	Maluku-Papua	69,71	70,22	72,75
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	68,76	69,47	70,98
33	Papua Barat	Maluku-Papua	65,26	65,89	67,47
34	Papua	Maluku-Papua	60,62	61,39	63,01
NASIONAL			72,29	72,91	74,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

V. Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2021-2023

No	Nama Provinsi	Regional	Tingkat Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Aceh	Sumatera	15,53%	14,75%	14,45%	850.260	818.470	806.750
2	Sumatera Utara	Sumatera	8,49%	8,33%	8,15%	1.273.070	1.262.090	1.239.710
3	Sumatera Barat	Sumatera	6,04%	6,04%	5,95%	339.930	343.820	340.370
4	Riau	Sumatera	7,00%	6,84%	6,68%	496.660	493.130	485.660
5	Jambi	Sumatera	7,67%	7,70%	7,58%	279.860	283.820	280.680
6	Sumatera Selatan	Sumatera	12,79%	11,95%	11,78%	1.116.610	1.054.990	1.045.680
7	Bengkulu	Sumatera	14,43%	14,34%	14,04%	291.790	292.930	288.460
8	Lampung	Sumatera	11,67%	11,44%	11,11%	1.007.020	995.590	970.670
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	4,67%	4,61%	4,52%	69.700	69.690	68.690
10	Kepulauan Riau	Sumatera	5,75%	6,03%	5,69%	137.750	148.890	142.500
11	DKI Jakarta	Jawa	4,67%	4,61%	4,44%	498.290	494.930	477.830
12	Jawa Barat	Jawa	7,97%	7,98%	7,62%	4.004.860	4.053.620	3.888.600
13	Jawa Tengah	Jawa	11,25%	10,98%	10,77%	3.934.010	3.858.230	3.791.500
14	DI Yogyakarta	Jawa	11,91%	11,49%	11,04%	474.490	463.630	448.470
15	Jawa Timur	Jawa	10,59%	10,49%	10,35%	4.259.600	4.236.510	4.188.810
16	Banten	Jawa	6,50%	6,24%	6,17%	852.280	829.660	826.130
17	Bali	Bali-Nusra	4,72%	4,53%	4,25%	211.460	205.360	193.780
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	13,83%	13,82%	13,85%	735.300	744.690	751.230
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	20,44%	20,23%	19,96%	1.146.280	1.149.170	1.141.110
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	6,84%	6,81%	6,71%	354.000	356.510	353.350
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	5,16%	5,22%	5,11%	141.030	144.520	142.170
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	4,56%	4,61%	4,29%	197.760	201.950	188.930
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	6,27%	6,44%	6,11%	233.130	242.300	231.070
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	6,83%	6,86%	6,45%	49.490	50.580	47.970
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	7,36%	7,34%	7,38%	186.550	187.330	189.000
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	12,18%	12,30%	12,41%	381.210	389.710	395.660
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	8,53%	8,66%	8,70%	765.460	782.320	788.850
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	11,74%	11,27%	11,43%	323.260	314.740	321.530
29	Gorontalo	Sulawesi	15,41%	15,51%	15,15%	184.600	187.350	183.710
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	11,85%	11,92%	11,49%	165.990	169.260	164.140
31	Maluku	Maluku-Papua	16,30%	16,23%	16,42%	294.970	296.660	301.610
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	6,38%	6,37%	6,46%	81.180	82.130	83.800
33	Papua Barat	Maluku-Papua	21,82%	21,43%	20,49%	221.290	222.360	214.980
34	Papua	Maluku-Papua	27,38%	26,80%	26,03%	944.490	936.320	915.150
NASIONAL			9,71%	9,57%	9,36%	26.503.630	26.363.270	25.898.550
1	Regional Sumatera	Sumatera	9,75%	9,47%	9,27%	5.862.650	5.763.420	5.669.170,00
2	Regional Jawa	Jawa	9,16%	9,03%	8,79%	14.023.530	13.936.580	13.621.340,00
3	Regional Kalimantan	Kalimantan	5,85%	5,90%	5,67%	2.588.070	995.860	963.490,00
4	Regional Sulawesi	Sulawesi	10,04%	10,06%	10,08%	2.007.070	2.030.710	2.042.890,00
5	Regional Bali-Nusa Tenggara	Bali-Nusra	13,59%	13,46%	13,29%	480.380	2.099.220	2.086.120,00
6	Regional Maluku-Papua	Maluku-Papua	20,43%	20,10%	19,68%	1.541.930	1.537.470	1.515.540,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

VI. Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Tahun 2021-2023

No	Nama Provinsi	Regional	Inflasi Gabungan		
			2021	2022	2023
1	Aceh	Sumatera	0,323	0,291	0,296
2	Sumatera Utara	Sumatera	0,313	0,326	0,309
3	Sumatera Barat	Sumatera	0,300	0,292	0,280
4	Riau	Sumatera	0,327	0,323	0,324
5	Jambi	Sumatera	0,315	0,335	0,343
6	Sumatera Selatan	Sumatera	0,340	0,330	0,338
7	Bengkulu	Sumatera	0,321	0,315	0,333
8	Lampung	Sumatera	0,314	0,313	0,324
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	0,247	0,255	0,245
10	Kepulauan Riau	Sumatera	0,339	0,325	0,340
11	DKI Jakarta	Jawa	0,411	0,412	0,431
12	Jawa Barat	Jawa	0,406	0,412	0,425
13	Jawa Tengah	Jawa	0,368	0,366	0,369
14	DI Yogyakarta	Jawa	0,436	0,459	0,449
15	Jawa Timur	Jawa	0,364	0,365	0,387
16	Banten	Jawa	0,363	0,377	0,368
17	Bali	Bali-Nusra	0,375	0,362	0,362
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	0,384	0,374	0,375
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	0,339	0,340	0,325
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	0,315	0,311	0,321
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	0,320	0,309	0,317
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	0,325	0,309	0,313
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	0,331	0,317	0,322
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	0,285	0,270	0,277
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	0,359	0,359	0,370
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	0,326	0,305	0,304
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	0,377	0,365	0,377
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	0,394	0,366	0,371
29	Gorontalo	Sulawesi	0,409	0,423	0,417
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	0,366	0,371	0,351
31	Maluku	Maluku-Papua	0,316	0,306	0,288
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	0,278	0,309	0,300
33	Papua Barat	Maluku-Papua	0,374	0,384	0,370
34	Papua	Maluku-Papua	0,396	0,393	0,386
NASIONAL			0,381	0,381	0,388

Sumber: Badan Pusat Statistik, per September 2023

VII. Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2021-2023

No	Nama Provinsi	Regional	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)*			Tingkat Pengangguran**)			Jumlah Pengangguran (orang)***)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Aceh	Sumatera	63,78%	63,50%	64,77%	6,30%	6,17%	6,03%	158.857	157.568	157.107
2	Sumatera Utara	Sumatera	69,10%	69,75%	71,06%	6,33%	6,16%	5,89%	475.156	472.496	472.085
3	Sumatera Barat	Sumatera	67,72%	69,30%	69,61%	6,52%	6,28%	5,94%	179.948	180.106	179.505
4	Riau	Sumatera	65,03%	63,86%	64,45%	4,42%	4,37%	4,23%	145.669	144.889	132.454
5	Jambi	Sumatera	67,17%	67,84%	68,75%	5,09%	4,59%	4,53%	93.754	86.459	85.576
6	Sumatera Selatan	Sumatera	68,77%	69,31%	70,72%	4,98%	4,63%	4,11%	219.199	208.256	188.511
7	Bengkulu	Sumatera	69,75%	69,81%	70,91%	3,65%	3,59%	3,42%	38.745	38.619	37.845
8	Lampung	Sumatera	69,35%	70,06%	70,04%	4,69%	4,52%	4,23%	210.632	207.965	207.242
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	65,88%	67,38%	68,34%	5,03%	4,77%	4,56%	37.176	36.631	35.812
10	Kepulauan Riau	Sumatera	68,27%	68,94%	68,68%	9,91%	8,23%	6,80%	119.595	103.715	74.330
11	DKI Jakarta	Jawa	62,63%	63,08%	65,21%	8,50%	7,18%	6,53%	439.899	377.294	354.496
12	Jawa Barat	Jawa	64,95%	66,15%	66,49%	9,82%	8,31%	7,44%	2.430.147	2.125.606	1.888.287
13	Jawa Tengah	Jawa	69,58%	70,84%	71,75%	5,95%	5,57%	5,13%	1.128.223	1.084.475	1.080.260
14	DI Yogyakarta	Jawa	73,52%	72,60%	74,08%	4,56%	4,06%	3,69%	106.432	94.945	81.984
15	Jawa Timur	Jawa	70,00%	71,23%	72,59%	5,74%	5,49%	4,88%	1.281.395	1.255.719	1.165.587
16	Banten	Jawa	63,79%	64,72%	64,44%	8,98%	8,09%	7,52%	562.310	523.013	448.432
17	Bali	Bali-Nusra	73,54%	76,86%	77,08%	5,37%	4,80%	2,69%	138.669	131.469	72.421
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	70,57%	70,93%	73,31%	3,01%	2,89%	2,80%	82.495	80.833	83.243
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	73,78%	75,23%	75,72%	3,77%	3,54%	3,14%	109.928	107.128	93.815
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	68,45%	68,97%	69,42%	5,82%	5,11%	5,05%	153.307	137.680	147.574
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	68,67%	67,23%	67,18%	4,53%	4,26%	4,10%	63.874	59.829	57.762
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	69,26%	67,55%	69,76%	4,95%	4,74%	4,31%	109.968	104.025	93.576
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	65,49%	64,73%	65,57%	6,83%	5,71%	5,31%	126.186	105.882	103.565
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	66,24%	67,62%	70,35%	4,58%	4,33%	4,01%	16.224	16.028	15.553
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	62,15%	63,08%	64,09%	7,06%	6,61%	6,10%	85.540	82.123	81.201
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	68,73%	69,99%	69,85%	3,75%	3,00%	2,95%	59.371	49.145	47.076
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	64,73%	66,18%	65,66%	5,72%	4,51%	4,33%	252.349	205.725	203.500
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	70,09%	68,82%	70,07%	3,92%	3,36%	3,15%	54.134	46.474	43.894
29	Gorontalo	Sulawesi	65,94%	68,91%	70,79%	3,01%	2,58%	3,06%	17.959	16.284	19.904
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	70,27%	73,00%	71,05%	3,13%	2,34%	2,27%	22.208	17.545	17.273
31	Maluku	Maluku-Papua	65,75%	65,46%	63,60%	6,93%	6,88%	6,31%	59.589	59.737	57.504
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	64,70%	64,88%	67,77%	4,71%	3,98%	4,31%	28.133	24.273	28.600
33	Papua Barat	Maluku-Papua	70,34%	68,55%	67,24%	5,84%	5,37%	5,38%	29.985	27.665	31.919
34	Papua	Maluku-Papua	78,29%	77,75%	77,20%	3,33%	2,83%	2,67%	64.996	56.330	67.182
	NASIONAL		9,71%	9,57%	9,36%	6,49%	5,86%	5,32%	9.102.052	8.425.931	7.855.075
1	Regional Sumatera	Sumatera	9,75%	9,47%	9,27%	5,63%	5,37%	5,04%	1.678.731	1.636.704	1.570.467
2	Regional Jawa	Jawa	9,16%	9,03%	8,79%	7,45%	6,66%	5,97%	5.948.406	5.461.052	5.019.046
3	Regional Kalimantan	Kalimantan	5,85%	5,90%	5,67%	4,46%	4,97%	4,73%	548.273	423.444	418.030
4	Regional Sulawesi	Sulawesi	10,04%	10,06%	10,08%	4,97%	4,09%	3,96%	491.561	417.296	412.848
5	Regional Bali-Nusa Tenggara	Bali-Nusra	13,59%	13,46%	13,29%	5,71%	3,73%	2,88%	252.378	319.430	249.479
6	Regional Maluku-Papua	Maluku-Papua	20,43%	20,10%	19,68%	4,66%	4,22%	3,95%	182.703	168.005	185.205

Sumber:

*) BRS masing-masing Provinsi

**) BRS data per-agustus 2022

***) Sakernas Indonesia 2021, 2022, dan 2023

VIII. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2021-2023

No	Nama Provinsi	Regional	2021		2022		2023	
			Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi
1	Aceh	Sumatera	5.347.889	1,95%	5.379.937	1,95%	5.515.839	1,96%
2	Sumatera Utara	Sumatera	15.242.297	5,57%	15.305.230	5,56%	15.471.582	5,51%
3	Sumatera Barat	Sumatera	5.604.457	2,05%	5.624.143	2,04%	5.750.326	2,05%
4	Riau	Sumatera	6.574.932	2,40%	6.646.390	2,41%	6.861.237	2,44%
5	Jambi	Sumatera	3.603.439	1,32%	3.642.763	1,32%	3.760.275	1,34%
6	Sumatera Selatan	Sumatera	8.565.814	3,13%	8.646.686	3,14%	8.889.913	3,17%
7	Bengkulu	Sumatera	2.037.019	0,74%	2.047.110	0,74%	2.098.089	0,75%
8	Lampung	Sumatera	8.882.107	3,24%	8.901.566	3,23%	9.051.459	3,22%
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	1.461.893	0,53%	1.472.427	0,53%	1.521.723	0,54%
10	Kepulauan Riau	Sumatera	2.082.785	0,76%	2.101.215	0,76%	2.178.610	0,78%
11	DKI Jakarta	Jawa	11.261.595	4,11%	11.249.585	4,09%	11.337.563	4,04%
12	Jawa Barat	Jawa	48.220.094	17,61%	48.637.180	17,66%	49.899.992	17,78%
13	Jawa Tengah	Jawa	37.313.063	13,62%	37.488.277	13,61%	38.125.191	13,58%
14	DI Yogyakarta	Jawa	3.677.446	1,34%	3.677.522	1,34%	3.722.296	1,33%
15	Jawa Timur	Jawa	41.063.094	14,99%	41.144.067	14,94%	41.644.099	14,83%
16	Banten	Jawa	12.030.892	4,39%	12.145.161	4,41%	12.469.997	4,44%
17	Bali	Bali-Nusra	4.279.129	1,56%	4.287.193	1,56%	4.344.554	1,55%
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	5.432.209	1,98%	5.473.507	1,99%	5.619.450	2,00%
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	5.489.851	2,00%	5.514.216	2,00%	5.609.049	2,00%
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	5.466.942	2,00%	5.482.046	1,99%	5.557.277	1,98%
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	2.656.442	0,97%	2.672.790	0,97%	2.753.049	0,98%
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	4.119.824	1,50%	4.141.533	1,50%	4.234.214	1,51%
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	3.849.832	1,41%	3.891.849	1,41%	4.007.736	1,43%
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	698.003	0,25%	709.620	0,26%	747.415	0,27%
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	2.657.998	0,97%	2.664.313	0,97%	2.660.415	0,95%
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	3.051.754	1,11%	3.074.958	1,12%	3.154.499	1,12%
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	9.218.736	3,37%	9.255.930	3,36%	9.400.283	3,35%
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	2.679.179	0,98%	2.690.791	0,98%	2.753.707	0,98%
29	Gorontalo	Sulawesi	1.200.663	0,44%	1.203.921	0,44%	1.237.185	0,44%
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	1.442.225	0,53%	1.447.186	0,53%	1.451.657	0,52%
31	Maluku	Maluku-Papua	1.880.666	0,69%	1.886.735	0,69%	1.911.943	0,68%
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	1.323.927	0,48%	1.337.368	0,49%	1.365.091	0,49%
33	Papua Barat	Maluku-Papua	1.150.468	0,42%	1.161.028	0,42%	1.178.985	0,42%
34	Papua	Maluku-Papua	4.313.086	1,57%	4.357.024	1,58%	4.440.728	1,58%
	NASIONAL		273.879.750	100,00%	275.361.267	100,00%	280.725.428	100,00%
1	Regional Sumatera	Sumatera	59.402.632	21,69%	59.767.467	21,71%	61.099.053,00	21,76%
2	Regional Jawa	Jawa	153.566.184	56,07%	154.341.792	56,05%	157.199.138,00	56,00%
3	Regional Kalimantan	Kalimantan	23.324.573	8,52%	16.897.838	6,14%	17.299.691,00	6,16%
4	Regional Sulawesi	Sulawesi	20.250.555	7,39%	20.337.099	7,39%	20.657.746,00	7,36%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara	Bali-Nusra	8.667.659	3,16%	15.274.916	5,55%	15.573.053,00	5,55%
6	Regional Maluku-Papua	Maluku-Papua	8.668.147	3,16%	8.742.155	3,17%	8.896.747,00	3,17%

Sumber:

Data BPS Sensus Penduduk

Data Kemendagri

IX. NTP dan NTN Tahun 2021-2023

No	Nama Provinsi	Regional	NTP			NTN		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Aceh	Sumatera	101,06	107,38	114,49	105,27	111,81	110,2
2	Sumatera Utara	Sumatera	119,52	122,2	125,92	106,18	109,13	108,25
3	Sumatera Barat	Sumatera	107,85	110,63	110,51	100,90	100,08	104,4
4	Riau	Sumatera	139,95	145,55	154,55	103,91	104,52	104,99
5	Jambi	Sumatera	127,26	135,63	138,8	113,65	112,24	107,6
6	Sumatera Selatan	Sumatera	107,90	107,74	105,03	104,67	110,92	121,11
7	Bengkulu	Sumatera	133,01	134,39	147,42	100,89	106,01	112,4
8	Lampung	Sumatera	101,19	104,33	109,51	105,73	108,41	111,43
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	127,21	127,38	119,09	111,25	112,3	114,28
10	Kepulauan Riau	Sumatera	102,25	105,02	102,25	109,51	111,54	110,02
11	DKI Jakarta	Jawa	-	-	-	97,83	101,43	107,83
12	Jawa Barat	Jawa	97,56	99,48	107,35	108,86	112,09	115,31
13	Jawa Tengah	Jawa	100,14	103,95	111,2	108,45	109,94	105,3
14	DI Yogyakarta	Jawa	97,46	98,54	103,99	115,83	115,7	120,72
15	Jawa Timur	Jawa	100,00	102,48	109,7	101,11	103,73	101,7
16	Banten	Jawa	98,36	99,45	106,29	100,99	102,23	98,91
17	Bali	Bali-Nusra	92,66	95,3	99,46	100,20	100,42	101,81
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	106,98	105,37	115,63	112,11	116,14	116,07
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	95,30	95,39	96,84	92,55	91,55	94,26
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	129,48	142,6	140,31	106,45	105,55	103,57
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	119,65	123,27	120,23	102,48	96,82	93,37
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	108,19	107,79	110,26	98,86	100,39	99,1
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	123,55	129,65	133,05	103,01	100,19	102,47
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	106,74	110,73	115,12	104,15	105,94	108,31
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	106,87	108,96	109,14	106,45	109,45	112,09
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	99,48	101,36	106,59	103,28	104,43	104,19
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	98,14	99,71	107,68	107,43	109,27	113,86
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	98,76	99,48	101,88	101,64	102,45	101,8
29	Gorontalo	Sulawesi	103,30	103,77	106,78	96,06	98	98,66
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	123,32	118,45	122,81	106,28	108,83	103,3
31	Maluku	Maluku-Papua	100,61	103,77	103,3	107,17	115,1	113,29
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	102,30	106,62	103,3	104,50	103,62	104,95
33	Papua Barat	Maluku-Papua	102,30	101,28	99,76	93,69	97,44	100,29
34	Papua	Maluku-Papua	101,64	99,36	99,61	111,59	112,78	108,71
NASIONAL			104,66	107,39	112,72	104,69	106,45	106,14

Sumber:

Data BPS Tahunan

X. Ikhtisar Realisasi APBN Menurut Regional Tahun 2021-2023

No	Regional	Pendapatan APBN					
		2021		2022		2023	
		Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi
1	Sumatera	113.326,73	5,63%	145.201,08	5,51%	133.314,68	4,79%
2	Jawa	1.781.687,91	88,58%	2.328.928,20	88,36%	2.460.187,89	88,37%
3	Kalimantan	51.582,69	2,56%	78.439,60	2,98%	94.162,32	3,38%
4	Sulawesi	28.939,17	1,44%	37.108,70	1,41%	40.480,49	1,45%
5	Bali-Nusra	17.766,87	0,88%	23.281,80	0,88%	30.096,50	1,08%
6	Maluku-Papua	18.043,71	0,90%	22.883,66	0,87%	25.687,79	0,92%
	Nasional	2.011.347,07	100,00%	2.635.843,05	100,00%	2.783.929,68	100,00%

No	Regional	Belanja APBN					
		2021		2022		2023	
		Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi
1	Sumatera	309.393,68	11,10%	306.700,05	9,91%	330.795,47	10,60%
2	Jawa	2.004.198,83	71,93%	2.279.425,88	73,62%	2.198.988,60	70,45%
3	Kalimantan	123.879,92	4,45%	154.719,78	5,00%	209.491,10	6,71%
4	Sulawesi	144.045,17	5,17%	144.001,85	4,65%	159.423,85	5,11%
5	Bali-Nusra	82.453,28	2,96%	82.608,33	2,67%	86.077,57	2,76%
6	Maluku-Papua	122.440,48	4,39%	128.806,83	4,16%	136.440,66	4,37%
	Nasional	2.786.411,36	100,00%	3.096.262,72	100,00%	3.121.217,25	100,00%

No	Regional	Surplus/Defisit APBN					
		2021		2022		2023	
		Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi
1	Sumatera	-196.066,95	25,30%	-161.498,97	35,08%	-197.480,79	58,55%
2	Jawa	-222.510,92	28,71%	49.502,31	-10,75%	261.199,29	-77,44%
3	Kalimantan	-72.297,24	9,33%	-76.280,18	16,57%	-115.328,77	34,19%
4	Sulawesi	-115.106,00	14,85%	-106.893,14	23,22%	-118.943,36	35,26%
5	Bali-Nusra	-64.686,41	8,35%	-59.326,53	12,89%	-55.981,07	16,60%
6	Maluku-Papua	-104.396,77	13,47%	-105.923,16	23,01%	-110.752,87	32,84%
	Nasional	-775.064,29	100,00%	-460.419,67	100,00%	-337.287,57	100,00%

XI. Ikhtisar Realisasi APBD Menurut Regional Tahun 2021-2023

No	Regional	Pendapatan APBD					
		2021		2022		2023	
		Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi
1	Sumatera	280.593,60	24,59%	280.233,47	24,18%	287.620,00	22,89%
2	Jawa	474.701,92	41,61%	400.276,21	34,53%	506.920,14	40,35%
3	Kalimantan	107.298,54	9,40%	133.061,97	11,48%	164.670,27	13,11%
4	Sulawesi	110.139,69	9,65%	112.527,89	9,71%	120.109,54	9,56%
5	Bali-Nusra	72.210,09	6,33%	59.864,14	5,16%	79.089,16	6,29%
6	Maluku-Papua	95.950,78	8,41%	173.213,79	14,94%	98.021,85	7,80%
	Nasional	1.140.894,62	100,00%	1.159.177,46	100,00%	1.256.430,96	100,00%

No	Regional	Belanja APBD					
		2021		2022		2023	
		Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi
1	Sumatera	293.710,99	24,20%	279.761,98	23,47%	293.896,01	23,25%
2	Jawa	505.647,11	41,66%	459.764,82	38,57%	508.587,88	40,24%
3	Kalimantan	116.919,98	9,63%	116.711,05	9,79%	164.992,04	13,05%
4	Sulawesi	117.914,38	9,71%	110.373,90	9,26%	123.143,14	9,74%
5	Bali-Nusra	78.800,72	6,49%	67.169,03	5,63%	77.965,82	6,17%
6	Maluku-Papua	100.772,06	8,30%	158.398,57	13,29%	95.289,13	7,54%
	Nasional	1.213.765,25	100,00%	1.192.179,35	100,00%	1.263.874,02	100,00%

No	Regional	Surplus/Defisit APBD					
		2021		2022		2023	
		Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi
1	Sumatera	-13.117,40	18,00%	471,49	-1,43%	-6.276,01	84,32%
2	Jawa	-30.945,19	42,47%	-59.488,61	180,26%	-1.667,75	22,41%
3	Kalimantan	-9.621,44	13,20%	16.350,92	-49,55%	-321,77	4,32%
4	Sulawesi	-7.774,69	10,67%	2.153,99	-6,53%	-3.033,61	40,76%
5	Bali-Nusra	-6.590,63	9,04%	-7.304,89	22,13%	1.123,34	-15,09%
6	Maluku-Papua	-4.821,28	6,62%	14.815,21	-44,89%	2.732,73	-36,72%
	Nasional	-72.870,63	100,00%	-33.001,89	100,00%	-7.443,06	100,00%

XII. Realisasi APBN (I-Account) Tahun 2021-2023 (LKPP Audited)

I-Account (Miliar Rp)	Realisasi APBN (Miliar Rupiah)					
	2021			2022		
	Pagu	Realisasi	%Realisasi	Pagu	Realisasi	%Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	1.743.648,55	2.011.347,07	115,35%	2.266.198,93	2.635.843,05	116,31%
Pendapatan Perpajakan	1.444.541,56	1.547.841,05	107,15%	1.783.987,99	2.034.552,44	114,05%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	298.204,17	458.492,98	153,75%	481.631,10	595.594,55	123,66%
Pendapatan Hibah	902,82	5.013,04	555,27%	579,85	5.696,06	982,33%
Belanja Negara	2.750.028,02	2.786.411,36	101,32%	3.106.425,26	3.096.262,72	99,67%
Belanja Pemerintah Pusat	1.954.548,54	2.000.703,77	102,36%	2.301.644,78	2.280.027,89	99,06%
Belanja Pegawai	421.143,68	387.752,49	92,07%	426.523,29	402.441,66	94,35%
Belanja Barang	362.476,19	530.059,30	146,23%	339.731,04	426.149,08	125,44%
Belanja Modal	246.781,52	239.632,25	97,10%	199.196,63	240.570,30	120,77%
Belanja Pembayaran Bunga Utang	373.262,82	343.495,38	92,03%	405.866,90	386.341,82	95,19%
Belanja Subsidi	175.350,38	242.086,82	138,06%	283.660,95	252.812,91	89,13%
Belanja Hibah	6.781,66	4.319,00	63,69%	4.824,30	5.803,27	120,29%
Bantuan Sosial	161.435,48	173.654,11	107,57%	147.431,48	161.523,08	109,56%
Belanja Lain-lain	207.316,81	79.704,43	38,45%	494.410,19	404.385,77	81,79%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795.479,48	785.707,59	98,77%	804.780,47	816.234,83	101,42%
Dana Transfer Umum	492.253,01	494.948,38	100,55%	518.430,37	546.414,11	105,40%
a) Dana Bagi Hasil	101.961,62	117.156,99	114,90%	140.430,37	168.414,11	119,93%
b) Dana Alokasi Umum	390.291,39	377.791,39	96,80%	378.000,00	378.000,00	100,00%
Dana Transfer Khusus	196.423,55	184.638,30	94,00%	189.593,84	173.164,64	91,33%
a) Dana Alokasi Khusus Fisik	65.248,20	57.069,67	87,47%	60.874,00	54.783,95	90,00%
b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.175,35	127.568,62	97,25%	128.719,84	118.380,69	91,97%
Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal)	13.500,00	13.464,28	99,74%	7.000,00	6.993,67	99,91%
Dana Keistimewaan DIY	1.320,00	1.320,00	100,00%	1.320,00	1.320,00	100,00%
Dana Otonomi Khusus	19.982,92	19.482,92	97,50%	20.436,26	20.436,26	100,00%
Dana Desa	72.000,00	71.853,71	99,80%	68.000,00	67.906,14	99,86%
Surplus/Defisit	-1.006.379,47	-775.064,29	77,02%	-840.226,32	-460.419,67	54,80%
Pembiayaan	1.006.379,47	871.723,16	86,62%	840.226,32	590.978,14	70,34%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)		96.658,88			130.558,47	

Sumber: LKPP Audited



Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan